

Basri Ibrahim & Mohd. Nasir

# RESISTENSI SANTRI TERHADAP KEKUASAAN USTADZ

Editor: Syamsul Rizal

Perdana  
Publishing

**RESISTENSI SANTRI  
TERHADAP KEKUASAAN USTADZ**



# RESISTENSI SANTRI TERHADAP KEKUASAAN USTADZ

Penulis:  
Basri Ibrahim  
Mohd. Nasir

Editor:  
Syamsul Rizal



Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana



## **RESISTENSI SANTRI TERHADAP KEKUASAAN USTADZ**

Penulis: Basri Ibrahim dan Mohd. Nasir

Editor: Syamsul Rizal

Copyright © 2020, pada penulis  
Hak cipta dilindungi undang-undang  
All rights reserved

Penata letak: Muhammad Yunus Nasution  
Perancang sampul: Aulia Grafika

Diterbitkan oleh:

### **PERDANA PUBLISHING**

Kelompok Penerbit Perdana Mulya Sarana  
(ANGGOTA IKAPI No. 022/SUT/11)  
Jl. Sosro No. 16-A Medan 20224  
Telp. 061-77151020, 7347756 Faks. 061-7347756  
E-mail: [perdanapublishing@gmail.com](mailto:perdanapublishing@gmail.com)  
Contact person: 08126516306

Cetakan pertama : Desember 2020

**ISBN 978-623-7842-55-2**

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian  
atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau  
bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

## KATA PENGANTAR

**A**lhamdulillah, segala puji dan puja kepada Allah, akhirnya penulisan buku ini dapat terselesaikan, berkat rahman dan huda-Nya karya ini ada ditangan saudara-saudariku sekalian. Salawat dan salam kepada baginda Muhammad Saw., rasul yang diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Buku yang ada ditangan pembaca ini, awalnya hanyalah merupakan sub pembahasan dari dua buah laporan penelian yang memiliki garis benang merah pengkajian. Menyadari pentingnya desiminasi informasi penelitian ini, maka penulis meramunya menjadi sebuah buku hasil penelitian. Tentu saja, terdapat penyesuaian pembahasan dan beberapa penambahan informasi, sesuai tuntutan kebutuhan lazimnya sebuah buku.

Akhirnya, *last but not least*, kami ucapkan terimakasih kepada anak-anak, istri dan keluarga, serta para kolega yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan karya mungil ini. Terlebih, Syamsul Rizal, M.SI yang terkadang harus berperan melebihi tugasnya sebagai editor dalam penulisan buku ini. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi -baik langsung maupun tidak langsung- dalam perampungan buku ini, kami haturkan hormat dan ucapan terima kasih semoga mendapat berkah-Nya.

Kritikan konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaan buku ini, menjadi harapan tertinggi kami secara akademik. Semoga kehadiran buku ini ikut memberikan secerach pencerahan dunia akademik bagi kita semua, *aamiin*.

Langsa, Akhir November 2020

**Basri & Nasir**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN: SEBUAH PERMASALAHAN FENOMENA PACARAN DAN DAYAH .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II STRUKTUR SOSIAL DAN MASYARAKAT ACEH .</b>	<b>10</b>
A. Asal Usul Masyarakat Aceh .....	10
B. Struktur Sosial Masyarakat .....	18
C. Adat Istiadat Masyarakat Aceh .....	21
D. Seni Budaya Masyarakat Aceh .....	23
E. Agama Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh .....	24
F. Perpolitikan Dalam Masyarakat Aceh .....	34
1. Syariat Islam (SI) .....	38
2. Serikat Pemuda Islam .....	40
3. Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) .....	40
G. Faktor Intelektual: Peranan Ulama Dalam Masyarakat .....	55
1. Peran Ulama Dalam Pendidikan .....	58
2. Peran Ulama Dalam Pemerintah .....	60
<b>BAB III GENELOGI PENDIDIKAN ISLAM DI ACEH .....</b>	<b>62</b>
A. <i>Meunasah</i> dan Pendidikan Agama Islam Aceh .....	62
1. <i>Meunasah</i> dalam Definisi .....	65
2. Fungsi <i>Meunasah</i> dalam Masyarakat Aceh .....	72
3. Perkembangan <i>Meunasah</i> Masa Kesultanan Aceh Darussalam (1520-1675) .....	75

a. Sebelum Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1520-1606) .....	75
b. Masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) .....	81
c. Sesudah Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1637-1675) .....	85
B. Dayah: Dasar Pendidikan Agama Islam Aceh .....	88
1. Pengertian Dayah .....	88
2. Perkembangan Dayah di Aceh (1900-1945 M) ..	91
3. Perkembangan Dayah di Aceh Pasca Kemerdekaan (1945-1966) .....	98
C. Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Aceh .....	109
1. Perkembangan Madrasah .....	110
a. Masa Penjajahan .....	113
b. Madrasah Pada Masa Orde Lama .....	114
c. Masa Orde Baru .....	115
d. Masa Sekarang .....	116
2. Sistem Pendidikan dan Pengajaran di Madrasah .....	117
3. Pilih Madrasah atau Sekolah Umum .....	120

#### **BAB IV PESANTREN MADRASAH ‘ULUMUL QUR’AN**

<b>DAN RESISTENSI SIMBOLIK .....</b>	<b>122</b>
A. Selayang Pandang Madrasah ‘Ulumul Qur’an .....	122
1. Sejarah Berdirinya Madrasah ‘Ulumul Qur’an ...	122
2. Keadaan Santri dan Guru MUQ .....	128
3. Sarana dan Prasarana MUQ .....	131
4. Prestasi Siswa MUQ Langsa .....	143
B. MUQ Lokus Rekayasa .....	145
1. Sekolah .....	149
2. Dayah .....	151
C. Antara Makan, Desak-desakan dan Terlambat .....	155
1. Fenomena Makan Pagi dan Sekolah .....	155
2. Ketiduran dan Istirahat Sekolah .....	156
D. Ibadah Ikhlas dan Terpaksa .....	159

E. Bentuk-bentuk Resistensi Simbolik dalam Kehidupan Santri MUQ .....	165
1. Mahalnya Kejujuran Di Kalangan Santri .....	166
2. Santri Membawa Alat Komunikasi Handphone .	167
3. Santri Masih Ada Yang Tidak Salat Berjamaah ..	168
4. Terlambat Masuk Sekolah dan Bangun Tidur ....	170
5. Asrama Tidak Bersih .....	171
<b>BAB V FENOMENA PACARAN DI KALANGAN SANTRI MADRASAH ‘ULUMUL QUR’AN .....</b>	<b>172</b>
A. Pacaran Melalui Media HP .....	172
B. Saudara Menjadi Alasan Pertemuan .....	182
C. Musalla .....	186
D. Tatapan Mata Menjadi Bahagia .....	187
<b>BAB VI PACARAN DAN RESISTENSI TERHADAP HEGEMONI DI PESANTREN MADRASAH ‘ULUMUL QUR’AN.....</b>	<b>191</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>198</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	201
BIODATA PENULIS .....	212

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **SEBUAH PERMASALAHAN: FENOMENA PACARAN DAN DAYAH**

**A**ceh adalah provinsi yang berada di ujung barat Indonesia. Mengenai trema “Aceh”, banyak orang yang mencoba mencari asal mula kata Aceh atau makna kata tersebut. Di antaranya trema Aceh berasal dari kata “aca” yang berarti saudara perempuan, kata-kata itu berasal dari “Ba’ si-Aceh-Aceh”, semacam pohon beringin yang besar dan rindang.<sup>1</sup> Namun yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa trema “Aceh” merupakan singkatan dari “A” singkatan dari “Arab”, “C” singkatan dari “Cina”, “E” singkatan dari “Eropa”, dan “H” singkatan dari “Hindia”.<sup>2</sup>

Aceh merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan agama Islam menjadi ruh dalam diri masyarakat Aceh. Bagi masyarakat Aceh agama bukan hanya sekedar kepercayaan belaka, namun Islam sudah menjadi pakaian masyarakat Aceh, sehingga seluruh aktifitas masyarakat Aceh tidak terlepas dari agama. Dengan kekhasan tersebut maka Aceh diberikan julukan “Serambi Mekkah”. Predikat tersebut dikukuhkan (dikuatkan) dengan diberlakukannya syari’at Islam di Aceh.

Hal tersebut dikarenakan dalam masyarakat Aceh nilai-nilai agama memainkan peranan penting dalam kehidupan masyarakat Aceh, sehingga

---

<sup>1</sup> Ismail Sunni (ed), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1980) hlm. 19. Lihat juga A. Hasjimy (peny), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: al-Ma’arif, 1993), hlm. 188.

<sup>2</sup> Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 128.

agama dan kehidupan masyarakat Aceh dapat diibaratkan seperti sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Sebagaimana yang termaktub di dalam *hadi madjah* yang menyatakan bahwa; “*hukom ngon adat hanjet mecre, lage zat ngon sifeut*”.<sup>3</sup> Artinya hukum syara’ atau syari’at dan hukum adat tidak dapat dipisahkan, ibarat tidak terpisahkan antara zat Tuhan dengan sifat-Nya. Dari ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa selain Islam, adat juga berperan penting dalam masyarakat Aceh. Nilai-nilai tersebut yang kemudian menjadi ideologi masyarakat Aceh. Dalam hal ini dapat dilihat bagaimana agama Islam menjadi semangat dalam perjuangan masyarakat Aceh dalam mempertahankan tanah rencong<sup>4</sup> (nama lain Aceh) dari penjajahan.

Selanjutnya nuansa Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh dapat terlihat dalam falsafah “*adat bak poe teummeuruhom hukum bak syiah kual, qanun bak putroe phang, reusam bak laksamana*”. Adigium ini mengungkapkan latar belakang yang berpengaruh pada kehidupan masyarakat Aceh dan siapa yang berotoritas di dalamnya. Bagi masyarakat Aceh, adat adalah yang bertalian dengan kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan duniawi yang memiliki otoritas adalah raja. Sedangkan hukum adalah ketentuan hubungan manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia yang bersumber dari ajaran Islam (al-Qur’an dan Hadis) dan otoritas hukum ditangan ulama. Sedangkan qanun adalah adat dan budaya wanita dalam berbagai upacara kemasyarakatan. Dan *reusam* menyangkut aturan tata krama bagi laki-laki dalam melaksanakan adat kebiasaan dan budaya kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Hubungan yang erat antara agama dan masyarakat di Aceh mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai lini kehidupan dan termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Pada awalnya pendidikan di Aceh adalah pendidikan agama atau yang sering disebut dengan dayah. Dayah di Aceh pada awalnya hanya mempelajari kitab-kitab kuning dalam berbagai disiplin ilmu keislaman seperti fiqh, tauhid, dan tasawuf. Selanjutnya dayah berkembang dengan mengintegrasikan

---

<sup>3</sup> A. Hasjmy, *Himpunan Hadi Madja* (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, 1958), hlm. 41.

<sup>4</sup> Kata Rencong, selain dipakai untuk nama daerah Aceh kata tersebut digunakan pula untuk senjata khas Aceh.

<sup>5</sup> Taufiq Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syari’at Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2004), hlm. 14.

pelajaran umum dipelajari di dayah. Dayah sebagai “institusi budaya” lahir dari inisiatif masyarakat sehingga memiliki keunikan tersendiri.<sup>6</sup>

Secara yuridis pesantren telah diakui sejajar dengan lembaga formal<sup>7</sup> lain seperti yang tercantum dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 6 yang menyebutkan bahwa hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemda dengan mengacu kepada standar nasional pendidikan.

Lembaga pendidikan pesantren mempunyai nilai-nilai dan norma tersendiri. Nilai merupakan landasan bagi sebagian besar sistem nilai-nilai yang berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang dirasakan berharga bagi seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Sedangkan norma yaitu suatu tatanan aturan-aturan atau pedoman yang khusus mengenai tingkah laku, sikap, perbuatan yang boleh dilakukan di dalam lingkungan kehidupan.<sup>8</sup>

Diantara pendidikan pesantren yang memiliki peraturan dan tata tertib yang mengikat santri yang berada di dalamnya adalah Madrasah Ulumul Qur’an Langsa. Seorang santri<sup>9</sup> yang memiliki kehidupan di lingkungan pesantren harus mentaati nilai dan norma pesantren yang telah ditetapkan, begitu pula di pesantren Madrasah Ulumul Qur’an selanjutnya disingkat dengan MUQ mempunyai peraturan-peraturan yang didominasi oleh ustadz-ustadz sehingga membentuk hegemoni.<sup>10</sup>

Bentuk-bentuk hegemoni ustadz terhadap santri tersebut diantaranya: santri harus disiplin, tidak boleh membawa handphone/radio/laptop, tidak boleh memakai baju pendek/ketat/ tipis, wajib berbahasa Arab dan Inggris,

---

<sup>6</sup> Djuhardi, Edukasi Penelitian Tindakan Agama dan Keagamaan. *Pengembangan Ekonomi Pesantren*. “ Vol VII, No 1 (januari-maret 2009), hlm. 8

<sup>7</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikenal tiga jalur pendidikan; formal, non formal dan informal, baca lebih lanjut dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003 pasal 1 ayat 11,12 dan 13

<sup>8</sup> Sunarto, *Perkembangan Peserta Didik*. (Jakarta:Rineka Cipta,2002), hlm.168

<sup>9</sup> Santri merupakan seseorang yang mondok dipesantren, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (*Arti Santri*) Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (Jakarta:Balai Pustaka), hlm. 389

<sup>10</sup> Wawancara dengan Dina salah seorang santri MUQ 09 april 2016



wajib shalat berjamaah, saat jam makan harus mengantri, sekolah santri dipisah antara laki-laki dan perempuan, tidak boleh ketemuan, dan santri tidak diperbolehkan berpacaran. Selanjutnya, peraturan yang telah dibuat akan dikontrol oleh para ustadz, ustadz memberikan hukuman terhadap santri yang melakukan pelanggaran peraturan.<sup>11</sup>

Pelanggaran dapat dilakukan oleh siapa saja, begitu juga oleh para santri yang usianya masih remaja. Masa remaja adalah masa di mana suatu penahapan pertumbuhan yang berada pada titik gerak aktif kedua setelah masa pertumbuhan pada level anak. Bentuk-bentuk kreativitas juga ditunjukkan pada masa ini secara lebih dominan, termasuk rasa ingin bebas yang tidak mau berada pada pengendalian yang dirasa memaksa kehendak gerak yang diinginkan.<sup>12</sup> Selain itu, pada masa remaja seseorang juga memiliki gejala emosional yang tidak stabil. Hal ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang bekerja pada usia remaja tersebut.

Gejala yang tidak stabil tersebut dapat terlihat dari santri yang ingin bebas dari pengendalian peraturan yang ada, sehingga terkadang melahirkan bentuk perlawanan yang mengakibatkan pelanggaran peraturan. Perlawanan tersebut dapat dikatakan sebagai resistensi.<sup>13</sup> Banyak dari santri yang melakukan resistensi dari peraturan-peraturan yang ditetapkan ustadz, seperti dalam *Teori Hidden Transcript* James C. Scott mengatakan bahwa orang-orang kalah atau kelompok-kelompok sub-ordinat selalu memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan perlawanannya terhadap dominasi kelompok-kelompok berkuasa.<sup>14</sup> Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa kelompok-kelompok sub-ordinat yang dimaksud ialah santri dan kelompok yang berkuasa ialah ustadz, sehingga santri memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan perlawanannya terhadap peraturan yang diberikan oleh penguasa/ustadz.

Santri yang tergolong usia remaja berada pada masa pubertas, tidak jarang melakukan perlawanan pada peraturan dalam bentuk pacaran. Hal

---

<sup>11</sup> Syamsul Rizal, *Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Tantangan Global. Perilaku Pacaran Anak Muda Kota Langsa-Aceh Dalam Bayang-Bayang Syariah*. (Yogyakarta: UGM, 2008), hlm. 14

<sup>12</sup> Resistensi merupakan sebuah bentuk perlawanan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari subordinat kepada kelompok dominasi. Muhammad Anshor, dkk, *Berbagi Suami Atas Nama Tuhan*, (Langsa: Data Printing, 2013), hlm. 85

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 85

<sup>14</sup> Wawancara dengan (MA) seorang santri MUQ pada tanggal 07 april 2016

ini dikarenakan karena usia remaja ditandai dengan ketertarikan pada lawan jenisnya, sehingga pacaran di kalangan santri pun terjadi, hal tersebut menjadi resistensi simbolik yang dilakukan oleh santri.

Santri di Pesantren Madrasah Ulumul Qur'an melakukan perlawanan dalam hegemoni ustadz pada pemisahan laki-laki dan perempuan. Di sini santri memiliki cara untuk meresisten peraturan tersebut yaitu dengan berpacaran sesama santri, pacaran di kalangan santri MUQ dianggap hal biasa, salah satu santri MUQ mengatakan kepada penulis bahwa "mereka (santri yang melakukan resistensi) pada pukul 22:00 akan "ngejob" dengan aktivitas pacarnya hingga pukul 00:00, baru setelah itu mereka akan tidur".<sup>15</sup> Selanjutnya penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana fenomena-fenomena ini bisa terjadi di kalangan santri yang berada pada ruang lingkup pesantren Madrasah Ulumul Qur'an Langsa.

Dari latar belakang di atas muncul dua permasalahan penelitian, yaitu: pertama, bagaimana pacaran santri dalam hegemoni ustadz? Kedua, bagaimana pacaran menjadi media resistensi simbolik santri terhadap hegemoni ustadz di Madrasah Ulumul Qur'an?

Pesantren menjadi obyek penelitian bukanlah sesuatu yang baru, telah banyak peneliti yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mengaktualisasi ajaran Islam sangat memperhatikan hubungan laki-laki dan perempuan, hal tersebut dapat dilihat dari adanya pemisahan pada asrama dan sekolah santri, hal ini pula dilakukan agar tidak terjadi hubungan yang tidak diinginkan (pacaran) antara sesama santri.

Ada banyak penelitian yang dilakukan tentang pacaran, diantaranya: penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Rizal, dalam penelitiannya ia menjelaskan bagaimana perilaku pacaran Anak muda Kota Langsa-Aceh dalam bayang-bayang syariat. Syamsul dengan menggunakan *field research* juga melihat bagaimana perilaku berpacaran dan perilaku berpakaian remaja di Kota Langsa.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Irwan Abdullah, Dkk. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2008), hlm. 14

<sup>16</sup> Universitas Airlangga, *Hubungan Karakteristik Demografi Dan Sosial Ekonomi Dengan Perilaku Pacaran Santri*. Vol 7 No 2 Desember 2005

Dalam penelitiannya Syamsul menyoroti perilaku pacaran remaja di Kota Langsa. Syamsul tidak menyoroti bagaimana perilaku pacaran di kalangan santri pada pesantren Madrasah Ulumul Qur'an Langsa. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Syamsul sebelumnya.

Selanjutnya penelitian dalam jurnal Universitas Airlangga tentang Hubungan Antara Karakter Demografi dan Sosial Ekonomi dengan Perilaku Pacaran di kalangan santri. Dalam tersebut membahas apakah ada hubungan antara karakteristik demografi dan sosial ekonomi dengan perilaku pacaran di kalangan santri,<sup>17</sup> sedangkan penelitian ini membahas tentang pacaran di kalangan santri sebagai bentuk resistensi terhadap hegemoni ustadz di Madrasah Ulumul Qur'an Langsa.

Teori yang digunakan untuk menganalisa dalam penelitian ini adalah *teori hidden transcript* yang dikemukakan oleh James C. Scott. Dikarenakan setiap pesantren mempunyai sebuah peraturan atau doktrin-doktrin tertentu yang harus dipatuhi oleh santri, peraturan tersebut merupakan bentuk hegemoni<sup>18</sup> ustadz. Antonio Gramsci mengatakan aparatus intelektual memiliki kekuatan untuk mendominasi suatu cara pandang tertentu yang secara sadar atau tidak sadar harus diterima masyarakat.<sup>19</sup> Menggunakan kerangka berpikir Gramsci tentang teori hegemoni, tindakan pacaran pada dasarnya merupakan efek penafsiran hegemonik atas doktrin-doktrin tentang relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan.

Seyogyanya santri pada masa transisi dari kanak-kanak menjadi remaja sehingga memiliki gejolak emosional yang terkadang tidak terkendali. Sehingga hegemoni ustadz menjadi sebuah bentuk perlawanan dengan menggunakan simbol, hal ini sesuai dengan *teori hidden transcript* James C. Scott bahwa bentuk-bentuk resistensi simbolik/ sembunyi antara lain dilakukan dengan berpura-pura taat terhadap kelompok yang mendominasi meskipun di belakangnya melakukan hal yang berbalikan.

---

<sup>17</sup> Hegemoni sebagai kepemimpinan kultural yang dilaksanakan oleh kelas penguasa. Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 176

<sup>18</sup> Antonio Gramsci, *Selection From The Prison Notebooks*, (India: Orient Longman, 1996), hlm. 12-13

<sup>19</sup> Muhammad Anshor, *Berbagi...*, hlm. 92

Scott menulis bahwa berpura-pura merupakan gaya yang khas dan perlu bagi kelompok sub-ordinat dimana saja, dan hampir kapan saja.<sup>20</sup> Hal ini menurut Scott dilakukan dengan pertimbangan agar di satu pihak tidak kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat atau keuntungan tertentu dari kelompok yang mendominasi, tetapi di pihak lain dapat mengekspresikan resistensi terhadap dominasi tersebut.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori resistensi tertutup yang dikemukakan oleh James C. Scott. Adapun perlawanan tertutup dicirikan: pertama, tidak teratur, tidak sistematis dan terjadi secara individual. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana pacaran di kalangan santri bisa terjadi dengan tidak memiliki aturan atau sistematis tertentu yang harus dijalankan, pacaran dijalankan secara individual oleh santri. Kedua, bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri. Pacaran yang dijalankan secara individual oleh santri bersifat oportunistik, yaitu suatu sifat dimana santri mengambil keuntungan dari situasi hegemoni ustadz, dan juga santri yang berpacaran tersebut akan mementingkan dirinya sendiri.

Ketiga, tidak berkonsekuensi revolusioner, selanjutnya akan dibahas bagaimana hegemoni yang dijalankan oleh ustadz tidak berakibat pada perubahan kondisi pacaran yang dilakukan oleh santri, karena setiap seperti yang dikatakan Scott bahwa sub-ordinat memiliki cara tersendiri untuk melakukan perlawanan. Keempat, lebih akomodatif terhadap sistem dominasi.<sup>21</sup> Lebih akomodatif terhadap sistem dominasi dimaksudkan bahwa santri akan menyesuaikan dirinya dari peraturan ustadz, dan lingkungan di pesantrennya.

Metodologi penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metode suatu pendekatan umum mengkaji topik penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian membutuhkan kajian yang mendalam dengan latar yang wajar. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya

---

<sup>20</sup> James C. Scott, *Senjatanya Orang-orang Kalah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. xxii-xxiv

<sup>21</sup> Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Erlangga), hlm. 59

peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Memahami pengalaman-pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji sejumlah subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi makna.<sup>22</sup>

Penelitian dengan menggunakan pendekatan fenomenologi dimaksud untuk dapat mengetahui dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci tentang resistensi simbolik menjadi media yang dilakukan santri dalam berpacaran terhadap hegemoni ustadz di Pesantren Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ)".

Dalam penelitian kualitatif, fokus masalah cenderung melihat realita sebagai fenomena sosial yang akan diungkapkan maknanya yang berada di dalam kedalaman fenomena tersebut.<sup>23</sup> Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif.

Metode mengumpulkan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan diperlukan teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

Pertama, observasi. Observasi merupakan teknik mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya.<sup>24</sup> Peneliti mengobservasi tempat-tempat yang peneliti asumsikan untuk melakukan aktifitas tersebut. Di antara tempat kerap dijadikan oleh santri sebagai tempat pertemuan itu ialah: dapur umum, ruangan bawah mushalla, pos satpam, aula, dan tempat antar cucian.

---

<sup>22</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 53

<sup>23</sup> Jogyanto, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), hlm. 89

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 111

Kedua, wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi anantara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari responden dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini wawancara dilakukan tanpa daftar tanya, bebas, dan tidak terikat. Informan dalam penelitian ini adalah ustadz, santri, dan masyarakat yang ada di kompleks Madrasah Ulumul Qur'an. Dalam penelitian ini ustadz sebagai informan dikarenakan penulis hendak mencari informasi tentang ustadz menghegemoni santri dalam bentuk peraturan. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang relevan dengan obyek penelitian. Peneliti akan mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh santri terutama dalam bentuk pacaran.

## BAB II

# STRUKTUR SOSIAL DAN MASYARAKAT ACEH

### A. ASAL USUL MASYARAKAT ACEH

Aceh sebagai salah satu daerah di Indonesia yang merupakan suatu kompleks *historis*, telah menunjukkan peranannya dalam sejarah, yang telah banyak mengundang para peneliti, baik di dalam maupun luar negeri, maka untuk menguraikan sub bab ini secara *sistematis*, uraiannya meliputi: *geografis* Aceh, asal usul masyarakat, perekonomian, struktur sosial masyarakat, adat-istiadat, serta seni budaya yang berkembang dalam masyarakat Aceh.

Aceh<sup>1</sup> merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada wilayah ujung Utara Barat Sumatera, dan paling Barat Kepulauan Nusantara, salah satu wilayah yang memiliki peradaban besar dalam sejarahnya. Kebesaran tersebut dapat dilihat dari aspek *eksistensi* dan pengaruh kerajaan Islam Aceh di nusantara dan dunia, serta tradisi keilmuan dan kekayaan khazanah

---

<sup>1</sup> Sebutan nama Aceh di nusantara ini memiliki beberapa perkataan. Dalam ejaan bahasa Melayu di Malaysia di sebut Acheh dan dalam ejaan bahasa Indonesia dikenal dengan Aceh. Sementara dalam ejaan Aceh lama dituliskan dengan Atjeh, seperti yang ditulis dalam catatan sejarah lama. Ini berarti bahwa ejaan Aceh di Nusantara terdiri dari tiga ucapan, yaitu Acheh, Aceh dan Atjeh. Kaum Eropa atau bangsa Barat juga menuliskan Aceh dengan beragam tulisan dan penamaan. Portugis dan Italia menyebut Aceh dengan Achem, Achen dan Acen. Sementara Perancis menuliskannya dengan Achem, Achen, Achin dan Acheh. Sedangkan Inggris menyebutnya Atcheen, Acheen dan Achin serta Belanda menuliskan dengan ejaan Achem, Achin, Atchin, Athcien, Atjih, Atsjiem dan Atsjeh. Lihat: *Aceh Dalam Angka*, (Banda Aceh: BPS. Propinsi NAD kerjasama dengan BAPPEDA Propinsi NAD, 2001), hlm. 3

keislaman yang telah menjadi barometer perkembangan Islam di wilayah Asia Tenggara, “Aceh pernah menjadi salah satu kerajaan besar Islam di dunia pada masa *Sultan Iskandar Muda*”.<sup>2</sup> Aceh kini dinamakan Propinsi Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Letak *geografis* Aceh sangat *strategis*, pada wilayah ujung utara bagian barat pada 2° - 6° dan 95° - 98° bujur timur dengan luas wilayah 57.365, 57 km<sup>2</sup>.<sup>3</sup> sehingga merupakan pintu masuk sebelah barat kepulauan Indonesia. Daerah ini sebagai lalu lintas internasional. Sejak zaman *Neolithicum* Selat Malaka merupakan terusan penting dalam *migrasi* bangsa di Asia, dalam gerak *ekspansi* kebudayaan India dan sebagai jalan niaga dunia, Selat Malaka adalah jalan penghubung utama antara dua pusat kebudayaan yaitu, Cina dan India. *Geografis* yang sangat penting itulah maka daerah Aceh, “sejak zaman permulaan, terbentuknya jaringan-jaringan lalu lintas *internasional* (Sekitar abad ke-1 M), agaknya sudah dikenal”.<sup>4</sup>

Sementara menurut *Lombard* menjelaskan, sejak abad ke-6 sejarah *Dinasti Liang* sudah banyak juga membicarakan kerajaan Poli<sup>5</sup> yang menurut sementara orang sama dengan sebelah utara Sumatera.<sup>6</sup> Lebih lanjut, Alfian, dkk., menjelaskan, “bahwanama poli tidak kurang pentingnya dan menggemparkan, ada yang menyamakan dengan Bali, Brunai (Kalimantan Utara) dan dengan Sumatera Utara, dan di Aceh, yang disebut Lamuri oleh orang-orang Arab dan *Lambri* oleh *Marco Polo*”.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Muliadi Kurdi (ed), *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010), hlm. 3

<sup>3</sup> Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan* (Banda Aceh: Boebon Jaya, 2013), hlm. 1

<sup>4</sup> Burger dan Prayudi, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, (Jakarta: Pradiya Pramita, 1962), hlm. 14

<sup>5</sup> Nama tentang “poli” dijumpai dalam catatan cina. Berita pertama tercantum dalam catatan *Dinasti Loang* (502-556 M.) Kemudian dari *Dinasti Sui* (581-617 M.) dan berita terakhir mengenai negeri ini berasal dari catatan *Dinasti Tang* (618-906 M). Mengenai letak negeri ini belum ada kata sepakat para ahli, tetapi ada para ahli yang cenderung untuk menempatkan negeri ini di Aceh. Lihat: T. Ibrahim Alfian, dkk., *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978), hlm. 35

<sup>6</sup> Denys Lombard (Terj.) Winarsih Arifin, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, (Jakarta: Pustaka Populer Gramedia, 2006), hlm. 56

<sup>7</sup> Alfian, *Sejarah Daerah*, h. 35. Dalam naskah-naskah Aceh sendiri seperti hikayat



Pada abad ke-13 teks-teks Cina memuat nama tempat *Lan-wu-li* atau *Lam-li*, yang mengingatkan akan *Lamuri* pula.<sup>8</sup> Ketika Marco Polo pada tahun 1292 M tiba di Jawa *Minor* (Sumatera), ia mendapatkan di sana delapan buah kerajaan diantaranya adalah *Lamiri*. Kerajaan ini katanya, tunduk pada *Kaisar Cina* dan mereka diwajibkan membayar *upeti*.<sup>9</sup> Menurut Din Shamsuddin, dalam Hasbi Amiruddin,<sup>10</sup> “Asal nama Aceh juga terdapat cerita di dalam sebuah suku bangsa Pegu (Hindia Belakang) yang menceritakan perjalanan Budha ke Indochina dan Kepulauan Melayu. Mereka melihat di atas gunung di pulau Sumatera sebuah pancar cahaya beraneka warna dari gunung itu, sehingga mereka berseru “*Acchera bata*” (*Atjaram bata bho* = alangkah indahnyanya). Jadi dari kata-kata itulah kemudian menjadi sebutan nama Aceh”.<sup>11</sup> Dalam tahun 1310 M seorang penulis Parsi bernama *Rashiduddin* menyebut untuk pertama kalinya, bahwa tempat-tempat penting di pulau *Lamiri* yang besar itu, selain Perlak dan Samudera adalah Aru dan Tamiang.<sup>12</sup> Pada tahun 1323 M. biarawan Odoric de Pordenone dengan parah menunjukkan pada adat kebiasaan “biadab” (poligami dan *kanibalisme*) di negeri *Lamuri*.<sup>13</sup> Pada akhir abad ke-15 pusat kerajaan *Lamiri* dipindahkan ke *Meukuta Alam* (Sekarang Kota Alam) yang terletak pada sisi utara krueng Aceh di lembah Aceh. Permindahan ini disebabkan karena adanya serangan dari Pidie, dan pendangkalan muara

---

Aceh disebutkan Kerajaan *Lamuri* yang dieja dengan l.m.ri antara a dan r tidak terdapat tanda vocal, sehingga jika kita menuruti cara mengeja di dalam naskah itu akan dibaca *Lamur* atau *Lamiri*. Di dalam naskah Nagara kertagama dicantumkan nama *Lamuri* sebagai salah satu negeri yang takluk kepada Maharaja Mojopahit. Lihat: Mohd. Yamin, *Gadjah Mada*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), hlm. 50

<sup>8</sup> Lombard, *Kerajaan Aceh*, hlm. 57

<sup>9</sup> Alfian, *Sejarah*, hlm. 37

<sup>10</sup> Amiruddin, *Aceh*, hlm. 6

<sup>11</sup> Asal nama Aceh hampir tidak ada seorangpun yang dapat mengetahuinya secara pasti. Teungku Syech Muhammad Noerdin, yang pada masa hidupnya banyak sekali membantu Prof. Snouck Hugronje dan Prof. Husein, baik dalam mencari bahan-bahan atau dalam menyalin hikayat-hikayat Aceh dari huruf Arab ke huruf Latin, begitu juga banyak mengumpulkan bahan-bahan tentang kehidupan, peradaban dan adat-istiadat Aceh dan sempat diperbantukan pada Balai Pustaka, pada akhir hayatnya meninggalkan beberapa buah karangan dan pada salinan kepada penerbitan pemerintah ini, menyatakan bahwa nama Aceh itu berasal dari “Ba’ (Baca Bak=Pohon) si Aceh-Aceh” pohon itu dilukiskan semacam pohon beringin yang besar dan rindang. Lihat: Aboebakar Aceh, dalam Hasbi Amiruddin, *Aceh dan Serambi Makkah*, hlm. 7

<sup>12</sup> Alfian, *Sejarah*, hlm. 37

<sup>13</sup> Lombard, *Kerajaan Aceh*, hlm. 58

sungai yang mengalir melalui pusat kerajaan Lamiri sehingga tidak begitu baik lagi untuk kepentingan pelayaran. Sejak itu Lamiri lebih dikenal dengan nama *Kerajaan Kota Alam*.<sup>14</sup>

Pendapat lain mengemukakan bahwa nama Aceh sudah tua sekali, sejak abad ke-13 M. Aceh telah dikenal masyarakatnya muslim, dengan makin terbuka dagang dunia luar, antara lain *Marco Polo* singgah di pelabuhan-pelabuhan Sumatera Utara dan memberitakan *terdapatnya agama Islam* dalam salah satu dari enam pelabuhan dagang yang namanya disebut olehnya, yaitu “*Perlec (Perlak), Basman, Sumatra, Dagroian, Lambri, dan Fansur*”.<sup>15</sup> Walaupun tidak sama tuanya dengan *Lamiri*, tetapi setidaknya kerajaan Aceh telah tumbuh dan berkembang berbarengan Raja-raja yang pertama di Aceh berkedudukan di Kandang Aceh (tidak begitu jauh dari kota Banda Aceh sekarang). Di dalam hikayat Aceh disebutkan bahwa *Sulthan Mahmud Syah* memindahkan istananya ke *Daruddunia* sesudah memerintah di Kandang selama 43 tahun. Aceh belum dikenal sebelum tahun 1500 M oleh orang-orang asing, karena ia terletak lebih dari 1 (satu) mil ke pedalaman sehingga tidak banyak disinggahi oleh orang-orang asing yang melakukan perjalanan/pelayaran antara India dan Cina. Sebuah catatan Aceh yang dipelajari oleh *Hoesein Djajadiningrat* mengatakan bahwa *Sultan Johan Syah* yang memerintah pada tahun 1205 M (601 H) dan berkedudukan di Kandang Aceh, merupakan Sultan Aceh yang pertama beragama Islam, yang bernama *Gazi Djohansyah* yang mulai memangku jabatannya pada tanggal 19 Januari 1215 M. Menjelang abad ke-15 dan awal abad ke-16 Portugis telah dapat melaksanakan penjajahan kepada Raja-raja Aru (Pulau Kampai), Pase, Pidie dan Daya. Dalam kerajaan-kerajaan tersebut mereka mendirikan kantor-kantor dagang untuk menempatkan pasukan.<sup>16</sup> Dengan demikian Aceh telah tumbuh dan berkembang berbarengan sampai penghujung abad ke-15 M. menjadi pusat Tamaddun Islam Asia.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Alfian, *Sejarah*, hlm. 42

<sup>15</sup> Ismail, *Sistem*, hlm. 11

<sup>16</sup> A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 14

<sup>17</sup> Dalam lintasan sejarah, Aceh sebagai wilayah yang telah dikenal sejak lama. Di masa-masa kerajaan Islam, Aceh telah dikenal sebagai salah satu Negara yang makmur dan termasuk lima Negara terkuat di dunia yaitu : Aceh, Agra, Maroko, Istanbul dan Isfaha. Lihat: Amiruddin, *Aceh*, hlm. 1. Lebih lanjut Mohd. Yamin Menjelaskan, wilayah Asia Tenggara pernah diberi beberapa pusat Tamaddun Islam Asia Tenggara yaitu: Kerajaan Islam di Aceh. Dalam sejarah Aceh kerajaan yang sangat populer

Sejalan dengan pertumbuhan kerajaan-kerajaan di Aceh dan meningkatnya arus lalu lintas perhubungan dan perdagangan internasional yang menghubungkan bagian Barat, Tenggara dan Timur Asia, melalui Selat Malaka, maka tumbuh pulalah kota-kota di sepanjang pantai utara Aceh, seperti *Perlak*, *Samudera Pasai*, *Pidie*, *Lamiri* dan *Bandar Aceh Darussalam*. Jika didasarkan pada sumber-sumber sejarah, terutama pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia tempat-tempat di atas tersebut sudah boleh disebutkan kota.<sup>18</sup> Wilayah teritorial kota diantaranya ada yang berfungsi sebagai pusat kerajaan, sebagai kota kabupaten, ada pula sebagai kota pelabuhan. Wilayah teritorial kota dibagi atas bahagian-bahagian sesuai dengan fungsinya, ada yang bahagian untuk keraton, pasar, tempat kediaman saudagar-saudagar, tempat orang-orang asing dan lain-lain.

Dalam penelusuran sejarah, belum ditemukan secara kongkrit data yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan tentang latar belakang masyarakat Aceh. Namun demikian kita hanya dapat menaruh dugaan keras berdasarkan berbagai data, bahwa latar belakang masyarakat Aceh tentunya amat diwarnai dengan banyaknya percampuran *genetic* yang menyebabkan terus berkembang sebagai masyarakat sosial. Diantara pada sejarawan berpendapat bahwa sejarah masyarakat Aceh dikenal sejalan dengan berkembangnya agama Islam, seperti pernah disinggung dalam sejarah, Aceh sebelum Islam gelap. “Para penulisan sejarah memiliki pandangan yang berbeda dan tidak ada satupun yang diyakini lebih pasti, karena itu sejak diketahui secara jelas masyarakat Aceh telah beragama Islam”.<sup>19</sup>

Fakta sejarah menyebutkan latar belakang masyarakat Aceh menunjukkan adanya unsur Hindia dalam asal-usulnya, misalnya dapat dipastikan, bahwa *Hinduisme* dengan satu dan lain secara langsung selama waktu yang cukup lama, telah mempengaruhi peradaban Aceh. Walaupun dalam cerita dan adat-istiadat sekarang, bekas-bekas pengaruh peradaban tersebut hampir

---

yaitu Kerajaan Aceh Darussalam yang masa kejayaannya dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1607-1637). Kerajaan ini pernah menguasai sebagian Sumatera dan semenanjung Tanah Melayu. Sebelum muncul Kerajaan Aceh Darussalam, telah berdiri beberapa Kerajaan Islam kecil di Aceh, seperti Kerajaan Islam Perlak, Pasai, Pidie, Tamiang, Lamuri dan Barat Daya. Yamin, *Gadjah*, hlm. 48

<sup>18</sup> Sutono Kartodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm. 148

<sup>19</sup> Amiruddin, *Aceh*, hlm. 12

tidak kelihatan lagi. Fakta lain juga menunjukkan ada hubungan orang Aceh dengan penduduk India, sehingga nampaknya dan sangat memungkinkan sekali kalau Aceh, sebagaimana banyak lagi lain dari kepulauan nusantara, telah memeluk agama Islam karena mendapatkan dari India, bahwa penduduk Kerajaan Aceh, sebagai penduduk asli datang dari orang-orang agama Hindu, ada dari *Keeling*, *Madras*, dan *Malabar*. Kemudian masuk Islam di Aceh. Selain itu orang-orang Aceh juga berasal dari Arab, Persia, Turki, Mantea dan Batak.<sup>20</sup> Semua saudagar yang datang ke Aceh belum beragama Islam, akhirnya secara berangsur-angsur berbaur dan hidup di tengah-tengah masyarakat Aceh dengan ikatan pernikahan antara satu dengan lainnya, dan akhirnya masuk Islam.<sup>21</sup>

Dalam sejarah telah tercatat bahwa hubungan perdagangan antara Arab, Parsi, Eropa dan lain-lain dengan nusantara telah berjalan sejak lama, hal ini ikut andil dalam memberikan perkembangan penduduk Aceh diantaranya suku Melayu, kulit *kleeng*, budak belian dari Nias, orang Batak, Hindia, Arab, Turki dan Persia. Pendapat ini, memperkuat sebagaimana yang disampaikan oleh Julis Jacob yang mengatakan, bahwa latar belakang Aceh merupakan perpaduan atau percampuran daerah dan darah dari berbagai etnis, ada yang berasal dari Arab, Habsyi, Bugis, India, Batak, Nias, dan Minangkabau.<sup>22</sup> Banyak percampuran etnis dapat dilihat pada aktifitas kehidupan, "Aceh pada zaman kerajaan sudah sangat ramai dikunjungi para nelayan lebih-lebih lagi pada masa kebesaran Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin

<sup>20</sup> Ismail, *Sistem*, hlm. 3

<sup>21</sup> A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan berkembangnya Agama Islam di Nusantara*, (Jakarta: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 20. Sumber lain menyebutkan bahwa masyarakat Aceh merupakan salah satu suku yang tergolong ke *etnis* Melayu atau ras Melayu. Percampuran *etnis* masyarakat Aceh dengan etnis yang lain adalah pada penduduk pesisir barat yang dijuluki dengan *aneuk jamee blasteran* keturunan orang asing atau tamu, juga *aneuk rawa* (penduduk Propinsi Rawa). Orang-orang *blasteran* ini memberikan keanekaragaman tersendiri terhadap suku bangsa Aceh, khususnya di daerah Aceh Besar dan Pantai Timur telah melahirkan lebih banyak keturunan *blasteran* yang kini diakui oleh banyak orang. *Blasteran* ini lebih besar dipengaruhi oleh perkawinan silang antara satu suku dengan suku yang lain. Demikian halnya, "penduduk Aceh terdiri dari berbagai *etnis* yang telah hidup dan berkembang sampai saat ini, misalnya sub-*etnis Gayo*, sub-*etnis Tamiang*, sub-*etnis Alas*, sub-*etnis Simeulu* dan ada lagi sub-*etnis* di pedalaman terutama di Aceh Singkil dan Pulau Banyak. Lihat: Darwis A. Sulaiman, (ed), *Aceh Bumi Iskandar Muda*, Cet. I (Banda Aceh: Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 59

<sup>22</sup> Julius Jacob, *Het Falilie An Kampong Leven Op Groop Aceh* (Leiden: Ej.Brill, 1984), hlm. 90

oleh Sultan Iskandar Muda<sup>23</sup> dan pengganti-penggantinya sampai ratusan tahun lamanya”.<sup>24</sup> Dari uraian di atas diketahui bahwa kerajaan Aceh dalam perkembangannya meluas sepanjang jalur pantai pada kota-kota pelabuhan, baik sebelah Timur maupun sebelah Barat pulau Sumatera.

Kehidupan ekonomi masyarakat Aceh pada zaman kerajaan Aceh terkait dengan ekonomi masyarakat Asia secara keseluruhannya. Sumber-sumber yang dapat dipergunakan untuk menyusun perikehidupan ekonomi masyarakat Aceh, berasal dari pusat-pusat kebudayaan Asia pada masa itu, yaitu Cina, India dan Arab. Pada zaman tersebut di Asia terdapat 2 (dua) jalur perniagaan *internasional*, yaitu melalui darat dan laut.<sup>25</sup> Saudagar yang datang ke Aceh disambut dengan hormat dan penuh rasa persaudaraan, sikap hormat terhadap tamu telah terbukti dalam lembaran sejarah, bukan hanya datang untuk perniagaan dan menjadi rakyat Aceh, tetapi juga saat menjadi pemimpin di Aceh diterima dengan baik.<sup>26</sup> Jalur lalulintas yang ditempuh sangat lancar sehingga cukup mendukung untuk pertumbuhan dan kehidupan ekonomi masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Puncak perkembangan Kerajaan Aceh terjadi pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1637), masa pemerintahan sultan ini merupakan masa kejayaan kerajaan Aceh, baik politik maupun ekonomi. *Ekspansi-ekspansi teritorial* ke daerah-daerah tetangga seperti yang pernah dilakukan pada masa *Sultan Alaudin Riayat Syah Al-Kahhar* diulangi kembali, Sultan Iskandar Muda melakukan ekspansi wilayah lebih banyak dan lebih luas, telah berhasil menaklukkan sejumlah kerajaan pantai di Selat Malaka dan di pantai bagian Barat pulau Sumatera. Lihat: Alfian, *Sejarah*, hlm. 74

<sup>24</sup> Sulaiman, *Aceh.*, hlm. 60

<sup>25</sup> Melalui darat disebut jalan *Sutra*, jalan ini dimulai dari Cina, terus ke Asia Tengah, Turkistan sampai ke laut Tengah. Jalur ini di Asia tengah bertemu dengan jalur jalan khafilah India yang melewati selat Kaibar. Jalur darat ini merupakan jalan penghubung yang paling tua antar bangsa dan ras di dunia. Sedangkan jalan melalui laut ialah dari Cina terus ke Indonesia melalui selat Malaka, selanjutnya ke India. Dari India ada jalur yang ke teluk Persia melalui Syria dan selanjutnya ke laut Tengah. Jalur lain melalui laut, yaitu laut Merah, Mesir dan sampai juga ke laut tengah, perhubungan darat dan laut tersebut di atas sudah dimulai sejak abad ke-1 M. Lihat: Burger dan Prayudi, *Sejarah*, hlm. 14

<sup>26</sup> Ajidar Matsyah, *Jatuh Bangun Kerajaan Islam di Aceh* (Yogyakarta: Kaukabar, 2013), hlm. 16

<sup>27</sup> Jalan lalulintas antar Indonesia yang dimulai dari Maluku seterusnya ke Makasar, Kepulauan Nusa Tenggara pantai utara Jawa, Sumatera bersatu dengan lalulintas perniagaan internasional di Selat Malaka. Jalan perdagangan antar Indonesia ini sudah lazim dilakukan sejak bangsa Indonesia menetap di kepulauan Indonesia dan bertambah ramai dengan adanya perdagangan rempah-rempah yang dihasilkan oleh kepulauan Maluku dan Sumatera yang sangat dibutuhkan oleh orang-orang

Penghasilan utama masyarakat Aceh berdagang dan bercocok tanam serta bekerja sebagai ahli-ahli pertukangan, seperti tukang mas, tukang periok, tukang meriam, tukang kapal, tukang besi, tukang tenun. Kerajaan Aceh (Perlak) dikenal sebagai wilayah sumber hasil pertanian berupa lada, rotan, kapur barus, kemenyan, daging dan sutera.<sup>28</sup> Tetapi yang menarik perhatian pedagang-pedagang asing yang datang ke Aceh adalah lada, timah, emas, sutera. Selain itu di Aceh juga didapatkan barang-barang yang didatangkan dari luar negeri seperti rempah-rempah, pakaian dari India dan porselin dari Cina. Dari segala hasil yang disebutkan di atas, lada adalah yang merupakan barang dagangan utama kerajaan Aceh. Pohon-pohon lada di Aceh tumbuh sedemikian banyaknya, sehingga tiap tahunnya kerajaan Aceh mampu menghasilkan lada mencapai duapuluh kapal dagang untuk masa itu.<sup>29</sup> Hasil pertanian yang populer di Aceh ini diekspor ke Turki, Arab, Persia, Malaya, Jawa dan Siam.<sup>30</sup>

Semua kegiatan perdagangan di kerajaan Aceh dipusatkan di Ibukota Kerajaan, sehingga kota Bandar Aceh *Dar as-salam* menjadi ramai melebihi kota pelabuhan lainnya di pantai bagian Timur dan Barat pulau Sumatera. Sejumlah pedagang asing dari bermacam-macam bangsa, mendiami tempat-tempat tertentu yang letaknya terpisah-pisah di dalam kota. Mereka tinggal berkelompok-kelompok sesuai negeri asal mereka. Pedagang-pedagang ini mendapat sambutan baik dari masyarakat, Sultan maupun dari pejabat-pejabat kerajaan lainnya. Mereka pada umumnya senang berdagang ke Aceh, karena pajak-pajak atau bea-bea yang harus mereka bayar, masih terlalu murah. Menurut Zainuddin dalam buku *Tarich Atjeh* dan *Nusantara*, disebutkan, “bahwa di Pasai pernah beredar berbagai mata uang asing sebagai alat tukar di pasar perdagangan dalam negeri, selain mata uang resmi kerajaan”.<sup>31</sup>

Sumber penghasilan masyarakat Aceh adalah hasil-hasil perniagaan yang dilakukan di pelabuhan Aceh dan daerah takluknya. Selain itu juga dari

---

Cina, India dan Eropa. Dapatlah dipahami bahwa Selat Malaka demikian pentingnya sebagai tempat bertemunya jaring-jaring lalulintas Barat, Timur dan Indonesia. Lihat: Alfian, *Sejarah*, hlm. 56

<sup>28</sup> Matsyah, *Jatuh*, hlm. 110

<sup>29</sup> Alfian, *Sejarah*, hlm. 84

<sup>30</sup> Uka Tjandrasmitra, *Proses Kedatangan Islam dan Munculnya Kerajaan-Kerajaan Islam di Aceh*, *Kertas Kerja Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh Nusantara*, (Aceh Timur, 23-30 September 1980), hlm. 7

<sup>31</sup> Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961), hlm. 71

bea cukai yang dikenakan bagi kapal-kapal asing yang berlabuh di pelabuhan Aceh. Setiap kapal-kapal asing yang memasukkan barang-barang ke pelabuhan Aceh dipungut pajak pemasukan sebesar 5 (lima) persen dari harga-harga barang itu.<sup>32</sup> Sumber pemasukan lain adalah berupa hadiah-hadiah yang diberikan oleh tamu-tamu dan pedagang-pedagang asing, yang berkunjung ke kerajaan Aceh. Para pedagang asing hampir tidak dapat melakukan urusannya di kerajaan Aceh tanpa memberikan hadiah-hadiah kepada sultan Aceh. Pemberian hadiah itu berlaku bagi setiap pedagang asing yang berdagang di Aceh.<sup>33</sup> Kemakmuran Pasai pernah disaksikan oleh Ibnu Batutah dan Marco Polo saat mengunjungi Pasai, menceritakan betapa sibuknya suasana pelabuhan Pasai pada waktu itu, “banyak kapal-kapal dagang dari berbagai negara di dunia berlabuh dan melakukan transaksi perdagangan di Pasai”.<sup>34</sup> Sektor perdagangan telah menjadi urat nadi pergerakan ekonomi kerajaan, bahkan Aceh sering dikunjungi oleh saudagar-saudagar, hal ini menandakan bahwa Aceh telah menjadi sentral perdagangan dunia di Asia Tenggara. Kekuatan perdagangan ini didukung oleh *infrastruktur* pelabuhan-pelabuhan yang cukup memadai dan terkenal.

## B. STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT

Bentuk wilayah dalam susunan struktur pemerintahan kerajaan Aceh adalah *gampong* (kampong) yang dikepalai oleh seorang *Keucik* dan *Waki* (wakil). Sebuah *gampong* terdiri dari beberapa kelompok rumah yang mempunyai tempat ibadah sendiri yang disebut *Meunasah*. *Keucik* dalam pemerintah *Gampong* dibantu pula oleh Pejabat Keagamaan yang disebut *Teungku Meunasah* dan *Para Orang Tuha Gampong* yang disebut *Ureung Tuha*. Setiap *gampong* memiliki *meunasah* tempat dimana *Keucik* dan *Teungku Meunasah* mengendalikan pemerintah *gampong*.<sup>35</sup>

*Gampong-gampong* yang terletak berdekatan dan penduduknya melakukan ibadah bersama pada setiap hari Jum'at di sebuah masjid merupakan suatu

---

<sup>32</sup> P.J. Veth, *Atehin an Zijne Betrekkingen tot Nederland Tot Nadeland* (Leiden: Geralth, Koff, 1887), hlm. 55

<sup>33</sup> Alfian, *Sejarah*, hlm. 86

<sup>34</sup> Matsyah, *Jatuh*, hlm. 111

<sup>35</sup> Soelaiman, *Aceh*, hlm. 69

kekuasaan wilayah pula yang diberi nama *Mukim*. Yang memegang pimpinan *Mukim* disebut *Imeum Mukim*. Dialah yang bertindak sebagai *Imeum* (imam) sembahyang pada setiap hari Jum'at yang diikuti sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang laki-laki dewasa. Pada mulanya tiap-tiap *Mukim*, ditetapkan minimal sekitar 1000 (seribu) orang penduduk laki-laki yang dapat memegang senjata.<sup>36</sup> Dalam perkembangan fungsi dari *Imeum Mukim* berubah menjadi kepala pemerintah di sebuah *mukim*, yang mengkoordinir kepala-kepala *gampong* atau *Keucik-keucik*, dengan berubah fungsi *Imeum Mukim*, berubah pula nama panggilannya yakni *Kepala Mukim*. Untuk mengganti sebagai *Imeum* sembahyang pada setiap hari Juma'at di sebuah masjid, diserahkan kepada orang lain yang disebut *Imeum Masjid* (Imam Masjid). Satu *mukim* terdapat delapan *meunasah* (*gampong*) dan dalam tiap-tiap *mukim* diangkat satu orang *Imeum*, yaitu buat menguruskan pekerjaan rakyat dan pada tiap-tiap satu *Mukim*, didirikan satu masjid untuk shalat Jum'at, shalat berjamaah diangkat satu orang *Imam Masjid*.<sup>37</sup>

Bentuk wilayah kekuasaan yang lebih besar dari pada *mukim* adalah yang disebut *nanggroe*. Di Aceh *nanggroe* adalah gabungan dari beberapa buah *mukim* yang dikepalai oleh seorang *Uleebalang* yaitu daerah-daerah yang termasuk dalam kekuasaan kerajaan Aceh. Para *Uleebalang* menerima kekuasaan langsung dari Sultan Aceh. Di daerah kekuasaannya mereka memerintah secara turun-temurun. Namun sewaktu akan memangku jabatan sebagai pimpinan di daerahnya, maka mereka harus disyahkan pengangkatannya oleh Sultan Aceh.<sup>38</sup> Di dalam surat pengangkatan itu harus dibubuhi cap stempel kerajaan Aceh, yang disebut *Cap Sikireueng* (cap sembilan) atau disebut juga cap *Halilintar*.<sup>39</sup>

Struktur Pemerintah Aceh adalah pemerintah pusat,<sup>40</sup> yang berkedudukan di ibukota kerajaan pemerintahan pusat adalah sultan. Dalam mengendalikan

<sup>36</sup> Alfian, *Sejarah*, hlm. 77

<sup>37</sup> Badruzzaman, *Sistem*, hlm. 14-15

<sup>38</sup> Menurut tradisi, ketika kerajaan Aceh berada di bawah *Sultanah Nurul Alam Nakiatuddin Syah* (1675-1678), Aceh dibagi menjadi *Lhee Sagoe* (tiga sagi). Tiap sagi terdiri dari sejumlah *Mukim*. Berdasarkan jumlah *mukim-mukim* yang disatukan, maka ketiga sagi ini adalah *Sagi XXII Mukim*, *Sagi XXV Mukim* dan *Sagi XXVI Mukim*, pimpinan sagi ini juga disebut *Uleebalang*. Lihat: Mohammad Said, *Atjeh Sepanjang Abad*, (Medan: Diterbitkan Pengarang Sendiri, 1961), hlm. 209-211

<sup>39</sup> Alfian, *Sejarah*, hlm. 78

<sup>40</sup> Secara jelas dapat digambarkan bahwa struktur Kerajaan Aceh Darussalam



pemerintahnya, sultan dibantu oleh beberapa pembantu yang membawahi bidangnya masing-masing. Ketika datangnya pedagang-pedagang Belanda dan Inggris pertama kali ke Aceh, sultan dalam pemerintahan kerajaan Aceh, dibantu oleh lima orang terkemuka, yaitu seorang yang disebut *Bendahara* dan 4 (empat) orang *Syahbandar*. Bendahara berfungsi sebagai penulis atau sekretaris kerajaan, sedangkan para syahbandar berfungsi sebagai pembantu sultan dalam mengurus dan mengepalai perdagangan di kota-kota Pelabuhan.<sup>41</sup>

Di dalam kerajaan Aceh terdapat juga beberapa lembaga atau badan yang turut mendampingi sultan Aceh dalam melaksanakan tugasnya. Diantara lembaga-lembaga itu adalah yaitu: (1) *Balai Rung Sari*, yaitu tempat bermufakat empat orang *Uleebalang* (hulubalang empat) dan tujuh orang ulama, serta menteri-menteri kerajaan Aceh. (2) *Balai Gading*, yaitu tempat mufakat dari delapan orang *Uleebalang* dan tujuh orang alim ulama serta menteri-menteri kerajaan Aceh. (3) *Balai Majlis Mahkamah Rakyat*, yaitu sebagai tempat mufakat wakil rakyat sebanyak tujuh puluh tiga orang yang datang dari tujuh puluh tiga *mukim*, tiap-tiap *mukim* diwakili satu orang.<sup>42</sup>

Pengaruh nilai-nilai Islam sangat mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah kesultanan Aceh, sejak agama Islam masuk ke daratan Aceh, bahkan mempengaruhi wilayah nusantara. Stuktur kerajaan Aceh dalam konteks sistem pemerintahan berdasarkan *Qanun Meukuta Alam*, berakar pada susunan *gampong-gampong* dan *mukim* (federasi *gampong-gampong*), *nanggroe* (kecamatan), *sagoe* (federasi beberapa *nanggroe*) dan langsung ke kerajaan /negara. Struktur Kerajaan Aceh Darussalam, sehingga menjadi suatu kultur pemerintah.

---

adalah sebagai berikut : Gampong yang disebut juga dengan meunasah, dipimpin oleh seorang Keuchik dan seorang Imeum Rawatib dengan dibantu oleh seorang staf yang bernama Tuha Peut. Pemerintahan gampong mendapat hak otonomi yang sangat luas. Mukim yaitu federasi dari beberapa gampong, paling sedikit delapan Gampong. Mukim dipimpin oleh seorang Imeum mukim dan seorang Kadhi Muslim serta dibantu oleh beberapa orang wakil. Dalam tiap-tiap mukim didirikan sebuah Masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at. Lihat: Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya*, hlm. 15

<sup>41</sup> Alfian, *Sejarah*, hlm. 79

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 82

### C. ADAT ISTIADAT MASYARAKAT ACEH

Perkembangan adat-istiadat dalam masyarakat Aceh, sejak dahulunya unik dan menarik untuk dikaji, karena masyarakat Aceh merupakan percampuran dari berbagai suku dan *etnis*, telah melahirkan suatu sistem kehidupan budaya dan adat-istiadat yang berbeda-beda, namun tetap dalam bingkai yang penuh dengan nilai-nilai Islami. Menurut, Hoesein Djajadiningrat, dalam T. Alamsyah, dkk, (ed), Adat-Istiadat dalam “Peraturan di dalam Negeri Aceh *Bandar Dar As-Salam*, lebih dikenal dengan nama “*Adat Meukuta Alam*” atau “*Adat Pomeureuhom*”, mengandung susunan Pemerintah, hukum dan adat memperlakukan hukum Islam.<sup>43</sup> Sedangkan menurut, Darwis A. Soelaiman, adat-istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku antar generasi dalam suatu masyarakat, di mana keberadaannya berfungsi sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak di masyarakat pemangku adat tersebut.<sup>44</sup>

Adat-istiadat merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat Aceh, sehingga menjadi suatu kultur yang hidup dan berkembang keberadaan dan fungsinya sebagai landasan berpikir dan bertindak bagi masyarakat. Bagi masyarakat Aceh, adat-istiadat tidak bisa terlepas dari ajaran Islam, pernyataan ini sesuai dengan peribahasa Aceh yang mengatakan, “*Hukom ngen adat hanjeut cree bue lagei zat ngon sipheut* (hukum agama dan adat tidak dapat dipisahkan, seperti benda dengan sifatnya). Karena itu telah dibakukan dalam *Narit Maja* “*Adat bak Poeteumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Lakseumana*”.<sup>45</sup>

Masyarakat Aceh dalam konteks sejarah merupakan sebagai bangsa dari Negara *Kesultanan Aceh*, sifat perilaku bahasa Aceh dan budaya adat-istiadat yang Islami. Kepercayaan dan keyakinan hidup masyarakat Aceh yang disimbolkan pada *Meunasah* dan Masjid, menjadi tolak ukur sebagai salah satu indikator awal, dalam mencari identitas keberadaan komunitas Aceh, di manapun mereka berada.<sup>46</sup> Perilaku kehidupan inilah masyarakat

<sup>43</sup> T. Alamsyah, dkk., *Pedoman Umum Adat Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Prov. Daerah Istimewa Aceh, 1990), hlm. 9

<sup>44</sup> Soelaiman (ed), *Aceh.*, hlm. 69

<sup>45</sup> Ismail, *Sistem Budaya*, hlm. 4

<sup>46</sup> Darwis Sulaiman (78 tahun) Guru Besar Sejarah Pendidikan Universitas Syiahkuala, Pendiri/Pengurus MPD Aceh (1990-2007), Wawancara di Banda Aceh, tanggal 12 Februari 2016.

Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bahagian dari mereka dengan segala kelebihan dan kekurangan. Masyarakat Aceh sangat tunduk dan taat kepada ajaran Islam.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Aceh, dibangun berdasarkan ajaran agama Islam, maka kerajaan Aceh *Darussalam* dinyatakan sebagai negara yang berbudaya hukum, yang dalam *Qanun al-Asyi*, disebut juga dengan *Adat Meukuta Alam* yang bersumber dari Alquran, al-Hadis, Ijma' ulama dan Qiyas menetapkan ada empat sumber hukum, bagi kerajaan Aceh, yaitu:

- a. Kekuasaan Hukum (*Yudikatif*) yang dipegang oleh *Kadhi Malikul Adil*.
- b. Kekuasaan Adat (*Eksekutif*) yang dipegang oleh *Sultan Malikul Adil*.
- c. Kekuasaan Qanun (*Legislatif*) yang dipegang oleh *Majelis Mahkamah Rakyat* (Dewan Perwakilan Rakyat).
- d. Kekuasaan Reusam (*Hukum Darurat*) yang dipegang oleh *Penguasa Tunggal*, yaitu Sultan sebagai penguasa tertinggi waktu Negara dalam keadaan perang.<sup>47</sup>

Dalam menjalankan empat jenis hukum dalam kerajaan, yang disebutkan dalam qanun tersebut di atas, menetapkan bahwa sultan dan ulama harus menjadi *Dwi Tunggal* artinya sultan dengan ulama tidak boleh pisah, maka semua aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat hukum Allah Swt. harus dijalankan dan adat-istiadat tidak boleh ditinggalkan.

Untuk kemajuan masyarakat dan pelaksanaan hukum adat, kerajaan membuat peraturan dan mengangkat pejabat-pejabat ahli dalam bidangnya masing-masing, antara lain, yaitu: *Hukom Adat Blang* (peraturan mengenai persawahan), *Hukom Adat Seuneubok* (peraturan mengenai perkebunan), *Hukom Adat Laut* (Peraturan mengenai penangkapan ikan), *Hukom Adat Glee* (Peraturan mengenai kehutanan), dan *Hukom Adat Geumeubeu* (Peraturan mengenai perternakan).<sup>48</sup> Berbagai peraturan tersebut dalam rangka pengaturan dan pelaksanaan adat-istiadat bersendikan pada ajaran Islam. Dengan demikian adat-istiadat masyarakat Aceh mencerminkan nilai-nilai Islami.

<sup>47</sup> Ismail, *Sistem Budaya*, hlm. 13

<sup>48</sup> A. Hasjmy, *Sejarah kebudayaan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 113-115

#### D. SENI BUDAYA MASYARAKAT ACEH

Pada saat kerajaan Aceh telah dapat menggantikan kedudukan Malaka, baik sebagai pusat perdagangan, maupun pusat penyebaran agama Islam, Kerajaan Aceh telah menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan terkemuka di Timur Tengah, pada waktu itu, yaitu kerajaan Turki. Pada masa itu pula banyak ulama dan pujangga-pujangga dari berbagai negeri Islam datang ke Aceh. Diantara ulama tersebut adalah *Muhammad Azhari* yang mengajar ilmu *metafisika*, *Syeikh Abdul Khair Ibnu Hajar* ahli *pogmatic* dan *mistik*, *Muhammad Yamami* ahli dalam *ilmu ushul*, *Syeikh Muhammad Jailani Ibnu Hasan Ibnu Muhammad Hamid* dari *Gujarat*, yang mengajar *logika*.<sup>49</sup>

Kehidupan seni budaya di Aceh dilandasi oleh dasar-dasar pokok ajaran Islam. Pada masa kejayaan Aceh pengaruh seni budaya Barat meskipun ada unsur-unsurnya yang tidak bertentangan dengan dasar ajaran Islam, dalam berbagai aspek belum berapa nampak. Dalam perkembangan selama abad ke-19, seni budaya di Aceh, meliputi sistem pendidikan, *seni sastra*, *seni tari* dan sebagainya masih mengikuti pola-pola yang sudah ada dan berkembang pada masa kejayaan Islam kerajaan Aceh Darussalam. Di samping terdapat pengaruh yang diterima dari negeri-negeri Islam, seperti dari Parsi, Turki, dan lain-lain, juga sedikit banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur seni yang berlandaskan Islam dalam perkembangannya, sejarah masyarakat Aceh baru dikenal sejalan dengan perkembangan agama Islam.<sup>50</sup>

Pada abad ke-19 seni sastra lebih menonjol dibandingkan dengan cabang kesenian lainnya. Dalam hal ini, adalah *syair-syair* perang (hikayat perang) yang rupa-rupanya diciptakan dalam rangka untuk lebih menumbuhkan semangat berjuang. Diantaranya yang cukup dikenal dalam masyarakat Aceh khususnya *Hikayat Prang Sabi*, *Hikayat Prang Gompeuni* dan *Syair Prang Aceh*. *Hikayat Prang Sabi* dikarang oleh *Teungku Chiek Pante Kulu* (Teungku Muhammad) sekitar tahun 1808 M.<sup>51</sup>

Dalam kerajaan Aceh Darussalam ada tiga bahasa yang berlaku yaitu: bahasa Aceh (bahasa nasional), Bahasa Melayu (bahasa perhubungan antar

<sup>49</sup> T. Ibrahim Alfian, *Wajah Rakyat Aceh Dalam Lintasan Sejarah, Jilid XVI* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972), hlm. 496

<sup>50</sup> Amiruddin, *Aceh dan Serambi*, hlm. 11-12

<sup>51</sup> Said, *Aceh*, hlm. 548

bangsa kepulauan nusantara dan Asia Tenggara), dan bahasa Arab (bahasa agama/ilmu pengetahuan.<sup>52</sup> Sedangkan di bidang kesusasteraan Aceh berbentuk prosa berkembang pesat dalam bahasa Melayu. Surat menyurat resmi dan tata bahasa negara ditulis dalam bahasa Melayu, demikian pula undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah, *Qanun* dan *Reusam* semua ditulis dalam bahasa Melayu, termasuk buku-buku ilmu pengetahuan sebahagian besar dikarang dalam bahasa Melayu, dan sejumlah kecil ditulis dalam bahasa arab. Huruf resmi yang digunakan yaitu huruf Arab Melayu atau tulisan *Jawi* baik untuk surat menyurat ataupun buku.<sup>53</sup> Pemahaman budaya Aceh bersumber kepada nilai-nilai syariat Islam.<sup>54</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, berbagai seni budaya berkembang secara pesat, meliputi: *seni bahasa, prosa, puisi, seni suara, seni tari, seudati, rapai, seni rupa, seni drama*, seni bangunan, dan lain sebagainya.<sup>55</sup> Yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses *internalisasi*, dan penghayatan nilai-nilai yang menjadi pembentukan kepribadian yang baik di masyarakat, mengembangkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera. Semua seni budaya Aceh mencerminkan pesan moral dan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga akan membentuk sebuah peradaban masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai sosial kemanusiaan dan keislaman.

## E. AGAMA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT ACEH

Islam masuk ke Indonesia secara damai, bukan lewat peperangan dan penaklukan sebagaimana terjadi pada beberapa negara di Timur Tengah, seperti masuk Islam ke Irak, Mesir dan daerah-daerah lainnya. Hal ini satu keunikan tersendiri, karenanya yang berperan dalam penyebaran Islam wilayah ini adalah para mubaliq yang berperan ganda, di satu sisi mereka sebagai pedagang, di sisi lain sebagai mubaliq, semata-mata memang datang ke kawasan ini khusus untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam.<sup>56</sup>

<sup>52</sup> Hasjmy, *Sejarah*, hlm. 251

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Ismail, *Seni Budaya*, hlm. 81

<sup>55</sup> Hasjmy, *Sejarah*, hlm. 252-257

<sup>56</sup> Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 2-3

Pada umumnya para ahli berpendapat Islam di Indonesia disalurkan melalui jalan damai, sekalipun dalam perkembangan Islamisasi di Indonesia menggunakan tiga metode, yaitu: *Pertama*, disebarkan oleh para pedagang muslim dalam suasana damai. *Kedua*, disebarkan oleh para juru dakwah dan para wali khusus dari India dan Arab untuk mengislamkan penduduk dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keimanan mereka. *Ketiga*, disebarkan dengan kekuatan untuk berperang melawan pemerintahan kafir. Proses tersebut tidak mungkin berjalan menurut pola yang seragam untuk seluruh nusantara.<sup>57</sup>

Secara historis, tradisi pendidikan Islam Indonesia telah terbangun cukup lama. Ini bisa dilihat dari mata rantai intelektual muslim yang terbangun secara sinergis dan cukup lama dengan berbagai ulama di Timur Tengah. Dalam jaringan intelektual yang kuat itu, “pergumulan umat Islam Indonesia dengan Alquran menjadi demikian intens. Alquran menjadi sumber rujukan dari setiap persoalan, diuraikan maknanya dan ditafsirkan, lalu disebar luaskan ajaran-ajarannya kepada masyarakat Islam”.<sup>58</sup> Kini Islam telah menjadi agama mayoritas di Indonesia dan telah memberi warna atau corak peradaban tersendiri, yang berakar kuat pada tradisi yang sangat panjang sejak masa Rasulullah. Pertumbuhan antara para penganut ilmu di nusantara dengan banyak ulama Timur Tengah, khususnya Haramayn, melibatkan proses historis yang amat kompleks. Jaringan murid-guru yang tercipta di antara kaum muslim-baik dari kalangan penganut ilmu dan ulama maupun muslim awam umumnya diantara kedua kawasan dunia muslim ini merupakan buah dari interaksi yang panjang diantara wilayah muslim di nusantara dan Timur Tengah.<sup>59</sup>

Kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia, bukan saja sebagai sistem keagamaan semata, tapi sekaligus kekuatan yang cukup

---

<sup>57</sup> Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 187

<sup>58</sup> Ada tiga pilar utama yang menyokong sosialisme religious (Islam). *Pertama*, gerakan sosial yang memperjuangkan tatanan struktural yang berkeadilan. *Kedua*, gerakan humanistik yang menyapa sesamanya berdasarkan kemanusiaan, bukan atas dasar primodialisme agama, suku, ras, kelompok. Gerakan humanistik merupakan kritik atas kecenderungan tirani rasionalitas dan fatalism terhadap gerakan ritualistik-skriptural. *Ketiga*, religiusitas, yaitu spirit beragama yang dilandasi semangat pembebasan dan humanistik, yang beribadah kepada Tuhan dengan cinta dan soliter. Lihat: Muhidin M. Dahlan, (ed), *Sosialisme Religius Suatu Jalan keempat*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001), hlm.xxi-xxii.

<sup>59</sup> Azra, *Jaringan Ulama*, hlm. 1

diperhitungkan. Islam merupakan daya dobrak bagi pengikutnya untuk menghancurkan tatanan sosial yang timpang. Islam juga merupakan kekuatan dalam membebaskan bangsa dari kolonialisme. Sejak awal kelahirannya, “Islam telah membuktikan diri sebagai kekuatan yang mampu mengubah setiap bentuk tatanan kehidupan yang tidak sesuai dengan harkat dalam diktum-diktum universal”.<sup>60</sup>

Sejarah dunia telah mencatat bahwa abad ke-20 disebut abad *Nasionalisme*, artinya sejak awal sampai penutupan abad ini timbul kesadaran berbangsa.<sup>61</sup> Masa kebangkitan bangsa-bangsa Asia dari tekanan *Imperialisme* dan *Kolonialisme* Barat. Bangkitnya pergerakan di Indonesia ditandai dengan perubahan kesadaran politik berbangsa. Di era ini mulai bangkitnya perjuangan dan pergerakan modern, kepulauan nusantara telah menyaksikan tumbuhnya pemikiran politik yang penuh gairah, semangat dan dalam pergerakan.<sup>62</sup> Kesadaran dan bangkitnya rasa *Nasionalisme* dalam masyarakat Islam Indonesia juga dipengaruhi oleh faktor luar dan dalam negeri.<sup>63</sup> Islam merupakan kekuatan dalam membebaskan bangsa dari *Kolonialisme*, kenyataan ini sesuatu yang telah terbukti sebagai kekuatan yang mampu mengubah setiap bentuk tatanan kehidupan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan ajaran Islam.

---

<sup>60</sup> Fackri Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 32

<sup>61</sup> Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi, 1908-1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hlm. v

<sup>62</sup> Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 97

<sup>63</sup> Faktor-faktor dari luar adalah: (1) Pan Islamisme, (2) Revolusi Tiongkok tahun 1911, (3) Marxisme, (4) Asas-asas perjanjian *Versailles* yang tidak dijalankan (hak bangsa mengatur sendiri), (5) Berdirinya Volkenbond dan Labour Office, (6) Perjuangan dan soal Irlandia, (7) Pergerakan di India (non koperasi, swadhesi, civil disobediensi). Sedangkan faktor-faktor dari dalam adalah: (1) Yang terpenting, ialah naiknya konjungtur dalam abad ini (yang dekat hubungan dengan kenaikan Konjungtur Internasional), yang tidak saja membawa perluasan dunia perekonomian Barat di sini, tetapi juga dari kalangan pemerintah, (2) Luas lapangan pengajaran yang perlu untuk mengadakan pegawai-pegawai, dan karena banyaknya kaum terpelajar, (3) Lenyap lapangan pengadaan perkumpulan dan persidangan politik, berhubung adanya Volksraad tahun 1918, (4) Perluasan desentralisasi, (5) Ketidakpuasan rakyat karena semakin banyak penyedotan hasil dari Indonesia dibandingkan manfaat yang diambil rakyat, (6) Susunan dan penempatan pegawai negeri, (7) Pemberian sokongan kepada agama. Lihat: A. K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1950), hlm. 8-10

Bila diperhatikan dengan sungguh pada hakikat pergerakan kebangsaan Indonesia itu, tidak lain dari perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, terutama perjuangan dengan mempergunakan organisasi-organisasi modern, berupa gerakan-gerakan dengan partai-partai politik yang berasaskan Islam, sejak akhir abad ke-19. Keinginan untuk merdeka tentu sudah timbul sejak jatuhnya bangsa Indonesia ke dalam kekuasaan penjajah. Keinginan ini selalu ditindas oleh penjajah, seperti perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Chik Ditiro, Teuku Umar, dan pahlawan-pahlawan lainnya diseluruh Indonesia. Perlawanan-perlawanan itu tidak lain dari protes kaum tertindas dan gambaran jiwa merdeka yang ingin lepas dari gengaman penjajah. Menurut cara sendiri-sendiri, sesuai zamannya pada waktu itu.<sup>64</sup> Demikianlah faktor-faktor yang mendorong lahir dan berkembangnya pergerakan rakyat Indonesia dalam kaitan dengan pendidikan Islam. Berdirinya beberapa Negara Islam di kepulauan Indonesia-Melayu merupakan salah satu bukti kuatnya pengaruh Islam. Selain itu, Islam sebagai faktor eksternal telah berhasil dalam mempersatukan kelompok-kelompok etnis yang terdiri atas ratusan suku yang ada di kepulauan ini. Walaupun Islam menciptakan kesatuan politis, “tetapi Islam telah memberikan kelangsungan dasar-dasar untuk terwujudnya integrasi kultural, paling tidak sejak abad ke-15”.<sup>65</sup>

Dalam pergerakan umat Islam Indonesia, ada beberapa faktor yang mendorong semangat sehingga lahir organisasi-organisasi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam dan kualitas keislaman masyarakat. Di samping itu organisasi-organisasi Islam sejalan dengan kebangkitan nasional Indonesia, dilatarbelakangi oleh lima faktor yang merupakan ciri-ciri kebangunan Islam di Indonesia, ialah:

1. Ketiadaan bersih dan campur aduk kehidupan agama Islam di Indonesia.
2. Ketidak effisiennya lembaga-lembaga pendidikan agama.
3. Aktivitas misi Khatolik dan Protestan.
4. Sikap acuh tak acuh, malah kadang-kadang merendahkan dari golongan *Intellegensie* Indonesia terhadap Islam.

<sup>64</sup> Sitorus, *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1947), hlm. 6

<sup>65</sup> Andi Faisal Bakti, *Islam And Nation Formation In Indonesia: From Communitarian To Organizational Communications*, (Jakarta: Logos, 2000), hlm. 18



5. Keadaan politik, ekonomi dan sosial sebagai akibat keadaan Indonesia sebagai negeri jajahan.<sup>66</sup>

Aspek lain ialah, sistem pendidikan Islam di Indonesia yang telah dipakai sejak berabad-abad lama mengisolasi diri, tidak menghasilkan pendidikan dan pengajaran yang ideal. Dayah merupakan tempat pendidikan masyarakat yang tradisional. Bentuk bangunan seperti: rumah-rumah kecil terletak di sekitar masjid. Dayah yang merupakan tempat pertama sebagai sumber pengambilan ilmu keislaman bagi masyarakat. Kehidupan dayah dalam masa-masa awal Islam mengalami perkembangan pesat dan subur. Sesudah peperangan Diponegoro, pemerintah Belanda mulai mengadakan pengawasan-pengawasan terhadap pendidikan masyarakat di dayah. Karena tekanan dan halangan-halangan dari pemerintah Belanda itu, maka dayah mengambil sikap non kooperatif terhadap apa saja yang berbau Barat, non kooperatif politis dan kultural, dengan arti tidak bersedia bekerjasama dalam pemerintahan dan kebudayaan. Akibatnya, dayah menolak sistem pendidikan modern, bahkan tidak mempelajari segala ilmu yang berasal dari Barat (ilmu-ilmu umum). Dengan penolakan yang apriori terhadap apa saja yang datang dari Barat dan sikap isolasi, menyebabkan dayah ketinggalan zaman. Predikat kaku, picik dan fanatik dalam arti yang kurang baik, meliputi kehidupan alam dayah, sampai awal abad ke-20.<sup>67</sup> Pertumbuhan dan perkembangan sistem pendidikan Islam memasuki periode baru dan sekaligus merupakan periode terakhir, sejak munculnya sistem madrasah. Sebab sistem madrasah selain dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang ada sebelumnya baik masjid, *Bayt al-hikmat*, khanaqah atau ribath, bimaristan maupun observatorium, juga sistem pendidikannya sudah lebih sempurna., sebagaimana yang tercermin pada sistem pendidikan Madrasah Nizhamiyah yang tidak hanya merupakan salah satu organisasi resmi negara, yang mengeluarkan pekerja-pekerja, tetapi juga pelajarannya sudah resmi, berjalan menurut undang-undang dan peraturan, serupa yang kita kenal hari ini.<sup>68</sup>

<sup>66</sup> A. Mukti, *Alam Pemikiran Islam Modern Di Indonesia Dan Modern Islamic Thought In Indonesia*, (Yogyakarta: Nida, 1969), hlm. 13

<sup>67</sup> Amir Hamzah Ws, *Pembaharuan Pendidikan Dan Pengadjaran Islam Jang Diselenggarakan oleh Pergerakan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Muhammadiyah, 1962), hlm. 32

<sup>68</sup> Abd. Mukti, *Konstruksi Pendidikan Islam, Belajar dari Kejayaan Madrasah Nizhamiyah Dinasti Saljuq*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 260-161

Kolonial Belanda memperkenalkan sekolah-sekolah modern menurut sistem persekolahan yang berkembang di dunia Barat. Sedikit banyak mempengaruhi sistem pendidikan di Aceh seperti dayah yang sangat jauh berbeda dalam sistem dan pengelolaannya dengan sekolah-sekolah yang diperkenalkan oleh Belanda.<sup>69</sup> Hal ini terlihat terpecahnya dunia pendidikan Indonesia menjadi dua, yaitu: *Pertama*, pendidikan yang diberikan oleh sekolah Barat yang sekuler yang tidak mengajarkan agama. *Kedua*, pendidikan yang diberikan oleh dayah yang hanya mengenal agama saja. Dengan kata lain menurut istilah Wijosukarto, dalam Muhaimin, pada periode tersebut terdapat dua corak pendidikan, yaitu corak lama yang berpusat pada dayah yang menekankan pada pengetahuan dan keterampilan agama dan corak baru dari pengetahuan sekolah-sekolah yang dikelola Belanda yang berpusat pada pengetahuan umum.<sup>70</sup> Kebijakan politik Belanda dalam pendidikan nampak ketika pada tahun 1931 M. dikeluarkan kebijakan oleh *Van De Boss*, Gubernur Jenderal Belanda, tentang kebijakan sekolah-sekolah Gereja dianggap dan diperlukan sebagai sekolah pemerintah, sedangkan Kementerian yang mengurus Pendidikan dan Keagamaan disatukan, sementara di setiap daerah keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen.<sup>71</sup>

Kebijakan yang dijalankan Belanda terhadap rakyat Aceh yang beragama Islam sebenarnya disadari oleh adanya rasa ketakutan, rasa panggilan agamanya, yaitu Kristen dan rasa kolonialismenya, sehingga dengan begitu mereka menerapkan berbagai peraturan dan kebijakan.<sup>72</sup> Penekatan kolonial Belanda

---

<sup>69</sup> Zuhairimi, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 46

<sup>70</sup> Muhaimin, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Padang: IAIN Press, 1999), hlm. 78

<sup>71</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.51

<sup>72</sup> Di antaranya, *Pertama*. Pada tahun 1882 M. Kolonial Belanda membentuk badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut Priesterraden. Dari nasehat badan inilah maka pada tahun 1905 M. kolonial Belanda mengeluarkan peraturan baru yang isinya bahwa orang yang memberikan pengajaran atau pengajian agama Islam harus terlebih dahulu meminta izin kepada kolonial Belanda. *Kedua*. Pada tahun 1925 M. dikeluarkan lagi peraturan yang lebih ketat terhadap pendidikan agama Islam yaitu bahwa tidak semua orang (kiai) boleh memberikan pelajaran mengaji kecuali telah mendapat semacam rekomendasi atau persetujuan kolonial Belanda. *Ketiga*. Kemudian pada tahun 1932 M. keluar lagi peraturan yang isinya berupa kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah yang tidak ada izinnnya atau memberikan pelajaran yang tidak disukai

terhadap pendidikan Islam tidak hanya seperti yang dalam ketentuan tersebut, tetapi berbagai usaha lain mereka tempuh, dengan maksud menekan dan mematikan kegiatan-kegiatan orang Islam, misalnya sejalan dengan sifat penjajah, maka hal ikhwal tentang pribumi dan Islam di Indonesia mereka pelajari dengan sebaik-baiknya secara mendalam dan ilmiah di negeri Belanda. Dalam posisi seperti ini, “pusat-pusat pertumbuhan di Aceh berfungsi sebagai pintu masuk berbagai gerakan pembaharuan agama”.<sup>73</sup>

Dalam kerajaan Aceh yang berdasarkan Islam, sultan bertanggung jawab melindungi dan menyiarkan agama. Untuk menjaga supaya penyelenggaraan kekuasaan senantiasa berada dalam keadilan, maka ada golongan yang selalu diberikan jabatan tinggi dalam pemerintahan, yaitu: ulama, orang yang ahli dalam hukum, cendikiawan, orang yang cakap mengurus negara sebagai menteri, dan uleebalang, yang sanggup mengatur pertahanan negeri. Dalam lintasan sejarah Aceh, mulai periode proses Islamisasi awal hingga saat ini, ulama memegang posisi penting dalam kehidupan masyarakat. Pada awal kehadiran Islam di Aceh (juga nusantara). Sebagai daerah-daerah sentral agama Islam adalah di wilayah-wilayah pesisir. Di Aceh, misalnya, dapat diamati pada pesisir kota Pasai, Perlak, dan Banda Aceh. Semenjak kerajaan Pasai hingga kerajaan Aceh Darussalam, selalu ada seorang ulama besar yang mendampingi sultan.<sup>74</sup>

Ulama mempunyai tugas mulia, sebagai penasehat sultan dan pemerintah dalam hal yang bersangkutan dengan agama, ulama Aceh mulai memegang peranan penting dalam kerajaan.<sup>75</sup> Tugas mulia memberikan penerangan kepada masyarakat tentang berbagai persoalan keagamaan yang berkembang, baik yang berkaitan dengan persoalan iman, hukum, maupun pendidikan Islam. Di samping itu juga ulama sebagai wali hakim, yang akan menikahkan orang yang tidak berwali dan urusan-urusan lain yang bertalian dengan hukum (agama).<sup>76</sup> Dengan menjalankan pemerintahan di dalam kerajaan Aceh

---

oleh kolonial Belanda yang disebut Ordonansi sekolah liar (*wilde school ordonantie*). Lihat: Hasbullah, *Sejarah*, hlm. 52

<sup>73</sup> M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan terhadap Tradisi*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 36

<sup>74</sup> Aslam Nur (ed), *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX, Jilid II* (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh Bekerja sama Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), hlm. 3

<sup>75</sup> Amiruddin, *Ulama Dayah*, hlm. 7

<sup>76</sup> Hamzah, *Pembaharuan*, hlm. 33

Darussalam tidak terjadi pemisahan antara agama dan negara. Ulama sebagai pemimpin agama terlibat langsung dalam pemerintahan, menurut bidang tugas yang dibebankan kepadanya. Di samping tugas formil, ulama dalam pemerintahan, ulama-ulama kebanyakan tersebar di setiap kampong (gampong), mencerdaskan rakyat dengan memberikan pelajaran-pelajaran di meunasah-meunasah dan dayah-dayah yang ada di Aceh. Kontribusi ulama dalam pendidikan masyarakat sangat besar, terutama tentu saja menyebarkan ajaran Islam dan mendalaminya, sehingga menjadi penghayatan yang hidup. Pada masa itu hubungan antara ulama dengan masyarakat belum bersifat kepemimpinan vertikal struktural. Posisi kepemimpinan terhadap masyarakat tidak dimainkan secara dominan oleh ulama, kepemimpinan yang dominan pada masa itu berada di tangan sultan atau Uleebalang.<sup>77</sup>

Ulama di tengah masyarakat muslim, mempunyai pengaruh spiritual yang besar. Hal ini, karena ia memang ahli menerangkan agama dan taat menjalankan perintah Allah Swt. dan RasulNya, menjaga dirinya dari kelakuan yang tercela dan sikap yang menurunkan kepribadian dirinya sebagai pembimbing masyarakat. Setiap raja yang memimpin kerajaan pasti didampingi oleh ulama sebagai Qadhi Malik al-Adil.<sup>78</sup> Pendamping sultan dalam urusan-urusan hukum Islam, maka di tingkat *sagoe* dan daerah uleebalang, ulama juga tetap mendampingi panglima *sagoe* dan uleebalang. Mereka mempunyai wewenang yang menurut bidang tertentu dalam pemerintahan negeri, “ulama sosok pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan keislaman, di mana pengetahuan tersebut ia ajarkan kepada murid-murid dan masyarakatnya, kemudian dia mendapat pengakuan sebagai ulama dari sebahagian anggota masyarakat”.<sup>79</sup>

Sejarah telah mencatat, bahwa yang paling gigih memerangi Belanda penjajah adalah para Ulama Aceh. Di antara mereka adalah: *Teungku Chik Ditiro*, *Teungku Chik Tanoh Abee*, *Teungku Chik Tanoh Mirah*, *Teungku Chik Aneuk Galong*, *Teungku Chik Samalanga* dan *Teungku Chik Matang*.<sup>80</sup> Dengan daya upaya mereka bersama para pejuang selama berpuluh tahun, sanggup

<sup>77</sup> Aslam Nur (ed), *Biografi*, hlm. 3

<sup>78</sup> Amiruddin, *Ulama Dayah*, hlm. 9

<sup>79</sup> Aslam Nur (ed), *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX*, Jilid I, Cet. 2 (Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh Bekerjasama Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm. 2

<sup>80</sup> Darwis Sulaiman, wawancara di Banda Aceh, tanggal 12 Februari 2016.

menghadapi angkatan perang Belanda. Dengan korban dari kedua belah pihak yang tidak sedikit jumlahnya maka secara frontal perang mengendor di tahun 1904. Akan tetapi secara gerilya kelompok dan penyerangan perorangan secara sporadik berjalan hingga datangnya Jepang ke daratan Aceh.<sup>81</sup>

Ulama, sebagaimana fungsinya yang esensi sebagai pembina agama bagi masyarakat. Di lain pihak, ulama adalah masyarakat biasa, hanya karena rasa tanggung jawabnya kepada agama, ia memberi tuntunan kepada umat, untuk berbuat baik, mengajak yang ma'ruf (baik) dan mencegah yang mungkar (tidak baik). Secara tanggung jawab, para ulama tidak dapat berdiri sendiri dari keadaan masyarakat di sekitarnya. Peranan ulama tidak berhenti sampai di sana saja, terjadinya berbagai kemelut sosial dan politik di daerah Aceh hingga saat ini, para ulama tidak pernah tinggal diam. Mereka berperan sebagai penasehat, penetralisir, pengambil keputusan, pemimpin atau tetap bergerak di lembaga-lembaga pendidikan tradisional maupun modern yang diharapkan dapat melahirkan generasi penerus yang bertaqwa, yang selalu beramal makruf dan bernahi mungkar.<sup>82</sup>

Pengaruh pembaharuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, seperti H.O.S. Cokroaminoto, K.H.Ahmad Dahlan, K.H. Zamzam, A. Hassan, Syeikh Ahmad Surkarti (semuanya di Jawa), Abdullah Ahmad, dan Abdul Karim Amrullah (keduanya di Sumatera Barat), Syeikh Abdul Hamid, *Teungku* Muhammad Hasbi As-Shiddiqy, *Teungku* Muhammad Daud Beureueh (ketiganya di Aceh), merupakan tokoh-tokoh pembaharuan di Indonesia. Ide pembaharuan yang ingin mereka salurkan melalui organisasi atau perserikatan. Demikianlah, Syarekat Islam, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad (semua di Jawa), Sumatera Thawalib di Sumatera Barat dan PUSA di Aceh, merupakan wadah penampungan dan penyebaran pembaharuan pemikiran Islam di Aceh. Di pusat-pusat pendidikan Islam modern itu, "para putera-puteri Aceh bukan

---

<sup>81</sup> Paul Van H. Veer, *De Atjeh Oorlog*, Terj. Abubakar, hlm. 367. Ia menyebutkan Perang Belanda di Aceh tidaklah berakhir pada tahun 1913 atau 1914. Dari tahun 1914 ke tahun 1942 terbentang seutas benang merah, sederet jejak-jejak pembunuhan dan pemukulan sampai mati dari perlawanan di bawah sampai ke atas tanah, sejak tahun 1933 kembali timbul perlawanan setempat yang cukup meluas. Puluhan pembunuhan-pembunuhan Aceh, yaitu pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh orang Aceh terhadap *kaphe* (kafir) yang terjadi antara tahun-tahun tersebut, dikenal secara meluas di seluruh Hindia Belanda.

<sup>82</sup> Aslam Nur, *Biografi*, Jilid I, hlm. 4

saja berkenalan dengan nilai-nilai baru, melainkan juga memperoleh tempaan melalui program kurikuler dan ekstra kurikuler yang ditawarkan, kesemua itu dalam rangkian membentuk visi dan cita-cita dalam pendidikan Islam”.<sup>83</sup>

Sarekat Islam dan Muhammadiyah organisasi modern Islam yang amat besar pengaruhnya di Indonesia dalam memajukan rakyat. Sarekat Islam, di samping mempunyai kegiatan di bidang pendidikan dan agama, juga ia lebih dikenal sebagai organisasi pergerakan politik yang berdasarkan Islam. Bahkan, dapat dikatakan sebagai perintis pergerakan rakyat di Indonesia. Memang benar, sebelumnya sudah ada Budi Utomo, akan tetapi keanggotaannya terbatas pada ambatenaar-ambatenaar pemerintah saja, sedang Sarekat Islam mempunyai keanggotaan yang meluas seluruh Indonesia dan dari semua tingkatan.<sup>84</sup>

Muhammadiyah adalah gerakan agama bukan gerakan politik, hal ini ditegaskan dalam rumusan kepribadian Muhammadiyah, yaitu: *Pertama*, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, bukan dan tidak akan menjadi partai politik, geraknya di bidang kemasyarakatan. Maksud gerak adalah dakwah Islamiyah, amar makruf dan nahi mungkar di segala bidang. *Kedua*, sifat gerakannya adalah *Tajdidiyah* (pembaharuan), *Islahiyah* (pembangunan) dan *Tabsyiriyah* (bimbingan dan dorongan) yang semunya itu dijalankan dengan musyawarah atas dasar taqwa serta mengindahkan segala peraturan dan perundang-undangan negara yang sah.<sup>85</sup>

Aktifitas kegiatan Muhammadiyah tertumpu pada tiga sektor, yaitu pendidikan, dakwah dan sosial. Di samping itu dalam kegiatan di bidang keagamaan, terutama dalam mengambil salah satu hukum menggunakan *ijtihad* dan memberantas *taqlid*. Dalam hal ini, peran majelis tarjih dalam memberikan bimbingan amal dan meneliti dalam perjalanan amal, untuk menetapkan hukum sesuatu perbuatan yang berdasarkan Alquran dan hadis, ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan dari pendapat-pendapat ulama. Kemudian majelis tarjih menetapkan hukum perbuatan itu dengan hukum yang menurut pendapat mereka lebih kuat yang sesuai dengan Alquran

<sup>83</sup> Sulaiman, *Sejarah*, hlm. 42

<sup>84</sup> Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1977), hlm.187

<sup>85</sup> A. Manaf Meuraxa, *Pelajaran Kemuhammadiyah*, (Blang Pidie: MPD Tingkat II Aceh Selatan, 1976), hlm. 4

dan hadits.<sup>86</sup> Bentuk kajian, penetapan hukum dan aktifitas keagamaan dan pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah Aceh, memberi warna dan kemajuan pendidikan Islam masyarakat, dapat dilihat pada aktifitas kajian pembaharuan keagamaan yang dilakukan oleh majelis tarjih dan berkembang lembaga-lembaga pendidikan di berbagai daerah di Aceh dengan sistem yang *modern*.

Perubahan yang dilakukan oleh Sarekat Islam dan Muhammadiyah demikian menonjol, hal ini telah tercatat dalam sejarah pergerakan dan kemajuan di Aceh. Karya dan jasanya telah dirasakan oleh masyarakat umum, ruh jihad dan ijtihadnya telah menggerakkan hati umat, untuk mencapai kemajuan. Yang lebih utama lagi ialah, faham dan cita organisasi-organisasi ini telah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat Aceh untuk suatu perubahan dan kemajuan, terutama di bidang agama dan pendidikan, untuk mewujudkan masyarakat Islam dalam sebuah Daulah Islamiyah.<sup>87</sup>

Kemajuan pemikiran di Aceh, dan merupakan suatu kegiatan pembaharuan di bidang agama. Ada sejumlah ulama yang masyhur nama dan karyanya sehingga menjadi bahan studi imiah yang tidak habis-habisnya di Aceh. Dengan banyak ulama yang cukup populer pemikirannya, membangun lembaga-lembaga pendidikan dan mendirikan organisasi keagamaan untuk menghasilkan generasi yang mempunyai jiwa dan semangat untuk memajukan pendidikan di masa depan, maka dapat dipastikan, bahwa Aceh menjadi pusat studi Islam. Karenanya faktor agama (Islam) merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pendidikan Islam dalam masyarakat Aceh.

## **F. PERPOLITIKAN DALAM MASYARAKAT ACEH**

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, di nusantara telah terbentuk institusi politik Islam yang cukup tangguh. Pada masa ini umat Islam mempunyai kemerdekaan dalam menentukan kebijakan politik. Kemerdekaan politik ini mulai terganggu ketika intervensi bangsa Eropa terhadap institusi-institusi Islam setempat. Mudah-mudahan umat Islam diintervensi adalah karena terjadi persaingan politis dan ekonomis di antara kerajaan-kerajaan Islam. Selain

---

<sup>86</sup> A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia dan Modern Islamic Thought In Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Nida, 1969), hlm. 16

<sup>87</sup> Hasanuddin, *Teungku Muhammad*, hlm. 60

itu, kolonial juga memanfaatkan struktur masyarakat lokal yang tidak sama dalam pemahaman agama, antara kaum santri dan kaum abangan. Jatuhnya *institusi politik* Islam ke tangan pemerintah Belanda sangat mempengaruhi kondisi sosial umat Islam, mereka hidup dalam bayang-bayang politik pemerintah kolonial, “pemerintah Belanda akan mengambil langkah-langkah secepat mungkin untuk menata hubungannya dengan Aceh, sedemikian rupa sehingga Aceh, tanpa kehilangan sedikitpun kemerdekaannya, dapat memberikan kepada awak kapal dan para pedagang jaminan keamanan yang pasti, yang dapat diwujudkan”.<sup>88</sup>

Abad ke-19 merupakan masa kurang baik bagi perjuangan politik Islam di seluruh dunia, pasalnya beberapa negara yang telah dikuasai oleh Islam saat itu melemah. Negara-negara Islam ditandai dengan dikuasainya negara Mesir oleh *imperialisme* Perancis dan Inggris. Berdasarkan kondisi ini Belanda menyerang Aceh. Dengan kekuatan yang sederhana, tidak mudah untuk mampu mengimbangi dan menghadapi kekuatan senjata *modern* Belanda.<sup>89</sup> Perjanjian-perjanjian yang dibuat *Anderson* tahun 1823 M. dengan kerajaan-kerajaan Pantai Timur juga menemui nasib yang sama. Pejabat-pejabat lokal Inggris bertindak atas dasar anggapan bahwa perjanjian Inggris-Belanda tahun 1824 M. membatalkan semua perjanjian itu, meski mereka tidak pernah melakukan apapun untuk memberi tahu para penguasa Melayu mengenai hal itu, “aru pada masa-masa kemudian perjanjian-perjanjian Sumatera sebelum tahun 1824 M. dihidupkan kembali di *Straits Settlements* sebagai senjata untuk melawan Belanda yang terus mengembangkan sayap kekuasaannya.”<sup>90</sup>

Situasi tersebut, “selaras dengan rencana besar Portugis untuk menaklukkan Aceh yang disebabkan oleh faktor *geopolitik komersial* perdagangan dan agama”.<sup>91</sup> Di Aceh, Belanda menghadapi kenyataan bahwa mayoritas penduduk yang

<sup>88</sup> Reid, *Asal Mula*, hlm. 13

<sup>89</sup> Menurut catatan sejarah, perjuangan Aceh dalam tahun 925 H/1520 M yaitu pada masa pemerintahan *Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah*, Aceh telah mulai menentang penjajah Portugis yang terus menerus serta berlarut-larut sampai pada masa pemerintahan Iskandar Muda tahun 1045 H/1636 M selama 116 tahun lamanya Lihat: M. Junus Djamil, *Gerakan kebangkitan Aceh Kumpulan Karya Sejarah* (Bandung: Bina Biladi Press, 2009), hlm. 394

<sup>90</sup> Reid, *Asal Mula*, hm. 14

<sup>91</sup> Jorge Santos Alves, *Aceh Dari Kacamata Portugis pandangan sebagai Kota pelabuhan Asia Tenggara, dalam Meletakkan Masa lalu Aceh*, (Jakarta: Pustaka Larasan, 2011), hlm. 96



dijajah adalah beragama Islam dan memiliki semangat *fanatisme* Islam. Para ulama mempergunakan pusat-pusat pengajian atau dayah sebagai tempat untuk memperkokoh pengikut-pengikut dan untuk menghimpun kekuatan menghadapi Belanda, kecuali peringatan pentingnya mengangkat senjata, *Tgk. Chik Di Tiro* menginsafkan dengan lisan maupun tulisan untuk berperang. Bahkan kepada pihak Belanda disampaikan *ideologi* perjuangan yang bernafaskan Islam.<sup>92</sup>

Setelah berlangsungnya peperangan selama 18 hari, pada tanggal 23 April 1873, seluruh kekuatan Belanda dapat disapu bersih dari daratan Aceh. Tewasnya *Jenderal Kohler* yang disambar peluru Aceh membuat semangat serdadu Belanda menjadi surut. Sedangkan di pihak Aceh semangat juang semakin menyala terlebih saat menyaksikan terbakarnya *Masjid Raya Baiturrahman* akibat ulah Belanda, hal ini menimbulkan keyakinan pada rakyat Aceh bahwa Belanda bukan hanya datang sebagai *imperialis* politik yang ingin menghancurkan kemerdekaan Aceh, tapi juga sebagai *imperialis* agama yang akan menghancurkan Islam pada rakyat Aceh. Angkatan perang Belanda yang gagal menaklukkan Aceh kembali ke Batavia untuk melapor kekalahan yang dialami kepada Gubernur Jenderal mereka. Kekalahan serdadu Belanda tersebut antara lain karena tidak mau merenung nasehat seorang diplomat Inggris, *Raffles* agar Belanda tidak mengganggu Aceh, karena Aceh merupakan "*Umpung Geumeutoe*".<sup>93</sup> Belanda belum pernah gagal menyerang daerah lain di Indonesia dengan kekuatan yang sama seperti pada saat menyerang Aceh, dan ternyata Belanda mengalami kekalahan pahit seperti yang dialami pada tahun 1873, dalam satu instruksi yang sangat rahasia di bulan Maret 1882 M., Gubernur Jenderal memerintahkan Gubernur Aceh untuk memberi hadiah orang-orang Aceh yang sanggup menyerahkan pemimpin-pemimpin pemuka Aceh.<sup>94</sup>

Menyingkapi peperangan yang didasar pada ruh agama, Belanda menghadapi dilema yang sangat besar. Selain tidak pernah menang melawan rakyat Aceh ditambah banyaknya panglima serta prajurit yang mati dalam medan pertempuran *gerilya* membuat Belanda frustrasi. Menghadapi problem dalam melawan perang yang dipimpin kaum ulama, menurut *Snouck Hurgronje* dalam buku Misri A. Muchsin menyatakan bahwa ia selaku penasehat yang

<sup>92</sup> Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah*, Cet. Pertama, (Jakarta: New Aqua Press, 1987), hlm. 151

<sup>93</sup> Said, *Atjeh Sepanjang*, hlm. 378

<sup>94</sup> Alfian, *Perang*, hlm. 152

dijuluki benda dengan *arsitek* keberhasilan politik Islam yang paling *legendaris*. Selanjutnya menyatakan tidak ada satupun yang dapat diperbuat untuk meredakan perlawanan yang *fanatik* dari kaum ulama, terutama yang disebut Islam sebagai kekuatan politik. Dengan demikian, menurut *Snouck Hurgronje* Islam politik harus ditumpas sampai habis dan pemerintahan Belanda harus mengandalkan *Uleebalang* yang dapat dilihat sebagai para pemimpin adat dan *sekuler*. Atas nasehat inilah penguasa *kolonial* Belanda kemudian mencari-cari kaum *Uleebalang* yang bersedia bekerjasama, dan Belanda menganggap mereka setara dengan Bupati di kepulauan Jawa atau dengan penghulu di Minangkabau.<sup>95</sup>

Kedatangan *Snouck Hurgronje*, orang yang sangat ahli dalam Islam pada tahun 1889, membuat pemerintah Hindia Belanda mempunyai kebijakan yang jelas terhadap Islam. *Snouck* sendiri membuat sebuah teori yang disebut dengan “Islam Politik”.<sup>96</sup> Islam politik ini, bermaksud untuk melahirkan suatu negeri Belanda yang terdiri dari dua wilayah yang berbeda secara *geografis*, tetapi secara *spiritual* berhubungan. Yang satu berada di Barat laut Eropa dan yang satu lagi berada di Asia Tenggara. Namun dalam pandangan *Hurgronje*, Islam yang dipeluk mayoritas masyarakat Hindia Belanda, begitu *rilid* (kaku), sehingga kurang mampu menghadapi era baru. Karenanya, hanya dengan organisasi pendidikan universal berskala besar dan basis keagamaan yang netral pemerintah saja yang akan dapat membebaskan muslim dari agamanya. *Snouck Hurgronje* berada di Aceh, berhasil memperoleh kepercayaan orang-orang Aceh terkemuka, para ulama dan yang lain-lain lagi. Sambil lalu dia belajar bahasa Aceh, seperti dia telah mempelajari secara mendasar bahasa

<sup>95</sup> Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm. 82

<sup>96</sup> Teori Islam Politik *Snuock Hurgronje*, sebagai berikut: Dia membedakan Islam dalam tiga katagori, yaitu: (1) Bidang agama Murni atau ibadah, (2) Bidang Sosial kemasyarakatan, dan (3) Bidang politik. Dimana masing-masing bidang menuntut alternatif pemecahan yang berbeda. Alternatif pemecahan yang pertama, pemerintah kolonial harus memberikan kebebasan kepada umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan Hindia Belanda. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, pemerintah perlu memanfaatkan adat kebiasaan yang berlaku dengan cara menggerakkan rakyat agar mereka mendekati Belanda, bahkan pemerintah harus membantu rakyat untuk menempuh jalan tersebut. Sebaliknya, dalam bidang politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Islamisme. Lihat: Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor Voor Inlandsche zaken*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm.12

Melayu, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda selama berdiam satu setengah tahun di Jawa.<sup>97</sup> Kemampuna *Snouck* di bidang agama Islam dan berbahasa, telah berhasil membuat pendekatan dengan pemuka-pemuka Aceh, hal ini ditandai dengan sebahagian *uleebalang* berkompromi dengan pihak Belanda. Keterlanjutan *uleebalang* berkompromi dengan Belanda inilah kemudian menjadi profil dan mirip kehidupan mereka sehingga dengan demikian *otomatis* menjadi musuh kaum ulama yang menantang Belanda tanpa berkompromi. Sikap tersebut telah melahirkan kompromis *elit* sosial dan hal inilah yang menyebabkan terjadi perang *Cumbok* sebagai *revolusi* sosial yang menentang *elit* bangsawan *birokrat* oleh ulama dikemudian hari. Isu perpecahan antara *uleebalang* dengan ulama ternyata telah dibaca oleh pihak ulama pada saat itu, oleh karena itu ulama mulai menyeru masyarakat untuk bersatu dengan mendirikan organisasi.

## 1. Syarikat Islam (SI)

Partai Syarikat Islam (SI) adalah organisasi politik berdasarkan Islam, dengan maksud utama mempertinggi kehidupan ekonomi rakyat, dan tidak sebagai partai politik. Pembentukan SI ini pertama sekali didirikan oleh Haji Samanhudi di Solo, tahun 1911 M. Landasan didirikan mengingat kondisi bangsa yang semakin terasa penindasan terhadap rakyat yang dilakukan oleh penjajah Belanda, terutama dalam lapangan politik.<sup>98</sup> Pada saat didirikan yang menjadi ketua adalah Haji Samanhudi, dan sebagai komisaris adalah HOS. Tjokroaminoto, dengan anggota sekitar lima puluh orang, untuk maksud akan berikhtiar supaya anggota-anggota timbul kerukunan dan tolong menolong satu sama lainnya antara sekalian kaum muslimin dan dengan segala daya upaya yang halal dan tidak mengalahi *wet-wet* negeri (Surakarta) dan *wet-wet Gouvernement*.<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Paul Van T Veer, Perang Aceh, *Kisah Kegagalan Snouck Hurgronje*, Cet. Pertama, (Jakarta: Grafiti Press, 1985), hlm. 152

<sup>98</sup> Kementrien Penerangan Republik Indonesia, *Kepartaian di Indonesia*, (Jakarta, 1952), hlm. 24

<sup>99</sup> Sekalipun SI pada dasarnya bukan berdasarkan politik (karena tidak diperbolehkan pemerintahan Belanda), namun ia terus berkembang ke seluruh Indonesia, karena Islam sebagai lambang persatuan dan dengan kemauan memperbaiki derajat rakyat. Sarikat Islam satu-satunya organisasi pergerakan rakyat yang memenuhi, menampung dan menyalurkan kehendak rakyat Indonesia. Syarikat Islam organisasi untuk semua tingkatan dari rakyat jelata sampai ke cendikiawan sekalipun. Setelah beberapa

Dalam pergerakannya, sebenarnya SI mengandung tujuan politik, hanya dalam Anggaran Dasar sekali-kali tidak boleh menyebutkan sifat politik. Pemerintah Belanda memperhatikan gerak yang dimainkan oleh SI, melihat pergerakan yang semakin cepat berkembang ke seluruh nusantara, dengan jumlah anggota yang semakin banyak, Belanda merasa khawatir terhadap gerakan SI ini, oleh karena itu SI dibatasi tiap daerah berdiri sendiri-sendiri dengan memakai Anggaran Dasar sendiri. Hal ini tidak lain dari pelaksanaan politik *divide et impera* pemerintah kolonial Belanda, yang pada saat itu dipegang oleh G.G Idenburg.<sup>100</sup>

Syarikat Islam memasuki Daerah Aceh pada tahun 1914 M. yang diketuai oleh Abd. Manaf dan Marah Husein sebagai wakil ketua. Dalam waktu yang relatif tidak lama perkembangan SI ini di Aceh semakin pesat, sehingga anggota-anggotanya bukan saja di daratan Aceh, akan tetapi sampai ke pulau-pulau kecil, seperti pulau Aceh. Syarikat Islam di Aceh disambut oleh Ulama dan *Uleebalang* yang berpikiran maju. Diantara Ulama-ulama yang *progresif* yang ikut berdiri di depan dalam memimpin SI adalah Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga. Ulama Pesantren yang menyatakan kebaikan SI (karena ia berdasarkan Islam), Teungku Meunasah Kumbang Aceh Utara, Teungku Hasballah Indrapuri, Teungku Syekh Ibrahim dan Teungku Abdul Wahab Seulimeum di Aceh Besar.<sup>101</sup>

Di Aceh, orang memahami bahwa SI adalah sebuah organisasi Islam, dalam rangka melaksanakan kebijakan baru yang telah ditetapkan untuk memajukan Islam. Pada saat kemajuan SI di Aceh, anggotanya tidak hanya laki-laki, akan tetapi perempuan turut pula menjadi anggota, demikian pula hampir semua tingkat dari rakyat biasa sampai ke Ulama dan *Uleebalang*. Bagi masyarakat Aceh, asal suatu perkumpulan itu sudah bersesuaian dengan ajaran Islam, maka tidak ada halangan lagi untuk memasukinya.

---

tahun organisasi ini berdiri, pada tahun 1915, jumlah anggota sudah mencapai lebih kurang 3 (tiga) juta orang. Lihat: Penerangan, *Kepartaian*, hlm. 26

<sup>100</sup> L.M. Sitorus, *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 1947), hlm. 15

<sup>101</sup> A. Hasjmy, *Perang Gerilya dan Pergerakan politik di Aceh Untuk Merebut Kemerdekaan Kembali* (Banda Aceh: MUI Prop. NAD, 1980), hlm. 30

## 2. Serikat Pemuda Islam

Tepat pada tahun 1935 M. A. Hasjmy, bermaksud mendirikan organisasi pemuda di Aceh yang akhirnya berubah nama menjadi pergerakan pemuda Islam Indonesia (PERAMINDO), pembentukan organisasi Serikat Pemuda Islam Aceh (SPIA) didirikan pada sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh sekitar 50 orang pemuda, baik yang baru pulang dari Sumatera Barat maupun yang memang berada di Aceh sendiri. Pertemuan besar tersebut dilaksanakan di Madrasah Diniyah Lamjampok Montasiek. Akhirnya pada pertemuan tersebut disepakati berdirinya organisasi SPIA yang lengkap dengan pengurusnya.<sup>102</sup>

## 3. Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA)

Organisasi dan pergerakan Islam di Aceh, baik yang berasal dari luar maupun yang tumbuh dari dalam daerah, sudah berjalan, namun perwujudan tujuan pergerakan Islam belum berhasil dengan baik. Keadaan masyarakat dan ulama-ulama pro dan kontra terhadap pergerakan Islam, sejalan dengan kondisi ini lahirlah Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Bilamana dilihat dari perjalanan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) sejak lahirnya di tahun 1939 M. sampai akhir kegiatannya di akhir tahun 1953 M. hanya organisasi ini berdiri sekitar 14 (empat belas) tahun. Pergerakan organisasi yang didirikan oleh ulama Aceh (PUSA) pada tahun 1939 M. ini, muncul dari pertemuan yang terorganisir secara hati-hati pada bulan Mei 1938 M. Oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap dan Teungku Ismail Yacob, bertujuan untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syiar Islam yang suci terutama di tanah Aceh yang pernah digelar Serambi Makkah pada keemasan Aceh. Perhatiannya PUSA yang lebih besar kepada masalah-masalah politik, perkembangan dalam dan luar negeri, pengaruh perang dunia II, perang Pasifik serta melihat situasi dan kondisi dalam negeri terutama dalam daerah Aceh. PUSA hidup dimasa penjajahan Belanda selama tiga tahun, kemudian tahun peralihan

---

<sup>102</sup> Pengurus SPIA terdiri dari: Ketua Umum: Abubakar (Guru Perguruan Islam Seulumum), Sekretaris: Thamrin Amin (Jadam Montasiek), Bendahara: A. Hasjmy (Guru Perguruan Islam Seulumum), Komisaris: Abdul Jalil, Muhammad Ali, Suleiman Ahmad, Yahya Hasyimi, dan M. Arsyad. Lihat: A. Hasjmy, *Semangat Merdeka A. Hasjmy 70 Tahun Menempuh Jalan Pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 77

ke masa penjajahan Jepang, Dengan demikian perhatian pengurus PUSA lebih banyak kepada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi Aceh, sesuai dengan kondisi peralihan penjajahan, di samping persoalan kebijakan masalah politik juga memikirkan persoalan sekolah, dan kesejahteraan rakyat. PUSA juga bertujuan berusaha sekuat tenaga untuk mempersatukan faham ulama-ulama Aceh yang dulunya pernah berbeda pendapat tentang hukum-hukum. Selain itu PUSA juga bertujuan memperbaiki dan mempersatukan *leerplan* sekolah-sekolah agama di seluruh tanah Aceh. Pada saat didirikan organisasi ini memiliki pengurus yang lengkap.<sup>103</sup>

Kehadiran Belanda dan Jepang di Indonesia tidak hanya mengeksploitasi kekayaan alam, tetapi juga menekan politik dan kehadiran beragama rakyat. Secara politis, pemerintah kolonial Belanda dan Jepang melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan Islam yang notabene dilesenggarakan oleh umat Islam, segala aktifitas umat Islam yang berkaitan dengan kehidupan beragama ditekan. Belanda terus menerapkan langkah-langkah yang membatasi gerak pengamalan Agama Islam. Kontrol tersebut dimotivasi oleh pertimbangan politis bahwa umat Islam di nusantara adalah komunitas yang mayoritas, Jadi dengan adanya diskriminasi dalam segala lini kehidupan akibat kolonialisme dan feodalisme tersebut terdapat banyak tokoh pemikir dan pejuang rakyat baik pribadi maupun lewat organisasi yang bangkit dan sadar menolak terhadap perlakuan penjajahan tersebut. Pemuda PUSA mengadakan revolusi sosial di pantai timur dari selatan menuju utara dan sepanjang perjalanan membersihkan segala unsur yang dianggap mewakili kekuasaan feodalisme. Aksi itu muncul dari pada pemuda, tetapi aktor utama adalah PUSA (1939) yang diketuai oleh

---

<sup>103</sup> Pengurus PUSA pertama sekali dibentuk: Ketua I: Teungku Muhammad Daud Beureueh, Ketua II: Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap, Setia Usaha I: Teungku M. Nur El-Ibrahimi, Setia Usaha II: Teungku Ismail Yakub, Bendahara: Teungku M. Amin, Komisaris: Teungku Abdul Wahab Keusalou (Seulimum), Teungku Syekh Abdul Hamid (Samalanga), Teungku Usman (Lampoh Awe), Teungku Yahya Baden (Peudada), Teungku Mahmud (Simpang Ulim), Teungku Ahmad Damahuri (Takengon), Teungku M. Daud (Peudada), dan Teungku Usman aziz (Lhoksukon). Lihat: A. Hasjmy, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamaddun Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 86-87. Untuk mencapai tujuan, PUSA yang terdiri dari ulama-ulama Aceh memutuskan tiga ulama yang *representatif* untuk bekerja sama dengan lima kelompok Jepang yang dinamakan *Fujiwarakikan* di Penang, Malaya yang bertujuan mengusir Belanda. Ketiga ulama tersebut adalah Tgk. Abdul Hamid samalanga, H. Ahmad Batee, dan Tgk. Al-Samad Seuneubok Rambong. Melalui kerjasama ini, rakyat Aceh berharap dapat mengusir Belanda dari daerah Aceh. Lihat: Amiruddin, *Ulama Dayah*, hlm. 32

Teungku Muhammad Daud Beureueh. Organisasi ini didirikan untuk menentang pendudukan Belanda.<sup>104</sup>

Belanda bukan sekedar usaha untuk mengukuhkan kedudukan penjajahan di Aceh, akan tetapi juga ingin mengelabui pendapat *Internasional* dan memutar-balikan sejarah dengan cara bersikap sebagai pahlawan kemanusiaan. Sikap Belanda yang demikian, membuat orang Aceh, terutama ulamanya, meskipun segala bentuk kegiatan mereka telah terikat dengan *Korte Verklaring*,<sup>105</sup> akan tetapi Aceh tidak ada kompromi dengan penjajah. Sekalipun pemerintahan di Aceh berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh penjajah. Para ulama mengalihkan siasat perjuangan dari bentuk perlawanan fisik kepada bentuk pembinaan kader perjuangan melalui lembaga-lembaga pendidikan Islam. Pembinaan ini lahirlah kader-kader yang akan menyusun kekuatan kembali melawan Belanda. Pada ulama menyadari kekuatan yang tersimpan dalam pendidikan sangat militan, “karena pendidikan itu merupakan wahana yang paling ampuh guna menggalang persatuan melalui ajaran Islam, di samping itu juga paling efektif bagi pembentukan manusia yang dicita-citakan mereka, sebagai pengganti pahlawan yang telah syahid di medan perang”.<sup>106</sup>

Dalam kurun waktu antara tahun 1939-1945, kekuatan politik dan pemerintahan di Aceh dipegang oleh para ulama. Kolonialis Belanda pada saat itu masih menguasai hampir seluruh kepulauan Nusantara Indonesia. Pada tahun 1945, Sukarno datang ke Aceh atas nama Bangsa Indonesia.<sup>107</sup> yang disambut oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, selaku pemegang kekuasaan politik pemerintah di Aceh. Dengan tangisan air mata, Sukarno meminta kepada rakyat Aceh untuk dapat membantu Indonesia menggapai kemerdekaannya. Pimpinan Aceh pada saat itu menyetujui untuk membantu Indonesia dengan sebuah syarat yang diberikan. Syarat tersebut adalah Sukarno berjanji bahwa Indonesia akan dijadikan sebuah Negara Islam apabila mencapai

<sup>104</sup> Kawilarang, *Aceh*, hlm. 148

<sup>105</sup> *Korte Verklaring* (perjanjian pendek) yang isi ringkasnya adalah daerah Aceh harus tunduk di bawah kekuasaan kerajaan Belanda. Lihat: Paul Van't Veer, *De Atjeh Oorlog*, Terj. Aboebakar, (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1977), hlm. 180

<sup>106</sup> Departemen Agama R.I., *Pengembangan Pendidikan Agama* (Jakarta: Dep. Agama, 2004), hlm. 4

<sup>107</sup> M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh Dalam Pergolakan Aceh* (Jakarta: Media Dakwah, t.t), hlm. 77

kemerdekaannya. Rakyat Aceh pada saat itu dengan penuh semangat berperang membantu Indonesia, serta menghadiahkan dua unit pesawat terbang kepada Indonesia, yaitu *Seulawah 001* dan *Seulawah 002*. Pesawat ini merupakan pesawat pertama Republik Indonesia yang merupakan hadiah dari rakyat Aceh. Namun setelah itu, Indonesia mengingkari janjinya, sehingga pada tanggal 21 September 1953, meletuslah pemberontakan Aceh tahap pertama terhadap Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan Aceh sebagai sebuah negara.<sup>108</sup>

Sebagai akibat proses politik, bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di nusantara ini, Aceh termasuk daerah yang terlambat menerima sistem pendidikan dari pemerintah Hindia Belanda. Pendidikan ini diperkenalkan pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Aceh, baru pada permulaan abad ke-20, yang pada mulanya masih terbatas kepada anak-anak golongan bangsawan (*uleebalang*) saja. Pada saat itu meskipun usaha-usaha ke arah perdamaian sudah mulai dirintis, dengan berhasil mengajak Sultan Aceh untuk berdamai, tetapi peperangan antara Aceh dengan penjajahan Belanda tetap berlangsung. Oleh karena itu pada masa yang belum aman itu, suatu sistem pendidikan yang teratur dan terorganisasi secara baik belum mungkin dapat dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Usaha kearah pengembangan dan *intensifikasi* sistem pendidikan ini, baru dapat dimulai setelah melemahnya perlawanan rakyat Aceh terhadap penjajah Belanda, yaitu pada tahun dua puluhan. Sebagian generasi muda Aceh (lulusan madrasah) menjadi guru di madrasah-madrasah, seperti A. Hasjmy dan Sayid Abubakar mengajar di Perguruan Islam Seulimeum dan M. Nur El Ibrahimy mengajar di Madni (Madrasah Nahdatul Islam Transformasi dari Madrasah Ahlussunnah wal Jama'ah). Sebagian lainnya membangun dan mengorganisasi madrasah baru baik di gampong ataupun di tempat lain sehingga jumlah madrasah lebih dari 100 buah di Aceh pada akhir zaman *kolonial*.<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 1

<sup>109</sup> Sulaiman, *Sejarah*, hlm. 42. Ada dua faktor utama yang mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk memasukkan sistem pendidikan mereka ke daerah Aceh. *Pertama*, dapat dilihat dalam hubungan dengan perubahan sistem politik kolonial Belanda abad ke-20, yaitu sejalan dengan visi politik etika yang mereka jalankan, yang salah satu tujuan adalah untuk mendapatkan pegawai-pegawai administrasi yang terampil menurut ukuran mereka. Pegawai-pegawai yang berasal dari kalangan pribumi ini diusahakan agar dapat dijadikan sebagai aparat-aparat yang efektif dalam melancarkan sistem ekonomi dan struktur birokrasi mereka. Maka sehubungan dengan kepentingan ini pemerintah kolonial Belanda menginginkan adanya pengembangan sistem pendidikan



Pasca Proklamasi, Belanda melancarkan 2 (dua) *Agresi Militer* terhadap Republik Indonesia,

*Agresi Militer* I dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947, diiringi dengan pembentukan negara *boneka* oleh *Van Mook* di wilayah Indonesia Timur. *Agresi Militer* Belanda II terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, diiringi pembentukan negara *boneka* oleh *Van Mook* dikawasan pulau Jawa dan Sumatera sebagai basis terakhir Republik Indonesia. Selama *revolusi* fisik, Aceh merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat diduduki oleh Belanda sehingga Aceh disebut sebagai Daerah Modal bagi perjuangan bangsa Indonesia.<sup>110</sup>

Dalam era mempertahankan kemerdekaan ini peran para ulama sangat menentukan karena melalui fatwa dan bimbingan pada ulama ini rakyat rela berjuang dan berkorban mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Lebih lanjut *Paul Van T. Veer*,<sup>111</sup> juga mengungkapkan *Agresi Militer* I dan II tidak dapat menembus Aceh, sebagaimana yang diutarakan, "...Sesudah tahun 1945 pemerintah Belanda tidak kembali lagi ke Aceh. Pada ketika aksi-aksi militer tahun 1946 dan tahun 1947, ketika bagian-bagian besar sumatera diduduki, tidak dilakukan upaya untuk menembus sampai ke Aceh".

Bertitik tolak dari rangkaian peristiwa sejarah tersebut, sampai terjadinya *Agresi* Belanda I dan II, hal ini menjadi landasan hubungan Aceh dan pemerintahan Republik Indonesia. Rakyat Aceh bertekad akan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan harta bendanya untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan Indonesia sehingga rencana Belanda hendak menduduki lagi daerah Aceh tidak dapat terlaksana.<sup>112</sup> Daratan Aceh adalah satu-satunya daerah di Indonesia yang masih utuh, tidak diduduki oleh Belanda. Karena itu Aceh disebut sebagai "Daerah Modal" yang berarti daerah untuk meneruskan cita perjuangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden

---

mereka kepada kalangan penduduk bumi putra, yang pada mulanya diusahakan secara terbatas. *Kedua*, munculnya suatu kelompok baru dalam kalangan pemerintah kolonial Belanda, yang dipelopori oleh seorang orientalis terkemuka yaitu *C. Snouck Hurgronje* yang terkenal dengan konsepsinya yang disebut *politik asosiasi*. *Hurgronje*, adalah sarjana dan negarawan agung. Lihat: T. Veer, *Perang*, hlm. 151

<sup>110</sup> T. Veer, *Perang Aceh*, hlm. 246

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 254

<sup>112</sup> Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka, Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 2000), hlm. 108

Republik Indonesia (Soekarno), pada tanggal 16 Juni 1948 dalam rapat di Blang Padang, Banda Aceh. Berikut pernyataan Soekarno:<sup>113</sup>

“...Rakyat Aceh dalam sejarah dikenal sebagai pejuang yang paling gigih menentang penjajahan Belanda. Berpuluh-puluh tahun rakyat Aceh menentang *kolonialisme* Belanda. Sekarang saatnya mengusir penjajahan Belanda dari bumi persada tercinta ini. Di mana-mana Belanda sudah mendirikan negara *boneka* untuk mengepung Republik Indonesia. Sudah waktunya sekarang pemuda-pemuda Aceh yang berdarah pahlawan siap melakukan perang *sabil* untuk mengusir kaum penjajah dari persada ibu pertiwi tercinta. Aceh adalah modal. Modal dalam meneruskan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan modal dalam perjuangan mengusir kaum penjajah dari halaman rumah kita...”.

Pada hari yang sama Soekarno menuju Sigli, tepatnya di lapangan Kota Asan Sigli, Soekarno juga mengatakan bahwa:<sup>114</sup> “... biar Republik Indonesia selebar payung, tetap harus berjuang terus dengan Aceh sebagai daerah modal. Dalam meneruskan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan meneruskan perjuangan kemerdekaan bangsa dan negara...”.

Rentang waktu *Agresi Militer II* Belanda, Belanda terus melakukan *manuver* politik adu domba, tepatnya 3 (tiga) bulan pasca pendudukan Yogyakarta sejumlah pihak mencoba menggunting dalam lipatan, untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia yang baru seumur jagung. Pada tanggal 17 Maret 1949, Wali Negara Sumatera Timur (Teungku Dr. Mansyur) berkirim surat kepada Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang intinya agar bersedia menghadiri Mukhtamar Sumatera yang diadakan di Medan pada tanggal 28 Maret 1949. Mukhtamar tersebut bertujuan membentuk Negara Sumatera Merdeka, yang terpisah dari Republik Indonesia. Khusus untuk Aceh diberi 3 (tiga) pilihan, yaitu: *Pertama*: Aceh dapat meninggalkan Republik Indonesia dan bergabung dengan Negara Sumatera Merdeka yang akan dibentuk. *Kedua*: Aceh berpeluang menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. *Ketiga*: Aceh tetap berada dalam pangkuan Republik Indonesia.<sup>115</sup>

---

<sup>113</sup> Jakobi, *Aceh*, hlm. 217-218

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 219

<sup>115</sup> Cakra Arbas, *Aceh dan MoU Helsinki, Di Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Jakarta: Sofmedia, 2015), hlm. 97

*Teungku* Muhammad Daud Beureueh, dengan tegas menjawab ajakan dari Tengku Dr. Mansyur. Pernyataan tegas *Teungku* Muhammad Daud Beureueh ini membuat semangat *Tengku* Dr. Mansyur untuk mendirikan Negara Sumatera Merdeka menjadi runtuh. Mukhtamar Sumatera pun menjadi tidak populer lagi dan sikap tegas *Teungku* Muhammad Daud Beureueh ini membuat Soekarno menjadi kagum. Karena keyakinannya untuk mewujudkan Negara Indonesia yang sesuai dengan janji Soekarno, maka *Teungku* Daud Beureueh dengan tegas menolak tawaran tersebut.<sup>116</sup> Dihak lain, Aksi Militer Belanda memperkuat pengaruh Daud Beureueh di daerah. Jatuhnya Medan ke tangan Belanda menyebabkan pemerintah pusat membentuk dua daerah militer di Sumatera Utara. Dalam kaitan ini, Pemerintah Pusat mengangkat Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo dengan pangkat Mayor Jenderal.<sup>117</sup> Dengan demikian telah mengindikasikan Aceh dan pemerintah Republik Indonesia memiliki hubungan yang harmonis, khusus di masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, “akan tetapi berbagai hubungan yang harmonis tersebut dapat berubah menjadi disharmonis, hal ini salah satunya disebabkan karena *inkonsistensinya* Pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan kebijakan untuk Aceh”.<sup>118</sup>

Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia memiliki corak yang cukup *intensif*, yang dipengaruhi oleh gerakan pembaharuan Islam di timur tengah.<sup>119</sup> Dalam konteks ini, Pemerintah melahirkan sejumlah kebijakan yang berimplikasi pada kultural dan politis. Kebijakan-kebijakan<sup>120</sup> dapat

<sup>116</sup> Adan, *Teungku Muhammad*, hlm. 81

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 29

<sup>118</sup> Arbas, *Aceh dan Mou Hesinki*, hlm. 100

<sup>119</sup> Orang-orang Minangkabau mempunyai peranan penting dalam gerakan pembaharuan Islam pertama di Indonesia. Pada tahun 1906 telah terbit surat kabar pertama berbahasa melayu, al-Imam (Pemimpin Agama) di Singapura. Koran ini menyajikan analisis Islam modern pertama yang benar-benar mendalam tentang persoalan agama, sosial dan ekonomi. Seorang muslim Minangkabau yang terlibat dalam al-Islam tersebut adalah Syaikh Thahir Jalaluddin (Muhammad Thahir bin Jalaluddin Al- Azhari, 1869-1957) yang pernah menetap di Makkah selama 12 tahun. Selanjutnya, disusul dengan jurnal modernis pertama, al-munir, didirikan pada awal 1911 di pantai barat Sumatera oleh H. Abdullah Ahmad (1878-1933) dan Haji Abdul Karim Amrullah (1879-1945). H. Abdullah Ahmad kemudian menerbitkan majalah al-Akhbar (Majalah Berita) pada tahun 1913 dan menjadi redaktur majalah al-Islam yang diterbitkan oleh Sarikat Islam pada tahun 1916. Lihat: M. Dawam Raharjo, *Islam dan Transformasi Budaya* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 255

<sup>120</sup> Di zaman penjajahan kebijakan-kebijakan pendidikan tentu disesuaikan/

dilihat dari dua sisi. *Pertama*, tradisi keagamaan yang berkembang di masyarakat Indonesia sebagai konsekwensi dari persentuhan dengan ide-ide pembaharuan Islam. *Kedua*, fenomena kebijakan pemerinrah kolonial dalam bidang pendidikan yang direspon oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah diawali dengan pembentukan Kementrian Agama yang memegang kewenangan utama dalam penyelenggaraan bidang agama. Kewenangan Kementrian Agama yang terkait dengan pendidikan Islam. Secara struktural adalah pendidikan Islam di Indonesia berada di bawah struktur Kementerian Agama, yang untuk ke depan pemerintah sangat perlu memberdayakan Kementrian Agama sebagai kementrian yang mengayomi lembaga pendidikan, sedangkan secara kultural agar umat Islam dari seluruh lapisan masyarakat ikut serta memberdayakan pendidikan Islam.<sup>121</sup>

Secara kultural, tradisi pendidikan Islam di Indonesia tidak sepenuhnya khas Indonesia, aspek universal dari tradisi tidak bisa dilepaskan, karena dalam kenyataan *eksistensi* lembaga pendidikan Islam sudah berkembang sejak masa Islam klasik. Lembaga pendidikan Islam dalam bentuk pesantren di Jawa, *meunasah* di Aceh, Surau di Minangkabau dan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang telah mengalami proses transformasi keilmuan dan kelembagaan, bahkan terus berkembang hingga masa modern dengan segala bentuk penyesuaian dan pembaharuannya. Perkembangan lembaga-lembaga tersebut telah memainkan fungsi dan perannya sesuai dengan tuntunan masyarakat dan zaman. *Modernisasi* lembaga pendidikan Islam berlangsung sejak awal abad ke-20, sebuah periode yang menandai awal bangkitnya *modernitas* di dunia Islam. Pada periode tersebut, dunia Islam mengalami pergulatan dengan *kolonialisme* dan *imperialism* yang menimbulkan berbagai implikasi. Di antara yang penting adalah terjadinya proses *cultural encounter* di mana Islam dan *modernitas* menjadi wacana dominan.<sup>122</sup>

---

diarahkan demi kepentingan kaum penjajah serta disesuaikan pula dengan niat politik yang mereka lakukan, seperti politik “pecah belah” (*divide et impera* atau *devided and imperial*), politik etis, Hakko Ichiu (Jepang), dan sebagainya. Tetapi di zaman kemerdekaan, pendidikan kita mulai dibangkitkan kembali melalui pendidikan yang bersifat patriotism, kesadaran nasional sampai dengan pendidikan Nasional Pancasila. Lihat: Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*, Cet. 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 1-2

<sup>121</sup> Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Renika Cipta, 2009), hlm. 11

<sup>122</sup> Subhan, *lembaga Pendidikan*, hlm. 4

Dalam pergerakan politik, pada tanggal 21 September 1953 di Aceh terjadi protes keras terhadap pemerintah Pusat (Jakarta) yang dipimpin oleh *Teungku* Muhammad Daud Beureueh dengan cara mengangkat senjata, karena pemerintah pusat tidak memenuhi janjinya, sedangkan Aceh sudah berjasa dalam mempertahankan dan membela berdirinya Negara Republik Indonesia, “kecuali Aceh, seandainya Aceh dapat diduduki kembali oleh Belanda, maka Negara Republik Indonesia sudah takluk di bawah kekuasaan Belanda”.<sup>123</sup> Rakyat Aceh merasa kecewa dengan sikap Pemerintah Republik Indonesia, Aceh yang disebut-sebut daerah modal, tetapi dilupakan.<sup>124</sup> Semua janji tidak pernah ditepati oleh Pemerintah Pusat, bahkan Provinsi Aceh dilebur dan disatukan dengan Propinsi Sumatera Utara beribukota Medan. Kemudian karena janji tersebut diabaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, dengan semangat yang kuat mendorong Beureueh, untuk merealisasikan sebuah impian yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Aceh yaitu mendirikan *Darul Islam*. Dengan *Darul Islam* ini, hukum Allah akan terlaksana dan jauh dari pengaruh *sekularisme* dalam kehidupan rakyat Aceh.<sup>125</sup> Oleh karena itu, pada tahun 1953 *Teungku* Muhammad Daud Beureueh, salah seorang ulama yang sangat *fenomenal* membuat maklumat dalam bentuk meminta hak-hak terhadap pemerintah Indonesia.<sup>126</sup> Dan dengan sikap politiknya, “mengumumkan bahwa Aceh adalah sebagai bagian dari negara Islam Indonesia yang menjalankan Syariat Islam, yaitu *Negara Islam Indonesia* (NII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo, dengan nama *Darul Islam* (DI). Pasukan keamanan diberi nama Tentera Islam Indonesia (TII).<sup>127</sup> Aceh adalah daerah modal

<sup>123</sup> Muhammad Umar (EMTAS), *Darah dan Jiwa Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2002), hlm. 285

<sup>124</sup> Arbas, *Aceh*, hlm. 121

<sup>125</sup> Adan, *Teungku*, hlm. 59

<sup>126</sup> Firdaus, A.N., *Dosa-Dosa Politik, (orde lama yang tidak berulang di era reformasi)*, (Jawa Timur: Pustaka Alkautsar, 1999), hlm. 73

<sup>127</sup> Dalam situasi politik dan militer yang ekstra rawan itulah, Presiden Soekarno bersama Menteri Dalam Negeri Dr. Sukiman terbang ke Aceh tanggal 15 Juni 1948, mendarat di lapangan terbang militer Lhok Nga. Dalam kunjungan itu Bung Karno sempat menghadiri appel militer di Blang Padang dan menginspeksi pasukan militer dan perjuangan rakyat Aceh lengkap dengan senjata berat. Panglima Tertinggi Soekarno merasa bangsa dan terenyuh hati melihat kesiagaan angkatan perang dan Barisan Rakyat Bersenjata Daerah Aceh yang masih utuh dan memiliki potensi dengan semangat juang yang tinggi pantang menyerah. Lihat: Tgk. A. K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal*, (Jakarta: Seulawah RI-001, 1992), hlm. 217

dalam meneruskan cita-cita proklamasi kemerdekaan, maka Aceh sebagai basis yang akan dilancarkan perang *gerilya* jangka panjang dengan melibatkan seluruh rakyat.<sup>128</sup>

Peristiwa *Darul Islam* (DI) merupakan sebagai sikap protes keras dari masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat, karena masyarakat Aceh merasa dipermainkan oleh pusat, maka dengan kebulatan tekad seluruh rakyat Aceh mendukung tindakan *Teungku* Muhammad Daud Beureueh untuk angkat senjata menandakan Aceh sudah tidak sabar lagi pada pemerintah pusat mengirim tentera dari luar Aceh. Cita-cita Beureueh untuk mewujudkan sebuah Negara Islam di Indonesia cukup besar. Hal ini pernah disampaikan Beureueh kepada seorang wartawan asing, *Boyd R. Compton*, ketika dia mengunjungi beliau di Beureueh. Meneurutnya, “kebebasan beragama tetap terjamin di negara Islam. Beureueh memberi contoh mengenai toleransi terhadap penganut Kristen di negara-negara Islam Timur Dekat, kaum kristiani diberi kebebasan dan dilindungi di Negara Islam Indonesia. Umat Islam tidak akan dapat merasakan kemerdekaan sejati kalau mereka tidak hidup dalam sebuah negara yang diasaskan kepada ajaran Alquran”.<sup>129</sup>

Dalam keadaan Negara Indonesia yang tidak jelas sikap tentang pernyataan Presiden Soekarno, Aceh sebagai daerah modal, dan permintaan *Teungku* Daud Beureueh, sebagai Negara Islam, yang tidak terealisasi. Diadakan perundingan yang disebut dengan Misi Hardi. Perundingan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan setelah melalui proses perundingan yang melelahkan dengan Hasan Saleh, dan kawan-kawan, antara lain *Teungku* Muhammad Daud Beureueh bersedia meletakkan senjata, dan turun gunung, semua Tentara Islam Indonesia (TII) digabungkan dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlibat *Darul Islam* (DI) kembali diberi pekerjaan sebagaimana semula (26 Mei 1959). Untuk Daerah Propinsi Aceh diberi hak Istimewa yang mencakup 3 (tiga) keistimewaan oleh Misi Hardi, tetapi tidak pernah ada undang-undangnya yaitu: *Pertama*, keistimewaan di bidang beragama, yaitu Islam. *Kedua*, keistimewaan di bidang pendidikan. Dan *Ketiga*, keistimewaan di bidang adat-istiadat.<sup>130</sup>

<sup>128</sup> Jakobi, *Aceh*, hlm. 219

<sup>129</sup> Adan, *Teungku*, hlm. 84

<sup>130</sup> Umar, *Darah dan Jiwa*, hlm. 287

Pada akhir tahun 1959, sesuai dengan kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan di Genewa pada Bulan Desember tahun 1958, yang dalam pertemuan itu turut hadir juga Hasan Ali, Perdana Menteri Negara Islam Indonesia (NII) dan Hasan Muhammad Tiro, maka diputuskan untuk mendirikan suatu negara yang berbentuk federal yang dinamakan Republik Persatuan Indonesia (RPI), guna mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari daerah-daerah dan untuk lebih mengefektifkan perjuangan menghancurkan rezim Soekarno yang diktator.<sup>131</sup> Dalam Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia antara lain disebutkan bahwa negara RPI adalah suatu bentuk federasi yang menjiwai ketetanegearaan Islam yang mempunyai landasan bijakan berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk atau golongan untuk memeluk agamanya atau kepercayaan masing-masing dan untuk beribadah serta hidup bermasyarakat sesuai dengan syariat agamanya atau kepercayaannya.<sup>132</sup>

Di sisi lain, dalam negara Republik Indonesia, kebijakan politik umat Islam adalah telah mendirikan Kementerian Agama, yang merupakan koalisi Muslim dan beberapa Partai Nasionalis, antara lain Masyumi, Nahdhatul Ulama, PNI dan PKI. Meskipun selama tahun-tahun peperangan, pihak muslim menjadi kekuatan organisasi politik yang besar, namun kemudian kekuatan mereka terkalahkan oleh kekuatan Partai Nasionalis Indonesia yang bercorak nasionalis sekuler.<sup>133</sup> Pembentukan Kementerian Agama tersebut segera menimbulkan kontroversi, baik dari kalangan non muslim, kelompok nasionalis sekuler maupun kalangan Islam sendiri. Terlepas dari sikap pro-kontra ini, nampaknya pembentukan Kementerian Agama lebih didasarkan pada pertimbangan politik dari pada urgensi peran yang diperlukan dari sebuah sistem tata

---

<sup>131</sup> Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang diri dari sepuluh negara, semuanya kecuali dua negara yang berada di Sumatera dan Sulawesi. Aceh, sebagai Republik Islam Aceh (RIA), adalah salah satu dari enam negara di Sumatera, dan Sulawesi Selatan satu dari dua negara di pulau itu. Selain dari delapan negara ini, barang kali sebagai tindakan mengambil hati, terdapat negara Maluku dan negara Maluku Selatan. Secara mencolok tidak terdapat negara-negara di Jawa, seperti Jawa Barat, bumi kelahiran Darul Islam, dan Kalimantan Selatan, tempat Ibnu Hadjar beroperasi. Lihat: Al Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta: Madani Press, 2000), hlm. 132

<sup>132</sup> Chaidar, *Gerakan*, hlm. 132

<sup>133</sup> Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 61

pemerintahan yang baru.<sup>134</sup> Supaya dalam Negara Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah hendaknya urusan agama hanya diambil lalukan dalam tugas Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, tetapi hendaknya diurus oleh Kementerian Agama sendiri.

Dari sinilah akar terjadinya dualisme dalam sistem pendidikan di Indonesia yang berawal dari masa kemerdekaan. Pada saat itu lembaga-lembaga pendidikan warisan Belanda selanjutnya diambil alih dan dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, sedangkan Pendidikan Agama Islam pada sekolah-sekolah, madrasah dan pesantren dibina oleh Kementerian Agama. Perbedaan antara keduanya dipertajam dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (pada saat itu) yang lebih cenderung mementingkan pendidikan umum dari pada pendidikan agama. Pada umum praktek penyelenggara pendidikan dalam suatu masyarakat dilatarbelakangi adanya pertimbangan-pertimbangan subyektif masing-masing masyarakat berupa filosofi, nilai-nilai, serta suatu prinsip yang dipilih.<sup>135</sup>

Kementerian Agama secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia, baik secara ideologi, politik, kelembagaan maupun sistem pendidikan, sehingga cita-cita umat Islam dapat diimplementasikan dalam kehidupan. Usaha dalam bidang pendidikan Islam ini sesuai aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan pendidikan Islam dari pendidikan dasar, sampai pada tingkat pendidikan tinggi Islam. Sejak masa itu, Kementerian Agama mengelola sepenuhnya Pendidikan Islam. Namun, perhatian yang diberikan di masa awal kemerdekaan mendapat tantangan dari kekuatan nasionalis sekuler terutama di lembaga Badan Pekerja Nasional Indonesia (BPNI-KNIP) saat sidang dalam merumuskan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah pendidikan Islam terintegrasi ke dalam sistem pendidikan nasional. Salah satu penyebabnya

---

<sup>134</sup> Untuk menampung aspirasi umat Islam, pemerintah menyediakan pembentukan Kementerian Agama pada tanggal 3 Januari 1946 sebagai konsensi bagi umat beragama khususnya bagi umat Islam. Kementerian ini dibentuk untuk melindungi kebebasan beragama, menjaga keserasian hubungan antara komunitas agama yang berbeda, dan yang utama adalah untuk menangani masalah keagamaan Muslim, seperti pendidikan Islam, perkawinan, haji, dakwah dan mengelola Peradilan Agama. Lihat: Ira Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, Bahagian Ketiga*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 340

<sup>135</sup> Rohman, *Politik Ideologi*, hlm. 69



adalah selain masih kuatnya pengaruh zaman penjajahan Hindia Belanda dan Jepang di bidang pendidikan yang netral terhadap agama, juga masih kuatnya pengaruh kelompok nasionalis sekuler dalam pengambilan kebijakan negara di bidang pendidikan. Pelaksana pendidikan agama adalah implementasi dari landasan filosofis bangsa yang tertera dalam sila pertama pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menjelaskan tentang kedudukan agama di Indonesia, dan landasan relegius masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang beragama.<sup>136</sup>

Kondisi politik negara yang belum stabil dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhinya. Berbagai aliran politik dapat dengan bebas membentuk partai-partai politik di Indonesia sebagai sarana demokrasi seperti yang dinyatakan oleh pasal 28 UUD 1945. Umat Islam juga berpartisipasi dalam kesempatan ini pada tanggal 7 dan 8 Nopember 1945, melalui sebuah Kongres Umat Islam, di Yogyakarta, lahirnya dua keputusan, yaitu: *Pertama*, pembentukan sebuah Partai Politik yang namanya Masyumi, dan *Kedua*, umat Islam tidak mempunyai partai lain kecuali Masyumi.<sup>137</sup> Berdiri Masyumi tersebut juga merupakan jawaban positif terhadap manifesto politik Wakil Presiden Mohammad Hatta, tertanggal 1 Nopember 1945 yang mendorong pembentukan partai-partai.<sup>138</sup> Partai Masyumi ini merupakan Partai persatuan umat Islam, dengan tujuan agar terlaksana ajaran dan hukum Islam di Indonesia dalam segala aspek kehidupan umat Islam.

Usaha umat Islam untuk menegakkan Islam sebagai dasar ideologi negara dalam konstitusi mengalami jalan buntu. Demikian juga dengan Pancasila, yang oleh umat Islam pada waktu itu dipandang sebagai milik kaum “anti Islam” dan waktu itu tidak ada kata sepakat, sehingga Presiden mengeluarkan dekrit Presiden yang berisi, membubarkan Konstituante dan UUD 1945 diberlakukan kembali. Dalam dekrit itu disebutkan, bahwa piagam Jakarta menjiwai dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD 1945.<sup>139</sup> Dengan dikeluarkan dekrit Presiden, maka bentuk Pemerintahan Indonesia Demokrasi Terpimpin, Soekarno kembali mengeluarkan idenya, Nasional

---

<sup>136</sup> Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan*, hlm. 45

<sup>137</sup> M. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah kenegaraan, Studi tentang Percaturan Dalam Konstituante*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm. 112

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 111

<sup>139</sup> Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, hlm. 55

Agama Komunis (Nasakom), suatu pemikiran yang ingin menyatukan Nasional, Agama dan Komunis,<sup>140</sup> akan tetapi ide ini dilaksanakan dengan caranya sendiri, peranan partai mengalami erosi, kecuali PKI yang memainkan peranan penting, sedangkan partai-partai Islam secara keseluruhan mengalami kemerosotan, berubah sikap NU dari organisasi keagamaan menjadi organisasi politik mempunyai dampak besar atas pola kepemimpinan politik umat Islam Indonesia yang dikuasai oleh kelompok modernis.<sup>141</sup>

Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin terpusat pada presiden Soekarno dengan TNI-AD dan PKI sebagai pendukung utama. Kegiatan politik pada demokrasi terpimpin didominasi oleh PKI, dengan landasan politik Manipol (Manifesto Politik) sebagai gerakan politik PKI menyatakan “revolusi belum selesai”. Dengan dalih PKI mengajak rakyat untuk menyelesaikan tahapan-tahapan revolusi, yakni dari tahap nasional demokrasi dan tahap sosialis. Masa Demokrasi terpimpin ini berakhir dengan gagalnya Gerakan 30 September PKI Tahun 1965, umat Islam bersama ABRI dan golongan lainnya bekerjasama menumpas gerakan itu, sistem politik (tahun 1966) mengalami pembaharuan, penataan kehidupan perpolitikan dengan menetapkan asas tunggal Pancasila untuk semua parpol, tidak ada ciri khusus, tidak ada idiologi Islam, dan tidak ada lagi partai Islam.<sup>142</sup> Dalam periode ini umat Islam merasa kecewa, sebab meskipun PKI sebagai ideologi komunis, telah tumbuh namun perkembangan tidak seperti yang diharapkan, sebab rehabilitasi Masyumi-Partai Islam berpengaruh yang dibubarkan Soekarno, tidak diperkenankan untuk kembali hidup. Bahkan tokoh-tokoh juga tidak diizinkan aktif dalam Partai Muslimin Indonesia.<sup>143</sup>

Memasuki tahun 1966 (Era Orde Baru) Aceh kembali lahir gerakan-gerakan yang menentang pemerintah. Hal ini merupakan dampak negatif

---

<sup>140</sup> Tiga kekuatan ideologis ini sering kali berbenturan dan saling menyalahkan. Presiden Soekarno adalah tokoh yang menganut ideologi nasionalis yang berbasis keindonesiaan dan kultural. Dalam posisi itu, ia terkadang dekat dengan kelompok Islam dan terkadang dekat dengan kelompok sekularis komunis. Lihat: Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 14

<sup>141</sup> Ma'arif, *Islam dan Masalah*, h. 120

<sup>142</sup> Taufiq Abdullah, (Ed), *Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: MUI, 1991), hlm. 405

<sup>143</sup> B. J. Boland, *Pergumulan Islam Indonesia*, (Jakarta: Grafindo, 1985), hlm. 157

dari lambannya perwujudan syariah dan peningkatan kesejahteraan telah memberikan lahan bagi munculnya gerakan politik baru. Awalnya Hasan Tiro mantan duta Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang pulang ziarah ke Aceh pada awal tahun 1970 telah berhasil melakukan kontak dengan rekan perjuangannya dulu baik dari Medan maupun di Aceh seperti Teungku Muhammad Daud Beureueh, Hasballah Haji, Hasan Ali, Hasan Saleh, dan A. Wahab Ibrahim untuk bangkit berjuang kembali. Setelah terjadinya komunikasi dengan pihak yang terlibat DI/TII, selanjutnya Hasan Tiro mengambil sikap, yakni pada tanggal 4 Desember 1976 memproklamkan Aceh Merdeka (AM). Beberapa rekan lama masih mempunyai semangat berjuang, seperti Ilyas Leube, Daud Paneuk, dan Pawang Rasyid yang secara nyata ikut memanggul senjata. Muhammad Hasan Tiro berjuang keras di New York untuk memasukkan persoalan DI/TII ke dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan tujuan supaya kepada rakyat Aceh terutama diberi hak menentukan nasib sendiri (*self determination*), akan tetapi usaha mulia ini menemukan kegagalan.<sup>144</sup>

Atjeh Sumatera National Liberation Front (ASNLF), yang oleh rakyat Aceh dikenal dengan sebutan Atjeh Meurdeuka (AM), kemudian dicap oleh pemerintah Gerakan Pengacau Liar Hasan Tiro (GPLHT) atau Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Adapun dalam perkembangan selanjutnya dikenal dengan adagium “Gerakan Aceh Merdeka” (GAM). Pergulatan masyarakat Aceh dalam berbagai aspek kehidupan selalu identik dengan pergulatan-pergulatan yang dilakukan kaum cendikia Islam, perubahan dalam rangka membentuk dan menghasilkan suasana baru untuk kemajuan Aceh.<sup>145</sup> Lahirnya GAM mendapat pro dan kontra dalam kelompok senior DI/TII, karena ada perbedaan konsep terkait dengan perjuangan. Hasan Tiro selaku deklarasi GAM merumuskan gagasan dan memikirkannya tentang bentuk kenegaraan yang ideal bagi kepulauan Indonesia terutama di Aceh.<sup>146</sup>

<sup>144</sup> Al-Chaidar, dkk., *Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 39

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 49

<sup>146</sup> Menurut A. Jalil, menyatakan bahwa ada tiga paradigme Hasan Tiro dalam memproklamkan kemerdekaan Aceh, yaitu : *Pertama*, Aceh sampai kini masih berdaulat sebagai negara yang merdeka. Pengintegrasian Aceh kedalam negara Indonesia tidak sah berdasarkan hukum internasional (*International Laws*). Bahwa ketika hindia Belanda berubah menjadi Indonesia, Aceh tidak secara otomatis menjadi wilayah yang diserahkan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. *Kedua*, Aceh pada dasarnya

Berdasarkan kondisi politik di Aceh tersebut, maka dapat dipastikan bahwa lahirnya lembaga-lembaga pendidikan Islam memberi nuansa ilmiah yang menarik untuk dikaji dan *dideskripsikan* dalam pertemuan-pertemuan ilmiah. Sejalan dengan perubahan politik, pendidikan Islam akan mengikuti perkembangan untuk melakukan transformasi kelembagaan dan sistem pendidikan agar dapat menyahuti perubahan masyarakat.

### G. FAKTOR INTELEKTUAL: PERANAN ULAMA DALAM MASYARAKAT

Sejak Islam pertama sampai ke Aceh intelektual telah memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan rakyat Aceh.<sup>147</sup> Para intelektual muslim mempunyai pengaruh yang sangat besar dan cukup strategis dalam kehidupan masyarakat, karena mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Perkembangan intelektual di Aceh mencerminkan nuansa keislaman, karena dalam perkembangannya masyarakat Aceh kaum intelektual identik dengan para ulama dan memiliki peran penting baik dalam kehidupan sosial masyarakat, pendidikan maupun pemerintah. Ulama di Aceh merupakan kelompok yang istimewa, mereka lulusan dayah, dan oleh karena itu lebih terhormat diantara orang yang menuntut ilmu di tempat lain.<sup>148</sup> Dalam perjalanan sejarah intelektual di Aceh telah lahir dan berkembang sejalan dengan perkembangan kesultanan dan kehidupan masyarakat. Tradisi keilmuan di Aceh dipelihara dan dikembangkan secara

---

berhak untuk menentukan nasib sendiri, hal ini berdasarkan konvensi PBB, pada artikel 1, bagian 2 dan 55. Piagam Hak Bangsa-Bangsa, pada pasal 5, 6 dan 11. Piagam Hak-hak Azasi Manusia. Piagam Hak Ekonomi, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Serta Piagam Hak Umum dan Politik. Yang pada dasarnya menyebutkan bahwa "... semua bangsa di dunia mempunyai hak menentukan nasib diri sendiri dan kemerdekaan. *Ketiga*, Aceh sebagai negara Islam berdaulat. GAM merupakan perjuangan bersambung dari perjuangan bangsa Aceh tempo dulu usaha mempertahankan kemerdekaan dari penjajahan Belanda yang bermula sejak tahun 1873. GAM mengungkit kembali kesultanan Aceh yang sama sekali terpisah dari Indonesia ketika terbentuk pada tahun 1949. Lihat: Harry Kawilarang, *Aceh Dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), hlm. 157

<sup>147</sup> Sejumlah ahli memandang bahwa faktor jaringan ulama dari Haramayn telah memberikan warna intelektual di Aceh. Kehadiran mereka saat itu, juga sangat diharapkan oleh masyarakat guna mengajar mereka ajaran-ajaran Islam. Di samping itu para ulama juga menjadi penasihat para raja. Dengan begitu, segala keputusan mereka akhirnya menjadi kebijakan kerajaan dalam bidang agama, Amiruddin, *Ulama Dayah*, hlm. xi-xii

<sup>148</sup> *Ibid.*, hlm. 3

berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang mengacu kepada proses Islamisasi nilai-nilai keagamaan dalam tradisi keilmuan.<sup>149</sup> Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam mentransfer ajaran agama dan nilai-nilai sosial kepada masyarakat melalui lembaga dayah dan media dakwah lainnya.<sup>150</sup> Dalam masyarakat Aceh, bahkan ulama menjadi kelompok yang sangat penting, antara lain karena posisinya sebagai pemimpin-pemimpin informal.<sup>151</sup>

Perkembangan intelektual di Aceh telah memberikan banyak kesempatan kepada masyarakat untuk terjun menuntut ilmu pengetahuan keseluruhan nusantara tidak terkecuali ke Timur Tengah. sehingga muncul jaringan keilmuan keseluruhan nusantara. Kondisi keilmuan tersebut telah metradidisi yang berakar bagi para ulama-ulama yang singgah dan berhasil mengembangkan ajaran Islam di Aceh.<sup>152</sup> Tradisi keilmuan dan dinamika pemikiran yang muncul selalu dengan semangat pembaharuan. Ulama adalah para pendidik yang mengajarkan dan membimbing masyarakat dan mewarisi sejumlah ilmu pengetahuan. Proses pewarisan itulah yang disebut dengan pendidikan.

Ulama menduduki posisi penting dalam masyarakat di Aceh,<sup>153</sup> karena gagasan dan pemeliraaan wacana intelektual sangat urgen bagi sejarah intelektual Islam. Ulama tidak hanya sebagai figur keilmuan yang menguasai

---

<sup>149</sup> Hasbi Amiruddin, Guru Besar Ilmu Pendidikan UIN Ar-Raniry, Penulis Sejarah pendidikan Islam di Aceh, Wawancara di banda Aceh, tanggal 16 Februari 2016.

<sup>150</sup> Amiruddin (ed), *Ensiklopedi*, hlm. 14

<sup>151</sup> Perubahan dalam bidang pendidikan sudah mulai dicanangkan, bahkan hal itu telah mulai dilaksanakan di ayah-dayah yang telah dibangun oleh ulama yang turun dari bergerilya melawan penjajahan Belanda, dijadikan madrasah dengan sistem baru dengan memakai kurikulum, yaitu di madrasah-madrasah diajarkan pengetahuan umum seperti: Sejarah, Ilmu Politik, Ilmu tata Negara di samping pelajaran pokok agama, Lihat: Amiruddin (ed), *Ensiklopedi*, hlm. 78

<sup>152</sup> Bahwa adanya jaringan ulama Makkah dan Madinah, adanya hubungan bilateral antara Kesultanan Aceh dengan dengan Dinasti Turki Utsmani serta balapan antara Islam dengan Kristen dalam mempengaruhi kehidupan pribumi, hubungan tersebut menjadi catatan dalam sejarah sosial pendidikan Islam sekaligus menjadi faktor yang mempercepat Islamisasi dan pembentukan tradisi keilmuan di Aceh, Lihat: Azumardi Azra, *Islam Nusantara, Jaringan Global dan Lokal* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 15

<sup>153</sup> Ulama di Aceh, disamping sebagai penasehat raja juga berfungsi sebagai perantara masyarakat desa dengan daerah luar. Lebih jauh lagi, para ulama kendati selalu menemani pejabat, mereka tidak terikat dengan politik local dan bisa berkomunikasi secara bebas dengan siapa saja dari berbagai tingkatan masyarakat. Lihat: Amiruddin, *Ulama Dayah*, hlm. 9-10

dan memahami ajaran Islam, tetapi juga sebagai penggerak, motivator dan dinamisator masyarakat kearah pengembangan dan pembangunan umat, “hubungan kontak antara satu ulama dengan ulama lainnya meemunculkan semangat pembaharuan untuk merevitalisasi Islam dalam kehidupan pribadi dan masyarakat”.<sup>154</sup> Kedatangan ulama ke Aceh dalam rangka memperkenalkan lembaga pendidikan, atas dasar itulah dalam catatan sejarah menunjukkan bahwa institusi pendidikan berupa *meunasah*, *rangkang* dan *dayah* telah dikenal sejak kesultanan Samaudera Pase berkuasa.<sup>155</sup> Prilaku ulama selalu menjadi teladan dan panutan. Ucapan ulama selalu menjadi pengangan dan pedoman. Ulama adalah pelita umat dan memiliki karisma terhormat dalam masyarakat. Penerimaan dan penolakan masyarakat suatu gagasan, konsep atau program banyak dipengaruhi oleh ulama.<sup>156</sup>

Sepanjang sejarah kerajaan Aceh ulama telah menjadi penggerak keilmuan. Peranan ulama bukan hanya dalam aspek ibadah mahdah, memberikan fatwa atau berdoa saja, tetapi juga mencakup berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya pendidikan dan sebagainya, sesuai dengan ke-komprehensif-an ajaran Islam itu sendiri. Para ulama mengajarkan ilmu dengan sistem pengajaran yang tepat. Penguasaan Syekh Nur al-Din al-Raniry atas bahasa Arab, Persia, Urdu, Melayu dan Aceh sangat membantu dalam membangun reputasi keilmiah dan keilmuan di Aceh pada masa hidupnya.<sup>157</sup> Perkembangan intelektual masyarakat Aceh pada pasca kemerdekaan banyak dipengaruhi oleh kembalinya pelajar-pelajar dri Persia dan Arab, walaupun kebanyakan pedagang yang datang kepulauan Nusantara berasal dari India, para ulama dari Arab, Persia dan Gujarat untuk mengajar pada lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan, menghasilkan sarjana-sarjana Islam yang bisa mengembangkan ajaran Islam ke seluruh Aceh.<sup>158</sup> Membatasi peran ulama pada persoalan agama, fatwa dan akhlak saja merupakan kekeliruan besar, karena hal itu dipandang sebagai a historis, sebab dalam sejarah peran ulama sangat luas, seluas ajaran

---

<sup>154</sup> Erawadi, *Tradisi, Wacana dan Dinamika Intelektual Islam Aceh Abad XVII dan XIX* (Kementrian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan Tahun 2011), hlm. 2-3

<sup>155</sup> Mukti, *Sejarah Pertumbuhan*, hlm. 16

<sup>156</sup> Hasbi Amiruddin, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 16 Februari 2016.

<sup>157</sup> Azra, *Jaringan Ulama*, hlm. 232

<sup>158</sup> Muslim Thahiry, dkk., *Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh* (Banda Aceh: Wacana Press, 2007), hlm. 24

Islam yang komprehensif itu pula. Gambaran ini menunjukkan perjalanan hidup ulama tidak terlepas dari pengembangan keilmuan.

Para ulama telah memainkan peranan penting sepanjang sejarah dalam kehidupan masyarakat Aceh.<sup>159</sup> Kualitas dan kapasitas keilmuan yang dimiliki para ulama telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumusnya sistem ekonomi Islam secara konseptual, termasuk sistem perbankan syariah adalah hasil ijtihad dan kerja keras intelektual dan ulama. Di samping itu, personalitas tinggi yang dimilikinya telah mengantarkan ulama dalam keseharian sebagai suri tauladan umat, bahkan ketidakhadirannya pun menjadi sumber inspirasi dan motivasi umat untuk lebih bergairah dalam melaksanakan berbagai aktifitas hidupnya, terutama aktifitas pendidikan.

Secara sosiologis masyarakat Aceh memandang bahwa ulama sebagai orang yang jujur, rendah hati dan terkesan pendiam, tidak banyak bicara karena tinggi ilmu agamanya serta bersahaja dalam kehidupan sehari-hari. Kepribadian yang tinggi mengantarkan ulama pada posisi yang tinggi, sebagai panutan (*uswah*) bagi masyarakat di sekitarnya.<sup>160</sup> Banyak orang di Aceh menaruh perhatian dan harapan besar agar anak-anaknya kelak dapat mewarisi ilmu dan kepribadian dari para ulama yang diketahui kehidupannya.

Ulama menempati posisi penting dan memainkan peran yang signifikan terhadap transformasi pendidikan Islam di Aceh. Secara psikologis hubungan ulama dengan masyarakat semakin intensif, berbagai masalah yang dihadapi umat menjadi lebih ringan dan dimungkinkan untuk lebih cepat teratasi, termasuk masalah pendidikan Islam yang mendorong lebih berkembang dan berkualitas dengan peran ulama dalam masyarakat.

## 1. Peran Ulama Dalam Pendidikan

Dalam kehidupan masyarakat Aceh, ulama di samping perannya secara kolektif membina umat, melalui institusi pendidikan sebagai agen pembaharuan

---

<sup>159</sup> Ketika periode kerajaan Islam, para ulama terus berfungsi sebagai pengawal moral dan penasihat kerajaan, sementara masalah politik ditangani oleh sultan sendiri. Fungsi para ulama dapat dilihat dalam penolakan Nur al-Din al-Raniry terhadap ajaran Hamzah Fansuri pada abad ke-17, karena menurut al-Raniry, ajaran Hamzah telah membawa masyarakat ke jalan yang keliru. Lihat: Amiruddin, *Ulama Dayah*, hlm. 13

<sup>160</sup> Darwis Sulaiman, wawancara di Banda Aceh, 12 Februari 2016.

Islam. Ulama mengintensifkan pendidikan Islam melalui madrasah-madrasah yang didirikan, di samping untuk bertujuan memberikan pendidikan untuk masyarakat. Kehadiran sekolah ala Barat yang diperkenalkan yang semakin tersisih nuansa Islam di Aceh, membuat peran ulama semakin besar untuk mempertahankan sistem pendidikan madrasah.<sup>161</sup> Besarnya peranan ulama dalam pendidikan karena mereka sebagai kelompok dominan dalam sistem sosial masyarakat Aceh yang ditandai oleh nilai-nilai sosial keagamaan.<sup>162</sup>

Berdirinya madrasah-madrasah berbagai pelosok di Aceh dengan ide pembaharuan yang dimajukan oleh masing-masing pendirinya merupakan gerakan pembaharuan dari hasil perkembangan pemikiran para pendirinya serta pengaruh dari dunia luar, namun hal yang tidak bisa dipungkiri adalah peran ulama untuk menerima ide pembaharuan dalam kurikulum madrasah yang ada di seluruh pelosok Aceh. Dalam kehidupan orang Aceh sejak dulu semenjak Islam datang ke Aceh rasanya unsur Islam telah menyatu dalam setiap aspek kehidupannya, peran ulama hasil godokan dayah berpengaruh dalam berbagai pranata sosial dalam masyarakat dengan menguasai lembaga pendidikan dan ulama bergerak yang beridiri di garis depan memberikan penerangan kepada masyarakat.<sup>163</sup>

Para ulama berusaha agar pendidikan umum dapat diterima di institusi-institusi pendidikan Islam, khususnya di madrasah-madrasah yang ada di Aceh. Diantara usaha yang dilakukan adalah memasukan pengetahuan umum ke dalam kurikulum madrasah dengan penggunaan atribut bahasa Arab, sehingga ulama tradisional menerima sebagai bagian dari ilmu Islam, meskipun, belum memasukan dalam kurikulum dayah. Usaha seperti ini memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap integrasi ilmu pada lembaga pendidikan Islam.<sup>164</sup>

---

<sup>161</sup> Kehadiran madrasah modern telah memberi inspirasi kepada tokoh-tokoh masyarakat Aceh untuk memberikan model lembaga pendidikan, misalnya Teuku Muda dalam mendirikan Madrasah Islam di Bambi, Teuku Pie mendirikan Madrasah Islam di Kumbang Tanjong, Teuku Pakeh Mahmud mendirikan Madrasah Dunia Akhirat di Pekan Pidie. Demikian juga di kabupaten-kabupaten lain muncul madrasah-madrasah modern modern seperti MADNI di Idi, JADAM di Montasik Aceh Besar, Lihat: Amiruddin (ed), *Ensiklopedi*, hlm. 108

<sup>162</sup> Teungku Chik Awe Geutah yang di dalam kehidupan, beliau mendirikan pesantren di mana para santrinya bukan saja dari daerah sekitar atau dari Kecamatan Peusangan sendiri malah ada juga berasal dari luar Kecamatan Peusangan. Lihat: Amiruddin (ed), *Ensiklopedi*, hlm. 15

<sup>163</sup> Amiruddin, *Ensiklopedi*, hlm. 15

<sup>164</sup> Hasbi Amiruddin, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 16 Februari 2016.



Pertumbuhan dan perkembangan institusi pendidikan Islam yang cukup pesat di Aceh memiliki peran ulama yang cukup intens di dalamnya. Dalam penyusunan dan penetapan kurikulum institusi pendidikan di Aceh, ulama memberikan kontribusi yang cukup besar. Menyahuti kebijakan pelaksanaan ajaran Islam secara kaffah, maka peran ulama yang paling besar dalam bidang pendidikan adalah melalui institusi pendidikan menghilangkan dualisme sistem pendidikan dan dikotomi ilmu. Peran ini dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga diterapkan kurikulum yang bermuara pada Islamisasi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, peran ulama sebagai kelompok intelektual dalam bidang pendidikan, lembaga dan sistem pendidikan akan terjadi perubahan-perubahan kepada sebuah kemajuan bidang pendidikan Islam.

## 2. Peran Ulama Dalam Pemerintah

Dalam berbagai kondisi sosial yang ada di Aceh, ulama selalu memainkan peran yang cukup signifikan dan akan menentukan jalannya sejarah, ulama sebagai sosok yang dihormati dan diikuti tindakannya, keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Aceh yang religius, bahkan dalam beberapa kondisi ulama menjadi sentral perkembangan politik.<sup>165</sup> Dalam perkembangan politik, ulama menjadi peran dalam struktur pemerintahan sejak kesultanan di Aceh. Keterlibatan ulama dalam politik di Aceh, merupakan posisi strategis yang mereka mainkan. Sejak awal kehadiran Islam di nusantara, kehadiran ulama menempati peran yang cukup strategis, di samping menjalankan dakwah ke seluruh masyarakat, menjadi penasihat kesultanan dan memberi berbagai kontribusi dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintah (kesultanan). Di Aceh, sampai saat ini, masyarakat masih memperlihatkan rasa hormat kepada ulama.<sup>166</sup> Dengan demikian, ulama sebagai posisi sentral dalam kehidupan masyarakat. Seperti Ayah Hamid, seorang ulama Aceh yang belum puas untuk membantu bangsanya dengan mengajar saja. Beliau

---

<sup>165</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Aceh, pasal 3 ayat 2, menyebutkan bahwa penyelenggara keistimewaan Aceh meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan dan peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.

<sup>166</sup> Amiruddin, *Ulama Dayah*, hlm. 14

masih mencari organisasi yang dapat menggerakkan masyarakat untuk sebuah kesadaran terhadap situasi negara yang sedang dijajah.<sup>167</sup>

Dalam perjalanan abad ke-20 peran ulama di samping memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan semangat kebangsaan yang terus berkembang, juga menghimpun potensi masyarakat yang menjadi cikal bakal peran ulama dalam sistem politik di Indonesia melalui wadah partai politik.<sup>168</sup> Para ulama dalam Pergerakan kemerdekaan mendirikan Partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai partai yang memperjuangkan pelaksana syariat Islam dalam Negara Republik Indonesia. Perjuangan tersebut terutama dilaksanakan dalam sistem parlementer di Indonesia.

Perjuangan panjang para ulama, memiliki kesempatan terlibat dalam politik praktis sehingga memiliki wadah untuk memperjuangkan aspirasi umat Islam yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pelaksanaan pendidikan Islam. Lahirnya undang-undang, peraturan-peraturan dan berbagai program berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan Islam, menjadi dasar serta peluang terhadap perkembangan dan perubahan pendidikan Islam di Aceh kepada sebuah kemajuan yang ideal dan dicita-citakan oleh masyarakat Aceh.

---

<sup>167</sup> Amiruddin, *Ensiklopedi*, hlm. 111

<sup>168</sup> Tgk. Chik Abdul wahab, ulama yang anti penjajah Belanda. Dayahnya di Tanoh Abee di samping dijadikan tempat pendidikan dan latihan suluk, juga sebagai basis tempat latihan perang. Lihat: Amiruddin (ed), *Ensiklopedi*, hlm. 49

## BAB III

# GENEOLOGI PENDIDIKAN ISLAM DI ACEH

### A. MEUNASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ACEH

**D**alam sejarah, masuknya Islam ke Indonesia pertama kali ialah di Aceh hal ini dapat kita lihat dari hasil kesepakatan dalam seminar nasional yang diadakan di Medan pada tanggal 17 s/d 20 Maret 1963, mengenai Sejarah Masuknya Islam di Indonesia.<sup>1</sup> Kesimpulan yang dihasilkan dalam seminar nasional tersebut diantaranya ialah: pertama, menurut berbagai sumber yang diketahui, Islam telah masuk di Indonesia untuk pertama kalinya pada abad pertama Hijriyah (yakni bertepatan pada abad VII-VIII Masehi) dan serta merta dari Arab; kedua, Islam mendatangi pesisir Sumatera untuk pertama kalinya; dan membentuk penduduk Islam, hingga Aceh merupakan tempat keberadaan Raja Islam yang pertama; ketiga, lalu metode pengislaman berikutnya rakyat Indonesia turut berperan aktif mengambil bagian;

Keempat, para pendakwah Islam terdahulu bukan hanya sekedar sebagai penyiara agama saja, akan tetapi juga merupakan para pedagang dan pengusaha; kelima, penyiaraan Islam di Indonesia diterapkan secara damai; keenam, kedatangan Islam di Indonesia menjunjung tinggi intelektualitas dan kebudayaan, sehingga Kepribadian Bangsa Indonesia terbentuk; dan ketujuh, harus membentuk suatu Badan Penelitian dan Penyusunan Sejarah Islam di Indonesia yang lebih luas, disarankan supaya Badan ini berpusat di Medan, sedang di tempat-

---

<sup>1</sup> A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Jakarta: Al-Ma'arif, 1993), hlm. 5

tempat lain yang dipandang perlu, dibentuk pula cabang-cabangnya, teristimewa di Jakarta.<sup>2</sup>

Sebagian sarjana asal Belanda, menggunakan pendapat bahwa Islam di nusantara bermula dari Anak Benua India, bukan dari Persia atau Arabia. *Pijnappel* merupakan sarjana pertama yang mengutarakan pendapat ini. Ia mengkaitkan awal permulaan Islam di nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab yang bermazhab Syafi'i bermigrasi dan menetap di wilayah India tersebut yang kemudian membawa Islam ke nusantara.<sup>3</sup> Teori ini kemudian dikembangkan Snouck Hurgronje yang berhujah, begitu Islam berpijak kokoh di beberapa kota pelabuhan Anak Benua India, Muslim Deccan, banyak diantara mereka tinggal di sana sebagai pedagang perantara dalam perdagangan Timur Tengah dengan nusantara-datang ke dunia Melayu Indonesia sebagai para penyebar Islam pertama. Baru kemudian mereka disusul orang-orang Arab – kebanyakan keturunan Nabi Muhammad Saw. karena menggunakan gelar *sayyid* atau *syarif* – yang menyelesaikan penyebaran Islam di nusantara.<sup>4</sup> Orang-orang Arab ini muncul di nusantara baik sebagai “pendeta” (*priests*) maupun sebagai “pendeta penguasa” (*priest-princes*) atau *sulthan*. Snouck Hurgronje tidak menyebutkan secara eksplisit dari wilayah mana di India Selatan yang ia pandang sebagai asal Islam di nusantara, tetapi ia menyebutkan abad ke-12 sebagai periode paling mungkin dari permulaan penyebaran Islam di Nusantara.<sup>5</sup>

Perkembangan Islam di Aceh tidak dapat dipisahkan dengan peran penting lembaga pendidikan karena lembaga pendidikan merupakan sarana yang sangat efektif untuk menyebarluaskan Islam. Walaupun terdapat sarana lain yang menjadikan Islam di Aceh dapat berkembang luas yaitu; perkawinan dan perdagangan. Perbincangan mengenai lembaga pendidikan Islam, khususnya pada permulaan Islam masuk ke Indonesia menjadi permasalahan yang amat

<sup>2</sup> <https://ganaislamika.com/tentang-masuknya-islam-ke-nusantara-2/>, hlm. 2-3

<sup>3</sup> G.W.J. Drewes, “New Light on the Coming of Islam Indonesia” dalam *Readings on Islam in Southeast Asia*, (Singapore: Institute of Southeast Asia Studies, 1983), hlm. 8

<sup>4</sup> C. Snouck Hurgronje, “Arti Agama Islam bagi Penganutnya di Hindia Belanda, dalam *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, Jilid VII, terj. Sultan Maimun dan Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 6

<sup>5</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, Akar Pembaharuan Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana, cet. 3, 2007), hlm. 2-3

menarik untuk dijadikan sebuah kajian, perihal tersebut paling tidak dikarenakan beberapa hal, diantaranya; institusi pendidikan adalah wahana penting terhadap sistem perubahan norma dan tradisi bagi masyarakat; penelusuran keberadaan institusi pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari mekanisme masuknya Islam; munculnya institusi pendidikan Islam dalam masyarakat tidak mengalami kehampaan, akan tetapi selalu hidup dan aktif, baik dari fungsi maupun sistem pembelajarannya; dan keberadaan institusi pendidikan Islam telah memberikan spektrum tersendiri dalam membuka wawasan dan dinamika intelektual Islam.<sup>6</sup>

Tumbuh-kembangnya pendidikan Islam di Indonesia diantaranya ditandai dengan hadirnya berbagai institusi pendidikan secara berjenjang, diawali dengan tradisional hingga futuristik dan komplit. Institusi-institusi pendidikan Islam tersebut telah menunjukkan fungsi dan perannya sesuai dengan keinginan masyarakat pada zamannya. Pertumbuhan institusi-institusi pendidikan tersebut selanjutnya mengambil simpatik para ahli baik dari dalam maupun luar negeri untuk melakukan studi ilmiah secara menyeluruh. Kini sudah banyak hasil karya peneliti para ahli yang menginformasikan tentang tumbuh-kembangnya institusi-institusi pendidikan Islam tersebut. Tujuannya selain untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang bernuansa keislaman, juga sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi para pengelola pendidikan Islam pada masa-masa berikutnya. Hal ini sejalan dengan prinsip yang umumnya dianut masyarakat Islam Indonesia, yaitu mempertahankan tradisi masa lampau yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik lagi.

Pendidikan Islam secara kelembagaan terlihat dalam berbagai bentuk yang bervariasi. Disamping sebagai institusi yang bersifat umum seperti masjid, terdapat pula institusi-institusi lain yang mencerminkan kekhasan orientasinya. Dalam lintas sejarah kita mengenal beberapa institusi pendidikan Islam di Indonesia, diantaranya: meunasah, dayah, rangkang, surau, pesantren dan madrasah. Institusi-institusi pendidikan ini disamping sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan Islam juga merupakan potensi dasar umat Islam Indonesia. Mengingat hal ini merupakan khazanah bangsa dan akan menjadi salah satu katalisator menuju kebangkitan peradaban Islam.

---

<sup>6</sup> Samsul Nizar, *Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara* dalam Abudin Nata (editor), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo bekerja sama dengan IAIN Jakarta, 2001), hlm. 6

## 1. *Meunasah* dalam Definisi

Di Indonesia, sejak awal perkembangan Islam, Pendidikan Islam telah mendapatkan prioritas utama bagi masyarakat muslim Indonesia. Perihal tersebut selaras dengan kegiatan pendidikan Islam di Indonesia yang lahir dan tumbuh seiring tumbuh-kembangnya agama Islam di Indonesia. Selain disebabkan begitu pentingnya arti pendidikan, pengaruh Islamisasi sangat berguna untuk memberi semangat kepada umat Islam melaksanakan pengajaran Islam meski dengan cara yang sederhana dan dilaksanakan secara informal. Perihal tersebut dikarenakan agama Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim, sambil berdagang mereka menyiarkan agama Islam dan setiap ada kesempatan mereka memberikan pendidikan dan ajaran agama Islam.<sup>7</sup>

A. Hasjmy menyatakan bahwa Kerajaan Peureulak (225 H/840 M) merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Indonesia. Menurutnya, raja (sultan) yang memerintah pada masa itu memiliki perhatian yang amat besar terhadap pendidikan agama. Perihal tersebut ditandai dengan adanya pendirian pusat pendidikan Islam yang bernama *Dayah Cot Kala (Zawiyah Cot Kala)*. Ia menyatakan bahwa institusi pendidikan tersebut merupakan institusi pendidikan tertua di Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Sementara, masa-masa Kerajaan Samudera Pasai sendiri metode pembelajaran agama Islam diselenggarakan di masjid kerajaan dengan bentuk *halaqah* atau *zawiyah*.<sup>8</sup> Metode pembelajaran tersebut oleh masyarakat begitu diminati, sampai-sampai Raja Samudera Pasai sendiri, Malik al-Shaleh, begitu sukacita menghadirinya yang diselenggarakan setiap selesai shalat Jum'at.<sup>9</sup> Sedemikian pentingnya, pendidikan ini dihadiri bukan hanya para orang tua dan dewasa saja, akan tetapi anak-anak juga ikut menghadirinya. Sehingga tercetus keinginan para orang tua akan pentingnya pendidikan, terutama bagi anak-anaknya, kemudian hadirilah di Aceh suatu

<sup>7</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 21

<sup>8</sup> Menurut Safwan Idris *zawiyah* berarti sudut atau pojok. *Sebagai lembaga pendidikan*, *zawiyah* memang berasal dari pengajian-pengajian yang diadakan di sudut-sudut mesjid yang merupakan lembaga pendidikan yang sangat awal dalam Islam. Dari pengajian di sudut atau pojok mesjid inilah lahirnya institusi yang disebut dengan *zawiyah*. Lihat: Safwan Idris, *Perkembangan Pendidikan Pesantren*, hlm. 61-92

<sup>9</sup> Sadli, M. Z.A., "Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh: Ulama, Meunasah dan Rangkang", dalam Abudin Nata, (ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2001), hlm. 27-54

lembaga pendidikan Islam. Kehadiran lembaga pendidikan Islam tersebut pada masa berdirinya tiga kerajaan Islam Aceh, yakni Kerajaan Islam Peureulak, Kerajaan Islam Samudera Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam yang menjadikan Aceh bebas dari buta aksara. Hal ini dibenarkan oleh Beaulieu salah seorang warga negara Perancis yang pernah singgah di Aceh abad ke-17.<sup>10</sup>

Kata *meunasah* menurut kelompok etnis Aceh ada yang menyebutnya dengan *meulasah*, *beunasah*, dan *beulasah*. *Meunasah* juga dipahami masyarakat *Aneuk Jameë* sebagai *manasah* atau balai, sedangkan menurut orang mukim dari kelompok etnis Gayo, Alas dan Kluet, *meunasah* dikenal dengan *meurasah*. Kata *meunasah* sendiri merupakan kata asli dari bahasa Aceh yang telah dikenal cukup lama. Namun, secara historis, belum begitu jelas sejak kapan ditemukannya kata *meunasah* tersebut. Menurut beberapa ahli pengamat Aceh, kata *meunasah* berasal dari kata *madrasah* (yakni dari bahasa Arab),<sup>11</sup> kemudian menjadi *meunasah* dikarenakan permasalahan dialek orang Aceh yang sulit mengatakan kata *madrasah*. Sebagaimana juga kata *dayah* yang sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yakni *zawiyah*.<sup>12</sup>

Snouck Hurgronje mengidentikkan kata *meunasah* dengan langgar, *baleë* atau *tajug*, sehingga menurut Snouck Hurgronje bangunannya itu sendiri lebih tua dari namanya yang kabarnya kata *meunasah* itu berasal dari kata *madrasah*.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Badruzzaman Ismail dan para ahli pengamat Aceh terdahulu, bahwa kata-kata *meunasah*, *meulasah* atau *beulasah* berasal dari kata-kata bahasa Arab, yaitu *madrasah* yang memiliki arti sebagai lembaga pendidikan.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan: PT. Percetakan dan Penerbitan Waspada, 1981), hlm. 309; Hasjmy, *Sejarah Kebudayaan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 192

<sup>11</sup> *Meunasah* berasal dari istilah bahasa Arab yaitu *madrasah*, artinya lembaga/tempat belajar (Lihat: C. Snouck Hurgronje, *ACEH Rakyat dan Adat Istiadat*, Jakarta: INIS, 1996, hlm. 47; Hasjmy, *Pendidikan di Aceh...*, hlm. 71; Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi NAD, 2002, hlm. 5; Idris, *Perkembangan Pendidikan Pesantren*, h. 61).

<sup>12</sup> Muhammad Ibrahim, dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah., 1981), hlm. 21

<sup>13</sup> C. Snouck Hurgronje, *Aceh*, hlm. 48

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 1

Sedangkan Taufik Abdullah memberikan pengertian kata *meunasah* secara terminologis sebagai tempat segala bentuk kegiatan, baik dari yang berkaitan dengan keduniawian (seperti adat istiadat), hingga yang berkaitan dengan keagamaan yang dipimpin oleh seorang *teungku meunasah*. Dalam arti yang lain, *meunasah* adalah suatu media tempat mendidik dan menempa masyarakat pada suatu desa atau *gampông*, supaya mereka menjadi insan yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.<sup>15</sup> Begitu pula T. Syamsuddin mengemukakan pendapatnya dalam Jeumala, bahwa *meunasah* merupakan suatu tempat yang didirikan menjadi sebuah lembaga tradisional yang tak terpisahkan dari kehidupan orang-orang Aceh dan dijadikan sebagai pusat aktivitas masyarakat desa atau *gampông*.<sup>16</sup> Perihal tersebut memiliki faktor yang mendasar yang disebabkan *meunasah* memiliki banyak manfaat dan kegunaannya, selain berfungsi menjadi bagian dari pendidikan, ekonomi, sosial sekaligus berfungsi menjadi bagian dari keagamaan.

Luput dari interpretasi luas dan sempitnya defenisi *meunasah*, hal itu bersandar pada latar belakang dan situasi seorang pemerhati dalam pembahasan *meunasah*. *Meunasah* itu sendiri merupakan institusi tradisional rakyat Aceh yang selalu diidentikkan terhadap orang Aceh, sebab keberadaan orang-orang Aceh di mana pun tinggal, *meunasah* selalu ditemukan di situ.<sup>17</sup>

Sejarahnya, *meunasah* adalah pusat peradaban masyarakat Aceh, sebab bagi anak-anak desa atau *gampông* yang berusia dini, pendidikan didapatkan dari sini. Pembangunan *meunasah* di setiap desa atau *gampông* bagi masyarakat Aceh sendiri memiliki berbagai fungsi, selain menjadi pusat kebudayaan (*center of culture*) sekaligus menjadi pusat pendidikan (*center of education*).

<sup>15</sup> Taufik Abdullah et..al., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 221

<sup>16</sup> T. Syamsuddin, "Peranan *Meunasah* Sebagai Pusat Pendidikan dalam Masyarakat Aceh", *Majalah Jeumala*, diterbitkan oleh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), No. 5 (Maret - April 1993), hlm. 17

<sup>17</sup> Kenyataan tersebut dapat juga digambarkan bahwa apabila di suatu daerah (baik dalam maupun di luar negeri) sudah berkumpul komunitas masyarakat Aceh, maka mereka sudah berpikir untuk mendirikan *meunasah* sebagai pusat kegiatan sosial keagamaan. Maka tidak heran kalau misalnya di Jakarta atau daerah lainnya di Indonesia ada yang membangun *meunasah* Aceh, bahkan menurut penuturan seorang teman peneliti yang sudah menetap di Malaysia, di sana ada juga *meunasah* Aceh. *Meunasah* tersebut dibangun atas kerjasama komunitas masyarakat Aceh yang sudah menetap di sana.



Oleh karena itu, *meunasah* memiliki peran yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat Aceh sehingga disebut sebagai *center of culture*. Sedangkan *meunasah* disebut sebagai *center of education* hal ini disebabkan anak-anak masyarakat Aceh yang berusia dini mendapatkan pendidikannya – terutama pendidikan Islam – dari *meunasah* ini.<sup>18</sup> Dari pemahaman ini mengandung arti bahwa lembaga atau institusi sekolah sejak dahulu telah ada di setiap desa di seluruh Aceh.

Menjadi sebuah institusi pendidikan, *meunasah* dikoordinasi oleh seorang *teungku* – di daerah Jawa disebut *kiayi* – pada lazimnya, *teungku* yang memimpin *meunasah* tersebut lepasan dari pendidikan metode *dayah* (pesantren). Pendidikan yang dipelajari oleh seorang *teungku* tersebut ditempuh hingga beberapa tahun berkaitan dengan hukum-hukum Islam dan kemampuan dasar tentang penyajian dan penyuluhan keagamaan, baik sebagai imam shalat, sebagai pemandu pembaca do'a berjamaah, dan lainnya, hingga ia layak untuk dijadikan sebagai *teungku* dan sebagai pengajar di *meunasah*.

Anak-anak didik yang dibekali ilmu pengetahuan, baik dari baca-tulis Alquran hingga pendidikan agama lainnya di tingkat *meunasah*, ini merupakan bukti nyata bekas jejak pendidikan di tingkat rendah. Oleh karenanya, keberadaan *meunasah* ini, nyaris di setiap *gampông* di Aceh masih dapat ditemukan hingga sekarang. Akan tetapi, dewasa ini kegunaan *meunasah* mulai tampak berkurang sekedar dijadikan sebagai wadah untuk shalat berjamaah dan bermusyawarah di tingkat *gampông* saja. Sementara di Aceh sendiri, perbandingan jumlah *meunasah* lebih banyak dari pada Sekolah Dasar. Hal ini membuktikan bahwa media untuk pendidikan dasar pada masa Aceh lampau lebih memadai dari pada sekarang.

Berbagai pemaparan tersebut di atas terlihat jelas bahwa sejarah *meunasah* membawa tugas utama pada mekanisme untuk mencerdaskan bangsa, terutama bagi kehidupan masyarakat Aceh sendiri. Sebab, anak-anak masyarakat Aceh mengawali pendidikan Islam secara formal pada institusi *meunasah* ini.

Oleh karenanya, berdasarkan *meunasah* selain sebagai institusi pendidikan Islam tradisional tingkat dasar di Aceh, secara tidak langsung, *meunasah* pula yang menciptakan para cendikiawan muslim (ulama) dan lajunya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Kesultanan Aceh hingga Aceh dikenal sebagai

---

<sup>18</sup> Sulaiman Tripa, Meunasah Ruang Serba Guna Masyarakat Aceh (artikel), <http://www.aceh.institute.org>. 2006.

Pusat Ilmu Pengetahuan se-Asia Tenggara. Dari sinilah yang menurut penulis sangat menarik untuk dikaji mengenai *meunasah* sebagai institusi pendidikan Islam tradisional terutama pada masa Kesultanan Aceh periode tahun 1520-1675 M.

Bentuk *meunasah* tampak secara fisik merupakan bangunan bentuk rumah panggung,<sup>19</sup> yang didirikan di setiap gampong atau desa di mana di sekitarnya terdapat sumur, bak untuk penampungan air dan kamar mandi sebagai tempat keperluan buang air. Pada dasarnya *meunasah* didirikan dan terletak di pinggir jalan.<sup>20</sup>

Bangunan *meunasah* terletak (umumnya) berada di tengah *gampông* atau letak daerah yang terjangkau secara mudah oleh masyarakat. Berbentuk rumah adat atau rumah tradisional Aceh yang terbuat dari kayu pilihan dengan *daun rumbia* sebagai atap dan dinding dirancang sedemikian rupa secara terbuka. Berbagai ukiran yang menghiasi dengan beberapa tiang kayu yang letaknya lebih tinggi dari tanah. Terkadang bagian depan *meunasah* terdapat beranda yang agak rendah, biasanya digunakan sebagai tempat istirahat orang-orang yang datang dan di sinilah tercipta interaksi sosial antar warga masyarakat. Sehingga *meunasah* berfungsi secara terbuka menjadi pusat hubungan sosial yang efektif yang bersifat informal dalam masyarakat Aceh.<sup>21</sup>

Pada dasarnya, bangunan *meunasah* sama persis seperti rumah tradisional Aceh. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan variasi secara mendasar, diantaranya; 1) Pada posisi letak bangunan; secara posisi, letak bangunan rumah tradisional Aceh membujur (Timur-Barat) ke arah kiblat (Mekkah), sedangkan letak *meunasah* melintang (Utara-Selatan) atau letaknya menghadap-menyalang rumah tradisional Aceh; 2) Pada lantai; lantai bangunan rumah tradisional Aceh di bagian tengahnya terlihat lebih tinggi, sedang lantai pada *meunasah* terlihat datar dan rata; 3) Pada ruangan; pada rumah tradisional Aceh memiliki tiga ruangan utama, yakni ruangan depan (*serambi*), ruangan

<sup>19</sup> Kini bentuk bangunan fisik *meunasah* banyak yang telah berubah tidak hanya seperti rumah panggung tetapi juga sudah beton (permanen) dan dari segi arsitekturnya ada juga yang tidak lagi mengikuti arsitektur rumah Aceh.

<sup>20</sup> Abudin Nata, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grasindo bekerja sama dengan IAIN Jakarta, 2000), hlm. 42

<sup>21</sup> Safwan Idris, "Pendidikan di Aceh", dalam Badruzzaman Ismail, dkk., (ed.), *Perkembangan Pendidikan di Daerah Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah, 1995), hlm. 1-23

besar (*tungai*) dan serambi belakang (*seramoe likot*), sedangkan ruangan pada *meunasah* hanya terdiri dari ruangan depan (serambi) dan ruangan besar (*tungai*) saja; 4) Bentuk tiang; tiang pada bangunan rumah tradisional Aceh umumnya berbentuk bulat, dan memiliki dua buah tiang utama, yakni tiang raja dan tiang putri, sedangkan bangunan pada *meunasah* tiangnya berbentuk persegi delapan, akan tetapi tidak memiliki tiang utama seperti pada bangunan rumah tradisional Aceh.

Luasnya fluktuasi terjadi karena adanya gejala mekanisme Islamisasi yang meningkat tajam pada suatu wilayah, begitu pula yang dialami Aceh, mekanisme Islamisasi membentuk sistem secara progresif pada setiap sendi kehidupan, baik dari sendi sosial, budaya hingga pada ideologi. Salah satu contoh yang telah ada dalam membentuk sistem secara progresif di daerah Aceh adalah pada bidang kesenian, terutama seni arsitektur. Khususnya ketika Kerajaan Aceh Darussalam memegang tampuk kekuasaannya, setelah terbentuk sistem secara progresif arsitektur Islami (yang terpusat pada Arab, khususnya Mekkah) tersebut menjadikan seni arsitektur di daerah Aceh sendiri mengalami dampak pergeseran, baik secara fisik (bentuk, rupa, macam, keadaan, dsb.) maupun secara sifat (metode, tingkah laku, dan kepribadian yang mengandung pengajaran secara Islami). Begitu pula dengan bangunan-bangunannya, seperti istana, tempat ibadah, rumah adat, rumah tradisional, institusi pendidikan, secara keseluruhan berganti dengan seni dan budaya Islam.

Terlebih lagi dampak nyata yang terjadi, ketika Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam (1607-1636) berkuasa yang telah menginstruksikan kepada seluruh masyarakat Aceh untuk menyeragamkan bentuk bangunan dengan label dan nama seni bangunan Islam sebagai bentuk persamaan dan satu ketauhidan yang menjadi dasar fondasi pada setiap bangunannya.<sup>22</sup>

Meskipun bentuk bangunan *meunasah* merupakan bentuk yang umum dan global, akan tetapi *meunasah* tidak bisa terlepas dari sisi seni dan ajaran Islam. Memang, secara bentuk fisik dan untuk beragam kegiatan, *meunasah* merupakan rumah milik orang *se-gampông* atau satu desa, sebab berguna dan bermanfaat secara umum, seperti dari segi keagamaan digunakan untuk tempat beribadah (semisal langgar/mushalla) dan berfungsi untuk sosial

---

<sup>22</sup> Denys Lombard, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, terj: Winarsih Arifin, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), hlm. 77

kemasyarakatan, sehingga *meunasah* bisa sebagai sentral terciptanya budaya dan peradaban yang Islami. Sebagaimana masjid yang dijadikan sebagai tempat untuk beribadah, begitu pula dengan *meunasah*, mau tak mau mesti mengikuti seni Islam, baik yang bermacam bentuk seni kaligrafi dengan berbagai ornamen model seni Islamnya, sehingga *meunasah* menjadi sebuah bangunan yang memiliki pamor, yang tidak dibolehkan menjadi tempat untuk melakukan kemaksiatan dan asusila.

Sepertinya, pada masa-masa terdahulu, berbagai bangunan yang didirikan di Aceh sejatinya lebih menaruh perhatian kepada sisi budaya keislamannya, baik dari mekanisme pendirian atau pembuatannya, integritas pengelolaannya dan mengutamakan serta memprioritaskan segi manfaat dan tanggung jawab secara keagamaan.

*Pertama*, mekanisme pendirian atau pembuatan. Pada tahap ini bagi masyarakat Aceh merupakan tahap menghimpun dan mempersiapkan berbagai bahan, baik dari kayu, bambu, daun rumbia (*ôen meuria*), pelepah rumbia, dan berbagai bahan lainnya. Jika seluruh bahan telah terhimpun dan tersedia serta telah rampung untuk mendirikan bangunan, maka masyarakat *gampông* akan menyelenggarakan perhelatan (*kenduri*) sebagai bentuk permohonan do'a kepada Allah supaya bangunan yang akan didirikan dapat dimanfaatkan sebagai tempat ibadah kepada Allah. Demi sempurnanya tahap ini, maka seluruh daya upaya supaya bangunan yang akan didirikan mendapatkan pancaran cahaya Ilahi, maka bangunan (*meunasah*) itu diperindah dan dihias dengan bermacam kaligrafi yang terkandung seruan dan dakwah Islamiyah, serta arahan-arahan yang mendidik supaya orang-orang yang masuk akan mendapat hikmahnya.

*Kedua*, integritas pengelolaan. Pada umumnya, *meunasah* dibangun akan bernilai secara sistematis dan akan menjadi tempat mendidik bagi masyarakat *gampông* di Aceh, akan tetapi hal itu tergantung kepada integritas pengelola, yakni integritas *teungku meunasah* itu sendiri. Oleh karenanya, integritas *teungku meunasah* setidaknya mesti mempunyai keahlian dan mampu memberikan pemahaman mengenai permasalahan keagamaan, yang diistilahkan dalam bahasa Aceh *ureung nyang malem* atau orang yang ahli/mahir ilmu agama.<sup>23</sup> *Ketiga*, *meunasah* memiliki fungsi secara optimal di setiap sendi kehidupan.

<sup>23</sup> Taufik Abdullah et.al., *Ensiklopedi Tematis*, hlm. 222

Oleh karena itu, untuk menggapai hal itu, maka sebagaimana pandangan hidup orang Aceh, diperlukan adanya kesatuan zat dan sifat antara pemangku adat, kepala *gampông* (*keuchik*) dengan pemangku agama (*teungku*) dalam menumbuh-kembangkan fungsi kegunaan dan semangat *meunasah* di setiap sendi kehidupan masyarakat itu sendiri.

## 2. Fungsi *Meunasah* dalam Masyarakat Aceh

Bagi sebagian besar masyarakat Aceh, terutama pada masa Kesultanan Aceh, *meunasah* merupakan komponen yang sistemis untuk membentuk wilayah dalam ruang lingkup yang terarah dan dibawah kepemimpinan sultan terhadap kalangan bawah (rakyat biasa). Keadaan itu menjelaskan bahwa seluruh rencana dan rancangan pemerintah pusat akan terlaksana dengan lancar, diumpamakan seorang sultan atau pemimpin memberikan instruksi mengenai peningkatan bahan pangan, maka penerapannya untuk rakyat kalangan bawah dengan wilayah sasaran di tingkat *gampông* atau *meunasah* yang menjadi lokasi untuk berinteraksi antar masyarakat Aceh.

Menyadari begitu banyaknya kegunaan *meunasah*, maka mengenai hal itu penting pula untuk mengidentifikasi satu demi satu kegunaan *meunasah* tersebut, baik dari segi politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun kegunaan suatu institusi keagamaan dan pendidikan. Mengutip gagasan pendapat dari Abd. Rahman Gani; *meunasah* dalam Kerajaan Aceh Darussalam memiliki kegunaan, diantaranya; 1) Menjadi Balai Musyawarah Rakyat; 2) Menjadi lembaga pendidikan; 3) Menjadi taman hiburan yang sesuai dengan kebudayaan Islam; 4) Menjadi wisma bagi anak-anak yang baru aqil baligh (beranjak dewasa); 5) Menjadi wisma bagi musafir; 6) Menjadi tempat pada acara pernikahan atau rujuk; 7) Menjadi Mahkamah Pengadilan Damai; 8) Menjadi tempat untuk berbagai upacara keagamaan dan ritual lainnya (seperti upacara Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, tadarrus, qasidah, dan sebagainya).<sup>24</sup>

Anggapan tersebut di atas sejalan dengan pendapat Badruzzaman Ismail, bahwa pada masa terdahulu *meunasah* memiliki beragam daya guna, diantaranya; 1) Sebagai tempat untuk bermusyawarah; 2) Sebagai tempat untuk pendidikan

<sup>24</sup> Abdurrahman A. Gani, *Pandangan Hidup Rakyat Aceh Adat Bak Poteu Meureuhom Hukum Bak Syiah Kuala*, Skripsi Pada Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Tidak dipublikasikan, 1974, hlm. 21

dan pengajian; 3) Sebagai tempat untuk beribadah (seperti shalat atau ibadah lainnya); 4) Sebagai tempat untuk hiburan dan seni (seperti *dalail khairat*, *meusifeut*, *meurukôn*, *ratep duek*, dan sebagainya); 5) Sebagai tempat untuk asah terampil atau asah otak (seperti *meucabang* atau catur tradisional Aceh) sembari dialog dan diskusi; 6) Sebagai tempat untuk berbuka puasa bersama (dengan istilah “*ie bu da peudah*”).<sup>25</sup>

Selanjutnya, untuk memahami pendapat Badruzzaman Ismail di atas, maka akan diuraikan penjelasannya berikut di bawah ini:

*Pertama*, maksud dari *meunasah* menjadi tempat untuk bermusyawarah bagi masyarakat, bahwa desa atau *gampông* yang berada di tingkat bawah dalam sistem masyarakat di Aceh merupakan lembaga yang dijadikan pusat pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan *gampông*. *Kedua*, pengertian dari *meunasah* menjadi tempat untuk pendidikan dan pengajian, bahwa *meunasah* selain sebagai tempat ibadah sekaligus dapat berfungsi sebagai madrasah, dimana *teungku meunasah* sebagai pengampu yang sekaligus sebagai penyelenggara pendidikan dan pengajaran dalam bentuk pengajian bagi masyarakat desa atau *gampông* dari tingkat anak-anak (usia dini; 6-8 tahun), generasi muda hingga tingkat dewasa dan tua, baik dari membaca dan menulis huruf Arab, mengajarkan baca Alqur’an, mengajarkan tata cara beribadah, menjelaskan Rukun Islam dan Rukun Iman, mengajarkan Kitab Perukunan, dan menjelaskan *Risalah Masailal Muhtadin*.<sup>26</sup>

*Ketiga*, pemahaman dari *meunasah* menjadi tempat untuk beribadah, bahwa *teungku meunasah* selaku pengelola *meunasah* dapat memfungsikannya sebagaimana fungsi masjid, yakni sebagai rumah tempat beribadah. Umumnya, *meunasah* dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat *gampông* atau desa sebagai tempat beribadah (shalat/*seumayang*) dengan mendatangi *meunasah* secara beramai-ramai ketika *maghrib* (matahari telah terbenam), pada saat bedug (*tambô*) telah dipukul oleh pendamping atau pembantu *teungku meunasah*. Begitu pula ketika menjelang Ramadhan (bulan puasa), shalat dilakukan secara teratur, tepat pada waktunya di waktu malam menjelang tarawih.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Badruzzaman Ismail, *Mesjid dan Adat Meunasah Sebagai Sumber Energi Budaya Aceh*, (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi NAD, 20020, hlm. 4

<sup>26</sup> Hasjmy, *Pendidikan Islam di Aceh*, hlm. 7

<sup>27</sup> C. Snouck Hurgronje, *ACEH*, hlm. 48-49

Akan tetapi Snouck menyatakan bahwa *meunasah* tidak pernah dijadikan sebagai tempat pelaksanaan shalat Jum'at, sebagaimana juga di Jawa tidak pernah menjadikan langgar sebagai tempat dilaksanakannya shalat Jum'at.

*Keempat*, maksud dari *meunasah* menjadi tempat untuk hiburan dan seni, bahwa sejumlah fakta yang terlihat dalam masyarakat Aceh, ditemukannya suatu tradisi melantunkan *ratéb saman*, sedangkan nama *ratéb saman* sendiri menurut Snouck diambil dari nama seorang wali atau auliya yang hidup beberapa abad yang lalu di Madinah. Begitu juga seni memukul *tambô* yang dilakukan secara teratur (*ritmis*) dan berirama, sebagai contoh *pulet*, *rebana* atau *rapa'i* yang biasanya digelar pada malam Jum'at sesudah ditunaikannya shalat fardhu. Bahkan pula ditemukannya seni Islami yang lain seperti *dalail khairat*, *meusifeut*, *ratéb duek* dan sebagainya.

*Kelima*, pemahaman dari *meunasah* menjadi tempat pada acara pernikahan atau rujuk, bahwa Snouck menyatakan, *meunasah* juga memiliki fungsi untuk media penyelenggaraan akad pernikahan atau perkawinan.<sup>28</sup> Pendapat Snouck tersebut didukung oleh Abd. Rahman Gani melalui pernyataannya bahwa *meunasah* selain memiliki fungsi seperti Kantor Urusan Agama, juga memiliki fungsi menjadi lembaga institusi pernikahan dan rujuk. Masalah tersebut kemungkinan teratasi jika *teungku meunasah* bersedia, dan memiliki izin serta persetujuan dari keuchik jikalau memang lembaga nikah/rujuk/fasakh diperlukan secara mendesak di *gampông*, tujuannya jika yang memiliki hajat bertempat tinggal terlalu jauh dari Kantor Urusan Agama, maka *meunasah* bisa dijadikan alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Jika ditelusuri melalui perjalanan sejarah, masih sangat banyak kegunaan *meunasah*, bahkan *meunasah* bisa dimanfaatkan secara serba-guna yang meliputi seluruh sisi kehidupan manusia, diantaranya; 1) menjadi sarana penginapan bagi musafir; 2) menjadi media sarana transaksi jual-beli; 3) menjadi media sarana mahkamah damai atau media sarana untuk menyelesaikan perselisihan jika hal itu terjadi di dalam masyarakat *gampông*; 4) menjadi media sarana untuk berzikir, berdo'a, bahkan praktek tarekat (suluk), dan sebagainya.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 57

### 3. Perkembangan Meunasah Masa Kesultanan Aceh Darussalam (1520-1675)

#### a. Sebelum Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1520-1606)

Sebagaimana penjelasan mengenai perkembangan Islam pada mulanya di bab pendahuluan tulisan ini, bahwa masyarakat muslim di Indonesia memberikan perhatiannya dan selalu memprioritaskan keutamaan terhadap pendidikan. Oleh karenanya, pendidikan begitu berarti dan begitu pentingnya bagi penyebaran Islam dalam pengislamisasian selanjutnya untuk memotivasi umat Islam dalam penyelenggaraan pembelajaran agama Islam itu sendiri. Pembelajaran tersebut menggunakan metode *halaqah* yang merupakan metode sederhana dan mudah dalam pemberian pengajarannya. Pelaksanaan pembelajarannya dapat dilakukan di beberapa rumah para ulama atau di tempat-tempat ibadah, seperti masjid, langgar atau mushalla. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia sebagai pendorong, pengadopsi dan pentransferan institusi sosial dan agama yang telah terbentuk dalam wujud lembaga pendidikan Islam.<sup>29</sup> Seperti umat Islam yang berada di Jawa, bentuk pesantren merupakan pentransferan dari bentuk padepokan lembaga keagamaan Hindu-Budha, sedangkan di Minangkabau sendiri lembaga pendidikan Islam yang terbentuk merupakan pengambil-alihan dari surau yang merupakan warisan tradisi masyarakat setempat.

Pertumbuhan berbagai lembaga pendidikan Islam di Aceh sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pada masa hadirnya kerajaan-kerajaan Islam Aceh itu sendiri. Sebagaimana munculnya *madrasah* dalam bentuk *meunasah*, *rangkang*, *zawiyah* dalam bentuk *dayah*, dan masjid-masjid terutama Bait al-Rahman, semua itu tidak terlepas dari perjalanan Islamisasi dari bentuk kebijakan Sultan-Sultan dari Kerajaan Peureulak (Perlak), Samudera Pasai (Aceh Utara) dan Kerajaan Aceh Darussalam.

---

<sup>29</sup> Pendidikan Islam dalam perjalanannya sangat dipengaruhi oleh dua arus pergumulan. Pertama, bidang politik (kekuasaan) dan kedua, bidang pemikiran Islam. Dua arus pergumulan bidang politik dan pemikiran dalam sejarah pendidikan Islam adalah ditemukannya lembaga-lembaga pendidikan yang khusus dan sekaligus merupakan ciri aliran tertentu. Sebagai misal, berdirinya lembaga Dâr al-Hikmah lebih mengarah pada pola pendidikan failisuf (filsafat) dan pengikut Syi'ah. Berdirinya lembaga-lembaga al-Zawiyah atau al-Ribath adalah mengarah pada pola khas sufi (tasawuf). Madrasah pada awalnya merupakan lembaga pendidikan yang didukung oleh para ulama fiqh dan al-Hadits. Untuk selengkapnya lihat Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, 1999, hlm. 64-65



Dari sini, muncul sebuah pertanyaan, kapankah *meunasah* itu muncul? Muhammad Ibrahim, dkk melakukan sebuah penelitian mengenai kemunculan *meunasah* di Aceh. Sehingga ia memberikan dua asumsi mengenai akan hal itu, yakni; 1) *meunasah* hadir sejak masyarakat *gampông* atau desa Islam terbentuk; 2) sebelum kedatangan Islam, jauh sebelumnya masyarakat Aceh sudah mengenal lembaga atau institusi yang semisal *meunasah*, akan tetapi sampai dengan sekarang belum mengetahui keaslian dan asal mula nama *meunasah* tersebut.<sup>30</sup> Sebagaimana Snouck Hurgronje<sup>31</sup> memberikan asumsi terhadap pendapat kedua tersebut, bahwa keberadaan *meunasah* itu sendiri sudah sangat tua, lebih tua dari nama “*meunasah*” itu sendiri.

Menurut hasil peninjauan, ketika masyarakat Islam terbentuk di Aceh, sejatinya, dipahami secara umum, awal nama “*meunasah*” berasal dari bahasa Arab “*madrasah*”, yang pada waktu itu masyarakat Aceh mengenali *meunasah* merupakan sebuah lembaga keagamaan. Akan tetapi, kemungkinan lembaga semisal *meunasah* tersebut telah muncul sebelum masyarakat Islam terbentuk, meskipun nama *meunasah* itu sendiri belum dikenali. Hal ini sesuai pendapat Asrohah yang mengemukakan bahwa pendidikan sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia sebagai pendorong, pengadopsi dan pentransferan institusi sosial dan agama yang telah terbentuk dalam wujud lembaga pendidikan Islam di Indonesia.<sup>32</sup> Sebagaimana umat Islam yang berada di Jawa, bentuk pesantren merupakan pentransferan dari bentuk padepokan lembaga keagamaan Hindu-Budha, sedangkan di Minangkabau sendiri lembaga pendidikan Islam yang terbentuk merupakan pengambil-alihan dari surau yang merupakan warisan tradisi masyarakat setempat. Sehingga memunculkan argumentasi yang didasarkan pada teori tersebut, bahwa kemungkinan bentuk *meunasah* merupakan pentransferan lembaga keagamaan Hindu-Budha sebelumnya, dikarenakan masyarakat Islam baru terbentuk pada waktu itu di Aceh.

Sultan ‘Alaididin Ali Mughayat Syah memproklamkan Kerajaan Aceh Darussalam pada tanggal 12 Zulkaedah 916 H (1511 M).<sup>33</sup> Di awal-awal Kerajaan

<sup>30</sup> Muhammad Ibrahim dkk., *Sejarah Pendidikan*, hlm. 21

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>32</sup> Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 144

<sup>33</sup> Berbeda dengan Hasjmy, Taufik Abdullah menjelaskan bahwa Kerajaan Aceh Darussalam didirikan pada tahun 1514. Namun menurut peneliti perbedaan tersebut

Aceh Darussalam ini lah perubahan (transformasi) budaya di Aceh terjadi secara besar-besaran. Dibawah kepemimpinan Sultan 'Alaiddin Mughayat Syah (1511-1530 M), Aceh berhasil disatukan dan menumpas Portugis yang pada masa itu menjajah Aceh sehingga tercipta sebuah kerajaan yang memiliki cita-cita yang besar dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara, mewujudkan tamaddun dengan budaya yang tinggi di kawasan kepulauan Nusantara ini. Menurut Zakaria Ahmad, bahwa melalui penyebaran agama Islam secara gencar di kalangan masyarakat, mengakibatkan muncul dan bangkitnya semangat berjihad dalam melawan semangat agresor Portugis.<sup>34</sup>

Sejalan dengan perkembangan perekonomian dan politik pemerintah pada masa Kerajaan Aceh Darussalam sebelum masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, baik dari kepemimpinan Ali Mughayat Syah hingga kepemimpinan Ali Ri'ayat Syah, ketika itu pertumbuhan pendidikan Islam mengalami pasang surut.

Perihal yang dapat dibanggakan ketika 'Alaiddin Ri'ayat Syah al-Qahhar (1538-1571 M) memimpin, yakni pesatnya pertumbuhan dalam hubungan dengan luar negeri, baik dari perdagangan hingga kemiliteran. Hubungan tersebut dibangun dengan beberapa negara, yaitu Turki, India dan Persia melalui sistem ekspor-impor dengan metode tukar menukar barang, dari pembelian senjata hingga kerjasama pertahanan. Pada 1562, Sultan al-Qahhar memohon bantuan dari Turki dengan mengirimkan utusannya ke Istanbul. Sehingga Sultan Turki mengirimkan para utusannya, ahli dan tukang untuk membuat alat senjata dan meriam.<sup>35</sup> Begitu pula perkembangan yang dapat dibanggakan terjadi pada masa kepemimpinan berikutnya, yaitu pada masa-masa Sultan Husin (1571-1579 M) dan Sultan Mansyur Syah Perak (1579-1586 M).

Pinto mengemukakan, sebagaimana dikutip Zakaria Ahmad, bahwa dari hasil catatan seorang Portugis yang melakukan perjalanan ke Timur menyatakan bahwa hubungan kerjasama yang tercipta, Aceh dengan membawa beberapa kapal Aceh, mendapatkan bantuan berupa 300 orang ahli dan peralatan senjata dari Turki.<sup>36</sup>

---

sesuatu yang lumrah terjadi dalam penulisan sejarah dan bukanlah persoalan yang dinilai penting untuk dipermasalahkan.

<sup>34</sup> Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam tahun 1520-1675*, (Medan: Penerbit Monora, 1972), hlm. 37

<sup>35</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jil. I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 51

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 41

Hal ini berdampak pada meningkatnya perekonomian dan kemiliteran (dalam bidang politik) yang secara tidak langsung memiliki pengaruh terhadap perkembangan pendidikan dan lembaga pendidikan pada masa itu. Pada masa kepemimpinan al-Qahhar ini lah perkembangan pendidikan tersebut terjadi secara signifikan. Hal ini ditandai dengan mendatangkan ulama dari India dan Persia, dengan memberikan pelajaran ilmu pengetahuan sekaligus menyebarkan Islam ke pedalaman Sumatera dengan mendirikan pusat dakwah Islamiyah di Ulakan, dan Islam tersebut dibawa hingga Minangkabau dan Indrapura. Sultan al-Qahhar memiliki andil yang teramat besar terhadap perkembangan pendidikan Islam di Aceh Darussalam hingga wafat bertepatan pada tanggal 28 September 1571 M.<sup>37</sup>

Begitu pun ketika Sultan Husein (1571-1579 M) masih berkuasa, seorang Ulama Mekkah yang bernama Muhammad Azhari kelahiran Mesir bermazhab Syafi'i mendarangi Aceh hingga wafat, guna mengajarkan ilmu pengetahuan tentang metafisika di Ibukota Kerajaan Aceh Darussalam. Didatangkannya para ulama yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan merupakan suatu kebijakan dari sultan yang memberikan tanda bahwa sultan memberikan perhatiannya yang begitu besar (baik dari Sultan al-Qahhar hingga Sultan Husein) terhadap kemajuan pendidikan Islam dalam kawasan kekuasaannya. Sebagian besar peneliti menyatakan bahwa hal ini merupakan bukti kuat menjadi suatu alasan, bahkan bisa dikatakan sesuatu yang dapat dibanggakan bahwa begitu pesatnya lembaga pendidikan Islam tradisional di Aceh, baik dari *meunasah*, *rangrang* hingga *dayah*.

Berikutnya, mengenai kemajuan pendidikan Islam di Aceh tidak terlepas dari berbagai rintangan dan hambatan, meskipun tidak terlalu mempengaruhinya secara menyeluruh. Hal ini disebabkan karena terjadinya perang memperebutkan tampuk kepemimpinan di Kerajaan Aceh Darussalam sebelum datangnya masa Iskandar Muda. Dalam pernyataannya, Said bercerita bahwa terjadinya kekacauan dalam bidang politik di Kesultanan Aceh setelah wafatnya Sultan Husein yang mengakibatkan dalam rentang waktu beberapa bulan saja sudah mengalami tiga kali pergantian sultan. Sehingga, sepeninggal Sultan Husein kesultanan Aceh secara berurutan dikuasai; 1) Sultan Muda (1579 M), yang merupakan seorang anak kecil, memimpin selama tiga bulan dan wafat diusia tujuh bulan; 2) Sultan Sri Alam (1579 M), dua bulan memimpin tidak lama

---

<sup>37</sup> *Ibid.*

kemudian dibunuh; 3) Sultan Zaenal Abidin (1579 M), menaiki tahta hanya sepuluh bulan, lalu pada 5 Oktober 1579 dibunuh.<sup>38</sup>

Meskipun masih saja sering terjadi berbagai kericuhan, Kesultanan Aceh Darussalam secara bertahap dan perlahan-lahan mulai berbenah diri. Pada masa ini Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Zaenal Abidin, seorang sultan yang memiliki akhlakul karimah dan memiliki gelar Mansur Syah Perak (1579-1586 M). Konon, dalam berita terdahulu, terpilihnya Sultan Mansur Syah Perak, beliau dianggap sosok pemimpin yang terdapat dalam riwayat kitab *Bustan al-Salatin*, yakni sosok yang memiliki perangai alim, shaleh dan adil. Beliau sengaja melakukan memperluas peluang secara terbuka dengan tujuan agar para guru agama dan ulama da'i dari luar wilayah (negeri) datang ke Aceh.<sup>39</sup>

Pada 1582, dikabarkan bahwa masa kepemimpinan Mansur Syah Perak (1579-1586 M) pernah kedatangan dua orang ulama besar dari negeri Arab, yakni Kota Yaman, yang bernama Abdul Khair Ibn Hajar dan Syekh Muhammad Yamani. Selain dari kedua orang tersebut, datang pula salah seorang ulama yang menguasai ilmu Ushuluddin bernama Syekh Muhammad Jaelani Ibn Hasan Ibn Muhammad al-Raniry yang berasal dari Gujarat, (beliau merupakan paman dari Syekh Nuruddin ar-Raniry, pen). Ketiga ulama tersebut menjadi pengajar yang mengajarkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu Tasawuf dan Fiqh.<sup>40</sup>

Said (1981: 208), menyatakan bahwa Sultan Buyung yang bergelar Sultan Ali Ri'ayat Syah (1585-1589 M) menjadi pengganti Sultan Mansur Syah Perak, sebab beliau terbunuh dan wafat pada 12 Januari 1585. Menurutnya lagi, seorang sultan yang terpilih merupakan hasil dari musyawarah (kemufakatan) para petinggi kerajaan, akan tetapi Sultan Buyung juga dibunuh pada tahun 1589 sebagai akhir dari kepemimpinannya.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 205

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 206

<sup>40</sup> H.M. Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, (Medan: Pustaka Iskandar Muda, t.th.), hlm. 248; Bachtiar Ali, "Relevansi Pelestarian Adat dan Budaya Aceh Bagi Kepentingan Pengembangan Budaya Bangsa Indonesia Sepanjang Masa", dalam: T. Ali Basyah Talsya, *Adat dan Budaya Aceh-Nada dan Warna*, (Jakarta: Panitia Penyelenggara Seminar dan Mubes ke-2 Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA) Pusat, Tanggal 12-15 September 1994), hlm. 247-248

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 49

Kestabilan Kesultanan Aceh seketika terjadi ketika penobatan Sultan Alauddin Ri'ayat Syah Sayid al-Mukammal (1589-1604 M). Ketika muda, beliau begitu aktifnya ikut bertempur melawan Portugis dan berjasa besar dalam membela negeri. Setelah penobatannya, pertama kali beliau berusaha melakukan perwujudan situasi dan kondisi yang aman dan tenteram di Kerajaan Aceh Darussalam secara menyeluruh. Dibawah kepemimpinannya, beliau berhasil memulihkan Aceh dari krisis dan menciptakan kemajuan yang begitu pesat dari bidang ekonomi, politik hingga bidang sosial. Bahkan, pada masa kepemimpinan beliau ini lah, lahir para ulama yang memiliki pengaruh begitu besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan agama, diantaranya; Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Syeikh Ibrahim as-Syami dan Syeikh Djailani.<sup>42</sup>

Pada masa Kerajaan Aceh Darussalam sebelum masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, begitu jelas terlihat akan kemajuannya, seperti yang telah diuraikan pada pembahasan di atas sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan kemajuan akan pendidikan dan ilmu pengetahuannya. Hal ini disebabkan oleh begitu gigih dan cintanya para sultan akan pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga seluruh rakyat juga turut termotivasi. Bahkan dapat membentuk cara berpikir masyarakat Islam kala itu bahwa secara historis pendidikan yang dimiliki oleh rakyat Aceh tidak pernah memahami adanya perbedaan (*dualitas*) antara pendidikan agama dan pendidikan umum.<sup>43</sup>

Oleh karenanya, anggapan bahwa tumbuh-kembangnya pendidikan ketika itu begitu pesat diindikasikan oleh hal-hal sebagai berikut. *Pertama*, begitu besarnya sultan dalam memperhatikan kemajuan akan pendidikan dan ilmu pengetahuan, hingga sultan ikut berperan serta demi pembangunan berbagai lembaga pendidikan. *Kedua*, para ulama yang ahli di bidang ilmu pengetahuannya sendiri-sendiri yang datang ke Aceh, hal ini berdasarkan keinginannya sendiri atau bahkan berdasarkan undangan dari para sultan. *Ketiga*, menyebarnya berbagai lembaga pendidikan Islam di segenap kawasan

---

<sup>42</sup> Syeikh Djailani ini pernah dua kali datang ke Aceh, yaitu pada masa Sultan Mansur Syah. Pada saat itu di Aceh sedang pesatnya pengembangan ilmu tasawuf, sehingga beliau diminta untuk mengajarkan tasawuf, padahal beliau ahli ilmu mantiq, balaghah dan fikih. Karena tertarik kepada ilmu tasawuf beliau kembali ke Mekkah dan kemudian kembali ke Aceh pada masa Sultan al-Mukammal dan mengajar tasawuf di Aceh.

<sup>43</sup> Ismail Yakub, "Gambaran Pendidikan di Aceh Sesudah Perang Aceh-Belanda Sampai Sekarang", dalam Ismail Suny, (ed.), Bunga Rampai Tentang Aceh, (Jakarta: Bhratara Aksara, 1980), hlm. 319

Kesultanan Aceh. Sebagaimana diketahui, *meunasah* sudah ada di setiap *gampông* (desa), *rangkang* ada di setiap *mukim* dan sudah adanya *dayah* sebagai lembaga pendidikan tinggi.

**b. Masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637)**

Ketika Sultan Iskandar Muda memerintah, Kerajaan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan bidang pendidikan. Keadaan yang begitu mengagumkan yang berkaitan dengan pendidikan Islam ketika Sultan Iskandar Muda menduduki tampuk kekuasaannya ialah berbagai strategi yang beliau miliki begitu mendalam dan terorganisir. Hal ini beliau lakukan untuk mencapai sasaran membentuk sistem pendidikan yang tersistematisasi secara terpusat terus ke bawah, yakni dari pemerintah pusat hingga ke *gampông*, melalui penetapan tujuan pendidikan: 1) menciptakan orang-orang yang nantinya mampu memimpin di tengah-tengah masyarakat baik sebagai sultan, menteri, qadhi dan berbagai jabatan kenegaraan lainnya melalui berbagai persyaratan yang telah ditentukan; 2) menciptakan orang-orang dalam masyarakat baik secara global maupun universal yang mampu melaksanakan amar makruf dan meninggalkan berbagai kemungkaran.

Sultan mencanangkan tujuan pendidikan tersebut sebagai bentuk wujud nyata bagi masyarakat sehingga terbentuk dan terciptanya suatu kebiasaan dalam masyarakat Aceh. Sebagaimana pernyataan yang terdapat dalam *Kanun Meukuta Alam* bahwa sebagai pemangku jabatan, baik pemangku jabatan agama dan pemangku jabatan negara, yakni ulama dan raja, antara keduanya, baik ulama dan umara mesti bersatu, tidak boleh terpecah belah, jika terpecah belah, maka akan mengakibatkan binasa (hancurnya) negeri.

Mengenai hal berkaitan dengan pendidikan, dalam organisasi pemerintah pada masa Iskandar Muda telah dilakukan pentransferan yang menggunakan mekanisme Madrasah Nizamiyah. Oleh karenanya strategi pendidikan senantiasa tertata secara terstruktur dari tingkatan yang terendah yakni *meunasah* hingga tingkatan tertinggi yaitu jenjang pendidikan tinggi. Berbagai tingkatan pendidikan tersebut baik *meunasah*, *rangkang*, *dayah*, *dayah teungku chik* hingga *Jami'ah Bait ar-Rahman* membentuk satu kesatuan mekanisme pendidikan yang sinergis dan berjenjang dengan hasil keluaran (*output*) yang berkesinambungan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Hasjmy, "Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan",

Menurut peneliti, sebutan *meunasah* jika diartikan sebagai madrasah, yang menjadi pendidikan dasar bagi kepemimpinan Iskandar Muda merupakan menjadi tujuan diseminasi (pemasyarakatan) mekanisme pendidikan madrasah itu sendiri (menurut defenisi Nizamiyah) di tingkat wilayah terpelosok *gampông* atau desa (dalam bentuk *meunasah*). Bahkan menjadi fakta terjadinya pembauran keislaman dalam organisasi pemerintahan baik dari *gampông*, *mukim*, daerah *ulee balang*, *sagoe* dengan membentuk satu kesatuan antara pemangku agama *teungku meunasah*, *imum masjid*, qadhi dan hakim seperti zat dengan sifat, dan adat dengan agama yang selaras dan sejalan.

Diterapkannya mekanisme di atas tersebut yang dilakukan Iskandar Muda memiliki tujuan dengan ditandai, diantaranya: 1) Mombaurnya secara keislaman berbagai lembaga pemerintahan yang telah ada sejak zaman terdahulu, dan yang paling terkenal *gampông* dengan *meunasah*, meskipun dari makna yang sebenarnya *meunasah* berasal dari bahasa Arab madrasah.<sup>45</sup> 2) Memasyarakatkan agenda program bebas buta huruf terutama bahasa Arab, melalui pelaksanaan secara terstruktur, dimana sebagai pelaksanaanya misal *keuchik* (pemangku adat) dengan pemangku agama (*teungku meunasah*). A. Hasjmy mengemukakan perihal usaha yang dilakukan Iskandar Muda di Kerajaan Aceh Darussalam dalam membebaskan buta huruf bagi Aceh, bahwa penjenjangan pendidikan yang telah dicanangkan merupakan suatu usaha penyebaran Islam melalui dakwah Islamiyah yang menjadi tuntutan dan usaha wajib dalam memberantas buta huruf dan buta ilmu.<sup>46</sup> Sebagaimana pengakuan seorang diplomat Perancis, Augustin de Beaulieu yang mengunjungi Aceh pada abad ke-17 masa kepemimpinan Iskandar Muda, menyatakan bahwa pada masa itu buta huruf tidak dikenali lagi di Aceh.<sup>47</sup>

Lanjutnya lagi, Beaulieu menyatakan bahwa di kota Bandar Aceh Darussalam pada masa Iskandar Muda tersebut seni kerajinan yang berkaitan dengan pertukangan begitu dihargai, banyaknya ditemukan para tukang besi yang mampu menciptakan berbagai peralatan dari besi, para tukang kayu yang mahir menciptakan kapal dan perahu, dan para tukang penuang tembaga

---

dalam Ismail Suny, (ed.), *Bunga Rampai Tentang Aceh*, (Jakarta: Bhrotara Aksara, 1980), hlm. 214

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 48

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 192

yang ahli. Bahkan Beaulieu sendiri mengakui bahwa kapal Galley orang Aceh amat bagus, penuh dengan ukiran-ukiran, berbadan tinggi dan lebar.<sup>48</sup>

Berdasarkan pemaparan yang telah Beaulieu kemukakan, maka jelas dapat dianggapkan bahwa perkembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan berjalan begitu cepat. Terlihat bahwa *skill* kemampuan seperti itu mustahil hadir dengan begitu saja, tanpa adanya proses pendidikan yang dilalui, terutama pendidikan keterampilan. Oleh karenanya terlihat begitu jelas bahwa berbagai lembaga pendidikan dalam kesultanan Aceh pada masa itu begitu aktifnya turut serta untuk menciptakan dan melahirkan kecakapan hidup (*life-skill*) bagi masyarakat.

Secara pastinya tidak dapat diketahui seberapa banyak jumlah lembaga pendidikan selama berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam baik di tingkat terendah hingga tingkat tertinggi, khususnya ketika berjayanya di abad ke-16 dan ke-17. Pada masa pemerintahan tersebut dalam *De Atjehers* karya besar Snouck Hurgronje yang terdiri dari 2 jilid terbitan tahun 1893/1894, tidak ada disinggung mengenai berapa jumlahnya lembaga pendidikan Islam di Aceh, meskipun banyak anggapan bahwa ia sebagai seorang peneliti pertama yang meneliti permasalahan Aceh. Snouck sendiri hanya menuturkan sebagian nama *dayah*, yang kemungkinan menurutnya perlu untuk disebutkan sembari memaparkan kontribusi *meunasah* dan *dayah* bagi masyarakat Aceh itu sendiri. Akan tetapi, menurut Ibrahim, dkk., bersandarkan pada pencarian yang diperolehnya melalui ilustrasi yang dibuat sebagai berikut:<sup>49</sup>

Setidaknya hampir di setiap *gampông*nya memiliki sebuah *meunasah* (terkadang jika *gampông* tersebut sedikit lumayan luasnya, maka akan dibangun dua buah *meunasah*). Diperkirakan di Aceh memiliki 5.500 *gampông* dengan jumlah *meunasah*/langgar sebanyak 5.883 buah berdasarkan data statistik pada tahun 1972. Meskipun begitu, dari sekian banyak *gampông* dan *meunasah* (bahkan *meunasah* tersebut ada yang memperbaiki dan membangunnya kembali) merupakan bangunan yang datang dari masa lalu. Begitu juga pada setiap mukim, sering ditemukan sebuah masjid yang lazimnya dilingkupi oleh rangkang. Jumlah mukim pada tahun 1972 menyebutkan sebanyak 594 mukim dan masjid berjumlah 1.475 bangunan. Terdapat beberapa masjid yang berada di wilayah mukim berusia sangat tua sehingga harus dilakukan pemugaran dan memperbaikinya

---

<sup>48</sup> Muhammad Ibrahim dkk., *Sejarah Pendidikan*, hlm. 27

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 28



kembali, hal ini ditunjukkan oleh tim peneliti yang melakukan penelitian ke berbagai daerah berdasarkan dari perolehan observasinya. Sedangkan perolehan dari pengamatan beberapa wilayah bekas kawasan nanggroe, khususnya wilayah pesisir bagian timur dan utara ... berdasarkan data statistik, di Aceh pada tahun 1972, ditemukan 129 kecamatan, hal ini memiliki anggapan bahwa nyaris tiap-tiap wilayah sedikitnya satu dayah telah berdiri (hal ini menurut hasil peninjauan dan berdasar penuturan para orang tua setempat, terlebih lagi terdapat nama dayah (pesantren), yang merupakan warisan hingga dengan sekarang, dimana anggapan mereka nama dayah itu sudah ada dari masa zaman Iskandar Muda.

Sebutan *meunasah* sudah merupakan kepunyaan rakyat Aceh, khususnya telah menjadi institusi pendidikan Islam tingkat dasar. Hal ini disebabkan karena pengucapannya yang keluar dari tutur kata Sultan Iskandar Muda, ketika Aceh sampai pada titik kejayaannya. Selain sebagai sasaran utama pada program pendidikan pemerintah yang terbebas dari buta huruf, *meunasah* juga berfungsi untuk mengelaborasi pendidikan di tingkat dasar yang menciptakan para kader cilik (siswa; *aneuk mit beuët*), sehingga nantinya para orang tua mengirimkan anak-anaknya mengarah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik *rangkang*, *dayah*, bahkan ke *jami'ah* (perguruan tinggi).

Berkaitan mengenai hal itu, Ibrahim Husein mengemukakan pendapatnya bahwa kehadiran *meunasah* menjadi institusi pendidikan tradisional disebabkan adanya dukungan dari tiga aspek utama. *Pertama*, aspek kognisi (pemahaman) dari orang tua, sebab mereka menganggap bahwa pendidikan anak diusia dini merupakan tanggung jawab para orang tua. *Kedua*, aspek masyarakat, yakni mereka menganggap bahwa sebagai masyarakat, merekalah yang memiliki institusi pendidikan ini, sehingga seluruh anak-anak dari anggota masyarakat tersebut diperbolehkan dan berhak belajar di sini tanpa mempedulikan status sosial terhadap masing-masing individunya. *Ketiga*, aspek ibadah, bagi tiap-tiap muslim menganggap pendidikan merupakan suatu ibadah wajib. Berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penerapan pendidikan tersebut merupakan tugas bersama yang dilakukan secara ikhlas. Seorang guru (hal ini *teungku meunasah*), berkewajiban untuk mengajarkan, dan seorang murid (peserta didik; siswa) berkewajiban mengikuti pelajaran yang dilaksanakan di tempat tersebut yang berlandaskan perintah agama.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ibrahim Husein, "Sejarah Singkat Pendidikan, hlm. 47-60

Oleh karenanya, para orang tua maupun wali murid memerintahkan anak-anaknya untuk mengikuti pelajaran yang dilaksanakan di *meunasah* tersebut, sebagaimana wajib belajar yang merupakan program pemerintah yang telah dicanangkan saat ini.

Begitu besarnya kontribusi Iskandar Muda dalam menumbuhkembangkan pendidikan di Aceh Darussalam, diantaranya; 1) memberikan dukungan dalam mendirikan berbagai lembaga pendidikan Islam baik *meunasah*, *rangkang*, *dayah*, maupun *dayah teungku chik* dan *al-jami'ah bait ar-Rahman* sehingga masyarakat Aceh bisa menempuh pendidikan dan terbebas dari buta huruf; 2) membuat berbagai kebijakan berkaitan dengan maksud pendidikan yang disesuaikan menurut tingkatannya, jika *meunasah* memiliki tujuan membentuk siswa supaya memahami ilmu dasar keagamaan, maka bisa melanjutkan ke tingkat *rangkang*; 3) pemerintah akan membentuk sistem impulsif agar dapat memberikan bantuan berkesinambungan dalam memelihara institusi-institusi pendidikan itu, melalui institusi pemerintahannya yang memiliki peran sebagai institusi pendidikan dalam bentuk kerjasama dengan institusi pendidikan lainnya; 4) institusi-institusi pendidikan difungsikan lebih optimal di setiap sisi kehidupan; 5) mewujudkan berbagai institusi pendidikan, terutama *meunasah* sebagai elemen dari masyarakat dan menjadi hak masyarakat Aceh Darussalam; 6) terwujudnya Aceh Darussalam sebagai “Kota Universitas” merupakan manfaat terbesar selama kurun waktu dalam sejarah pertumbuhan Aceh di bidang pendidikan.

### c. Sesudah Pemerintahan Iskandar Muda (1637-1675)

Iskandar Tsani (1636-1641 M) merupakan menantu Sultan Iskandar Muda yang menggantikan kepemimpinannya. Metode pendidikan yang dikembangkan oleh Iskandar Tsani merupakan metode tindak lanjut dari jejak Sultan Iskandar Muda yang selalu menghubungkan ulama dan umara untuk meningkatkan institusi-institusi pendidikan Islam dan mengembangkan tingkat kemampuan kecerdasan di Aceh Darussalam. Akan tetapi, mengenai permasalahan itu tidak dapat terungkap yang disebabkan begitu singkat kepemimpinannya tidak lebih berkisar 5 (lima) tahun saja.

Meskipun begitu singkat kepemimpinan Iskandar Tsani, kenyataan di atas tersebut memperlihatkan bahwa ketika itu *meunasah*, *rangkang*, *dayah* dan *al-jami'ah* sebagai institusi pendidikan kian meningkat fungsinya dijadikan

sebagai sarana pendidikan Islam, terlebih lagi agar tercapainya maksud terpenting yakni terbentuknya pendidikan keislaman dan terbebas dari buta huruf di Aceh Darussalam.

Demikian pula ketika Sultanah Sri Ratu Tajul 'Alam Syafiatuddin Johan Berdaulat (1641-1675 M) memimpin, pada hakikatnya rancangan yang digunakan merupakan lanjutan strategi peningkatan pendidikan yang telah ada. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad menyatakan bahwa sistem pemerintahan yang dibentuk Iskandar Muda sebagai orang tuanya, telah disempurnakan oleh Ratu Syafiatuddin hingga menjadi sistem yang utuh dan komplet sebagaimana yang diketahui melalui sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. Ratu Syafiatuddin sendiri ikut berkontribusi dalam membenahi dan meninggikan status martabat perempuan Aceh di dalam masyarakat dengan memberikan berbagai peluang kepada para perempuan Aceh agar ikut berperan serta di setiap kegiatan dan aktifitas dalam masyarakat. Begitu menakjubkan dan spektakulernya perihal tersebut, sebab kala itu bagi para wanita tidak diberikan peluang di setiap negara belahan dunia, khususnya kemiliteran dan posisi di pemerintah.<sup>51</sup>

Mengembangkan dan mendirikan semua tempat ibadah dan berbagai institusi pendidikan kala itu disesuaikan menurut banyaknya *gampông*, *mukim* dan *nanggroe*, dengan menjadikan Banda Aceh sebagai Pusat Pemerintahan yang menjadi beban tugas pemerintah dan masyarakat Aceh.

Pelaksanaan pendirian *meunasah* di tiap-tiap *gampông* berdasarkan total banyaknya penduduk dan luas areal sebuah *gampông*, terkadang sebuah *gampông* dapat didirikan dua *meunasah*. Berdasarkan data M. Sadli dalam Abudin Nata, tiap *gampông* yang terdiri dari 40 rumah terdapat satu *meunasah*,<sup>52</sup> sehingga kemungkinan terjadinya pendirian *meunasah* lebih dari satu di sebuah *gampông*. Demikian pula pendirian pesantren (*dayah*), nyaris di seluruh wilayah *nanggroe* berdiri sebuah *dayah* yang menjadi institusi pendidikan di tingkat menengah dan tinggi.

Keberlanjutan pendirian *dayah* di Aceh banyak yang mempengaruhinya, disebabkan begitu ramainya para sarjana dan teungku yang telah melanjutkan pendidikan agama baik yang berasal dari Banda Aceh hingga dari luar wilayah

<sup>51</sup> Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan*, hlm. 139

<sup>52</sup> Sadli M. Z.A, "Pendidikan Islam di Kesultanan Aceh, hlm. 42

Aceh. Sebagaimana halnya *dayah manyang* (*al-jami'ah*) yang dibangun masa Kesultanan Iskandar Muda, dimana masjid Bait ar-Rahman menjadi pusat untuk kegiatan tersebut dengan 44 orang ulama sebagai guru besar yang didatangkan dari Arab, Turki, Persia, India dan wilayah Aceh sendiri. Apalagi metode yang dilakukan mengikuti metode pendidikan yang ada di India. Demikian pula ketika pendirian *rangkang* pada masa Tajul Alam Syafiatuddin, yang dibangun oleh Syeikh Abdurrauf as-Singkili (beliau merupakan seorang alumnus dari Timur Tengah), dimana *rangkang* tersebut didirikan di muara sungai Aceh, sedang proses kronologi selanjutnya, para santri di seluruh sisi Benua Asia Tenggara datang berkunjung mendatangi lokasi tersebut. Beberapa murid yang terkenal diantaranya Syeikh Burhanuddin di Ulakan merupakan orang yang termasyhur di Minangkabau.<sup>53</sup>

Kemajuan yang patut dibanggakan tersebut selanjutnya terus berkelanjutan sampai pada abad ke-18. *Dayah* di Aceh yang terus berkembang menurut Hasjmy selanjutnya menjadi *dayah-dayah* yang spesifik, sesuai dengan penempatan dan fungsinya, misalnya *dayah* wanita (*dayah ureung inông*), *dayah* pertanian, *dayah* pertukangan, *dayah* perniagaan dan sebagainya dengan menjadikan para guru besar (*teungku chik*) sebagai staf pengajar. Pertumbuhan *dayah* di seluruh wilayah dan di berbagai kawasan menciptakan banyak *teungku* yang berpartisipasi untuk ikut membenahi dan memperbaiki sistem pendidikan dasar di tingkat *meunasah* pada tingkatan *gampông*.

Kehadiran *meunasah* sesudah Iskandar Muda hingga pada kemajuan dan timbul-tenggelamnya kesultanan Aceh Darussalam selalu terpaut dengan situasi keadaan politik di Aceh. Permasalahan tersebut disebabkan setelah kepemimpinan Iskandar Muda, imperialis Belanda mendominasi dan mengancam kesultanan Aceh. Terutama ketika Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin memegang kekuasaan di Kerajaan Aceh Darussalam, VOC selalu melakukan penekanan-penekanan terhadap Kerajaan Aceh Darussalam yang berdampak pada keadaan sosial, ekonomi dan politik. Begitu pula dampak yang terjadi dengan pendidikan di Aceh, sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan berbagai institusi pendidikan (baik *meunasah*, *rangkang*, *dayah* maupun institusi pendidikan lainnya).

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 123

## B. DAYAH: DASAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ACEH

Sejak beberapa ratus tahun lalu, *dayah* sebagai institusi pendidikan Islam telah memulai sistemnya dengan banyak melahirkan ulama dan tokoh yang berpengaruh pada zamannya. Pembauran keilmuan merupakan suatu keberhasilan tersendiri bagi *dayah* di waktu dulu, sehingga dari lintasan sejarah membuktikan bahwa hasil keluaran *dayah* bukan sekedar menjadi ulama saja, akan tetapi dapat juga menjadi seorang politikus dan negarawan yang kharismatik. Begitu banyak partisipasi dan keterlibatan yang *dayah* berikan bagi kemajuan pendidikan dan bangsa itu sendiri, khususnya pendidikan di Aceh. Pada era penjajahan sendiri, tumbuh-kembang *dayah* sering terjadi naik-turun secara substansi disebabkan oleh situasi politik dan sosial agama di kehidupan bangsa dan negara.

### 1. Pengertian Dayah

Ketika dimulainya pendidikan Islam di Aceh, yang merupakan pula awal mula ketika Islam masuk, pada saat itu juga dimulainya sistem pendidikan yang bercorak pengajian agama Islam yang dijalankan para ulama yang telah menetap di Aceh, dengan mengalihkan lokasi pengajian dari *dayah* ke lokasi masjid-masjid yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka.<sup>54</sup> Sebagaimana pendapat George Makdisi dalam Safwan Idris:

Perkataan *dayah* berasal dari perkataan *zawiyah* yang dalam bahasa Arab berarti sudut atau pojok. Sebagai suatu lembaga pendidikan, *dayah* memang berasal dari pengajian-pengajian yang diadakan di sudut-sudut masjid yang merupakan lembaga pendidikan yang sangat awal dalam Islam. Dari pengajian-pengajian di sudut masjid inilah lahirnya institusi yang disebut dengan *zawiyah*.<sup>55</sup>

Sebagaimana substansi pendidikan tradisional di Aceh, peristilahan *dayah* dipahami juga sebagai peristilahan *meunasah*. Penyebutan *meunasah*

<sup>54</sup> M. Dawam Raharjo, *Pergulatan Dunia Pesantren dari Bawah*, (Jakarta: Perhimpunan Perkembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1985), hlm. 45

<sup>55</sup> Safwan Idris, "Pengembangan Pendidikan Pesantren/Dayah (Antara Tradisi dan Pembaharuan)", dalam, *Pengembangan Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam*, Cet. 2 (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 61

sendiri berdasarkan peristilahan *madrasah*, yang menurut bahasa Arab memiliki arti tempat belajar. Jika dikaitkan dengan permasalahan ini, penggunaan istilah *dayah* begitu umum, hingga melingkupi seluruh instansi tradisional di Aceh termasuk *meunasah* (akan tetapi bukan *madrasah* yang dikenal saat ini, karena *madrasah* yang sekarang adalah institusi yang hadir setelah adanya pembaharuan). Begitu pula penyebutan istilah untuk pendidikan tradisional yang lain, seperti istilah *dayah*<sup>56</sup> yang juga merupakan *rangkang*, *dayah teungku chik*, *balai setia* hingga sebagai *jami'ah*.<sup>57</sup>

Pengajian yang berbentuk seperti itu pada masa kerajaan Aceh disebut *dayah*, dimana nama *dayah* sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni *zawiyah* yang selanjutnya disesuaikan melalui pengecapan orang-orang Aceh menjadi *dayah*, yang dikaitkan dengan pendidikan di tingkat rendah dan menengah. Masa akhir dari abad ke-13 Hijriyah (yang bertepatan dengan sekitar abad ke-10 Masehi), lantas dibangun pusat pendidikan agama yang lebih menyeluruh, dari pendidikan di tingkat rendah, menengah hingga pendidikan di tingkat tinggi yang berlokasi di *Cot Kala*, Kabupaten Aceh Timur (sekarang telah menjadi Kecamatan Bayeun). Sebab itulah pusat pendidikan yang baru saja dibangun itu diberi nama *Dayah Cot Kala* yang dipimpin oleh *Teungku Chik Cot Kala Muhammad Amin* selama kurang lebih 10 tahun. Pada tahun 310 hingga 334 Hijriyah (yang bertepatan dengan tahun 922-946 Masehi), beliau menjalani penobatan sebagai Raja Peureulak VI dan bergelar Sultan Makhдум Alaidin Malik Muhammad Amin Syah Johan Berdaulat. Pada abad ke-10 Masehi itu pula *Dayah Cot Kala* merupakan *dayah* pertama yang mengajarkan pelajaran agama Islam dan sekaligus pelajaran umum hingga terkenal di Asia Tenggara, yang disebabkan pada saat itu; “*Dayah Cot Kala* merupakan satu-satunya institusi pendidikan pertama yang hadir di tengah-tengah masyarakat Aceh. Fungsi *dayah* ini masih terbatas untuk tujuan mengislamkan masyarakat di

<sup>56</sup> A. Hasjmy, *Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah*, (Jakarta: Beuna, 1993), hlm. 191-194

<sup>57</sup> *Dayah Teungku Chik* adalah lembaga pendidikan yang dapat disamakan dengan perguruan tinggi. Yang diajarkan pada *dayah teungku chik*, antara lain fiqh, tafsir, hadis, tauhid/filsafat, akhlak/tasawuf, ilmu bumi, sejarah/tata Negara, ilmu bahasa dan sastra Arab, manthiq dan ilmu bintang/falak. *Balai Setia* adalah tempat pendidikan yang dapat disamakan dengan majlis pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan. Sedangkan *Jami'ah* adalah lembaga pendidikan tempat para ulama/sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran, membahas masalah-masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lihat: A. Hasjmy, *Sejarah Aceh*, hlm. 1992-1993

sekitar dayah dan untuk menjaga pengamalan Islam oleh pemeluk-pemeluk Islam sekitar dayah. Karena itu dayah ini lebih terfokus kepada materi-materi praktis, terutama tauhid, fiqh dan tasawuf”.<sup>58</sup>

Begitu juga Kerajaan Islam Samudera Pasai, Kerajaan Islam Benua, Kerajaan Islam Lingga dan kerajaan-kerajaan kecil yang lain, tiap-tiap kerajaan tersebut memiliki pusat pendidikan masing-masing. Setelah beberapa kerajaan kecil tersebut dipersatukan Sultan Ali Mughayat Shah (1511-1530 M) membentuk kerajaan Aceh Darussalam, maka pusat pendidikan tersebut dialihkan ke Banda Aceh dengan mendirikan *Jami'ah Bait ar-Rahman* (Universitas Baitur Rahman) <sup>59</sup> yang letak lokasinya berdekatan dengan masjid Bait ar-Rahman Banda Aceh. Pelaksanaan pendidikan yang dijalankan oleh institusi-institusi pendidikan Islam tersebut tidak bersifat keras (kaku atau dogmatis), namun bersifat adaptif (lentur dan fleksibel) dan berkemajuan sesuai waktu dan tempat. Dengan menggunakan kelembagaan di tengah-tengah masyarakat, maka Islam secara tidak langsung tersebar dan berkembang ke berbagai daerah dan lingkungan sekitar baik dalam daerah maupun luar daerah.<sup>60</sup> Institusi pendidikan dayah terus maju berkembang pada masa kesultanan Aceh, “ini dibuktikan dengan jumlah dayah terus berkembang, demikian juga dengan jumlah ulama yang mengajar, selain ulama yang ada di Aceh, sultan juga, mengundang ulama-ulama dari luar negeri untuk mengajar dan juga sebagai kebutuhan sebagai konsultan hukum agama kesultanan”.<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Saifuddin Dhuhi, *Dayah Menapaki Jejak Pendidikan Warisan Endatu di Aceh*, (Banda Aceh: Lhee Sagoe Press, 2014), hlm. 23-24

<sup>59</sup> Jamia'ah Baitur-Rahman, terbagi kedalam berbagai Fakultas atau Jurusan, yaitu: 1. Daaru't-afsiir Wa'l Hadist (Fakultas Tafsir dan Hadist); 2. Daaru't-Thib (Fakultas Kedokteran); 3. Daaru't-Kimiya (Fakultas Kimia); 4. Daaru't-Tarikh (Fakultas Sejarah); 5. Daaru't-Hisaab (Fakultas Ilmu Pasti) ; 6. Daaru'a- Siyasah (Fakultas Ilmu Politik); 7. Daaru'l-Aqli (Fakultas Ilmu Logika); 8. Daaru'z-Ziraa'ah (Fakultas Pertanian); 9. Daaru'l-Falsafah (Fakultas Filsafat); 10. Daaru'l-Ahkaam (Fakultas Hukum); 11. Daaru'l-Kalam (Fakultas Theology); 12. Daaru'l-Wizaarah (Fakultas Ilmu Pemerintahan); 13. Daaru Khazanah Baitil-Maal (Fakultas pembendaharaan Keuangan Negara); 14. Daaru'l-Ardli (Fakultas Pertambangan); 15. Daaru'n-Nahwi (Fakultas Bahasa Arab); 16. Daaru'l-Madzahib (Fakultas Perbandingan Mazhab); 17. Daaru'l-Harb (Fakultas Peperangan); Lihat: A.Hasjmy, *Sepuluh Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Daerah Aceh* Hisaab (Fakultas Ilmu Pasti)H, Sinar Darussalam, Nomor 17 September 1969, (Banda Aceh: Yayasan Pembina Darussalam, 1969), hlm. 9

<sup>60</sup> A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Jakarta: Alma'arif, 1993), hlm. 363

<sup>61</sup> Amiruddin, *Dayah*, hlm. 35

Pendidikan Islam merupakan pendidikan dasar di tiap *gampông* yang telah diawali dari sejak dulu pada masa Kerajaan Islam dengan memusatkan *meunasah-meunasah* menjadi tempat pendidikannya. Kemudian, masjid di tiap *mukiem* juga menjadi pusat pendidikan untuk sekolah lanjutan pertama. Sedangkan *dayah* yang dibangun dan didirikan oleh ulama yang sudah tinggi pengetahuannya, dijadikan sebagai tempat sekolah pendidikan tingginya.<sup>62</sup> Meski sistem pendidikan *dayah* pada mulanya tergolong sederhana, akan tetapi aktifitas pendidikan terus berjalan sesuai keadaan dalam setiap kajian keislaman.

## 2. Perkembangan Dayah Di Aceh (1900-1945 M)

Sejak awal perkembangan Islam, umat Islam Indonesia mendirikan lembaga-lembaga pendidikan untuk kebutuhan dakwah Islamiyah (*Islamisasi*) agar memotivasi umat Islam dalam menyelenggarakan pengajaran Islam. Pembelajaran tersebut menggunakan metode *halaqah* yang merupakan metode sederhana dan mudah dalam pemberian pengajarannya. Pelaksanaan pembelajarannya dapat dilakukan di beberapa rumah para ulama atau di tempat-tempat ibadah, seperti masjid, langgar atau mushalla. Pendidikan sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia sebagai pendorong, pengadopsi dan pentransferan institusi sosial dan agama yang telah terbentuk dalam wujud lembaga pendidikan Islam.<sup>63</sup>

<sup>62</sup> Sangat tergantung kepada ada tidaknya ulama yang berpengetahuan, tetapi ada juga kadang-kadang *dayah* yang pada mulanya hanya setingkat sekolah lanjutan saja, kemudian berkembang sehingga disamping memberikan pelajaran tingkat lanjutan, juga memberikan pelajaran tingkat tinggi. Pendidikan *dayah* berkembang sesuai dan seiring dengan maju dan mundurnya kerajaan-kerajaan Aceh. Pada permulaan berdiri kerajaan Islam di Aceh, *dayah* juga dalam kondisi permulaan perkembangannya dan menjadi puncak keemasan perkembangannya adalah pada masa kejayaan *Kerajaan Aceh Darussalam*. Pada masa itu pendidikan *dayah* telah berstruktur mulai dari tingkat sekolah dasar; *meunasah*, sekolah menengah; *rangkang* dan perguruan tinggi. Lihat: Duhri, *Dayah*, hlm. 27

<sup>63</sup> Pendidikan Islam dalam perjalanannya sangat dipengaruhi oleh dua arus pergumulan. *Pertama*, bidang politik (kekuasaan) dan *Kedua*, bidang pemikiran Islam. Dua arus pergumulan bidang politik dan pemikiran dalam sejarah pendidikan Islam adalah ditemukannya lembaga-lembaga pendidikan yang khusus dan sekaligus merupakan ciri aliran tertentu. Sebagai misal, berdirinya lembaga *Dâr al-Hikmah* lebih mengarah pada pola pendidikan failasuf (filsafat) dan pengikut *Syî'ah*. Berdirinya lembaga-lembaga *az-Zâwiyah* atau *ar-Ribath* adalah mengarah pada pola khas sufi (tasawuf). Madrasah pada awalnya merupakan lembaga pendidikan yang didukung oleh para ulama *fiqh* dan *al-Hadits*. Untuk selengkapnya lihat Maksun, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, 1999, hlm. 64-65



Di Aceh, perkembangan lembaga pendidikan Islam dalam bentuk *meunasah*, *ranggang*, *dayah* dan masjid-masjid, tidak lepas dari proses Islamisasi sebagai kebijakan sultan-sultan di Aceh, baik Kerajaan Peureulak (Aceh Timur), Samudera-Pasai (Aceh Utara), maupun Kerajaan Aceh Darussalam, “lembaga pendidikan dayah telah dibangun di Aceh sejak era Islam yang disebut dengan Dayah Manyang (Setingkat SLTA), siswa yang menamatkan pendidikan diadakan wisuda”.<sup>64</sup> Fungsi dayah terbatas untuk tujuan mengislamkan masyarakat di sekitar dayah serta menjaga pengamalan agama masyarakat, karena pada saat itu pendidikan dayah lebih terfokus pada materi-materi praktis, terutama tauhid, fiqh dan tasawuf.<sup>65</sup> Dalam dayah semua pelajaran diajarkan dalam bahasa arab, dengan mempergunakan kitab-kitab Arab.<sup>66</sup>

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Ibrahim *dkk.*, perkembangan dayah di Aceh diawali dengan munculnya *meunasah* di Aceh, yaitu: “*Pertama: meunasah* itu sudah ada sejak terbentuknya masyarakat (*gampông*) Islam. *Kedua: lembaga serupa meunasah* sudah dikenal oleh masyarakat Aceh jauh sebelum datangnya Islam, namun nama aslinya sampai sekarang belum diketahui”.<sup>67</sup> Pendapat kedua ini yang diasumsi oleh banyak peneliti pendidikan Islam di Aceh, dayah berawal dari pendidikan *meunasah*. Ditinjau dari segi namanya “*meunasah*” yang berasal dari bahasa Arab “*madrashah*”, sebagai lembaga keagamaan dikenal pada waktu terbentuknya masyarakat Islam di Aceh. Namun lembaga serupa *meunasah* mungkin saja telah ada

<sup>64</sup> A. Hasjmy, “Keistimewaan Aceh”. dalam, *Bidang pendidikan, Dalam Perkembangan Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam*, Cet. 2 (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 42

<sup>65</sup> Duhri, *Dayah*, hlm. 23

<sup>66</sup> Pada masa awal Kerajaan Aceh Darussalam ini telah terjadi transformasi budaya dalam skala besar di Aceh. Setelah pendiri Kerajaan Aceh Darussalam Sultan Alaidin Ali Mughayat Syah (1511-1530) menyatukan Aceh dan memberantas musuh Aceh (Portugis), Aceh menjadi kerajaan yang bercita-cita besar dengan mengambil Islam menjadi dasar negara, membangun tamaddun dan kebudayaan yang tinggi di kawasan kepulauan nusantara. Para sultan-sultan yang memerintahkan kerajaan-kerajaan di Aceh adalah para ulama yang mempunyai pengetahuan luas dan karena itu mereka sangat mementingkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Zakaria Ahmad menjelaskan, “bahwa untuk mengimbangi semangat agresor Portugis di kalangan rakyat Aceh dibangun dan dibangkitkan semangat jihad dengan memperhebat pengajaran agama Islam di kalangan rakyat”. Lihat: Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh 1520-16-75* (Medan: Monora, 1972), hlm. 37

<sup>67</sup> Ibrahim, *Sejarah Pendidikan*, hlm. 21

sejak sebelum terbentuknya masyarakat Islam. Pendapat ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Asrohah bahwa kebutuhan terhadap lembaga pendidikan mendorong masyarakat Islam di Indonesia mengadopsi dan mentransfer lembaga keagamaan dan sosial yang sudah ada ke dalam lembaga pendidikan Islam di Indonesia.<sup>68</sup> Berdasarkan teori ini dapat diargumentasikan bahwa mungkin saja masyarakat Islam di Aceh yang baru terbentuk saat itu mentransfer lembaga keagamaan sebelumnya *meunasah* menjadi *dayah*.<sup>69</sup>

Perkembangan jumlah lembaga pendidikan (dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi) tidak diketahui dengan pasti.<sup>70</sup> Ibrahim Husein menjelaskan bahwa kehadiran *meunasah* menjadi institusi pendidikan tradisional disebabkan adanya dukungan dari tiga aspek utama. *Pertama*, aspek kognisi (pemahaman) dari orang tua, sebab mereka menganggap bahwa pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab para orang tua. *Kedua*, aspek masyarakat, yakni mereka menganggap bahwa sebagai masyarakat, merekalah yang memiliki

---

<sup>68</sup> Hanun Asrohah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 144

<sup>69</sup> Pada masa Iskandar Muda ini, pendidikan telah ditransfer sistem Madrasah Nizamiyah dalam struktur pemerintahan yang selalu berhubungan dengan pendidikan. Sehingga program pendidikan selalu terorganisir baik dari tingkat yang paling rendah yaitu *meunasah* hingga jenjang pendidikan tinggi. Tingkatan-tingkatan pendidikan dari *Meunasah*, *Rangkang*, *Dayah*, *Dayah Teungku Chik*, dan *Jami'ah Bait ar-Rahman* menjadi satu sinergis sistem pendidikan bertingkat dan dengan *output* yang selalu bersinambung. Lihat: A. Hasjmy, "Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan", dalam Ismail Suny, (ed.), *Bunga Rampai Tentang Aceh* (Jakarta: Bhrarata Aksara, 1980), hlm. 214

<sup>70</sup> Dalam *De Atjehers* karya besar Snouck Hurgronje yang terdiri dari 2 jilid terbitan tahun 1893/1894, tidak ada disinggung mengenai berapa jumlahnya lembaga pendidikan Islam di Aceh, meskipun banyak anggapan bahwa ia sebagai seorang peneliti pertama yang meneliti permasalahan Aceh. Snouck sendiri hanya menuturkan sebagian nama *dayah*, yang kemungkinan menurutnya perlu untuk disebutkan sembari memaparkan kontribusi *meunasah* dan *dayah* bagi masyarakat Aceh itu sendiri. Akan tetapi, menurut Ibrahim, dkk., bersandarkan pada pencarian yang diperolehnya melalui ilustrasi yang dibuat sebagai berikut: Sebutan *meunasah* sudah merupakan kepunyaan rakyat Aceh, khususnya telah menjadi institusi pendidikan Islam tingkat dasar. Hal ini disebabkan karena pengucapannya yang keluar dari tutur kata Sultan Iskandar Muda, ketika Aceh sampai pada titik kejayaannya. Selain sebagai sasaran utama pada program pendidikan pemerintah yang terbebas dari buta huruf, *meunasah* juga berfungsi untuk mengelaborasi pendidikan di tingkat dasar yang menciptakan para kader cilik (siswa; *aneuk mit beuët*), sehingga nantinya para orang tua mengirimkan anak-anaknya mengarah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik *rangkang*, *dayah*, bahkan ke *jami'ah* (perguruan tinggi). Lihat: Ibrahim, dkk., *Sejarah*, hlm. 28

institusi pendidikan ini, sehingga seluruh anak-anak dari anggota masyarakat tersebut diperbolehkan dan berhak belajar di sini tanpa mempedulikan status sosial terhadap masing-masing individunya. *Ketiga*, aspek ibadah, bagi tiap-tiap muslim menganggap pendidikan merupakan suatu ibadah wajib. Berbagai bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penerapan pendidikan tersebut merupakan tugas bersama yang dilakukan secara ikhlas. Seorang guru (hal ini *teungku meunasah*), berkewajiban untuk mengajarkan, dan seorang murid (peserta didik; siswa) berkewajiban mengikuti pelajaran yang dilaksanakan di tempat tersebut yang berlandaskan perintah agama.<sup>71</sup> Dengan demikian tanggung jawab pendidikan diarahkan kepada semua orang tua murid untuk mewajibkan anak-anak mereka belajar di *meunasah* ini adalah semacam wajib belajar yang diprogramkan pemerintah sekarang ini untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pengembangan, pertumbuhan dan pembangunan rumah-rumah ibadah dan berbagai institusi pendidikan kala itu disesuaikan menurut banyaknya jumlah *gampông*, *mukim* dan *nanggroe*, dengan menjadikan Banda Aceh sebagai Pusat Pemerintahan yang menjadi beban tugas pemerintah dan masyarakat Aceh.<sup>72</sup> Pelaksanaan pendirian *meunasah* di tiap-tiap *gampông* berdasarkan total banyaknya penduduk dan luas areal sebuah *gampông*, terkadang sebuah *gampông* dapat didirikan dua *meunasah*. Berdasarkan data M. Sadli dalam Abudin Nata, tiap *gampông* yang terdiri dari 40 rumah terdapat satu *meunasah*,<sup>73</sup> sehingga kemungkinan terjadinya pendirian *meunasah* lebih dari satu di sebuah *gampông*. Demikian pula pendirian pesantren (*dayah*), nyaris di seluruh wilayah *nanggroe* berdiri sebuah *dayah* yang menjadi institusi pendidikan di tingkat menengah dan tinggi.<sup>74</sup>

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 47-60

<sup>72</sup> Teungku Daud Zamzami (83 Tahun), Alumni Dayah Krueng Kalee Aceh Besar (tahun 1953), Alumni Dayah Labuhan Haji Aceh Selatan (tahun 1956), Pendiri Dayah Riyadhussalihin Aceh Besar (tahun 1960), Pimpinan Dayah Riyadhussalin Aceh Besar (tahun 1967-2017), Wawancara di Banda Aceh, tanggal 26 Desember 2017.

<sup>73</sup> Sadli, M. Z.A., *Pendidikan Islam*, hlm. 42

<sup>74</sup> Keberlanjutan pendirian dayah di Aceh banyak yang mempengaruhinya, disebabkan begitu ramainya para sarjana dan teungku yang telah melanjutkan pendidikan agama baik yang berasal dari Banda Aceh hingga dari luar wilayah Aceh. Sebagaimana halnya *dayah manyang (al-jami'ah)* yang dibangun masa Kesultanan Iskandar Muda, dimana masjid Bait ar-Rahman menjadi pusat untuk kegiatan tersebut dengan 44 orang ulama sebagai guru besar yang didatangkan dari Arab, Turki, Persia, India dan

Sebagaimana diketahui, bahwa perkembangan dayah di Aceh, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sudah sangat menggembirakan dan dengan peranannya sebagai lembaga pendidikan agama yang mendidik murid-murid ahli di bidang agama (*tafaqquh fi ad-din*) mendapat kedudukan dalam masyarakat yang sangat strategis.<sup>75</sup> Kejayaan dan perkembangan dayah pada hakikatnya tentu tidak terlepas dari kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, terkait dengan kondisi perekonomian rakyat Aceh yang sejahtera, Said mendeskripsikan bahwa masyarakat Aceh sama sekali tidak menunjukkan kemelaratan dari sektor ekonomi. Jalan-jalan terpelihara, rumah-rumah dan pekarangan yang dipagari dirawat, rakyat berpakaian baik, di belakang rumah tampak padang rumput untuk tempat peternakan kambing yang banyak dipelihara, dan sutera yang diproduksi tidak hanya untuk digunakan sendiri, tetapi menjadi salah satu komoditi ekspor.<sup>76</sup>

Setelah terjadi kevakuman pembelajaran di dayah, pada tahun 1913 ulama-ulama yang masih hidup dari perlawanan dengan Belanda kembali mengaktifkan dayah sebagai lembaga pendidikan. Ketika itu, kondisi Aceh sudah dikuasai oleh Belanda, meski perlawanan dari masyarakat Aceh terus berlanjut. Tentu hal tersebut diprediksi berbagai kebijakan Belanda akan menentukan penyelenggaraan pendidikan dayah. Apalagi bagi pemerintah Belanda, dayah tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga tempat

---

wilayah Aceh sendiri. Apalagi metode yang dilakukan mengikuti metode pendidikan yang ada di India. Demikian pula ketika pendirian *ranggang* pada masa Tajul 'Alam Syaflatuddin, yang dibangun oleh Syekh Abdurrauf as-Singkili (beliau merupakan seorang alumnus dari Timur Tengah), dimana *ranggang* tersebut didirikan di muara sungai Aceh, sedang proses kronologi selanjutnya, para santri di seluruh sisi Benua Asia Tenggara datang berkunjung mendatangi lokasi tersebut. Beberapa murid yang terkenal diantaranya Syekh Burhanuddin di Ulakan merupakan orang yang termasyhur di Minangkabau. Lihat: Sadli, M. Z.A. *Pendidikan Islam*, hlm. 123

<sup>75</sup> Pada awal abad 19 sejumlah dayah telah berdiri memperkaya lembaga pendidikan Islam di Aceh. Diantara dayah-dayah tersebut adalah: Dayah Tgk. Chiek Tanoh Abee, Dayah Tgk. Chiek Kuta Karang (Dayah Ulee Susu), Dayah Lam Birah, Dayah Lam Nyong, Dayah Lam Bhuk, Dayah Krueng Kalee, Dayah Lam Krak, Dayah Lam Pucok dan Dayah Lam U di Aceh Besar; Dayah Rumpet di Kuala Daya, pantai barat; Dayah Tgk. Chiek Ditiro, Dayah Tgk. Chiek Tante Geulima. Di Aceh Pidie, Dayah Meunasah Biang (Samalanga) dan beberapa Dayah di sekitar kuta pertahanan Batee Iliak, seperti Dayah Cot Meurak, Dayah Pulo Baroh dan lain-lain (Aceh Utara). Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Istimewa Aceh, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1984), hlm. 20

<sup>76</sup> Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, jld. I, (Medan: Waspada, 1981), hlm. 755

mencetak para pejuang.<sup>77</sup> Atas dasar itulah pemerintah Belanda selalu melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dayah di Aceh.

Bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap pendidikan dayah adalah ordonansi guru. “Ordonansi guru merupakan bentuk kebijakan aktual tentang pendidikan Islam masa kolonial yang bersifat sangat menekan dan diskriminatif. Ordonansi guru sejak abad 20 sudah muncul sebanyak 3 kali, yakni Nomor 550 tahun 1905, Nomor 219 tahun 1925, dan Nomor 495 tahun 1932”.<sup>78</sup> Kebijakan pemerintah Belanda pada Ordonansi guru tahun 1905 yaitu bentuk penekanan dalam penyelenggaraan pendidikan Islam. Dalam ordonansi ini menetapkan bahwa penyelenggaraan pendidikan Islam harus mendapatkan izin dari pemerintah Belanda. Begitu juga terhadap peserta didik dari luar tempat pendidikan diselenggarakan harus melapor kepada pihak kolonial Belanda. Selain itu, kurikulum yang digunakan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan kolonial Belanda. Dalam hal ini, pemerintah Belanda membatasi kurikulum yang dipelajari di dayah pada pelajaran-pelajaran agama saja, seperti fiqh mazhab Syafi’i, aqidah Asy’ariyah, dan tasawuf sunni.<sup>79</sup> Tujuan pembatasan tersebut dilakukan oleh pemerintah Belanda untuk melemahkan pengaruh ulama dan memperkuat pengaruh *ulee balang* sebagai kaki tangan Belanda. Alasan lain dilakukan hal tersebut untuk menghilangkan semangat juang umat Islam sehingga peran dayah hanya sebagai sekumpulan jamaah sufi.<sup>80</sup>

Dalam beberapa ordonansi yang telah terjadi di Aceh, memiliki kebijakan yang berbeda. Kebijakan ordonansi Nomor 219 tahun 1925 berbeda dengan sebelumnya. Kebijakan ini merupakan pemberlakuan kedua kebijakan pemerintah Belanda setelah menghapus ketentuan dalam kebijakan Ordonansi tahun

<sup>77</sup> Teungku Daud Zamzami, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 26 Desember 2017.

<sup>78</sup> Abd. Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 10

<sup>79</sup> Duhri, *Dayah*, hlm. 34

<sup>80</sup> Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Research dan Survey IAIN Ar-Raniry, menurutnya kebijakan pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam di Aceh sudah dimulai pada Ordonansi pertama. Alasan yang dikemukakannya karena perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh tidak pernah berhenti dan umumnya pemberontakan berawal dari dayah, maka pemerintah Belanda membatasi perkembangan dayah dengan cara harus berdasarkan izin kolonial Belanda. Hal ini pernah Tuanku Raja Keumala alami ketika beliau memohon perizinan di Kutaraja (sekarang: Banda Aceh) dalam pendirian Madrasah Khairiah pada tahun 1915. Lihat: Lembaga Research dan Survey, *Laporan Penelitian*, hlm. 6

1905. Pada kebijakan kedua ini, pemerintah Belanda bersikap lebih mudah dibandingkan sebelumnya, kebijakan ini tidak mengharuskan guru meminta izin secara tertulis kepada Bupati atau patih yang mempunyai kekuasaan sendiri atau kepala negara yang berkuasa di tempat orang yang mengajar, tetapi cukup hanya dengan memberitahukan. Alasan perubahan karena dianggap laporan tentang guru dan aktivitasnya (secara periodik disampaikan bupati) ternyata kurang meyakinkan. Di samping itu juga, kondisi politik ketika itu dinilai sudah tidak lagi memerlukan “pemburuan” guru agama, sehingga pemberitahuan penyelenggaraan sudah dirasa cukup. Sedangkan kurikulum masih seperti kondisi sebelumnya, “bahkan masa ini dikotomi pendidikan semakin terasa, pemerintah Belanda menyelenggarakan lembaga pendidikan umum yang fokus pada pembentukan psikomotorik peserta didik. Sedangkan dayah semakin didiskriminatif sehingga hilang aura keilmuannya dan tidak lagi ditakuti oleh pemerintah Belanda”.<sup>81</sup>

Sedangkan Ordonansi tahun 1932 tidak lagi mengurus tentang lembaga pendidikan Islam, tetapi lebih fokus pada membatasi perkembangan pendidikan liar. Pada tahun 1930 pemerintah kolonial Belanda dilanda krisis ekonomi. Sebagai akibatnya pemerintah Hindia Belanda harus melakukan penghematan dan terpaksa menekan anggaran untuk Departemen Pengajaran. Sehingga dari tahun 1930 sampai 1937 sudah dikurangi 53% lembaga pendidikan. Sementara itu tuntutan akan kebutuhan pendidikan di kalangan pribumi kian meningkat. Akibatnya, sekolah-sekolah partikelir bermunculan sebagai alternatif menjawab problem tersebut.<sup>82</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, dayah terus mengalami berbagai hambatan dan propaganda Belanda terhadap kelompok modernis Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Pihak Belanda melalui *uleebalang* mengadu domba antara ulama dayah dengan modernis. Hal ini juga berpengaruh terhadap lembaga pendidikan yang didirikan keduanya. Madrasah dipandang lebih maju dibandingkan dayah, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Ketika terjadi konflik antara kelompok DI/TII yang sebelumnya adalah kelompok PUSA dengan pemerintah Indonesia, pendidikan dayah bangkit kembali dengan dukungan masyarakat, untuk menjawab tantangan dari keterpurukan sebelumnya.<sup>83</sup>

<sup>81</sup> Lembaga Research dan Survey, *Laporan Penelitian*, hlm. 6

<sup>82</sup> Soebahar, *Kebijakan Pendidikan*, hlm. 17

<sup>83</sup> Teungku Daud Zamzami, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 26 Desember 2017.

### 3. Perkembangan Dayah di Aceh Pasca Kemerdekaan (1945-1966)

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, kemudian pada tanggal 15 Oktober 1945 ulama-ulama Aceh mengeluarkan maklumat bersama.<sup>84</sup> Sesudah maklumat tersebut dikeluarkan, para ulama, para khatib dan para mubalig giat berdakwah perang sabil terhadap Belanda, menebalkan semangat jihad sesuai dengan ajaran agama, setiap *meunasah* dan masjid penuh umat Islam melaksanakan shalat berjama'ah serta mendengar pelajaran-pelajaran agama. Didorong oleh semangat perang suci, rakyat Aceh berjuang dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan kemerdekaan, yakin bahwa melalui *jihad fi sabilillah*, Aceh akan menang, karena jika mereka gugur akan masuk syurga dan jika mereka selamat negaranya akan bebas dari penjajahan kolonial.<sup>85</sup>

Pada zaman Jepang sudah ada kantor yang bernama Aceh *Syu Syukyo Hooin* (Mahkamah Agama Daerah Aceh). Meskipun namanya mahkamah,

---

<sup>84</sup> Perang dunia kedua yang mendahsyat telah tamat dan Indonesia tanah tumpah darah kita telah dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia serta telah berdiri Republik Indonesia dibawah pimpinan dari paduka yang mulia Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta: Belanda adalah satu kerajaan yang kecil serta miskin, satu negeri kecil lebih kecil dari daerah Aceh dan telah hancur lebur, bangsa dari negeri seperti ini bertindak melakukan pengkhianatannya terhadap tanah air kita Indonesia yang sudah merdeka itu untuk dijajah kembali. Kalau maksud jahannam itu berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakyat, merampas semua harta benda Negara dan harta rakyat dan segala kekayaan yang telah kita kumpulkan selama ini akan musnah sama sekali. Mereka akan memperbudak rakyat Indonesia menjadi hamba sahayanya kembali dan menjalankan usaha untuk menghapus Agama Islam kita yang suci serta menindas dan menghangat kemuliaan bangsa Indonesia. Di Jawa bangsa Belanda dan kaki tangannya telah melakukan keganasannya terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, hingga terjadi pertempuran di beberapa tempat yang akhirnya kemenangan di pihak kita. Sungguh begitu belum juga insaf. Segenap rakyat yang sudah bersatu padu dengan patuh berdiri di belakang kedua pemimpin besar Soekarno-Hatta dan sedang menunggu perintah dan kewajiban yang akan dijalankan. Menurut keyakinan kami adalah perjuangan seperti ini adalah perjuangan suci yang disebut *Perang Sabil*, maka percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah sebagai sumbangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh Almarhum *Teungku Chik Ditiro* dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Dari sebab itu, bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu menyusun bahu mengangkat langkah menuju ke muka untuk mengikut jejak perjuangan nenek-nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh akan segala perintah-perintah kita untuk keselamatan tanah air, agama dan bangsa. Kutaraja (Banda Aceh), 15 Oktober 1945, atas nama ulama seluruh Aceh tertanda: Teungku Haji Hasan Krueng Kale, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Haji Dja'far Siddiq Lamdjabat, dan Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri.

<sup>85</sup> Amiruddin, *Ulama Dayah*, hlm. 26

tetapi tugas tidak hanya mengenai peradilan, melainkan juga mencakup tugas-tugas keberagamaan lainnya yang sekarang sudah menjadi tugas Kementerian Agama (termasuk pendidikan agama). Sesudah proklamasi mula-mula *Syukyo Hooiin* diubah nama menjadi Dewan Agama Islam, dan sebagai kepalanya ditunjuk Teungku Abd. Rahman Meunasah Meucap (di Aceh), kemudian diganti dengan Teungku Haji Dja'far Siddiq Lamdjabat yang diangkat pada masa Jepang. Selanjutnya di Sumatera sudah dibentuk pula pejabat Agama Sumatera yang berkedudukan di Pematang Siantar, yang dikepalai oleh Mukhtar Yahya (Bekas Direktur *Islamic College* di Padang). Pada saat itu Sumatera merupakan satu Propinsi yang Ibukotanya mula-mula Medan, kemudian karena serangan Belanda, pindah ke Pematang Siantar. Aceh yang merupakan keresidenan yang takluk di bawah Propinsi Sumatera, ingin menyesuaikan diri lalu dibentuk suatu panitia yang diketuai oleh Ustad M. Nur El-Ibrahimi, (Bekas Direktur Normal Islam Institut di Bireuen), untuk menyusun Struktur Pejabat Agama Aceh sesuai struktur Sumatera Utara dengan beberapa perubahan. Dalam Struktur Pejabat Agama di Aceh terdapat bahagian pendidikan agama di bawah Pejabat Agama. Sebagai kepala Pejabat Agama ditunjuk Teungku M. Daud Beureueh dan yang menjadi Kepala Bahagian Pendidikan Agama diangkat Ustad M. Nur El-Ibrahimi.<sup>86</sup>

Setelah mengalami berbagai dinamika kondisi dayah dalam kurun waktu yang telah disebutkan, pada tahun 1940-an berdiri Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan. Keberadaan Dayah ini dianggap sebagai awal kemajuan pendidikan dayah setelah sekian lama mengalami masa kemunduran.<sup>87</sup> Ada beberapa bentuk kemajuan yang dibawakan oleh Tgk. Muda Wali dalam menyelenggarakan pendidikan, yaitu: *Pertama*, kurikulum yang ditawarkan menambahkan beberapa pelajaran yang sebelumnya dihilangkan oleh pemerintah militan Belanda, sebagaimana disebutkan kebijakan ordonansi pemerintah Belanda. Hal ini sebagaimana penjelasan Muhibuddin Waly yang dikutip oleh Saifuddin Duhri, bahwa:

---

<sup>86</sup> Dalam tugas tersebut banyak sekali mendirikan madrasah sebagai langkah peralihan dari pada dayah yang pernah dikembangkan kepada madrasah yang mengajar ilmu sains, bahasa Inggris dan pelajaran umum lainnya, kurikulum dayah dirubah disesuaikan dengan kurikulum madrasah, yang lebih berkualitas, hampir semua masyarakat mengantar anaknya ke madrasah. Lihat: Yusuf Adan, *Teungku*, hlm. 134

<sup>87</sup> Teungku Daud Zamzami, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 26 Desember 2017.



Adapun buat pendidikan dan pelajaran dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan agama adalah sama, seperti pesantren-pesantren yang berkembang di Indonesia. Cuma buat daerah Aceh beliau telah membawa kemajuan pertama kali untuk dunia pendidikan dayah di Aceh. Apabila sebelumnya kitab-kitab agama di dayah-dayah di Aceh hanya terbatas pada ilmu Tauhid, ilmu Fiqh, ilmu tafsir, nahwu dan sharf, tetapi setelah ayahku (Muda Wali) telah membawa ke Aceh disiplin ilmu pengetahuan agama lainnya seperti ilmu balaghah, ma'ani, bayan, badi', ilmu ushul fiqh dari berbagai kitab Islam, khususnya ushul fiqh Syafi'i. Demikian juga dengan ilmu musthalah hadis, ilmu Qur'an, ilmu mantiq, ilmu 'aruth, ilmu tasawuf, mulai kitab tingkat tinggi.<sup>88</sup>

*Kedua*, sistem yang diberlakukan dalam proses pembelajaran berbeda dengan masa sebelumnya. Sistem yang ditawarkan oleh dayah ini proses belajar yang tidak lagi mengandalkan sistem tradisional. Dalam hal ini, Tgk. Muda Wali membagi kelompok belajar dalam tiga, yaitu: kelompok *mubtadi'in*, yaitu kelompok pemula dalam belajar di dayah, kelompok *tsanawiyah* dan kelompok *bustanul muhaqiqin*.

Sebenarnya dayah memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam modern sejak zaman kedatangan Islam ke Aceh, tetapi mungkin karena gejolak sosial politik yang berkepanjangan menimpa masyarakat Aceh, maka perkembangan dayah masa sebelum tahun 1966 relatif baik. Salah satu potensi besar yang dimiliki dayah adalah nilai-nilai tradisi keislaman yang lebih baik menjadi pegangan penting bagi masyarakat yang sedang berkembang.<sup>89</sup> Potensi lainnya adalah nilai-nilai moral dan spiritual yang sudah mentradisi, yang hidup dan berkembang dalam diri tokoh-tokoh penting yang muncul dari lembaga pendidikan Islam. Di Aceh, kenyataan bahwa ulama-ulama dayah merupakan ulama yang memiliki kharisma dan sangat dibutuhkan dalam menyatukan umat, hal ini menandakan bukti tentang kuatnya pendidikan dayah dalam menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual, di samping itu ulama dayah dapat berperan dalam perubahan sosial politik di Aceh.

Dayah untuk penyebutan masyarakat Aceh, jikalau masyarakat Indonesia pada umumnya menyebut dengan istilah pesantren. Pendidikan pesantren adalah pendidikan tertua di Indonesia, hingga saat ini model pendidikan

<sup>88</sup> Duhuri, *Dayah*, hlm. 37

<sup>89</sup> Teungku Daud Zamzami, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 26 Desember 2017.

pesantren masih bertahan di tengah-tengah modernisasi pendidikan di luar pesantren itu sendiri. Tetapi, juga harus diakui bahwa pesantren-pesantren yang dulu pernah mengalami kejayaan, sebagian mengalami kesurutan karena regenerasi para kiainya tidak disiapkan dalam pengkaderan. Disisi lain, arus pun sedemikian kuat terhadap pesantren, kondisi ini justru membuat dunia pesantren tertantang untuk menjawab problematika pendidikan di masyarakat.

Dengan demikian, pesantren sesungguhnya terbangun dari konstruksi kemasyarakatan dan epistemologi sosial yang menciptakan suatu transendensi atas perjalanan historis sosial. Sebagai *center of knowledge*, dalam pendakian sosial, pesantren mengalami metamorfosis yang berakar pada konstruksi epistemologi dari variasi pemahaman di kalangan umat Islam. Hal yang menjadi titik penting ialah kenyataan eksistensi pesantren sebagai salah satu pemicu terwujudnya kohesi sosial. Keniscayaan ini karena pesantren hadir terbuka dengan semangat kesederhanaan, kekeluargaan, dan kepedulian sosial. Konsepsi perilaku (*social behavior*) yang ditampilkan pesantren ini mempunyai daya rekat sosial yang tinggi dan sulit ditemukan pada institusi pendidikan lainnya.

Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah “tempat belajar para santri”, sedangkan pondok berarti “rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu”. Di samping itu, “pondok” mungkin juga berasal dari bahasa Arab “*funduk*” yang berarti “hotel atau asrama”. Ada beberapa istilah yang ditemukan dan sering digunakan untuk menunjuk jenis pendidikan Islam tradisional khas Indonesia atau yang lebih terkenal dengan sebutan pesantren. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura, umumnya dipergunakan istilah pesantren atau pondok,<sup>90</sup> di Aceh dikenal dengan istilah dayah atau rangkang atau meunasah, sedangkan di Minangkabau disebut surau.

Secara terminologi, dapat dikemukakan beberapa pendapat yang mengarah pada definisi pesantren. Abdurrahman Wahid, memaknai pesantren secara teknis, *a place where santri (student) live*, sedangkan Abdurrahman Mas’oed menulis, *the word pesantren stems from “santri” which means one who seeks Islamic knowledge. Usually the word pesantren refers to a place where the santri devotes most of his or her time to live in and acquire knowledge*. Kata pesantren berasal dari “santri” yang berarti orang yang mencari pengetahuan

---

<sup>90</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 18

Islam, yang pada umumnya kata pesantren mengacu pada suatu tempat, di mana santri menghabiskan kebanyakan dari waktunya untuk tinggal dan memperoleh pengetahuan.<sup>91</sup>

Pesantren yang merupakan “bapak” dari pendidikan Islam di Indonesia didirikan karena adanya tuntutan dan kebutuhan zaman. Hal ini bisa dilihat dari perjalanan sejarah, bila dirunut kembali sesungguhnya pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama atau da’i.<sup>92</sup>

Dalam pertumbuhannya, pondok pesantren telah mengalami beberapa fase perkembangan. Hasil penelitian LP3S Jakarta, telah mencatatkan 5 macam pola fisik pondok pesantren, sebagai berikut: pertama, pondok pesantren yang hanya terdiri dari masjid dan rumah kiai. Pondok pesantren seperti ini masih bersifat sederhana sekali, di mana kiai masih mempergunakan rumahnya untuk tempat mengajar, kemudian santri hanya datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri. Kedua, pondok pesantren selain masjid dan rumah kiai, juga telah memiliki pondok atau asrama tempat menginap para santri yang datang dari daerah-daerah yang jauh.

Ketiga, pola ini di samping memiliki kedua pola tersebut di atas, dengan sistem weton dan sorogan, pondok pesantren ini telah menyelenggarakan sistem pendidikan formal seperti madrasah. Keempat, pola ini selain memiliki pola-pola tersebut di atas, juga telah memiliki tempat untuk pendidikan keterampilan, seperti peternakan, perkebunan dan lain-lain. Kelima, dalam pola ini, di samping memiliki pola keempat tersebut, juga terdapat bangunan-bangunan seperti: perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, toko, dan lain sebagainya. Pondok pesantren tersebut telah berkembang atau bisa juga disebut pondok pesantren pembangunan.

Menurut Zamakhsyari Dhofir bahwa pesantren digolongkan kecil bila memiliki santri dibawah 1000 orang yang pengaruhnya hanya sebatas kabupaten. Pesantren sedang, memiliki santri antara 1000-2000 orang yang pengaruhnya

---

<sup>91</sup> Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 82

<sup>92</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan LKIS, 1999), hlm. 138

meliputi beberapa kabupaten. Pesantren besar memiliki santri lebih dari 2000 orang dan biasanya berasal dari beberapa propinsi.<sup>93</sup>

Sejarah pondok pesantren merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah pertumbuhan masyarakat Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan bahwa sejak kurun kerajaan Islam pertama di Aceh dalam abad-abad pertama Hijriyah, kemudian di kurun Wali Songo sampai permulaan abad 20 banyak para wali dan ulama yang menjadikan cikal-bakal desa baru.<sup>94</sup> Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang unik di Indonesia. Lembaga pendidikan ini telah berkembang khususnya di Jawa selama berabad-abad. Maulana Malik Ibrahim (w. 1419 di Gresik Jawa Timur), *spiritual father* Walisongo, dalam masyarakat santri Jawa dipandang sebagai gurunya guru tradisi pesantren di tanah Jawa.<sup>95</sup>

Dalam sejarah perjuangan mengusir penjajahan di Indonesia, pondok pesantren banyak memberi andil dalam bidang pendidikan untuk memajukan dan mencerdaskan rakyat Indonesia. Perjuangan ini dimulai oleh Pangeran Sabrang Lor (Patih Unus), Trenggono, Fatahillah (jaman kerajaan Demak) yang berjuang mengusir Portugis (abad ke-15), diteruskan masa Cik Ditiro, Imam Bonjol, Hasanuddin, Pangeran Antasari, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain sampai pada masa revolusi fisik tahun 1945.<sup>96</sup>

Agaknya *heroisme* kebangsaan dan *intelektualisme* keagamaan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kaum santri. Keduanya membutuhkan tokoh ideal dalam bentuk kepemimpinan efektif dan fungsional. Hubungan kaum santri dan pimpinan dalam bentuk *teacher-disciple relation* dilandasi sebuah pertalian yang tidak pernah putus, yaitu ikatan denominasi keagamaan yang berdimensi teologis. Dengan demikian, signifikansi kehidupan keagamaan ulama dan santri merupakan alasan penting mengapa komunitas ini sangat patuh terhadap penguasa-penguasa yang saleh, dan dalam waktu yang sama mereka memperoleh *support* dari *the so-called pious ruler*.

<sup>93</sup> Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi*, hlm. 82

<sup>94</sup> Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia* (Jakarta: Dharma Bhakti, 1982), hlm. 7

<sup>95</sup> Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: al-Ma'arif Bandung, 1979), hlm. 263

<sup>96</sup> Marwan Saridjo, *Sejarah*, hlm. 7

Meskipun tidak ada bukti dukungan dari pemerintah koloni atau sultan untuk memacu kualitas dan kuantitas pendidikan Islam di Jawa abad ke-19, tetapi pertumbuhannya terjadi secara *massif*.<sup>97</sup> Kemampuan pesantren dalam mengembangkan diri dan masyarakat sekitarnya ini, dikarenakan adanya potensi yang dimiliki oleh pondok pesantren, di antaranya sebagai berikut. Pertama, pondok pesantren hidup selama 24 jam; dengan pola 24 jam tersebut, baik pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan, sosial kemasyarakatan, atau sebagai lembaga pengembangan potensi umat dapat diterapkan secara tuntas, optimal dan terpadu. Kedua, Mengakar pada masyarakat; pondok pesantren banyak tumbuh dan berkembang umumnya di daerah pedesaan karena tuntutan masyarakat yang menghendaki berdirinya pondok pesantren. Dengan demikian, pondok pesantren dan keterikatannya dengan masyarakat merupakan hal yang amat penting bagi satu sama lain. Kecenderungan masyarakat menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren memang didasari oleh kepercayaan mereka terhadap pembinaan yang dilakukan oleh pondok pesantren yang lebih mengutamakan pendidikan agama.<sup>98</sup>

Setidaknya ada tiga karakteristik sebagai basis utama kultur pesantren di antaranya sebagai berikut. Pertama, *tradisionalisme*. Sebagaimana disinggung di atas, bahwa lembaga pendidikan pada umumnya adalah milik atau paling tidak didukung masyarakat tertentu yang cenderung mempertahankan tradisi-tradisi masa lalu. Disisi lain, dengan tetap menyadari kemungkinan terjadinya kontroversial dalam segi tertentu. Kelompok yang dimaksud adalah Nahdhatul Ulama (NU) dan Persatuan Tarbiyah Islam.<sup>99</sup>

Menurut Zamakhsyari Dhofier, pesantren salaf/tradisional adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab klasik sebagai inti pendidikan. Sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem *sorogan* yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum.<sup>100</sup>

<sup>97</sup> Abdurrahman Mas'ud, "Sejarah dan Budaya Pesantren" dalam Ismail S.M. (Ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 16-17

<sup>98</sup> <http://www.pesantrenonline/artikel/detailartikel?.php=124> diakses pada tgl 10 Des 2011

<sup>99</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 19-20

<sup>100</sup> Wahjoetomo, *Perguruan*, hlm. 83

Tradisionalisme dalam konteks pesantren harus dipahami sebagai upaya mencontoh tauladan yang dilakukan para ulama *salaf* yang masih murni dalam menjalankan ajaran Islam agar terhindar dari bid'ah, khurafat, takhayul, serta klenik. Hal ini kemudian lebih dikenal dengan gerakan salaf, yaitu gerakan dari orang-orang terdahulu yang ingin kembali kepada al-Qur'an dan Hadis.<sup>101</sup> Gerakan *salaf* ini dalam perjalanan sejarahnya telah memberikan sumbangan besar terhadap modernisasi Islam. Gerakan *salaf* secara sadar menolak anggapan bahwa Islam tidak cocok. Mereka mencari tahu faktor yang menyebabkan ketidakcocokan tersebut, yakni karena *taqlid*.

Kedua, *pertahanan budaya (Cultural Resistance)*. Mempertahankan budaya dan tetap bersandar pada ajaran dasar Islam adalah budaya pesantren yang sudah berkembang berabad-abad. Sikap ini tidak lain merupakan konsekuensi logis dari *modelling*. Ide *cultural resistance* juga mewarnai kehidupan intelektual dunia pesantren. Subjek yang diajarkan di lembaga ini melalui hidayah dan berkah seorang kiai sebagai guru utama atau *irsyadu ustadzin* adalah kitab klasik atau kitab kuning, diolah dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikut, yang sekaligus menunjukkan kemampuan kepemimpinan kiai. Isi kitab kuning menawarkan kesinambungan tradisi yang benar.

Karena konsep *cultural resistance* pula, dunia pesantren selalu tegar menghadapi hegemoni dunia luar. Sejarah menunjukkan bahwa saat penjajah semakin menindas, saat itu pula perlawanan kaum santri semakin keras. Penolakan Sultan Agung dan Diponegoro terhadap kecongkakan Belanda, ketegaran kiai-kiai pada masa penjajahan, serta kehati-hatian pemimpin Islam berlatar-belakang pesantren dalam menyikapi kebijakan penguasa yang dirasakan tidak bijaksana atau sistem yang *established* sehingga menempatkan mereka sebagai kelompok '*oposan*' adalah bentuk-bentuk *cultural resistance* dari dulu hingga sekarang.<sup>102</sup>

Ketiga, *pendidikan keagamaan*. Pendidikan pesantren didasari, digerakkan, dan diarahkan oleh nilai-nilai kehidupan yang bersumber pada ajaran Islam. Ajaran dasar ini berkelindan dengan struktur sosial atau realitas sosial yang digumuli dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan pesantren didasarkan atas dialog yang terus-menerus antara kepercayaan terhadap

<sup>101</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 30

<sup>102</sup> Abdurrahman Mas'ud, "Sejarah dan Budaya Pesantren" dalam Ismail S.M. (Ed.), *Dinamika Pesantren dan Madrasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 26

ajaran dasar agama yang diyakini memiliki nilai kebenaran mutlak dan realitas sosial yang memiliki nilai kebenaran relatif.<sup>103</sup>

Keempat, *kurikulum pesantren*. Pada sebuah lembaga pendidikan, kurikulum merupakan salah satu komponen utama yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan isi pengajaran, mengarahkan proses mekanisme pendidikan, tolok-ukur keberhasilan dan kualitas hasil pendidikan.<sup>104</sup> Menurut Iskandar W., kurikulum merupakan program pendidikan sekolah yang disediakan untuk siswa.<sup>105</sup> Kurikulum pesantren dalam hal ini pesantren “*salaf*” yang statusnya sebagai lembaga pendidikan non-formal, hanya mempelajari agama, bersumber pada kitab-kitab klasik meliputi bidang-bidang studi: *Tauhid, Tafsir, Hadis, Fiqh, Ushul Fiqh, Tasawuf, Bahasa Arab (Nahwu, Sharaf, Balagh, dan Tajwid), Mantiq, dan Akhlak*, yang kesemuanya dapat digolongkan ke dalam 3 golongan yaitu: 1) kitab dasar, 2) kitab menengah, 3) kitab besar.<sup>106</sup>

Kurikulum dalam jenis pendidikan pesantren berdasarkan tingkat kemudahan dan kompleksitas ilmu atau masalah yang dibahas dalam kitab, dapat dipilah menjadi tingkat awal, tingkat menengah, dan tingkat lanjut. Setiap kitab bidang studi memiliki tingkat kemudahan dan kompleksitas pembahasan masing-masing. Sehubungan dengan itu, maka evaluasi kemajuan belajar pada pesantren juga berbeda dengan evaluasi dari madrasah dan sekolah umum.

Dengan kata lain, makna pesantren sebagai jenis pendidikan non-formal, berbeda dengan makna pendidikan non-formal dalam term pendidikan umum, di mana makna pendidikan non-formal dalam terma yang terakhir berarti memberikan *komplemen* dan *suplemen* pada keterampilan atau kemampuan yang telah dimiliki oleh anak didik agar mampu melayani kebutuhan yang semakin meningkat sehubungan dengan kompleksitas tantangan pekerjaan yang dihadapinya. Makna pendidikan non-formal pada pesantren berarti mendasari, menjiwai, dan melengkapi akan nilai-nilai pendidikan formal. Tidak semua hal dapat diajarkan melalui program-program sekolah formal, di sini pesantren mengisi kekurangan tersebut.

<sup>103</sup> Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: INIS, 1994), hlm. 26

<sup>104</sup> Chabib Thoha, *Pengembangan Kurikulum PAI untuk Pembentukan Masyarakat Madani, Makalah* (Semarang: Fak. Tarbiyah IAIN Walisongo, 1999), hlm. 1

<sup>105</sup> Iskandar Wiryokusumo dan Usman Mulyadi, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bina Aksara, 1988), hlm. 6

<sup>106</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, hlm. 34

Karakteristik kurikulum dalam pesantren yang terfokus pada ilmu agama seperti di atas, tidak lepas dari tujuan pondok pesantren itu sendiri. Adapun tujuan pondok pesantren dibagi menjadi dua bagian, sebagai berikut. Tujuan umum. Membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islami yang dengan ilmu agamanya ia sanggup menjadi *muballigh* Islam dalam masyarakat sekitar melalui ilmu dan amalnya.

Selanjutnya adalah tujuan khusus. Mempersiapkan para santri untuk menjadi orang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan, serta mengamalkannya dalam masyarakat.<sup>107</sup> Dewasa ini, kalangan pesantren (termasuk pesantren salaf) mulai menerapkan sistem madrasah. Kelas-kelas dibentuk secara berjenjang dengan tetap memakai kurikulum dan materi pelajaran dari kitab-kitab kuning, dilengkapi pelatihan keterampilan seperti menjahit, mengetik, dan bertukang. Sistem ini kurikulumnya masih sangat umum tidak secara jelas dan terperinci. Tetapi, yang jelas semua pelajaran tersebut telah mencakup segala aspek kebutuhan santri dalam sehari semalam.<sup>108</sup> Kurikulum yang berkaitan dengan materi pengajian berkisar pada ilmu-ilmu agama dengan segala bidangnya seperti disebut sebelumnya. Kendati demikian, tidak berarti ilmu-ilmu keislaman yang diajarkan di pesantren-pesantren sama dan seragam. Pada umumnya, setiap pesantren mempunyai penekanan atau ciri tersendiri dalam hal-hal ilmu yang diberikan. Oleh karena itu, sulit bahkan mustahil menyamaratakan sistem dan kurikulum pesantren seperti yang pernah diusulkan.

Salah satu ciri tradisi pesantren yang masih kuat dipertahankan di sebagian besar pesantren adalah pengajian kitab *salaf*. Kitab *salaf* yang lebih dikenal di kalangan luar pesantren dengan sebutan kitab kuning, merupakan kitab-kitab yang disusun para sarjana Islam abad pertengahan. Kitab-kitab tersebut dalam konteks penyusunan dan awal penyebarluasannya merupakan karya intelektual yang tidak ternilai harganya, dan hanya mungkin disusun oleh ulama jenius dalam tradisi keilmuan dan kebudayaan yang tinggi pada zamannya.

Isi yang disajikan kitab kuning hampir selalu terdiri dari dua komponen; pertama *matan* dan kedua komponen *syarah*. *Matan* adalah isi inti yang akan dikupas oleh *syarah*. Dalam *layout*-nya, *matan* diletakkan di luar garis segi

---

<sup>107</sup> Arifin H.M., *Kapita.*, hlm. 248

<sup>108</sup> Wahjoetomo, *Perguruan*, hlm. 84-85



empat yang mengelilingi *syarah*. Ciri lain penjilidan kitab-kitab cetakan lama biasanya dengan sistem korasan (karasan), lembaran-lembarannya dapat dipisah-pisahkan sehingga lebih memudahkan pembaca untuk menelaahnya. Di kalangan masyarakat, kedudukan kitab kuning saling melengkapi dengan kedudukan kiai. Kitab kuning merupakan kodifikasi nilai-nilai yang dianut masyarakat pesantren, sementara kiai adalah personifikasi yang utuh dari sistem yang dianut tadi.

Sistem pendidikan di pesantren pun memiliki watak mandiri, bila dilihat secara keseluruhan bermula dari pengajaran *sorogan*, di mana seorang kiai mengajar santrinya yang masih berjumlah sedikit secara bergilir santri per santri. Pada gilirannya murid mengulangi dan menerjemahkan kata demi kata sepersis mungkin seperti apa yang diungkapkan oleh gurunya. Sistem penerjemahan dibuat sedemikian rupa agar murid mudah mengetahui baik arti maupun fungsi kata dalam rangkaian kalimat Arab. Murid diwajibkan menguasai cara pembacaan dan terjemahan secara tepat, dan hanya boleh menerima tambahan pelajaran bila telah berulang-ulang mendalami pelajaran sebelumnya. Sistem *sorogan* inilah yang dianggap fase tersulit dari sistem keseluruhan pengajaran di pesantren karena di sana menuntut kesabaran, kerajinan, ketaatan, dan disiplin pribadi dari murid itu sendiri. Pengajian *sorogan* lalu diikuti pengajian *weton*, seorang kiai duduk di lantai masjid atau beranda rumahnya sendiri membacakan dan menerangkan teks-teks keagamaan dengan dikerumuni oleh santri-santri yang mendengarkan dan mencatat uraiannya itu. Pengajian *sorogan* masih diteruskan dengan memberi wewenang kepada guru-guru untuk melaksanakannya di bilik masing-masing. Demikian pula lambat-laun pengajian *weton* diwakilkan kepada pengganti (*badal*) sehingga kiai hanya memberikan pengajian *weton* dengan teks-teks utama.

Selain kedua metode tersebut, Mastuhu menyebut hapalan dan *halaqah*. Dalam perkembangannya sistem *madrasi* dan *klasikal* diterapkan untuk mempermudah proses pembelajaran sebagai pengembangan dan pembaruan pengajian model *sorogan* dan *weton*.

Metode *sorogan*, diduga kuat merupakan tradisi pesantren, mengingat sistem pengajaran di pesantren secara keseluruhan menggunakan metode *sorogan*. Hal ini menunjukkan ciri khas tradisional pesantren dengan mempertahankan warisan masa lalu yang cukup jauh. Namun demikian, bukan berarti hanya metode *sorogan* saja yang dipergunakan di kalangan pesantren tradisional, melainkan boleh jadi dipergunakan pula metode yang lain

misalnya weton atau bandongan, bahkan pengajaran klasikal (*madrasi*). Hanya saja, yang disebutkan terakhir tidak bisa dibayangkan pelaksanaannya seperti yang berlaku di madrasah atau sekolah umum karena cukup banyak segi-segi yang membedakannya.

Istilah *weton* berasal dari bahasa Jawa yang berarti waktu. Disebut demikian karena pengajian model ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu, biasanya sesudah mengerjakan shalat fardhu, dilakukan seperti kuliah terbuka yang diikuti para santri. Kemudian kiai membaca, menerjemahkan, menerangkan, sekaligus mengulas kitab-kitab salaf yang menjadi acuan. Termasuk dalam pengertian *weton* adalah *halaqah*.

Sistem *sorogan*, para santri maju satu per satu untuk membaca dan menguraikan isi kitab di hadapan guru atau Kiai. Selain dua sistem tersebut (*weton*, *sorogan*), pesantren juga kerap menggunakan sistem musyawarah. Model ini bersifat dialogis sehingga umumnya hanya diikuti oleh santri senior.

Namun demikian, tiap pesantren tidak mengajarkan kitab yang sama, melainkan kombinasi kitab yang berbeda-beda sehingga banyak kiai terkenal dengan spesialisasi kitab tertentu. Hal ini karena kurikulum pesantren tidak distandarisasi. Dari perkembangan seperti itulah bahwa pesantren merupakan lembaga khusus dengan pengajaran kitab-kitab kuning sebagai tempat pendidikan yang mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam dengan sistem pengajaran yang dilakukan langsung dari bahasa Arab serta berdasarkan pembacaan kitab-kitab klasik karya ulama besar.

### **C. MADRASAH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ACEH**

Kata “Madrasah” berasal dari bahasa Arab sebagai keterangan tempat (*dzaraf*), dari akar kata: “*Darasa, Yadrusu, Darsan, dan Madrasatan*”. Yang mempunyai arti “Tempat belajar para pelajar” atau diartikan “jalan” (*Thariq*), misalnya: diartikan: “ini jalan kenikmatan”. Sedangkan kata “*Midras*” diartikan “buku yang dipelajari” atau “tempat belajar”.<sup>109</sup> Istilah madrasah sering diidentikkan dengan istilah sekolah atau semacam bentuk perguruan yang dijalankan oleh sekelompok atau institusi umat Islam. Dalam bahasa Indonesia madrasah

---

<sup>109</sup> Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam Pada Periode Klasik dan Pertengahan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50

disebut dengan sekolah yang berarti bangunan atau lembaga untuk belajar dan memberi pengajaran.<sup>110</sup> Dari pengertian di atas maka jelaslah bahwa madrasah adalah wadah atau tempat belajar ilmu-ilmu keislaman dan ilmu pengetahuan keahlian lainnya yang berkembang pada zamannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa istilah madrasah bersumber dari Islam itu sendiri.

## 1. Perkembangan Madrasah

Secara umum madrasah juga sama dengan sekolah-sekolah lain, yaitu lembaga pendidikan yang menggunakan sistem klasikal dan kelas dengan segala fasilitasnya seperti kursi, meja dan papan tulis, kecuali aspek tradisi dan kurikulum yang dilaksanakan. Meskipun sekarang posisi madrasah secara yuridis sama terutama dalam aspek kurikulum tetapi madrasah secara umum masih mempertahankan ciri khasnya sebagai sekolah yang berciri khas Islam.

Madrasah yang merupakan sebuah wujud institusi pendidikan Islam mengalami perjalanan yang begitu panjang dalam sejarah. Beberapa pendapat yang mengemukakan perihal munculnya madrasah, diantaranya; Nizam al-Mulk mendirikan madrasah untuk pertama kalinya di Baghdad, yaitu Syalabi Madrasah di tahun 459 Hijriyah. Pada abad ke-4 Hijriyah telah hadir lebih dahulu Hasan Abd Al-Madrasah yang berada di Naisabur. Bukan hanya termotivasi karena keagamaan dan perekonomian saja yang pada mulanya melatarbelakangi akan kehadiran madrasah sebagai sebuah institusi pendidikan, akan tetapi, politik juga ikut memotivasi akan hal itu. Oleh karenanya, pemerintah melakukan peresmian dan perubahan terhadap institusi madrasah dari mekanisme pendidikan informil (tidak resmi; swasta) yang sudah ada pada mulanya menjadi institusi pendidikan formal (umum; resmi), selain itu pula pemerintah memberikan berbagai kebijakan terkait mengenai berbagai elemen pendidikan dan sebagai wujud peran serta pemerintah dalam mengelola madrasah itu sendiri.

Oleh karenanya, kemunculan madrasah kala itu, menjadikan madrasah sebagai fundamental terhadap pelaksanaan pendidikan Islam yang telah memberi berbagai peranan dalam mengembangkan lingkungan bidang pendidikan pada periode-periode selanjutnya, begitu pula dalam perkembangan pendidikan di dunia Barat. Sebagaimana yang dikemukakan Abd. Ghani

---

<sup>110</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 889

Abud; “Berdirinya berbagai universitas di Barat merupakan terinspirasi dan dipengaruhi oleh Madrasah”.<sup>111</sup> Begitu pula pembuktian yang diberikan oleh George Makdisi, bahwa tradisi akademik Barat secara historis mengambil banyak keuntungan dari tradisi madrasah.

Di Indonesia, madrasah menjadi bukti kemajuan dunia pendidikan sejak permulaan abad ke-20. Belum adanya kepastian kaitan madrasah abad ke-11 dan abad ke-12 di wilayah Timur Tengah dengan kehadiran madrasah di Indonesia pada permulaan abad ke-20 tersebut. Asal-usul tumbuhnya madrasah di Indonesia, jika dirujuk kembali pada masa permulaan abad ke-20, terdapat anggapan bahwa mempunyai alasan riwayatnya sendiri, walaupun begitu, kemungkinan ia menjadi konsekuensi dari pengaruh intensif pembaharuan pendidikan Islam di Timur Tengah masa moderen.

Pengajaran agama yang umum (sah; resmi; formil) pada hakikatnya tidak akan berubah dikarenakan masuknya agama Islam, akan tetapi yang berubah isi agama yang diajarkan, bahasa yang menjadi media komunikasi dalam pelajaran agama itu sendiri, dan latar belakang para pelajarnya, sehingga metodenya masih menggunakan metode pola Hindu. Sependapat dengan hal itu, Karel Steenbrink (1994) memberikan indikasi bahwa pendidikan Islam berevolusi dari pesantren, madrasah dan kemudian sekolah, sebab itu madrasah di Indonesia dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau.

Hadirnya madrasah merupakan sebuah anggapan sebagai parameter utama pada keefektifan perubahan guna menghasikan kesuksesan kinerja budaya umat Islam, yang secara jelas terlihat pada bidang pendidikan, beitu pula tampak pada bukti nyata kian majunya madrasah kala itu yang tercermin pada kualitas pencapaian ilmu pengetahuan, intelektual dan kultural.<sup>112</sup>

Oleh karena itu madrasah merupakan sebuah bentuk substansi kebudayaan masyarakat Indonesia yang sudah mengalami reaksi diseminasi yang begitu sangat gencarnya, dan jangka periode yang begitu jauh dengan membawa peranannya di tahapan membentuk bangsa yang beradab.

---

<sup>111</sup> Maksun, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 75

<sup>112</sup> M. Munir Mursi, *al Tarbiyah al Islamiyyah*, hlm. 69

Ketika awal pembentukan pola madrasah, mekanisme pendidikan dan pengajarannya dilakukan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, dan pesantren. Sesudah terbangun dan terciptanya sistem yang kuat, yakni sistem “*Intellectual Webs*” (jaringan intelektual) di lingkungan masyarakat Islam seraya menjadikan Haramain sebagai situs utama yang “asli”, sehingga secara berangsur-angsur variasi klenik (kebatinan; mistik) yang begitu melekat di pondok pesantren menghilang dan berganti dengan sistem *fanatisme* (tradisional; ortodoksi), atau oleh peneliti peradaban di Indonesia menyebutnya sebagai reaksi aktif berpindahnya dari Islam yang bermotif klenik (kebatinan; mistik) mendekati dan menjadi Islam Sunni.

Disisi lain juga terjadi proses perubahan isi pembelajaran di dalam format-format pembelajarannya. Persentuhan “global” dengan pusat Islam di Haramain memungkinkan para pelaku pendidikan Islam melihat sistem pembelajaran yang lebih terprogram. Maka tumbuh dan berkembanglah pola pembelajaran pelajaran Islam yang dikelola dengan sistem “Madrasi”. Sebagaimana dimaklumi bahwa sistem madrasah pertama kali didirikan dan diperkenalkan di dunia Islam adalah madrasah Nidzamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Perdana Menteri Nidzamal Mulk seorang penguasa Bani Saljuk pada abad II yang salah seorang gurunya adalah Imam Ghazali.

Kemudian sistem madrasah ini berkembang ke berbagai kota di negeri Islam antara lain di Kairo (Mesir) berdiri perguruan al-Azhar, di Spanyol berdiri perguruan Cordoba dan di India berdiri madrasah Deoban. Dari sini dapat diketahui bahwa madrasah yang kita temukan di Indonesia bukanlah suatu yang *indigenius* (pribumi) dalam peta dunia pendidikan di Indonesia, dan juga sebagaimana yang ditunjukkan oleh kata “madrasah” itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab, secara harfiah kata ini setara maknanya dengan “sekolah”. Berbeda dengan pesantren, yang oleh para peneliti/ilmuwan dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam yang memiliki watak *indigenius*.

Dilihat dari pengelolaannya, pendidikan sistem madrasah ini memungkinkan cara pembelajaran secara klasikal. Hal ini berbeda dengan cara yang berkembang di pondok pesantren yang lebih bersifat individual seperti yang terdapat pada sistem sorogan dan wetonan. Pengelolaan sistem madrasi juga memungkinkan adanya pengelompokan pelajaran-pelajaran tentang pengetahuan Islam yang penyampaianya dilakukan secara bertingkat-tingkat. Pengelompokan ini sekaligus memperhitungkan rentang waktu yang dibutuhkan. Sehingga secara teknis, sistem madrasi berusaha mengorganisasikan kegiatan kependidikannya

dengan sistem kelas-kelas berjenjang dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelajaran yang sudah dipolakan.

Format madrasah dari waktu ke waktu semakin jelas sosoknya, sementara misi dan visi keislaman terus mengalami perubahan, seiring dengan semakin kuatnya kontak dengan dunia luar terutama dengan negara-negara Islam dan juga dipengaruhi oleh kolonialisasi di nusantara ini yang berabad-abad lamanya.

#### **a. Masa Penjajahan**

Awal mula terjadinya pertumbuhan madrasah pada periode pemerintahan kolonial Belanda berdasarkan gairah reformasi di lingkungan masyarakat Islam. Tumbuhnya madrasah tersebut disertai dengan adanya pembuktian motif tanggapan umat Islam yang lebih toleran, bukan hanya sekedar berjiwa protektif atas pendidikan Hindia Belanda. Peraturan yang dibuat pemerintah Hindia Belanda bermotif penekanan atas pendidikan Islam yang disebabkan adanya keresahan atas lahirnya para militansi dari kaum muslim terpelajar. Dari berbagai kasus, para ustadz selalu disalahkan saat melawan aksi kristenisasi dengan berdalih demi ketertiban dan keamanan.<sup>113</sup>

Pertumbuhan madrasah telah dimulai pada masa Hindia Belanda, kendati legitimasi yang diperoleh dari pemerintah Hindia Belanda hanya sebagian saja. Akan tetapi, kehadiran madrasah-madrasah tersebut baik dari Minangkabau, Jawa maupun Kalimantan biasanya muncul hanya dikarenakan susunan penggerak dan lembaga dan organisasi khusus yang tidak mendapatkan sokongan dan pengakuan dari pemerintah.<sup>114</sup>

Peraturan yang tidak berpihak kepada pendidikan Islam terus berjalan hingga Jepang menjajah, walaupun ditemukan berbagai perubahan pada bagian-bagian tertentu. Lain halnya bagi pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Jepang membuka dan mengaktifkan lagi madrasah-madrasah yang sempat tutup di periode pemerintahan sebelumnya. Meski begitu, pemerintahan Jepang senantiasa berhati-hati terhadap madrasah-madrasah yang berpotensi melakukan aksi pertentangan terhadap pendidikan Jepang di Indonesia. Mengawali Indonesia merdeka, madrasah turut pula berkembang di periode orde lama, yang selalu berkaitan dengan tugas dan fungsi Departemen Agama

---

<sup>113</sup> Maksun, *Madrasah Sejarah*, hlm. 63

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm. 114-115

yang diresmikan pada tanggal 3 Januari 1946, pada perkembangan berikutnya Departemen Agama melakukan penyeragaman sebutan, klasifikasi dan penjenjangan madrasah seperti keberadaannya saat ini. Madrasah tersebut terdiri dari dua kategori. Kategori pertama, madrasah yang melaksanakan pendidikan agama 30% dengan disertai pendidikan dasar dan pendidikan umum 70%. Kategori kedua, madrasah yang melaksanakan pendidikan agama Islam secara keseluruhan yang dikenal sebagai Madrasah Diniyah.<sup>115</sup>

Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 Jo Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, menegaskan bahwa undang-undang yang dimaksud tersebut tidak diberlakukan lagi bagi pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama. Sedangkan pasal 20 ayat 1 berikutnya menyebutkan bahwa pendidikan agama di sekolah bukanlah waktu pelajaran wajib dan tergantung dari kesepakatan orang tua murid. Melalui anjuran tersebut, meskipun madrasah keberadaannya masih di luar sistem pendidikan nasional, akan tetapi telah menjadi jalan legalisasi atas keberadaan madrasah di ruang lingkup pendidikan nasional.<sup>116</sup>

#### **b. Madrasah Pada Masa Orde Lama**

Mengawali masuknya orde lama, pemerintah meresmikan pembentukan Departemen Agama pada tanggal 3 Januari 1946. Institusi tersebut yang benar-benar serius berjuang untuk pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Tujuan dari tindakan Departemen Agama terhadap pendidikan Islam berpijak atas keinginan masyarakat muslim supaya pendidikan agama diberikan di sekolah-sekolah. Selain dari pada perluasan madrasah itu sendiri.

Diantara kemajuan madrasah yang begitu mencolok di periode orde lama adalah: berdirinya dan berkembangnya pendidikan guru agama dan pendidikan hakim Islam negeri. Berkembangnya madrasah yang begitu krusial tersebut ditandai dengan terciptanya para pegawai profesional di bidang agama dengan menyediakan para pegawai yang selalu sedia bagi pengembangan madrasah.

Keluarnya ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 pada tanggal 3 Desember 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, tahapan pertama tahun 1961-1969, menyatakan bahwa pendidikan agama

<sup>115</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Endiklopedi Islam*, hlm. 108

<sup>116</sup> Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, hlm. 130-131

menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai universitas-universitas negeri, dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut serta, apabila wali murid atau murid dewasa menyatakan keberatannya. Meskipun begitu, jika dikaitkan dengan madrasah, ketetapan tersebut sudah memberikan perhatiannya, walaupun belum begitu memiliki arti, melalui pemberian anjuran supaya madrasah sebaiknya berdiri sendiri menjadi sebuah lembaga mandiri dibawah pengendalian departemen pendidikan dan kebudayaan.<sup>117</sup>

### c. Masa Orde Baru

Periode orde baru, pemerintah mengawali pemikirannya pada madrasah yang harus diintegrasikan dalam pendidikan nasional. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/4/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah ditetapkan bahwa standar pendidikan madrasah sama dengan sekolah umum, ijazahnya mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum dan lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Lulusan Madrasah Aliyah dapat melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi umum dan agama.

Pemerintah pada masa orde baru menjalankan tahapan nyata dalam bentuk perancangan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Pada keadaan tersebut, penetapan pastinya mengenai madrasah akan disampaikan lewat berbagai ketetapan yang aplikatif dan kompatibel pada tingkatan pendidikan sekolah dengan tidak melenyapkan ciri khas agamanya. Menempuh jalan tersebut bisa diistilahkan bahwa sistem pendidikan nasional menjadikan perkembangan madrasah lebih terstruktur.<sup>118</sup> Sehingga seluruh tataran masyarakat bisa memulai untuk menerima madrasah di periode orde baru tersebut baik kalangan masyarakat tingkatan kelas dasar hingga masyarakat tingkatan kelas menengah ke atas.

Sebaliknya, progres tingkatannya menjelma 5 (tingkatan) pendidikan yang jika dirunut sebagai berikut: *pertama*, Raudhatul Athfal (Bustanul Athfal) yang terbagi atas 3 tingkatan: tingkat A bagi anak-anak umur 3-4 tahun, tingkat

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 130

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 130-131



B bagi anak usia 4-5 tahun, dan tingkat C bagi anak yang berusia 5-6 tahun. *Kedua*, Madrasah Ibtidaiyah, yakni institusi pendidikan yang menyampaikan pendidikan dan pengajaran di tingkat terendah disertai pelaksanaan mata pelajaran agama Islam menjadi mata pelajaran dasar paling sedikit 30% yang menyertai mata pelajaran umum. *Ketiga*, Madrasah Tsanawiyah merupakan institusi pendidikan yang menjalankan pendidikan dan pengajaran di tingkat menengah pertama dengan merealisasikan mata pelajaran agama Islam menjadi mata pelajaran dasar paling sedikit 30% yang menyertai mata pelajaran umum.

*Keempat*, Madrasah Aliyah, yaitu institusi pendidikan yang melaksanakan pendidikan dan pengajaran di tingkat menengah ke atas dengan merealisasikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang paling sedikit 30% yang menyertai mata pelajaran umum. Untuk saat sekarang Madrasah Aliyah mempunyai berbagai jurusan, yakni Ilmu Agama, Fisika, Biologi, Ilmu Pengetahuan Sosial dan Budaya. *Kelima*, Madrasah Diniyah, yakni institusi pendidikan dan pelajaran agama Islam, yang memiliki fungsi khusus sebagai pemenuhan keinginan para orang tua supaya anak-anak mendapatkan pendidikan agama Islam yang berlebih. Madrasah Diniyah tersebut terbagi atas 3 tingkatan, yakni Madrasah Diniyah Awaliyah yang merupakan madrasah tingkatan pemula dengan kelas 4 memiliki jam belajar sebanyak 18 jam pelajaran tiap minggunya. Madrasah Diniyah Wustha yang merupakan madrasah tingkatan pertama dengan periode belajar 2 tahun dari kelas I hingga kelas II mempunyai waktu belajar sebanyak 18 jam pelajaran tiap minggunya. Madrasah Diniyah Ula yang merupakan madrasah tingkat menengah atas yang memiliki periode belajar 2 tahun dari kelas I hingga kelas II yang memiliki waktu belajar sebanyak 18 jam pelajaran tiap minggunya.

#### **d. Masa Sekarang**

Pada umumnya, saat ini dan di masa yang akan datang sosial budaya masyarakat muslim Indonesia berkembang karena sedang dan akan dipengaruhi oleh arus era globalisasi, baik itu pendidikan Islam bahkan pesantren dan madrasah khususnya. Alasan yang begitu luas tidak harus dideskripsikan kembali bahwa masyarakat muslim tidak dapat menghindar pada mekanisme globalisasi yang terjadi, apalagi jika ingin berjaya di tengah perkembangan dunia yang kian kompetitif di masa kini dan abad 21.<sup>119</sup>

---

<sup>119</sup> Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 234-239

Globalisasi yang berlangsung dan melanda masyarakat muslim Indonesia sekarang ini menampilkan sumber dan watak yang berbeda. Proses globalisasi dewasa ini tidak bersumber dari Timur Tengah, melainkan dari barat, yang terus memegang *supremasi* dan *hegemoni* dalam berbagai lapangan kehidupan masyarakat dunia umumnya. Dominasi dan hegemoni politik barat dalam segi-segi tertentu mungkin saja telah “merosot”, khususnya sejak terakhirnya perang dunia kedua, dan “perang dingin”. Belum lama ini, tetapi hegemoni ekonomi dan sains teknologi barat tetap belum tergoyahkan. Meski muncul beberapa kekuatan ekonomi baru, seperti Jepang dan Korea Selatan, tetapi “kultur” hegemoni ekonomi dan sains teknologinya tetap sarat dengan nilai-nilai Barat.

Melihat begitu derasnya pengaruh barat yang mengarah pada hegemoni terhadap masyarakat muslim dalam segala aspek kehidupannya, maka madrasah harus segera berbenah diri. Madrasah sebagai institusi pendidikan yang konsen dan inten dalam usaha transformasi nilai-nilai Islam harus dapat menampilkan perannya sebagai *counter* terhadap *imperialisme kultural* (*culture imperialism*) yang sedang gencar-gencarnya menyerbu dunia timur (masyarakat muslim) khususnya di Indonesia.

## 2. Sistem Pendidikan dan Pengajaran di Madrasah

Sistem pengajaran yang digunakan di madrasah adalah perpaduan antara sistem pada pondok pesantren dengan sistem yang berlaku di sekolah-sekolah modern. Penilaian untuk kenaikan tingkat ditentukan dengan penguasaan terhadap sejumlah bidang pengajaran tertentu.

Pada perkembangan selanjutnya sistem pondok mulai ditinggal, dan berdirilah madrasah-madrasah yang mengikuti sistem yang sama dengan sekolah-sekolah modern. Namun demikian pada tahap awal madrasah tersebut masih bersifat *diniyah*, di mana mata pelajaran hanya agama dengan penggunaan kitab-kitab bahasa arab. Sebagai pengaruh dari ide-ide pembaharuan yang berkembang di dunia Islam dan kebangkitan bangsa Indonesia, sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke dalam kurikulum madrasah. Buku-buku pelajaran agama mulai disusun khusus sesuai dengan tingkatan madrasah, sebagai halnya buku-buku pengetahuan umum yang berlaku di sekolah-sekolah umum. Bahkan kemudian timbullah madrasah-madrasah yang mengikuti sistem perjenjangan dalam bentuk sekolah-sekolah modern, seperti *Madrasah Ibtidaiyah* untuk tingkat dasar, *Madrasah Tsanawiyah* untuk tingkat menengah

pertama, dan ada pula *Kuliah Muallimin* (pendidikan guru) yang disebut normal Islam.<sup>120</sup>

Melalui Kementerian Agama, madrasah perlu menentukan kriteria madrasah. Kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama untuk madrasah-madrasah yang berada di dalam wewenangnya adalah harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok, paling sedikit enam jam seminggu. Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sistem pendidikan dan pengajaran di madrasah merupakan perpaduan antara sistem yang berlaku di pondok pesantren dengan sistem yang berlaku di sekolah-sekolah modern.

Terdapat tiga hal untuk melihat perbedaan antara madrasah dan sekolah modern yaitu; pertama, materi-materi pelajaran yang disampaikan dalam pendidikan madrasah adalah kombinasi antara pelajaran-pelajaran agama Islam namun pendidikan agama lebih dominan, sedangkan untuk sekolah modern lebih bersifat ke pelajaran umum. Kedua, tempat tinggal. Dalam tempat tinggal ini maksudnya tempat tinggal siswa atau pelajar, sekolah madrasah biasanya menyediakan Asrama yang ada biasanya disediakan di sekitar madrasah, sedangkan untuk sekolah modern siswanya pulang ke rumah masing-masing. Ketiga, sumber dana. Sumber dana di sini maksudnya sumber dana yang membantu berdirinya madrasah itu sendiri, biasanya dana yang didapat madrasah sangat terbatas biasanya dari Departemen Agama, sedangkan sekolahan umum tidak terbatas misalnya Pendidikan Nasional, sumbangan tak terikat.

Sejak timbulnya madrasah dan menjadikannya sebagai lembaga pendidikan yang mandiri, tanpa bimbingan dan bantuan pemerintah kolonial Belanda. Setelah Indonesia merdeka, madrasah dan pesantren mulai mendapatkan perhatian dan pembinaan dari pemerintah RI. UUD 1945 mengamanatkan, agar mengusahakan terbentuknya suatu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional yang diatur undang-undang.<sup>121</sup>

Untuk melaksanakan amanat tersebut, BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) sebagai Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat pada masa itu, merumuskan pokok-pokok usaha pendidikan dan

<sup>120</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), hlm. 102

<sup>121</sup> Sekretariat Negara RI, *UUD, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara*. hlm. 7

pengajaran yang terdiri dari 10 pasal. Pada pasal 5 (b) sebagaimana dikutip oleh Hasbullah, menetapkan bahwa “madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah suatu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat akar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaknya juga mendapat perhatian dan bantuan materil dari pemerintah.”<sup>122</sup>

Dalam hal ini wewenang pembinaan dan pemberian bantuan dan tuntunan tersebut diserahkan kepada Kementerian Agama. Tujuan pembinaan dan bantuan adalah agar madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam berkembang secara terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional, sebagaimana yang dikehendaki oleh UUD 1945. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan madrasah tersebut dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan dan dilaksanakan secara bertahap.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan madrasah sesuai dengan sasaran BPKNIP agar madrasah dapat bantuan materil dan bimbingan dari pemerintah, maka kementerian agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1952. Menurut ketentuan ini, yang dinamakan madrasah ialah “tempat pendidikan yang telah diatur sebagai sekolah dan memuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajarannya”.

Dalam upaya pemerintah untuk menyediakan guru-guru agama untuk sekolah dan guru-guru umum serta lembaga pendidikan lainnya pada tahun 1951 Kementerian Agama mendirikan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI) dan Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHAI) di beberapa tempat. Berdirinya kedua jenis sekolah guru tersebut banyak manfaatnya bagi perkembangan dan pembinaan madrasah, karena kedua jenis sekolah guru ini, memberikan kesempatan bagi para alumni madrasah dengan persyaratan tertentu untuk memasukinya. Hal tersebut telah mendorong penyelenggaraan madrasah untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah.<sup>123</sup>

Kedua jenis sekolah guru itu, kemudian namanya diubah menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dan SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama). PGA menyediakan calon guru agama untuk sekolah dasar dan madrasah tingkat Ibtidaiyah, sedangkan SGHA menyediakan calon-calon guru agama

---

<sup>122</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. hlm. 175

<sup>123</sup> Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, 1986), hlm. 78

untuk tingkat sekolah menengah baik sekolah agama maupun sekolah umum, dan hakim pada Pengadilan Agama. Pada tahun 1957 SGHA disebut sebagai PGA dan untuk keperluan tenaga pendidikan hakim agama didirikan PHIN (Pendidikan Hakim Negeri). Pada masa itu banyak madrasah tingkat Tsanawiyah dan Aliyah berubah menjadi PGA. Dengan demikian, di samping PGA pertama (4 tahun), 9 buah PGA atas (2 tahun) dan 1 buah PHIN (3 tahun).<sup>124</sup>

Upaya pembinaan madrasah, menuju kesatuan sistem pendidikan nasional, semakin ditingkatkan. Usaha tersebut tidak hanya merupakan tugas dan wewenang Departemen Agama saja, tetapi merupakan tugas dan wewenang pemerintah secara keseluruhan bersama masyarakat. Pada tahun 1975, dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Hal ini dilatarbelakangi bahwa siswa-siswa madrasah sebagaimana halnya tiap-tiap warga negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah, yang menghendaki melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

Dalam rangka merealisasikan SKB 3 menteri tersebut, maka pada tahun 1976 Departemen Agama mengeluarkan kurikulum sebagai standar untuk dijadikan acuan oleh madrasah, baik untuk MI, MTs, maupun Madrasah Aliyah. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa pembinaan dan pengembangan madrasah tetap dilaksanakan semenjak munculnya istilah madrasah sampai lahirnya SKB 3 Menteri, dimana madrasah dipersamakan dengan sekolah umum, yang dalam hal ini adalah sekolah negeri umum yang berada dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sederajat. Dan demikian jelasnya bahwa pemerintah tetap memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia.

### **3. Pilih Madrasah atau Sekolah Umum**

Setelah banyak membahas pengertian, perkembangan madrasah dari masa ke masa maka sekarang timbul pertanyaan kenapa pendidikan di madrasah kurang diminati oleh masyarakat dan pelajar untuk menuntut ilmu, bahkan

---

<sup>124</sup> Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*. hlm. 393

di pelosok desa sudah banyak madrasah yang tutup karena tidak adanya siswa yang mau belajar di madrasah tersebut dan memilih untuk belajar di sekolah-sekolah umum, baik negeri maupun swasta.

Padahal sekolah madrasah, pondok pesantren sangat dibutuhkan keberadaannya untuk mengajarkan ilmu-ilmu agama yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan di masa ini, untuk memberikan pendidikan moral kepada calon-calon pemimpin bangsa, seandainya tidak ada lagi sekolah-sekolah yang mengajarkan pendidikan Islam sudah jelas bisa dipastikan kehancuran bangsa ini sudah dekat menggapa, karena pemimpin-pemimpin bangsa pasti tidak mengetahui ilmu-ilmu agama sehingga perbuatannya akan semakin bebas sesuai keinginannya.

Mengapa sekolah-sekolah umum lebih diminati dari pada madrasah hal tersebut bisa dilihat dari beberapa poin berikut: pertama, fasilitas yang diberikan. Fasilitas yang diberikan pun sangat jauh berbeda antara sekolah umum dengan madrasah, pada umumnya sekolah umum lebih menyiapkan fasilitas yang lebih lengkap dari pada madrasah, sehingga kebutuhan siswa pun bisa terpenuhi sesuai kebutuhannya masing-masing siswa. Kedua, pelajaran (pendidikan). Dalam sistem belajarnya pun madrasah bersifat pengkombinasian antara pelajaran umum dan pelajaran yang berbasis Agama, namun pelajaran-pelajaran yang bersifat keagamaan lebih menonjol dari pada pelajaran yang bersifat umum, sehingga muncul anggapan bahwasanya belajar di madrasah susah untuk mendapatkan suatu pekerjaan sedangkan sekolah umum sebaliknya. Ketiga, cara belajar. Cara belajarnya pun berbeda cara belajar di madrasah lebih bersifat dipaksa misalnya siswa-siswa di madrasah dituntut untuk menghafal ayat-ayat al-Quran, hadis, bahasa Arab, namun jika di sekolah umum lebih bebas maka dari itu sekolah umum lebih diminati.

## BAB IV

# PESANTREN MADRASAH 'ULUMUL QUR'AN DAN RESISTENSI SIMBOLIK

### A. SELAYANG PANDANG MADRASAH 'ULUMUL QUR'AN

#### 1. Sejarah Berdirinya Madrasah 'Ulumul Qur'an

**M**adrasah Ulumul Qur'an<sup>1</sup> merupakan salah satu lembaga pendidikan Agama yang memadukan sistem pendidikan pesantren<sup>2</sup> dengan sistem pendidikan madrasah kemudian dikolaborasi dengan lembaga dirasatul Qur'an serta lembaga pendidikan bakat yang selanjutnya disebut sistem pendidikan terpadu.<sup>3</sup> MUQ bukanlah sekolah yang baru bagi masyarakat di daerah kota Langsa, khususnya di Gampoeng Alue Pinang karena MUQ ini didirikan sudah cukup lama yaitu sekitar 35 tahun yang

---

<sup>1</sup> Dalam penelitian ini Madrasah Ulumul Qur'an selanjutnya akan ditulis dengan kata MUQ hal ini dikarenakan dalam masyarakat penyebutan MUQ lebih sering digunakan.

<sup>2</sup> Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat sehari-hari, pesantren didirikan dalam rangka pembagian tugas mukminin untuk iqamatuddin (menegakkan dan mempertahankan agama Islam di muka bumi), MUQ merupakan sebuah pesantren dengan tipe modern, karena telah mengalami transformasi yang sangat signifikan baik dalam sistem pendidikannya maupun unsur-unsur kelembagaannya selain itu pesantren modern lebih tanggap terhadap perkembangan dan pembaharuan yang mengakomodasikan tradisi-tradisi baru mulai dari kurikulum, metodologi ilmiah serta berfungsi sebagai pusat pengembangan masyarakat.. Muhammad Khalid, Pembelajaran di Pesantren Salafi dan Pesantren Modern, skripsi (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2012), hlm. 3-4, Skripsi tersebut tidak dipublikasikan.

<sup>3</sup> Sulaiman Ismail, Dinamika Sistem Pendidikan Islam, (Langsa: Data Printing, 2013) hlm. 87

lalu, pesantren ini berada disebelah kiri jalan raya Banda Aceh-Medan pada kilometer 447 dengan jarak kurang lebih 7 kilometer dari pusat kota Langsa.

MUQ didirikan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya lembaga pendidikan yang mampu mendidik calon pemimpin ummat yang juga mempunyai kemampuan sebagai ulama, saat itu para ulama dan masyarakat di kecamatan-kecamatan di Provinsi Aceh membangun pesantren-pesantren di setiap pemukiman, hal ini dilakukan guna untuk memperbaharui pertumbuhan pesantren-pesantren yang sejak masa penjajahan Belanda telah menjadi sarana pencetak kader pemimpin umat.

Upaya tersebut disahuti oleh pemerintah melalui musyawarah Penguasa Perang dan Gubernur Aceh yang pada waktu itu gubernurnya adalah A. Hasyimi pada tahun 1957. Musyawarah ini melahirkan ketetapan yang salah satunya adalah perintah untuk mendirikan taman pelajar di masing-masing kecamatan. Untuk merealisasikan hal tersebut, pada tahun 1961 di Kota Langsa, ibu kota Kabupaten Aceh Timur, dipromotori oleh Letnan Kolonel Teungku Muhammad Noerdin, Penguasa Perang Daerah Tingkat II Aceh Timur, Teungku Hasan Tanjong Dama Lhok Sukon, Teungku Husen Berdan dan Teungku Hasan Saudara, didirikanlah sebuah pesantren yang diberi nama "Dayah Bustanul Ulum" yang terletak di Jalan Irian (sekarang Jalan Syiah Kuala) Desa Tualang Teungoh, dibangun di atas areal seluas 10.556 M<sup>2</sup>.

Sejak berdirinya sampai dengan tahun 1967, Dayah Bustanul Ulum belum berkembang secara luas, saat itu para santri hanya terdiri dari pelajar SLTP dan SLTA yang bersekolah pada pagi dan siang. Mereka di bina di pesantren di malam hari dengan menggunakan sistem pendidikan dayah<sup>4</sup>. Tahun 1968 dilaksanakanlah program pendidikan dan pembinaan muallaf selama satu tahun, mereka dibekali dengan pengetahuan agama untuk mereka amalkan dan juga mereka dipersiapkan untuk menjadi pendakwah.

Tahun 1972, Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Timur membangun dua buah rumah permanent untuk guru di Komplek Dayah Bustanul Ulum dan pada tahun berikutnya menghadiahkan sebuah rumah beserta tanahnya seluas 20 x 35 M<sup>2</sup>. Tahun 1979 dibuka kursus Dakwah untuk kaum ibu yang

---

<sup>4</sup> Dayah merupakan sebuah pesantren tradisional yang mempunyai sistem belajar secara halaqah dengan metode sorongan dan bandongan. Materi yang diajarkan berupa kitab kuning serta nahu saraf, Al-qur'an dan tajwid serta seni qiraah dan juga muhadarah (pidato), *ibid.*, hlm. 88



bergabung dengan majelis pengajian dakwah sekota Langsa dengan jumlah peserta 140 orang, tahun 1981 kursus ini kembali dilanjutkan, namun diklasifikasi menjadi dua tingkat, tingkat I (satu) delapan puluh orang dan tingkat II (dua) dua puluh tiga orang. Selanjutnya MUQ berkembang dengan pesat, hal ini terlihat dari minat masyarakat yang mengantarkan anak mereka untuk belajar di Dayah bustanul Ulum, para santri juga berdatangan dari seluruh pelosok Kabupaten Aceh Darussalam, dari Sumatera Utara, Riau, bahkan dari Malaysia. Dengan memadukan kurikulum dan sistem pendidikan dayah dengan madrasah, dan diperkuat dengan dukungan; lembaga dayah; dirasatul Qur'an, dan lembaga pengembangan bakat.<sup>5</sup> Maka pendiri dan Pemerintah Daerah Aceh Timur mulai memikirkan untuk menerima santri yang bersedia menghafal Al-qur'an, maka pada tahun 1980 Dayah Bustanul Ulum mulai menerima santri putra dan putri. Selanjutnya Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Timur beserta Ulama dan masyarakat bermaksud membangun lembaga pendidikan, yang pelajarinya diasramakan, dididik dengan perpaduan antara pendidikan agama dan pengetahuan umum, dengan pengawasan dan bimbingan yang baik, serta diberikan latihan-latihan agar terampil dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang mereka peroleh dari madrasah.

September 1980 dalam Seminar "Sejarah Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Aceh dan Nusantara" menghasilkan sebuah rekomendasi: "Perlunya Mendirikan Suatu Pusat Studi Al-Qur-an". Di tambah lagi dengan amanat Presiden RI ke-2 (Soeharto) pada acara Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur-an tingkat Nasional ke-12 tahun 1981 di Desa Arafah Blang Padang Banda Aceh yang memberi ajakan "*Marilah Sambil Menikmati Keindahan dan Seni Baca Al-Qur'an kita menghayati Isinya Sebagai Obor dan Pedoman Dalam Kehidupan Dunia dan Akhirat*", maka pada akhir tahun 1981 atas kerja sama Pemda Aceh Timur, MUI Aceh Timur dan Kantor Depag Aceh Timur, didirikanla MUQ yang kurikulumnya 50% Agama dan 50% pengetahuan umum dengan sistem pendidikan pemondokan dan *full time*.<sup>6</sup> Sistem lama yang berlaku di Dayah Bustanul Ulum di ganti dengan yang baru dan modern.

---

<sup>5</sup> Sulaiman, *Dinamika ...*, hlm. 13

<sup>6</sup> Full time dimaksud ialah sistem belajar penuh dipesantren, dari pagi hingga sore dan malam. Skripsi. Annisah, *Relevansi Pendidikan Akhlak dengan Perilaku Keagamaan Siswa (Study Kasus Pada MA MUQ Langsa, (Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2011)*, hlm. 3 skripsi tersebut tidak dipublikasikan.

Melihat minat dari masyarakat yang begitu besar untuk memasukkan anaknya ke pesantren MUQ, Maka lokasi yang semula di jalan Irian (sekarang Syiah Kuala) Langsa, dipindahkan ke lokasi baru yang terletak di pinggir jalan raya Medan-Banda Aceh, hal ini dikarenakan lokasi di jalan Irian sudah terlalu sempit dan tidak ada pelebaran karena terletak di sekitaran pusat Kota Langsa, saat ini MUQ berstatus terakreditasi dengan peringkat A, diasuh oleh sebuah yayasan, yaitu Yayasan Dayah Bustanul Ulum.<sup>7</sup>

MUQ Langsa berdiri sesudah dilaksanakannya MTQ Nasional di Aceh, yaitu tahun 1981, perintisnya adalah kerjasama antara ulama dan umara. Adapun dipihak umara antara lain Drs. Zainuddin Mard (Bupati Aceh Timur), Abu H. Ismail Ibrahim, Abu H. Hasan ZZ., BA. (Kepala Kantor Departemen Agama Aceh Timur), Abu Tgk. H. Ibrahim Daud, BA (Pegawai Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur).<sup>8</sup>

Pendirian madrasah ini bertujuan: ikut mencerdaskan anak bangsa, membentuk manusia paripurna kader penerus risalah Islamiyah dan kader pembangunan yang tangguh dalam melestarikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Membina generasi penerus menjadi intelektual yang berjiwa Islam, Membina kader ulama Ahlul Qur-an wal Huffazh yang berpengetahuan/berpandangan luas dan terampil dalam hidup bermasyarakat untuk membangun Agama, Nusa dan Bangsa.

Setiap sekolah atau lembaga pendidikan selalu memiliki ciri-ciri khusus yang menjadi keunggulan dari tiap-tiap sekolah. Demikian pula dengan MUQ Langsa memiliki visi dan misi.<sup>9</sup> Visi misi tersebut dirumuskan oleh para pendiri dan disesuaikan dengan perkembangan MUQ, maka dalam hal ini MUQ

---

<sup>7</sup> Sulaiman, Dinamika .., hlm. 88

<sup>8</sup> Ibid., hlm. 90

<sup>9</sup> Visi adalah gambaran mental (mental picture) tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang diwujudkan dalam sebuah organisasi maupun lembaga. Dalam visi terdapat nilai-nilai, aspirasi serta kebutuhan organisasi/lembaga dimasa depan seperti ungkapan Kotler visi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelpok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang diperoleh serta cita-cita masa depan. Misi adalah apa sebabnya kita ada (why we exist/ what we believe we can do) menurut Drucker pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi/lembaga dan tujuan dari pernyataan misi mengkomunikasikan kepada stakeholder, didalam maupun luar organisasi/lembaga. Denny Bagus, jurnal Manajemen SDM, 2010<http://jurnal-sdm.definisi.visimisdanstrategi>, diakses pada tanggal 06 sept 2016,

memiliki visi dan misi sekolah sebagai keunggulan sekolah tersebut. Visi dan misi sekolah tersebut adalah:

Visi: “*menjadi madrasah unggul dalam bidang Al-Qur’an dan ulumul Qur’an yang berfungsi sebagai Dayah Pengkaderan Ulama Mufasirin dan Umara yang Ahlul Qurra’awal Huffaz dan Ulama Iptek Qur’ani*”.

Dalam visi tersebut dapat dilihat bahwa MUQ Langsa berkeinginan untuk mewujudkan kader ulama yang menjadi pelopor dan pelaksana berlakunya syariat Islam secara *kaffah* di Aceh. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dibekali dengan modal mahir membaca dan juga menghafal ayat-ayat al-qur’an sejak menempuh pendidikan tingkat Tsanawiyah dan Aliyah, karena al-qur’an adalah sumber utama hukum Islam.

Tafsiran tersebut menurut Muhammad Kasim MK ialah “MUQ memposisikan MUQ Langsa sebagai keunggulan yang mampu menyiapkan dan memberdayakan sumber daya insani yang berkualitas dibidang IPTEK dan IMTAQ”<sup>10</sup> Senada dengan itu menurut Amri, Visi MUQ Langsa ialah “mewujudkan masyarakat madani dan kader ulama yang intelek sesuai syariat Islam” selanjutnya menurut Ismail M. Daud dan Muhammad Yusuf, visi MUQ Langsa ialah “mewujudkan masyarakat yang madani dan kader ulama yang intelek sesuai syariat Islam, terbentuknya manusia paripurna yang beriman dan bertakwa, mandiri, terampil dan kreatif, inovatif, dinamis dan berwawasan luas, terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang representatif<sup>11</sup>, terpadu dan inovatif sebagai pusat pengkajian Islam dibidang takhassul ulumul qur’an bagi kader ulama *ahl al-qurra’wa al-huffaz*, selanjutnya Ismail M Daud menjelaskan bahwa visi MUQ ialah mewujudkan masyarakat madani, hal itu tidak akan tercapai kecuali dengan mempersiapkan calon generasi muslim paripurna (insani kamil) yang mandiri (tidak memberatkan orang lain), mempunyai ketrampilan sebagai modalnya dalam perjuangan, dan senantiasa mempunyai kemampuan untuk mencipta temuan-temuan baru dan berwawasan luas yaitu *berwawasan* luas yaitu berwawasan nasional dan internasional.

---

<sup>10</sup> Sulaiman, Dinamika .., hlm. 91

<sup>11</sup> Representatif dalam KBBI ialah dapat (cakap, tepat) mewakili; keadaan yang diwakili, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (arti kata representatif), (Jakarta: 2007), hlm. 950

Adapun misi MUQ Langsa ialah: menyiapkan calon ulama yang intelek, mempunyai wawasan keilmuan yang luas, tasamuh yang tinggi, kreatif,<sup>12</sup> inovatif,<sup>13</sup> produktif,<sup>14</sup> dan memiliki daya juang yang tinggi, menyiapkan calon pemimpin masa depan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, daya juang yang tinggi, kreatif, inovatif, Produktif, dan mempunyai landasan iman dan takwa yang kuat. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional, tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Menjadikan madrasah ulumul Qur'an yayasan IMTAQ dan IPTEK di NAD, mendidik santri dengan pembekalan utama IPTEK yang berlandaskan IMTAQ untuk dipersiapkan sebagai calon ulama IPTEK yang memiliki wawasan dan kepribadian Qur'ani serta mampu mengembangkan IPTEK secara Islami yang dipersembahkan untuk kemashlahatan umat manusia.

Dari penjabaran misi tersebut dapat diketahui bahwa MUQ Langsa mempunyai konsentrasi untuk menciptakan kader ulama<sup>15</sup>, "*al-ulama*" disini merupakan sebuah kata jamak yang berasal dari *al-alim*, yang berarti orang berilmu pengetahuan Islam serta mengamalkannya, kader ulama disini diharapkan dapat memadukan atau tidak menceraikan antara ilmu agama dengan pengetahuan umum.

Sebagai perealisasi misi tersebut, MUQ Langsa mempunyai konsentrasi pembelajaran yang memadukan sistem pembelajaran tradisional (salafiyah) dengan madrasah/sekolah. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya tujuan dari MUQ itu sendiri yaitu untuk menciptakan sebuah masyarakat yang madani. Selanjutnya MUQ Langsa dalam memberdayakan santri agar dapat menguasai IPTEK maka MUQ memberikan pengajaran dasar berbahasa inggris dan arab kepada santri,<sup>16</sup> karena bahasa tersebut sudah menjadi bahasa persatuan dunia dan buku-buku ilmiah dizaman era globalisasi ini sudah barang tentu banyak ditulis

<sup>12</sup> Kreatif adalah memiliki daya cipta, mempunyai kemampuan untuk menciptakan, atau mampu menciptakan; bersifat mengandung daya cipta, *ibid*, hlm. 599

<sup>13</sup> Inovatif adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru; pembaharuan, (kreasi baru), *ibid*, hlm. 435

<sup>14</sup> Produktif ialah bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar), *ibid*, hlm. 97

<sup>15</sup> Ulama berasal dari kata "*al-ulama*" yang ditulis dengan menambah alif dan lam, sesuai dengan sabda rasulullah "*wa anna al-ulama warathah al-anbiya*" (dan sesungguhnya ulama itu adalah mereka sebagai pewaris Nabi). Sulaiman, *dinamika*., hlm. 92

<sup>16</sup> Santri MUQ dibiasakan oleh ustadz untuk berbicara dengan Arab dan Inggris, hal ini untuk melatih kemampuan anak berbahasa juga untuk meningkatkan daya saing MUQ dengan sekolah lain,

dalam bahasa inggris, oleh sebab itulah MUQ membekali santrinya untuk menguasai kedua bahasa tersebut diharapkan agar santri bisa menguasai IPTEK.

MUQ juga membekali santri dengan ijazah Madrasah Aliyah Negeri bagi yang mengikuti UNAS/UAM MAN, hal ini diberikan agar para alumninya dapat melanjutkan ke perguruan tinggi serta yang berkeinginan bekerja dapat bekerja. Selanjutnya MUQ Langsa mempunyai tujuan dalam pengelolaan pendidikannya, yaitu:

“terbentuknya manusia paripura yang beriman dan taqwa, mandiri, terampil, kreatif, inovatif, dinamis dan berwawasan luas; terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang represntatif, terpadu dan inovatif sebagai pusat pengkajian Islam dibidang takhassus ulumul qur’an bagi kader ulama *ahl al-qurra’aw al-huffaz*”

Para pendiri MUQ telah meletakkan dasar dan tujuan dicapai lembaga tersebut, yaitu terbentuknya manusia paripurna (insan kamil) yang menjalin hubungan yang baik dengan sang pencipta alam sesemesta dan juga sesama umat manusia serta menjalankan tugas khalifah dimuka bumi.<sup>17</sup> Hal tersebut dicapai dengan menanamkan kepada santri keimanan kepada Allah yang mencapai tujuan akhirnya yaitu taqwa. Maka untuk tujuan tersebut perlu memiliki sikap trampil, kreatif, dinamis dan berwawasan luas. Dalam pergerakan itulah MUQ memadukan antara pendidikan madrasah dan sekolah sebagai pusat kajian Islam yang memberi tekanan khusus pada bidang *qurra wal huffaz* (pembaca dan hafal al-qur’an) hal ini karena nabi selalu memberikan persyaratan kepada rombongan-rombongan badui setelah masuk Islam untuk membaca al-qur’an diantara mereka.

## 2. Keadaan Santri dan Guru MUQ

Guru pada umumnya membantu mempersiapkan dan menghantarkan siswa untuk memiliki ilmu pengetahuan yang luas, berakhlak mulia, dan

---

<sup>17</sup> Khalifah secara bahasa berarti “mengganti”, baik dalam konteks penggantian generasi maupun dalam pengertian penggantian kepemimpinan, Al-ishfani menjelaskan bahwa menggantikan yang lain berarti melaksanakan sesuatu stas nama yang digantikan, baik bersaa yang digantikannya maupun sesudahnya. Kekhalifahan tersebut dapat terlaksana akibat ketiadaan ditempat, kematian atau ketidakmampuan orang yang digantikan, dan dapat juga akibat penghormatan yang diberikan kepada yang menggantikannya, Abd Rahim, jurnal studi islamika vol 9, No 1 juni 2012 hlm. 30

bermanfaat bagi kehidupan masyarakat yang luas. Sementara secara khusus, tugas pendidik meliputi; mengetahui tingkat perkembangan dan kemampuan siswa, membangkitkan minat belajar, membangkitkan dan mengarahkan potensi siswa, mengatur situasi proses belajar mengajar yang kondusif, mengakomodasikan tuntutan sosial dan zaman ke dalam proses pendidikan, serta melakukan interaksi dengan siswa, orang tua, dan sosial secara harmonis.

Guru menempati peranan penting dalam mengelola kegiatan pembelajaran, perananan penting ini dapat diemban apabila ia memiliki tingkat kemampuan professional yang tinggi dalam bidangnya masing-masing. Namun, tidak semua kemampuan professional guru itu dapat diukur dari kemampuan intelektualnya saja, melainkan juga guru dituntut untuk memiliki keunggulan dalam aspek moral, keagamaan, ketaqwaan, disiplin, bertanggung jawab dan keluasan wawasan kependidikannya dalam mengelola kegiatan pembelajaran.

Untuk kelancaran proses belajar mengajar pada madrasah ulumul Qur'an dibantu oleh beberapa orang guru pengawai tata usaha serta pesuruh sekolah yang ditugaskan oleh Dinas Pengajaran Kuala Simpang untuk saling bantu membantu dalam kegiatan proses belajar mengajar pada sekolah tersebut.

Santri yang menuntut ilmu di pondok pesantren Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur-an Langsa saat ini berjumlah 831 santriwan/i dengan perincian 402 santri putra dan 429 santri putri. Semuanya bermukim di pondok (di asramakan). Santri-santri tersebut sebagian besar berasal dari luar Kota Langsa, bahkan ada yang datang dari luar Propinsi Aceh.

Di Asrama, para santri diasuh oleh Pengasuh yang bertugas di setiap Asrama yang berjumlah 37 orang, pengasuhan putra 17 orang dan pengasuhan putri 20 orang dengan jumlah yang bervariasi untuk setiap Asrama, disamping itu terdapat 16 orang Pengasuh yang khusus menangani pengembangan Bahasa Santri.

Di Madrasah para santri diasuh oleh 96 orang Ustadz yang terdiri dari 33 orang laki-laki dan 63 orang perempuan dengan tingkat pendidikan SLTP plus Dayah (Pesantren): 05 orang, SLTA (dengan keterampilan khusus untuk Mata Pelajaran tertentu): 36 orang, Diploma: 6 orang, Strata 1: 93 orang, di bidang lainnya Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur'an Langsa memiliki 6 orang Tenaga Administrasi, 7 orang Tenaga Keuangan (pengelola Yayasan), 6 orang Tenaga Perpustakaan, 1 orang Tenaga Laboran (pengelola Yayasan), 7 orang Tenaga Kesehatan (pengelola Yayasan), 9 orang Tenaga Security, 16 orang Tukang Masak (pengelola Yayasan), 4 orang Tenaga Kebersihan, 5 orang Teknisi

khusus menangani Air Bersih, Listrik dan Peralatan Elektronik (Pengelola Yayasan). Berikut keadaan santri MUQ Langsa yang sedang beajar di kelas;



Gambar tersebut diambil oleh peneliti saat melakukan observasi lapangan, dari gambar tersebut terlihat bagaimana keadaan santri saat belajar pada jam sekolah, Adapun santri pada gambar tersebut merupakan santri Tsanawiyah kelas tahfidz putri dan kelas Abu Musa Putra, santriwan dan santriwati di MUQ Langsa belajar dengan sangat antusias, pukul 07:30 mereka sudah tiba di kelas untuk mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Adapun mata pelajaran yang dipelajari setara dengan sekolah madrasah dan sekolah negeri lainnya, hal ini dikarenakan MUQ Langsa memakai sistem pendidikan nasional.

### **3. Sarana dan Prasarana Ulumul Qur'an**

Perkembangan lembaga pendidikan sangat signifikan, mengakibatkan perkembangan sarana dan prasana yang berkualitas, refresentatif, memadai dan lengkap, yang memberikan eksistensi lembaga tersebut cukup baik dalam melahirkan generasi yang memiliki keilmuan dalam Islam dan professional dalam bidangnya masing-masing. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pendidikan. Sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses, baik itu usaha maupun bangunan, proyek dan sebagainya. Dengan demikian segala sesuatu yang digunakan sebagai perangkat, baik perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang secara langsung dapat digunakan untuk memotivasi belajar siswa, dan dapat memperjelas, mempermudah dan memperlancar pemberian pembelajaran. Menurut Mukti, "faktor lain yang sangat diperlukan dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan pengajaran adalah sarana dan fasilitas pendidikan. Oleh sebab itu berhasil tidaknya tujuan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan kepada sarana dan fasilitas pendidikan yang tersedia".<sup>18</sup>

Dalam proses pembelajaran kelengkapan sarana dan kualitas fasilitas penunjang pendidikan sangat penting, karena dengan kelengkapan fasilitas ini akan berpengaruh terhadap kualitas lulusan sebuah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dan atau sebuah proses pembelajaran sangat penting dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap untuk mencapai terlaksana pembelajaran baik dan akan tercapai secara maksimal tujuan pendidikan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pelaksanaan proses

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 255



pendidikan Islam harus didukung dengan sarana dan prasarana pendidikan Islam yang lengkap. Kelengkapan sarana dan prasarana yang merupakan perangkat memperlancar, mempermudah dan memaksimalkan proses pendidikan dan pembelajaran yang dilaksanakan pada setiap lembaga pendidikan, sehingga diharapkan mempercepat tercapainya tujuan pendidikan. Jika sistem dan kurikulum pendidikan merupakan ruh, jantung dan paru-parunya, maka sarana dan prasarana pendidikan raga dan anggota tubuhnya, tetapi bukan segalanya. Eksistensi sarana dan prasana secara maksimal akan dapat memperlancar kegiatan pendidikan dan pengajaran secara profesional dan berkualitas. Maka dalam sebuah lembaga pendidikan ketersediaan sarana dan prasana yang memadai akan memberi makna dan arti pentingnya bagi pelaksanaan pembelajaran yang sesungguhnya, maka proses belajar mengajar pada Madrasah Nizhamiyah boleh dikatakan berjalan dengan baik dan lancar ketimbang tempat-tempat belajar yang lainnya. Umpamanya di masjid-masjid, di rumah-rumah para ulama di kedai-kedai kitab dan lain-lainnya. “Gedung madrasah memiliki ruangan-ruangan belajar tersendiri yang disebut *iwan*, yang dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang mencukupi seperti podium tempat guru besar memberi kuliah, kursi staf pengajar menerima kuliah-kuliah dari dosennya”.<sup>19</sup>

Proses tumbuh dan berkembangnya lembaga pendidikan Islam di Aceh didukung dengan sarana dan prasara yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, sekalipun pada awal-awal perkembangan lembaga pendidikan tersebut, sarana dan prasaran relative memadai.

Pendidikan dayah di Aceh pada waktu itu belum memiliki sarana dan prasana yang *modern*, hal ini tergambar misalnya pendidikan dayah di *Gampong Krueng Kalee* Kecamatan Darussalam. Menurut tanda-tanda yang masih ada di *gampong* tersebut, di sana bukan hanya terdapat satu dayah saja, tetapi beberapa dayah yang tersebar mulai dari *Gampong Keubok* di ujung sebelah barat *Gampong Siem* (sekarang) sampai ke perbatasan *Gampong Krueng Kalee* dengan daerah persawahan di sebelah timur. Dari informasi sejumlah sumber memang seluruh *Gampong Krueng kale* merupakan satu *gampong* para santri yang datang dari berbagai daerah di Aceh.<sup>20</sup> Dayah yang dibangun pada masa awal di Aceh telah melahirkan ulama-ulama besar seperti: *Syamsuddin Ad-Sumatrani*, *Hamzah Fansuri*, *Nuruddin Ar-Raniry*, dan lain-lainnya adalah

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 256

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 74

yang memiliki dayah atau berorientasi pada dayah tertentu. Demikian juga Jami'ah Baiturrahman sebagai lembaga pendidikan sistem dayah yang memiliki berbagai fakultas yang fungsinya sebagai lembaga pendidikan dayah.<sup>21</sup>

Berakhirnya peperangan Aceh dengan Belanda sekitar pertengahan abad ke-20, melalui putra-putri Aceh yang belajar di Minangkabau, Pulau Pinang dan Timur Tengah, yang menerima pengaruh modernisasi dalam berbagai bidang pendidikan Islam. Semangat pembaruan dari pelajar tersebut disambut oleh ulama yang mempunyai keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang telah porak-poranda pada masa penjajahan. Untuk pertama kali didirikan di Banda Aceh (dulu Kutaraja) pada awal tahun 1916. Pembangunan sistem madrasah, berarti bertambah lembaga pendidikan di Aceh, di samping sekolah rakyat (SR) dan dayah, pendidikan madrasah adalah berbentuk klasikal.<sup>22</sup> Madrasah yang pertama kali didirikan di Aceh bukanlah masalah kelengkapan sarana dan prasarana, yang penting tiap madrasah besar atau kecil mempunyai peranan penting dalam mewujudkan Aceh yang baru, dan masing-masing masyarakat Aceh telah menderma baktikan harta bendanya kepada agama, nusa dan bangsa sesuai dengan kondisi zamannya.<sup>23</sup>

Pada tahun 1916 secara resmi *Madrasah Al-Khairiyah* didirikan dengan beberapa syarat,<sup>24</sup> dan mengambil tempat di halaman belakang Masjid Raya

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 76

<sup>22</sup> Badruzzaman Ismail, "Peranan dan Perkembangan lembaga pendidikan Agama di Aceh", Dalam *Perkembangan Pendidikan Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Cet.2 (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 157

<sup>23</sup> M. Nur El Ibrahimy, "Sekitar Pembaharuan Sistem Pendidikan Agama Di Aceh", Dalam *Perkembangan Pendidikan Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Cet. 2 (Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), hlm. 98

<sup>24</sup> Syarat-syarat untuk mendirikan madrasah yang ditentukan oleh Gubernur, yaitu: *Pertama*, kepada Taunku Raja Keumala yang tinggal di Kampung Keudah Kutaraja, diizinkan mendirikan sebuah madrasah, tempat belajar orang-orang dewasa dan pemuda. *Kedua*, mata pelajaran yang boleh diajarkan hanya menulis dan membaca bahasa Arab, sehingga dapat memahami kitab-kitab agama Islam dengan baik, ilmu tauhid dan ilmu fiqah. *Ketiga*, diwajibkan kepada Tuanku Raja Keumala untuk membuat daftar murid-murid sebagaimana di maksud *Staatblad* tahun 1905 No. 50 dengan ketentuan syarat-syarat *Bijblad* No. 6363. *Keempat*, murid-murid yang datang dari luar Kutaraja haruslah membawa keterangan dari pemerintah setempat. *Kelima*, tiap-tiap tanggal 2 Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahun harus memberi laporan kepada pemerintah setempat di Kutaraja, melalui komisi yang diangkat untuk itu. *Keenam*, untuk mengawasi madrasah tersebut dianggakt sebuah komisi terdiri dari Teungku Syekh Ibrahim Beurawe sebagai ketua, *Hoofd* Jaksa dan kepala penghulu pada *Landraad* Kutaraja sebagai anggota,

Baiturrahman Banda Aceh dengan pimpinan madrasah yang pertama ditunjuk Teungku Muhammad Saman Tiro, seorang ulama yang sangat maju pikirannya dan lama belajar di Makkah, pada saat itu sistem belajar menggunakan bangku, papan tulis dan peralatan lain.<sup>25</sup> Pada tahun 1927 di Lhoksemawe didirikan sebuah kelompok yang bernama *Jamiah Al-Islam Wal Irsyad Al Arabia* (suatu perkumpulan yang bergerak dibidang pendidikan) dipimpin oleh seorang Arab yang bernama Syekh Muhammad Ibnu Salim Ash Kalaly, mendirikan sebuah *Madrasah Al-Irsyad* sebagai cabang Al Irsyad Surabaya Jawa Timur, sebagai pimpinan di tunjuk Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqi. Kemudian pada tahun yang sama di Idi Kabupaten Aceh Timur didirikan pula sebuah madrasah yang bernama *Madrasah Ahlu Sunnah Wal Jamaah* yang dipimpin oleh Said Husien, kemudian menjadi *Madrasah Nahdatul Islam*, yang lebih populer disebut dengan MADNI.<sup>26</sup>

Pendirian dan perkembangan madrasah-madrasah pada awal di Aceh secara khusus tidak menyiapkan sarana dan prasana sebagai persyaratan pendirian dan untuk fasilitas pembelajaran, hanya melihat pada tuntutan kebutuhan terhadap pendidikan masyarakat, maka ulama mengambil inisiatif untuk mendirikan madrasah, hal ini langsung mendapat dukungan dari penguasa tokoh dan bagi setiap lapisan masyarakat.<sup>27</sup> Madrasah-madrasah pada masa awal di Aceh memiliki peran yang cukup penting terhadap pembinaan pendidikan masyarakat dalam mengisi ketertinggalan pendidikan akibat dari penjajahan, diantara alumni madrasah generasi awal : Amelz (pernah menjadi anggota parlemen DPR-RI), Teungku Usman Yahya Tiba melanjutkan pendidikan ke Mesir, Teungku H. Zaini Bakri (Pernah menjadi Bupati Aceh Besar).<sup>28</sup>

Selain jumlah guru yang memenuhi syarat sesuai kebutuhan yang diperlukan berdasarkan jumlah siswa Madrasah Ulumul Qur'an Langsa juga mengalami perkembangan yang cukup baik artinya pembangunannya terus ditingkatkan sesuai dengan jumlah siswa yang terus menerus mengalami peningkatan. Disamping itu juga Madrasah Ulumul Qur'an didukung oleh

---

*Ketujuh*, syarat-syarat yang ditetapkan dilanggar Tuanku Raja Keumala akan dihukum dan madrasah akan ditutup. Lihat: Badruzzaman, *Peranan dan Perkembangan*, hlm. 157-158

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 157

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 158-159

<sup>27</sup> Badruzzaman, Wawancara di Banda Aceh, tanggal 6 Juni 2016.

<sup>28</sup> Ismail, *Peranan dan Perkembangan*, hlm. 159

berbagai sarana dan prasarana yang dapat digunakan oleh siswa dan guru dalam memperlancar proses belajar mengajar serta meningkatkan efektifitas pembelajaran.

Sarana mendukung proses belajar mengajar di Madrasah Ulumul Qur'an Langsa adalah sudah sangat memadai seperti ruang belajar yang cukup, ruang perpustakaan sekolah serta ruang-ruang lainnya, selain itu terdapat kantin di MUQ Langsa, selain dapur umum santri juga dapat membeli makanan di kantin yang terletak di dalam asrama.<sup>29</sup> Berdekatan dengan asrama terdapat rumah dinas, rumah dinas tersebut merupakan perumahan yang diduduki oleh ustadz dan ustazah yang menjadi tenaga pengajar sekaligus mengontrol santri di lingkungan MUQ Langsa.

Untuk meningkatkan kualitas belajar santri MUQ Langsa, maka pesantren memfasilitasi santri dengan 29 unit ruang belajar, 29 unit tersebut merupakan ruang belajar santri tingkat Tsanawiyah, dari 29 ruang belajar hanya 10 ruangan dalam keadaan sehat, selebihnya ruangan dalam keadaan kurang sehat. Selanjutnya terdapat 1 buah ruang kepala sekolah yang dalam keadaan sehat, 1 buah ruang guru dalam kondisi yang kurang sehat, 1 buah ruang tata usaha, 1 buah laboratorium komputer, 2 buah laboratorium IPA, 1 buah laboratorium bahasa, 1 buah laboratorium dakwah, dan 1 buah ruang pustaka, dan masih dalam keadaan sehat. Pustaka terletak disebelah gedung Tsanawiyah MUQ Langsa. Adapun ruang Laboraturium tersebut digunakan oleh santri secara bersama-sama, penggunaannya diatur dengan jadwal-jadwal oleh ustadz.

Untuk pemondokan santri, MUQ langsa telah menyediakan 14 buah asrama dalam keadaan sehat, 50 asrama khusus BTN. Selain asrama terdapat tempat beribadah yaitu musalla dua tingkat, yang digunakan untuk salat dan pelatihan muhadarah MUQ, musalla tersebut dalam keadaan sehat, letak musalla ini berdekatan dengan Madrasah Aliyah MUQ untuk kelas 4 dan kelas 5. selanjutnya MUQ langsa memiliki dapur umum yang berjumlah 1 buah, didapur umum inilah santri mengambil makanan, sarapan, dsb. Selanjutnya MUQ langsa memiliki poliklinik yang berjumlah 2 buah, 37 rumah pengasuh yang dalam hal ini terdapat 3 buah rumah yang kurang sehat, 2 kantin dan warserde, juga terdapat 1 buah gedung sekretariat, 1 buah kantor pos satpam

---

<sup>29</sup> Skripsi Siti Juriah, Pengaruh Kompetensi Guru PAI terhadap Pengembangan Akhlak Siswa Madrasah Ulumul Quran. (Langsa: Zawiyah), hlm. 45-50. Skripsi tersebut tidak dipublikasikan.

yang sering digunakan santri untuk bertemu dengan orang tua, saudara dan temannya, dan satu buah Bank Syariah Mandiri yang dapat digunakan oleh santri untuk mengambil transfer uang dari orang tuanya.

Foto asrama santri MUQ



MUQ Langsa juga memiliki fasilitas olahraga bagi para santri, fasilitas tersebut terdiri dari 2 buah lapangan volley, 1 buah lapangan basket, 2 buah lapangan badminton, 1 buah lapangan takrow, dan 1 buah lapangan *Foot Ball*.

MUQ Langsa juga memiliki dua Madrasah yang menjadi sekolah bagi santriwan dan santriwati, madrasah tersebut ialah madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Madrasah Tsanawiyah terletak berdekatan dengan perpustakaan dan asrama santri Cut Mutia, di tingkat Tsanawiyah terdiri dari tiga tingkatan santri, yaitu santri kelas 1. 2. dan 3. Berikut tabel jumlah santri ditingkat Tsanawiyah.

Selain itu MUQ Langsa juga memiliki Madrasah Aliyah terdapat dua bangunan bangunan pertama berdekatan dengan Madrasah Tsanawiyah, dibangun ini ditempati oleh santri kelas 6, sedangkan santri kelas 4 dan 5 bangunannya berdekatan dengan musalla. Gambar Madrasah Aliyah kelas 6



Perkembangan minat masyarakat memasukkan anaknya ke MUQ Langsa mengalami pasang surut, pada tahun-tahun awal 1981 sekitar 42 orang yang masuk ke MUQ Langsa, selanjutnya semakin banyak pertahun orang tua yang mengantarkan anak-anaknya ke MUQ Langsa, hingga pada tahun 1999-2002 merupakan masa puncak kejayaan di MUQ Langsa, pada masa-masa inilah banyak orang tua yang percaya anaknya untuk didik di MUQ Langsa. Menurut Dedi Imansyah informan yang peneliti wawancarai menjawab bagaimana ketertarikannya memasuki MUQ Langsa pada tahun 1999, berikut hasil wawancaranya:

MUQ Langsa sekarang tidak seperti MUQ Langsa pada zaman 1999 ketika saya sekolah, dulu saat saya sekolah MUQ Langsa setara dengan kemajuannya dengan pesantren Samalanga, banyak anak-anak dari PT Arun masuk ke MUQ, dan juga pada masa 1999 itu pendidikan di MUQ juga maju begitupula dengan sarana prasarannya, hal inilah yang membuat saya tertarik masuk ke MUQ, tapi sekarang saya lihat MUQ tidak maju lagi seperti dulu, sudah banyak kekurangan baik itu dari segi pendidikan, ini artinya orang sudah menganggap bahwa mutu pendidikan di MUQ Langsa sudah menurun, banyak orang tua yang lebih memilih anaknya untuk dimasukkan ke sekolah Negeri dari pada kepesantren, dan juga orang sekarang lebih sekuler, mereka lebih memilih dunia ketimbang akhirat.<sup>30</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa menurut informan yang Alumni dari MUQ itu sendiri bahwa di MUQ Langsa minat masyarakat mengantarkan anaknya selalu mengalami pasang surut, ia mengatakan bahwa masa kemajuan di MUQ itu terjadi saat masa-masa ia bersekolah, kemajuan tersebut dapat dilihat dari segi pendidikan di MUQ Langsa, selanjutnya sarana dan prasarana saat itu juga sudah cukup memadai, beliau juga mengutarakan bahwa mutu pendidikan di MUQ Langsa hari ini sudah mulai berkurang sehingga orang tua lebih memilih memasukkan anaknya ke sekolah negeri dari pada pesantren.

Selanjutnya, peneliti juga mewawancarai seorang alumni MUQ Langsa Dina Kusumawardani, atas ketertarikannya masuk ke MUQ Langsa ia mengatakan:

“Sebenarnya yang membuat saya tertarik masuk ke MUQ itu karena ada program pembinaan bahasanya, saya sangat suka dengan Bahasa Arab, dan saya tertarik sekali untuk masuk ke MUQ karena Bahasa Arabnya, disana Bahasa Arab dan Inggris. Memang dijadikan Bahasa Sehari-hari, dengan Bahasa kita bisa menguasai dunia”.<sup>31</sup>

Dari informan tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa, dari segi pengembangan Bahasa yang ada di MUQ Langsa membuat daya tarik tersendiri

<sup>30</sup> Wawancara tersebut dilakukan dengan seorang Alumni MUQ Langsa yang bernama Dedi Imansyah, bekerja sebagai Guru di MIN Payabujok Langsa, beliau akrab dipanggil dengan sebutan Pak Ded, pak Ded tinggal di MUQ sekitar 3 tahun, lalu beliau keluar dan melanjutkan sekolah ke Negeri. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 25 september 2016.

<sup>31</sup> Wawancara dilakukan dengan salah seorang Alumni MUQ Langsa bernama Dina Kusumawardani, yang saat ini masih menempuh pendidikan Strata-1 di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, tanggal 27 september 2016.

untuk memanggil orang-orang untuk masuk ke MUQ, paradigma berpikir informan tersebut jika seseorang bisa menguasai bahasa maka seseorang tersebut dapat menguasai dunia, hal ini sesuai dengan tujuan program bahasa yang dilaksanakan di MUQ Langsa, dengan demikian diharapkan santri MUQ Langsa dapat menguasai IPTEK dan dapat menyelami ilmu pengetahuan melalui buku-buku yang dicetak dalam bahasa asing seperti Arab dan Inggris.

Hal ini juga sesuai dengan salah satu pendapat informan peneliti yang memiliki ketertarikan untuk memilih MUQ Langsa, Informan merupakan santri kelas 3 Tsanawiyah bernama Sabrina (bukan nama sebenarnya), berikut wawancaranya:

saya tertarik masuk ke MUQ karena saat saya SD dulurasanya masuk ke MUQ itu mantap, enak ramai kawannya. Rata-rata orang-orang yang telah selesai belajar di MUQ dikirim keluar lagi untuk kesekolah seperti ke mesir sekolah di AL-azhar kairo, sedikit sekalali yang berada didalam kampungnya, minimal sekali pergi melanjutkan sekolah keluar kota saya berkeinginan untuk seperti itu.<sup>32</sup>

Dari penjelasan Sabrina tersebut ketertarikannya ke MUQ ialah motivasi untuk bisa sekolah ke luar negeri seperti yang telah dilalui oleh banyak alumni MUQ yang sudah ke Mesir bersekolah di Al-Azhar Kairo, dan juga bersekolah ke luar daerah lainnya atau paling tidak dapat bersekolah ke luar kota.

Menurut penejelasan Anggraini Ramli, Lc dalam Dinamika Sistem Pendidikan Islam di Indonesia menjelaskan bahwa ketertarikannya untuk memilih pendidikannya di MUQ Langsa karena beberapa faktor yaitu: di MUQ Langsa para santrinya dilatih mandiri agar pandai menggunakan waktu, dilatih untuk pandai bermasyarakat melalui kehidupan dikampus selama 24 jam, materi yang diajarkan terpadu yaitu merupakan perpaduan antara pendidikan agama dan pendidikan umum yang berorientasi pada kehidupan dunia dan akhirat, selain itu di MUQ Langsa ada pelatihan OSMUQ (organisasi siswa MUQ) disini santri tidak hanya belajar teori semata, tapi juga tempat mengasah kreatifitas dan melatih kemampuan untuk melatih *leader*. Dan yang paling penting menurutnya santri MUQ mendapatkan perhatian penuh dari ustadz/ustazah selama 24 jam penuh yaitu dalam proses bimbingan, asuhan dan arahan. Selanjutnya Anggraini menjelaskan pada saat ia mondok

---

<sup>32</sup> Wawancara Sabrina tanggal 27 September 2016 .



di MUQ Langsa yang menjadi kendala adalah masih kurangnya fasilitas seperti lembaga bahasa yang tidak berfungsi, masih ada diantara santri yang belum memahami pentingnya belajar di asrama, ia juga menjelaskan bahwa adanya keunikan di MUQ Langsa yang tidak dimiliki oleh sekolah lain yaitu: lembaga pengembangan bakat, lembaga bahasa, lembaga khusus tahfizul quran, adanya Madrasah Aliyah Keagamaan, ketrampilan menjahit, Khat, Koor (paduan suara), gembus putri dan nasyid putra.<sup>33</sup>

Dari penjelasan Anggraini tersebut, dapat dilihat bagaimana lembaga bahasa juga menjadi salah satu hal yang membuat MUQ menjadi sesuatu yang unik, hal ini juga yang membuat daya tarik masyarakat untuk memasukkan anaknya ke MUQ Langsa. Namun, perkembangan pembinaan bahasa di MUQ hari ini sudah berkurang, sehingga masyarakat sudah kurang tertarik untuk memasukkan anaknya ke MUQ Langsa, salah satu informan Wawan (bukan nama sebenarnya) menjawab tentang bagaimana ia lebih memilih mengantarkan adiknya ke dayah sukarejo dari pada ke MUQ langsa, berikut hasil wawancara tersebut:

MUQ sudah mahal bayarnya, liburpun tetap bayar full bulannya, dan MUQ sekarang tidak sebagus MUQ yang dulu, MUQ sekarang sudah tidak seketat dulu, dari segi bahasa saja sudah tidak berjalan, bahasa sehari-hari yang digunakan ialah bahasa daerah, dulu semasa saya SMA sekitar tahun 2003-2006 MUQ memiliki penerapan dan pengembangan bahasa yang sangat bagus, pertukaran bahasa dilakukan seminggu sekali, misalkan saja dalam minggu ini memakai bahasa Inggris dan minggu depan memakai bahasa Arab. Pengembangan bahasa yang menurun hari ini mungkin disebabkan oleh aturan MUQ yang sudah tidak seketat dulu, Mungkin juga karena efek tidak boleh “teupeh” lagi, kalau duluan masih bisa “*diseupeut*” pakai “*awe*” atau sejenisnya. Dulu masih bisa ditampar, sekarang tidak bisa lagi, makanya santripun sudah tidak takut dengan aturan. Untuk mengembalikan kembali penerapan bahasa di MUQ itu akan tergantung sekali kepada penggeraknya, yaitu ustadz, karena ustadz yang akan mengontrol satri sampai ketinggian itu, peraturan itu sebenarnya sudah dibuat tinggal menjalaninya saja, tapi sekarang peraturan tersebut sudah tidak berjalan, penggeraknya sudah tidak menjalankannya lagi, saya rasa untuk mengembaikan MUQ seperti dulu harus dimulai dari penggeraknya, penggeraknya harus lebih tegas lagi unuk menerapkan peraturan.”<sup>34</sup>

<sup>33</sup> Sulaiman, *Dinamika...*, hlm. 106

<sup>34</sup> Wawancara dengan Wawan, tanggal 08 oktober 2016.

Dari petikan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu daya tarik masyarakat untuk mengantarkan anaknya ke MUQ Langsa karena ada pengembangan bahasa yang ada di MUQ, informan menjelaskan dulu MUQ Langsa memiliki pengembangan bahasa yang tertib, pertukaran antar minggu bahasa yang digunakan sehingga santri benar-benar terlatih, kalau sekarang tidak. Selain itu menurutnya juga tidak berjalannya pengembangan bahasa di MUQ karena penggerak (ustadz) sekarang mulai kurang tegas dalam menegakkannya, dan kurangnya ketegasan dari ustadz mungkin disebabkan santri sekarang tidak boleh di “*teupeuh*”, tidak boleh “*diseupeut*” pakai “*awe*”, jadi untuk mengembalikan MUQ dalam penerapan pengembangan bahasa diperlukan ketegasan dan pergerakan dari ustadz, karena ustadzlah yang memiliki wewenang dan mampu mengontrol santri sejauh hal itu.<sup>35</sup>

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan santri mengenai peraturan yang sudah tidak ketat lagi, informan Nani (bukan nama sebenarnya) menjelaskan:

“peraturan yang sudah tidak ketat lagi disebabkan oleh atasannya yaitu Mudir. Mudir sudah kurang kontrol, bahkan mudir juga tidak kejam lagi, mungkin juga disebabkan oleh adanya HAM. Biasanya peraturan dibuat oleh kakak-kakak osim untuk adik-adik, jadi konfirmasi ke ustazah seringnya ustazah suruh ke Mudir, kalau udah sampai ke mudir biasanya keluar kata “tidak usah dibuat seperti ini” makannya peraturan semakin kendur.”<sup>36</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, santri juga menjelaskan bahwa ketidakberaturan lagi santri untuk mentaati peraturan disebabkan oleh atasan yang memiliki kekuasaan tertinggi yaitu Mudir. Mudir tidak lagi sekejam dulu sehingga membuat santri elanggar aturan, kekejaman mudir terhadap santri juga disebabkan lahirnya HAM, yang membuat Mudir kurang leluasa untuk bergerak mendidik peraturan kepada santri.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai salah seorang guru MUQ langsa (Fathurrahman) yang menjelaskan mengapa peraturan di MUQ sudah tidak seketat dulu, kepada peneliti informan menjelaskan:

peraturan di MUQ Langsa sudah tidak ketat lagi dikarenakan Demo yang dilakukan kemarin, demo itu mensymboliskan ketidakbersatuan.

<sup>35</sup> “*teupeuh*” artinya tidak boleh kena, “*seupeut*” artinya pukul, dan “*awe*” dimaksud sejenis bambu yang biasa digunakan oleh orang Aceh untuk memukul anak jika ia nakal.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Nani (nama disamarkan) santri MUQ Langsa, tanggal 14 Oktober 2016.

Artinya dengan adanya demo maka orang akan tahu bahwa orang-orang di MUQ sudah tidak bersatu lagi, untuk mengembalikan MUQ seperti dulu memerlukan waktu yang panjang, sekarang ini MUQ masih berada dalam pemulihan kembali agar dapat seperti dulu lagi, dengan memerlukan jangka waktu yang lama.<sup>37</sup>

Dari penjelasan tersebut MUQ dapat dilihat bahwa peraturan yang sudah tidak ketat lagi berawal dari demo yang terjadi beberapa tahun yang lalu, demo menurut informan merupakan simbol bahwa MUQ sudah tidak bersatu, demo ini dilakukan santri terhadap atasan MUQ yang hasil dari demo tersebut menggulirkan Mudir sebagai atasan MUQ Langsa. Berikut salah satu informan Nina (nama disamarkan) yang menjawab bagaimana terjadinya demo di MUQ Langsa:

Demo di MUQ Langsa terjadi karena santri tidak terima dengan kenaikan harga di MUQ, isu-isu yang berkembang bahwa kepala MUQ menyekolahkan anaknya keluar negeri dengan SPP 5.000 000 persemester sehingga mudir tidak sanggup membayar, oleh karena itu menekan kenaikan SPP santri, dengan OSIS santri melakukan aksi demo untuk menggulirkan Mudir sehingga Mudir tersebut digantikan dengan Mudir yang baru, dari semenjak kejadian tersebut MUQ sudah tidak terkenal lagi. Banyak orang yang kurang berminat untuk memasukkan anaknya ke MUQ, dan MUQ juga sudah tidak ketat lagi.<sup>38</sup>

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana kekacauan terjadi di MUQ, kepada peneliti informan menjelaskan bahwa Mudir yang lama tidak sanggup membayar SPP anaknya kuliah sehingga membengkakan pembayaran SPP santri, sehingga santri tidak terima dengan kebijakan tersebut melakukan aksi demo. Aksi demo ini dilakukan oleh osis dan santri lainnya. Kedudukan osis di MUQ sangat besar, osis memiliki hak yang besar untuk menyampaikan aspirasi dari santri yang lainnya, sehingga untuk menggulirkan Mudir pun osis mampu. Santri mengatakan kepada peneliti bahwa MUQ Langsa mampu berjaya lagi dengan syarat sebagai berikut:

“MUQ bisa seperti dulu lagi apabila struktur paling atas hingga kebawah semua diganti, dan lebih baik jika MUQ ini dipimpin oleh orang-orang

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Faturrahman. Guru di MUQ Langsa, tanggal 15 oktober 2016.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Nina (nama disamarkan) santri MUQ Langsa, tanggal 17 Oktober 2016.

yang sudah menjadi alumni MUQ, karena mereka lebih tau untuk mengembangkan MUQ itu sendiri, karena kenyataannya sekarang alumni sudah tidak mau lagi untuk mengecimplungkan dirinya ke MUQ karena MUQ sudah menjadi ajang politik”<sup>39</sup>

Dari wawancara tersebut santri sangat berharap bahwa kepemimpinan MUQ harus diperbaiki, mulai dari personal yang paling atas hingga ke bawah, santri menginginkan MUQ kembali seperti dulu dengan penerapan dan ketegasan yang dipimpin oleh orang-orang yang pernah berada di MUQ Langsa itu sendiri.

#### 4. Prestasi Siswa MUQ Langsa

Prestasi yang pernah diraih selama Madrasah Ulumul Qur-an ini berdiri, telah banyak memperoleh penghargaan yang dicapai baik tingkat lokal, propinsi maupun nasional, sebagai salah satu bentuk partisipasi dalam berbagai perlombaan yang diikuti baik itu dibidang olah raga, kesenian/ keterampilan dan dari sisi pendidikan yang memang dicanangkan Madrasah Tsanawiyah Ulumul Qur’an Langsa sebagai salah satu tujuan peningkatan mutu siswa dan mutu Madrasah sendiri sehingga hasil yang dicapai dapat dirasakan oleh lingkungan Madrasah maupun masyarakat pada umumnya. Di antara prestasi siswa MUQ adalah;

NO	BIDANG KEGIATAN	TINGKAT	TAHUN	DALAM RANGKA	JUARA	KET
1	Siswa Teladan	Propinsi	1997	HUT RI	-	Banda Aceh
2	Cerdas Cermat Umum Dan Agama SLTP	Propinsi	1994	Porseni	I	Kota Cane
3	Deklamasi	Propinsi	1992	Porseni	I	Kota Cane
4	Busana Muslimah	Propinsi	1995	Porseni	I	Tapak Tuan
5	Tahfidzul Qur’an 1 Juz	Propinsi	1993	MTQ Propinsi	I	Takengon

<sup>39</sup> Wawancara dengan santri MUQ Aliyah. Mimi (nama disamarkan) tanggal 17 Oktober 2016.

6	Khathil Qur'an	Propinsi	1996	MTQ Propinsi	III	Lhokseumawe
7	Tahfidz	Propinsi	1996	MTQ Propinsi	III	Lhokseumawe
8	Kepramukaan	Propinsi	1994	Kemsama	I	Langsa
9	Lomba Penggalang	Propinsi	1992	Porseni DEPAG	II	Kuta Cane
10	Lomba Penggalang	Propinsi		( Kemba Giat ) Kwarda	II	Idi
11	Tenis Meja	Propinsi	1995	Porseni DEPAG	II	Tapaktuan
12	Lompat Jauh	Propinsi	1995	Porseni DEPAG	I	Tapaktuan
13	Bola Volley	Propinsi	1995	Porseni DEPAG	-	Tapaktuan
14	Lomba Mat Pel. Bahasa Indonesia	Propinsi	2003	Peningkatan Mutu	I	Banda Aceh
15	Lomba Mat Pel. Matematika	Propinsi	2003	Dikjar Propinsi Dal. Rangka Pembinaan Sekolah Unggul	II	Banda Aceh
16	Lomba Siswa Teladan	Propinsi	2003	Dikjar Propinsi Dal. Rangka Pembinaan Sekolah Unggul	I	Banda Aceh
17	Debat Narkoba	Propinsi	2003	Dikjar Propinsi Dal. Rangka Pembinaan Sekolah Unggul	III	Banda Aceh
18	Pidato Bahasa Aceh	Propinsi	2003	Dikjar Propinsi Dal. Rangka Pembinaan Sekolah Unggul	I	Banda Aceh
19	Pidato Bahasa Inggris	Propinsi	2003	Dikjar Propinsi Dal. Rangka Pembinaan Sekolah Unggul	I	Banda Aceh
20	Seni Qira'ah	Propinsi	2003	Dikjar Propinsi Dal. Rangka Pembinaan Sekolah Unggul	I	Banda Aceh

MUQ dari sudut pandang prestasinya sangat diakui oleh lembaga dan masyarakat diluar, dari tabel dapat dilihat banyaknya prestasi yang telah diraih oleh santriwan dan santriwati MUQ, baik ditingkat lokal, kota, provinsi

hingga tingkat nasional. santri-santri MUQ Langsa banyak dilatih oleh ustadz untuk mengikuti perlombaan tersebut, selain itu dalam kegiatan sehari-hari santri MUQ sebenarnya sudah terlatih dan terbiasa.

## **B. MUQ LOKUS REKAYASA**

MUQ merupakan sebuah lokus (tempat) yang terdapat kekuasaan<sup>40</sup> didalamnya. *penguasaan adalah proses, cara-cara, perbuatan mengatur suatu aktivitas atau kegiatan, termasuk sebagai proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.* Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami dalam konteks kepemilikan oleh suatu kelompok institusional sebagai suatu mekanisme yang memastikan ketundukan warga negara terhadap negara. Kekuasaan juga bukan mekanisme dominasi sebagai bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang *powerfull* dengan *powerless*. Bukan kekuasaan seperti halnya bentuk kedaulatan suatu negara atau institusi hukum yang mengandaikan dominasi atau penguasaan secara eksternal terhadap individu atau kelompok.

Kekuasaan mempunyai jangkauan cukup luas yang meliputi kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain, kemampuan untuk memerintah, serta kemampuan untuk memberikan keputusan. Pelaksanaan kekuasaan tidak pertama-tama melalui kekerasan atau masalah persetujuan tetapi seluruh struktur tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, rayuan atau melalui paksaan dan larangan. Jadi kekuasaan pertama-tama bukan represi atau pertarungan kekuasaan dan bukan juga fungsi dominasi suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi. Foucault mengatakan dengan kekuasaan “harus dipahami pertama-tama banyak dan beragamnya hubungan – hubungan kekuatan yang melekat pada bidang hubungan – hubungan tersebut dan organisasinya. Permainannya akan mengubah, memperkuat, membalikkan hubungan-hubungan itu melalui perjuangan dan pertarungan terus-menerus.

---

<sup>40</sup> *Penguasaan sebagai suatu proses atau cara-cara untuk mengatur, megerahkan, dan melakukan pengawasan, berkaitan erat dengan kekuasaan. sebuah kekuasaan di dukung oleh pihak-pihak yang dikuasai. Kekuasaan yang diberikan kepada pihak penguasa tidak dipergunakan untuk mencapai tujuan sosial malah digunakan untuk menekan kepentingan yang relatif tidak mempunyai kekuasaan.*

Foucault mencoba mendefinisikan kembali kekuasaan dengan menunjukkan ciri-cirinya: kekuasaan tidak dapat dilokalisasi, merupakan tatanan disiplin dan dihubungkan dengan jaringan, memberi struktur kegiatan-kegiatan, tidak represif tetapi produktif, serta melekat pada kehendak untuk mengetahui. Kekuasaan berarti menempatkan konflik dalam berbagai institusi sosial, dalam ketidaksetaraan ekonomi, dalam bahasa, dan bahkan dalam tubuh kita masing-masing.

Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah. Kekuasaan juga tidak dipahami beroperasi secara negatif melalui tindakan represif, koersif, dan menekan dari suatu institusi pemilik kekuasaan, termasuk negara. Kekuasaan bukan merupakan fungsi dominasi dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi atau manipulasi ideologi (marx), juga bukan dimiliki berkat suatu kharisma (Weber). Kekuasaan tidak dipandang secara negatif, melainkan positif, dan produktif. Kekuasaan bukan merupakan institusi atau struktur, bukan kekuatan yang dimiliki, tetapi kekuasaan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut situasi strategis kompleks dalam masyarakat. Kekuasaan menurut Foucault mesti dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar seperti jaringan, yang mempunyai ruang lingkup strategis.

Kekuasaan pada konteks ini bukan soal legalitas tindakan dan penghukuman dalam mengontrol yang lain, tetapi mengenai normalisasi kelakuan yang didesain dengan memanfaatkan kemampuan produktif dan reproduktif tubuh. Selanjutnya Foucault memahami kekuasaan dengan menyebar dan mengalir dinormalisasikan dalam praktik pendisiplinan. Disiplin merupakan bentuk normalisasi kekuasaan yang berlangsung dalam suatu institusi terhadap tubuh individu, beroperasinya kekuasaan yang dilegimitasi oleh rezim pengetahuan tertentu sebagai normalisasi itu juga berlangsung dalam ruang yang lebih luas yakni terhadap tubuh sosial (*population*).

Dari paparan di atas, Foucault menjelaskan bahwa sasaran kekuasaan ialah tubuh, tujuan yang mau dicapai dengan membidik tubuh ialah kepatuhan, kepatuhan yang akan melahirkan produktivitas.<sup>41</sup> Kekuasaan hendak membentuk

---

<sup>41</sup> Haryatmoko, *Kekuasaan-Pengetahuan Sebagai Rezim Wacana*, Juni 2010, hlm. 2

individu-individu berdisiplin agar menjadi tenaga produktif. Maka tekanan pada normalisasi dan pendisiplinan tubuh menjadi bagian dari strategi kekuasaan dan kebenaran.

*Disciplinary power* beroperasi terhadap tubuh untuk mengendapkan normalisasi kekuasaan itu sebagai proses pembiasaan dalam tubuh terhadap tubuh perilaku dan menempatkan subjek sebagai efek dan kendaraan bagi kekuasaan (*vehicle of power*). *Sovereign power* iytu negatif, menundukkan perilaku melalui kepatuhan terhadap hukum. sementara *disciplinary power* produktif, mengontrol tubuh melalui mekanisme pengawasan yang diinternalisasi sebagai proses normalisasi beroperasinya kekuasaan terhadap tubuh. Oleh krena itu, menurut Foucault, subjek modern merupakan kendaraan bagi kekuasaan dan objek bagi pengetahuan.<sup>42</sup>

Sistem pendidikan di MUQ Langsa memakai sistem kekuasaan dengan praktik pendisiplinan terhadap tubuh santri, Ustadz memegang kekuasaan tersebut, hal ini dilakukan untuk melahirkan santri-santri yang patuh terhadap regulasi yang dilakukan ustadz, dalam kekuasaannya ustadz memiliki kemampuan untuk memerintahkan santri sehingga santri yang berada dalam kekuasaan tersebut merasa terkondisikan oleh keadaan, keadaan-keadaan yang terkondisi tersebut dilakukan dalam upaya kedisiplinan santri.

Foucault menguraikan tentang disiplin sebagai teknologi politis terhadap tubuh untuk menjadikan individu patuh dan berguna. Foucault menyebut disiplin sebagai 'anatomi politis' yang baru. Di dalam rezim ini tubuh tidak lagi disiksa melainkan dilatih, diatur dan dibiasakan untuk melaksanakan aktivitas yang berguna. Individu yang dicatat, dikelompokkan dan dipantau atau diawasi terus menerus, supaya menjadi individu yang 'patuh dan berguna'.<sup>43</sup>

Praktik pendisiplinan bertujuan memanipulasi tubuh sebagai sumber kekuatan yang menjadikannya sebagai tubuh yang berguna dan patuh. Foucault menganggap bahwa di dalam mekanisme kuasa seperti inilah 'pengetahuan' atas individu akan lahir. Metode-metode disiplin dikembangkan di penjara, sekolah, rumah sakit, barak tentara, dan bengkel kerja untuk menciptakan

---

<sup>42</sup> Abdil Mughis Mudhoffir, *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik*, Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol. 18, No. 1, Jnuari 2013: hlm. 79

<sup>43</sup> Disiplin Tubuh Foucault, suatu pendekatan geneologi untuk menghadirkan konsep ruang kekuasaan.



tubuh-tubuh yang patuh. Untuk menciptakan sarana-sarana pendisiplinan yang baik diperlukan pengawasan hirarkis, normalisasi, dan pengujian.

Seperti halnya di MUQ Langsa, untuk melahirkan kepatuhan tersebut tubuh santri dilatih, diatur dengan aktivitas yang berguna, aktivitas tersebut diantaranya ialah sekolah, dayah, tersebut demikian karena pesantren MUQ Langsa memakai perpaduan dalam sitem pendidikan, yaitu sistem perpaduan antara madrasah dan sekolah. Aktivitas yang dijalani oleh santri tersebut dilakukan untuk mencapai sarana pendisiplinan. Untuk mewujudkan disiplin tersebut maka santri berada dalam kontrol serta pengawasan ustadz dan ustazah.

Berikut wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang Alumni MUQ yang masih terbayang dengan pendisiplinan pada pesantren MUQ Langsa:

“Saya terkenang sekali dengan pendisiplinan di MUQ Langsa, disana kita diperhatikan 24 jam, dari segi belajar, ibadah, dan juga waktu makan. pada tahun 1999 saya belajar di MUQ Langsa memakai sistem belajar dayah dan negeri. Sistem belajar dayah dimulai dari sore hingga malam selesai belajarnya itu sekitar pukul setengah 10, kalau sistem belajar negeri itu sistem belajar sekolah, belajarnya dimulai pada pagi hari dan selesai pada siang hari. Jadi semua aktivitas kita sudah diatur disana, harus disiplin, tidak boleh tidak disiplin, yang tidak disiplin belajar diberikan hukuman, misalnya yang terlambat berjamaah itu dipukuli pakai rotan.<sup>44</sup>

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa dari sejak MUQ dulu, MUQ Langsa sudah memiliki pendisiplinan bagi santri, baik dari segi belajar, ibadah, dan juga saat makan. hal tersebut muncul dari adanya realsi kekuasaan yang dipegang oleh ustadz, Kekuasaan muncul dari relasi-relasi pelbagai kekuatan, dimana ada relasi disana ada kekuasaan, oleh karena itu kekuasaan terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Kekuasaan merupakan sebuah strategi.<sup>45</sup> Strategi berlangsung dimana-mana dan disana terdapat sistem, aturan, susunan dan regulasi<sup>46</sup>. Sama halnya dalam MUQ yang

<sup>44</sup> Wawancara dengan Dedi Imansyah, tanggal 25 september 2016.

<sup>45</sup> Kekuasaan bagi foucault tidak dipahami dalam suatu hubungan kepemilikan sebagai properti, perolehan, atau hak istimewa yang dapat digenggam oleh sekelompok kecil masyarakat dan yang dapat terancam punah.

<sup>46</sup> Regulasi adalah sesuatu yang tidak bebas niali karena di dalam proses pembuatannya pasti terdapat tarik menarik kepentingan yang kuat antara kepentingan publik, pemilik modal dan pemerintah. Regulasi juga merupakan sebuah pengendalian perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan regulasi dapat dilakukan denagn

kekuasaannya merupakan sebuah strategi yang dipakai dalam sebuah sistem pendidikan dipesantren. Disana terdapat relasi antar Ustadz dan santri, ustadz yang memiliki kekuasaan sehingga santri dalam pesantren MUQ terkondisikan oleh keadaan yang dikuasakan. Kekuasaan tersebut tidak datang dari luar, melainkan kekuasaan menentukan susunan, aturan dan hubungan-hubungan dari dalam.

Kekuasaan dalam pandangan Foucault berarti memiliki, ustadz secara relasi memiliki santri, santri berada dalam kekuasaan ustadz, sehingga kehidupan santri didominasi oleh ustadz, melalui kekuasaan santri dilatih kedisiplinan, kedisiplinan yang dilatih dalam kehidupan di pesantren tersebut diantaranya terletak pada sekolah, dayah, jamaah, waktu makan, dan istirahat.

## 1. Sekolah

Pada awalnya pendidikan dayah di Aceh lanjutan dari pendidikan di rumah-rumah dan *meunasah* yang dilaksanakan oleh *teungku-teungku*, maka murid-murid dayah adalah seluruh anak-anak yang melanjutkan pendidikan agama setelah mendapatkan di rumah dan *meunasah*. Murid-murid pada setiap dayah pada saat itu tidak tercatat secara baik dan statusnyapun tidak begitu terikat, sekalipun demikian pendidikan dayah pada masa awal telah banyak mendidik ulama, seperti Dayah *Kreung Kalee* mulai berkembang sejak zaman Belanda dan merupakan dayah yang sangat menonjol pada saat itu ulama-ulama. Pemimpin dayah yang lahir sebagai kader-kader dari Dayah *Krueng Kalee* diantaranya: Dayah Indra puri, Dayah Tanoh Mirah, Darussalam Labuhan Haji, dan lain-lain.<sup>47</sup> Dengan demikian, peserta didik dayah adalah orang-orang yang pernah mendapatkan pendidikan dayah dalam berbagai tingkatan dayah, dari berbagai usia serta dalam berbagai materi, sehingga mereka yang mendapatkan pendidikan tersebut telah memiliki kompetensi keagamaan tertentu. Sedangkan peserta didik dayah moren dan terpadu adalah lulusan siswa-siswa SLTP yang telah memiliki ijazah, kemampuan dasar agama, kemampuan dasar al-Qur'an, yang proses penerimaannya melalui seleksi masuk siswa baru pada awal tahun ajaran.

---

berbagai bentuk, misalnya pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, regulasi sosial, seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku.

<sup>47</sup> Idris, *Perkembangan Pendidikan*, hlm. 83

Sejak tahun 1960, madrasah sudah mendapat perhatian dari pemerintah dengan memberikan bantuan, maka seiring dengan kebijakan pemerintah tersebut masyarakat sudah mulai meningkat motifasi untuk melanjutkan pendidikan pada madrasah, mulai dari tingkat ibtidaiyah sampai aliyah. Pada saat itu untuk melanjutkan pendidikan pada madrasah dalam berbagai tingkatan belum memiliki ketentuan yang selektif, baik persyaratan kompetensi peserta didik maupun syarat administrasi lainnya.

Sistem pendidikan di pesantren MUQ Langsa pada awalnya hanya memakai sistem pendidikan salafiah, namun dengan seiring adanya perkembangan pendidikan nasional maka MUQ Langsa melakukan perpaduan pada sistem pendidikan salafiah/ dayah, pendidikan madrasah dan sistem pendidikan nasional, perubahan sistem tersebut membuat MUQ Langsa mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan madrasah lain.

Seiring dengan hal tersebut, di MUQ Langsa juga melakukan perubahan yang tersebut meliputi metode belajar, metode belajar dalam pendidikan salafiah ialah metode perorangan, yaitu masing-masing santri menentukan sendiri kemajuannya dalam belajar yang dibuktikan pada penguasaan kitab-kitab kuning kepada dan ustadz, sedangkan sistem pendidikan sekolah dan madrasah diberlakukannya sistem kelas dan tingkatan pendidikan serta diberlakukan kurikulum sesuai dengan kurikulum zaman yang berlangsung atau sering disebut dengan kurikulum nasional.<sup>48</sup>

Sekolah merupakan salah satu dari tripusat pendidikan, disamping keluarga dan masyarakat. Meskipun dalam ranahnya pendidikan mempunyai kesamaan, namun juga terdapat perbedaan dari segi teknis-teknis pelaksanaannya antara satu dengan yang lain, dalam sistem pendidikan sekolah adanya guru, siswa, kelas, kurikulum, silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), dan juga sarana dan prasarana. Sistem pendidikan masyarakat menitik beratkan pada pendidikan nonformal, sedangkan sistem pendidikan keluarga menitik beratkan pada informal. Sekolah pada hakikatnya untuk membantu orangtua mendidik anak-anak agar menjadi masyarakat yang siap pakai dan berakhlakul karimah, oleh sebab itu melalui pendidikan disekolah ini siswa diajarkan budi pekerti, kebiasaan baik, serta hal-hal yang terpuji.<sup>49</sup> Dalam sistem pendidikan

---

<sup>48</sup> Sulaiman, *Dinamika..* hlm. 59

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 59

sekolah, guru dan murid saling membutuhkan, guru tidak bisa mentransfer ilmu jika murid tidak ada, oleh karena itu tugas guru ialah mendidik anak agar tujuan dari pendidikan tercapai.<sup>50</sup>

MUQ Langsa memakai sistem sekolah dari pagi hingga menjelang siang, sekolah ini setiap hari dilaksanakan kecuali pada hari jumat yaitu hari besar Islam maka pada hari tersebut santri diliburkan. Masuk sekolah di pesantren umumnya sama dengan masuk sekolah di sekolah luar yaitu pukul 07:30 sistem belajarnya juga sama hanya saja kurikulumnya agak sedikit dengan sekolah pada umumnya. Misalnya pada pelajaran tauhid, disekolah santri MUQ memakai referensi kitab dalam mengajarkan tauhid kepada santri sedangkan pada sekolah lain menggunakan referensi buku pada umumnya. Hal ini sesuai dengan observasi yang peneliti lakukan di MUQ Langsa. Demikian juga, santri dalam sekolah harus disiplin, santri harus tepat masuk kedalam kelas jika terlambat datang akan dihukum dengan membaca asmaul husna sampai tiga kali, pompa, selanjutnya jam istirahat juga sudah ditentukan di MUQ Langsa sehingga dengan adanya penjadwalan tersebut santri didik untuk mendisiplinkan waktu termasuk didalam kegiatan sekolah, dan santri diawasi oleh ustadz dan ustazahnya sehingga dengan demikian santri akan menjadi patuh.

## 2. Dayah

Sistem pendidikan dayah<sup>51</sup> berpusat pada figur seorang ulama yang disebut Mudir di pesantren MUQ Langsa, mudir dipercaya sebagai sosok

---

<sup>50</sup> Tujuan pendidikan bukan saja terletak pada intelektual saja namun juga pada akhlak dan budi pekerti, hal ini sesuai dengan diturunkannya nabi Muhammad SAW ialah untuk memperbaiki akhlak manusia. Selanjutnya UU yang membahas tentang jenis pendidikan ialah UU RI No. 20 tahun 2003 tercantum, pasal satu.15 jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Pasal 16; jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, desa maupun masyarakat. pasal 18: (1) pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar (2) pendidikan menengah terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. (3) pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dan sekolah lainnya yang sederajat. Ibid., hlm. 59

<sup>51</sup> Kata Dayah berasal dari kutipan bahasa arab yaitu "Zawiyah" yang berarti majelis pengajian. Kata itu kemudian berubah sesuai dengan dialek bahasa aceh menjadi dayah. Dalam perkembangan selanjutnya Dayah dalam terminologi orang

yang memiliki ketinggian ilmu agama, luasnya pengalaman, darah biru, kaya dan “sakti”. Oleh karena itu kedudukan Mudhir sebagai sentral sistem menjadi sangat efektif, dalam sistem pendidikan di dayah MUQ Langsa, santri diberikan materi pelajaran; kitab-kitab yang ma’ruf (kitab kuning) yang digunakan di dayah-dayah salafiah, juga ditambah dengan bahasa arab, bahasa inggris, ekstrakurikuler, ketrampilan/komputer, les Ebta/Ebtanas, dan pengembangan bakat/minat santri.

Materi yang diajarkan pada jam dayah itu diantaranya ilmu hadits, tauhid, tafsir, tahfiz, nahwu, saraf, khat, mutalaah, imla’, praktek ibdah, dan juga muhadarah. Pada dasarnya materi-materi dayah tersebut materi keagamaan yang orientasinya kepada kitab-kitab kuning, dan pengembangan bakat/ketrampilan.<sup>52</sup> Waktu pelaksanaan dayah tersebut ialah ba’da subuh, ba’da ashar, dan ba’da magrib hingga pukul 21:30 wib.

Pengaturan santri dilakukan bukan saja pada sekolah, tetapi juga di dayah. Seperti peraturan dalam berpakaian, dalam pendidikan dayah, santriwati memakai mukenah, dan bagi santriwan memakai sarung dan peci. Jadi setiap ada dayah santri harus memakai pakaian yang telah ditetapkan oleh ustadz dan ustazahl tersebut.

Selain peraturan berpakaian, pada sistem pendidikan dayah santri juga diharuskan menghafal pelajaran, seperti pelajaran nahu dan saraf. Secara psikologi belajar tidak semua santri dapat dengan mudah menghafal, belajar dengan cara menghafal merupakan belajar yang hanya mencoba mengingat informasi baru tnpa mengasimilasi pengetahuan baru dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif<sup>53</sup> informasi yang sering diulang dalam waktu yang lama, maka akan lebih mudah untuk disimpan, akan tetapi santri dalam jangka waktu yang panjang akan lebih mudah bosan dan jenuh karena mereka harus menghafal berkali-kali. Hal ini dialami oleh seorang alumni MUQ Langsa Saputra (nama disamarkan) yang bercerita kepada peneliti tentang bagaimana kebosanannya dalam menghafal pelajaran, berikut wawancaranya:

---

Aceh adalah sebuah lembaga pendidikan islam yang berperan aktif membina keteguhan keimanan, akhlak, semangat, jihad dan keilmuan masyarakat, *Ibid.*, hlm. 188

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 188

<sup>53</sup> Terisa Yulia Hardjoesanto dan siswanto, *Pengaruh Belajar Dengan Cara Menghafal Terhadap Mengingat Kosakata dalam Bahasa Inggris*, Psikomensia Vol. 13, No 1, January 2014, hlm. 75

Saya masuk ke MUQ Langsa dengan paksaan orang tua, hari itu saya diantar dengan perasaan saya yang sangat galau, hati saya rasanya tidak mau, saya serba teringat rumah, saat orang tua saya pulang barulah air mata saya menetes alias menanggis meskipun saya laki-laki saya juga bisa menanggis. Karena saya sudah diantar ke MUQ Langsa, saya merasa ada istilah terlanjur sudah masuk, sebenarnya malu untuk mengungkapkan ngapain masuk kesini karena saya sudah diantar, saya menurut dengan orang tua dimulut padahal dihati saya tidak menurut apa yang diinginkan orang tua. Makannya kalau jadi orang tua harus pikir-pikir dulu memasukkan anaknya kepesantren karena bagi anak yang mau dimulut saja jelas secara psikologi mereka terbebani. Seperti saya karena sudah terlanjur saya jalani saja meskipun hati pahit ya kayak mana, makanya pada diri saya ada istilah paksaan, saya tidak masuk dengan jiwa saya. Dipesantren MUQ itu selalu belajar dengan hafalan, saya merasa terbebani karena harus menghafalannya pada malam hari, dan hal ini membuat waktu istirahat saya kurang. Saya sangat bosan dan seringkali saya tidur disekolah karena saya waktu tidur saya sudah tersita dengan menghafal malam di malam hari.<sup>54</sup>

Dari wawancara tersebut terlihat jelas bagaimana informan merasa sangat terbebani dengan cara belajar menghafal, hal ini juga menunjukkan keterpaksaannya dalam menjalankan aktivitas belajar, santri tersebut merasa bosan karena harus belajar, belajar dan belajar terus. Dalam hal ini santri tidak dapat membebaskan dirinya dalam lingkungan yang demikian, santri harus menjalankan apa yang telah menjadi peraturan yang ada, kebosanan ini timbul dan lama kelamaan akan menjadi sebuah kejenuhan, dan juga tidak adanya ruang bermain bagi santri, dan akhirnya hal ini sangat berakibat pada santri yang akan sebentar-bentar minta pulang dengan beralasan sakit, rindu orang tua dan sebagainya. hal ini berkaitan dengan konsep dominasi dan hegemoni.

Hegemoni terkait penguasaan peraturan di MUQ Langsa merupakan wewenang dan kekuasaan ustadz menguasai dan mengatur segala kehidupan yang berlangsung di pesantren MUQ Langsa yang terlegitimasi dalam bentuk peraturan yang harus dijalankan oleh santri. Dalam hal ini ustadz selaku pihak penghegemonian menggunakan otoritasnya untuk menguasai santri secara total. Semua santri di pesantren MUQ Langsa berada dalam kekuasaan ustadz. Ustadz sebagai penguasa mampu menggerakkan santri dan melakukan pengawasan

---

<sup>54</sup> Wawancara dilakukan dengan seorang Alumni MUQ Saputra (bukan nama sebenarnya) pada tanggal 25 September 2016.

terhadap segala pergerakan santri di MUQ Langsa hal ini diantaranya kemampuan mengatur ruang gerak santri, pengawasan dan pergerakan masyarakat dilakukan berdasarkan otoritas dan legitimasi baik secara paksaan maupun kerelaan. Dengan demikian hegemoni dalam penguasaan santri merupakan wewenang ustadz untuk melakukan pengawasan, menggerakkan, dan mengatur keberadaan santri dalam segala bentuk peraturan tersebut.

Dalam kegiatan yang berlangsung setiap hari di MUQ Langsa: sekolah, dayah, jamaah, makan, dan istirahat sebenarnya secara tidak sadar santri sedang dibentuk oleh ustadz untuk menjadi pribadi yang diinginkan oleh pihak pesantren itu sendiri, yang sesuai dengan visi dan tujuan MUQ langsa didiikan, hal ini sesuai dengan konsep *geneologisasi*.<sup>55</sup> Mempersoalkan proses pembentukan subjek melalui *geneologisasi* subjek mengandaikan bahwa ada kondisi dimana aktor berada diantara kondisi kesadaran dan ketidaksadaran dalam menentukan pilihan tindakannya. Gramsci terlebih dulu menunjukkan situasi ketidaksadaran pada alam pikiran masyarakat atau situasi yang menindas. Situasi ketidaksadaran itu yang disebutnya sebagai hegemoni, yakni dominasi<sup>56</sup> yang dilakukan melalui cara-cara yang tidak diketahui oleh subjek atau kelompok yang didominasi atau dihegemoni.<sup>57</sup>

Kelompok yang mendapat dominasi tersebut ialah santri, dan kelompok yang mendominasi ialah ustadz, selanjutnya dominasi juag muncul dalam kebudayaan. Seperti halnya dalam budaya pesantren yaitu budaya sekolah dan dayah, pada kebudayaan ini seringkali menjadi legitimasi berlangsungnya proses penundukan dan penguasaan. Subjek yang dihegemoni tidak pernah tau bahwa praktik sosial mereka dan cara mereka memaknai dunia sosialnya merupakan sesuatu yang dikehendaki oleh kelompok dominan.

Dalam pandangan Foucault, hegemoni merupakan suatu model beroperasinya kekuasaan dari sudut pandang strategi politik, legitimasi, dan kepemimpinan intelektual dan dari *standpoint* oposisi yang terorganisasi kepada mapannya

---

<sup>55</sup> Geneologi merupakan metode penelusuran sejarah yang digunakan oleh Foucault untuk menegetahui asal muasal subjek dan bagaimana mekanisme kekuasaan yang dijalankan untuk itu. Dengan kata lain, mengkaji kebudayaan tidak lain sebenarnya merupakan tugas untuk subjek macam apa yang terbentuk, bagaimana sejarah terbentuknya, serta apa mekanisme kekuasaan yang dijalankan, dalam situasi tertentu.

<sup>56</sup> Dominasi adalah bentuk praktik kekuasaan yang berimplikasi melahirkan situasi dimana ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi begitu terbatas.

<sup>57</sup> Mudhoffir, *Teori Kekuasaan..*, hlm. 90

relasi kekuasaan. Foucault juga membedakan antara kekuasaan dan dominasi, yang dalam hal ini, hegemoni<sup>58</sup> merupakan bentuk dari model dominasi. Relasi dominasi mengandaikan bahwa relasi antar subjek tidak berangsur secara sejajar atau seimbang. Relasi dominasi merupakan bentuk relasi kekuasaan yang asimetris dimana subjek yang didominasi memiliki keterbatasan ruang untuk bermanuver atau menentukan pilihan suatu tindakan.<sup>59</sup> Relasi dominasi adalah relasi kekuasaan yang stabil, hirarki, mantap dan sulit untuk dipertahankan.

## C. ANTARA MAKAN, DESAK-DESAKAN DAN TERLAMBAT SEKOLAH

### 1. Fenomena Makan Pagi dan Sekolah

MUQ Langsa memiliki dapur umum yang berfungsi sebagai tempat makan para santri, makanan tersebut di sediakan oleh petugas dapur, sehingga di pesantren MUQ Langsa tidak ada santri yang memasak sendiri. Menu makanan yang diberikan kepada santri termasuk kedalam makanan bergizi dan sehat, sebulan sekali santri diberikan makanan berupa daging, selanjutnya santri juga sering diberi susu dan roti sehingga untuk fisik santri di MUQ Langsa terkategori aman dan baik dikonsumsi santri. Oleh karena itu menurut hemat peneliti bahwa hal ini mencerminkan betapa santri sangat di disiplinkan dalam segala aktivitas sehingga jam makanpun harus ditentukan.

MUQ Langsa memiliki aturan waktu tersendiri dalam pelaksanaan makanan, setiap hari santri mendapat makan tiga kali, waktu tersebut ialah pagi, siang dan sore. Makan pagi dimulai pukul 07.00, makan siang pukul 02.00, dan makan sore atau makan malam dimulai pukul 06.00.

Pada makan pagi santri memiliki waktu 30 menit. yang dimulai pukul 07.00 sampai dengan 07.30. dalam waktu yang sesingkat ini santri terkondisikan akan terlambat. Agar dapat makan pagi dan tidak terlambat sekolah, maka

---

<sup>58</sup> Hegemoni adalah kekuasaan simbolik seperti konsep yang dikembangkan oleh Bordieu. Kekuasaan dalam bentuk disiplin perspektif Foucaultian juga dimengerti sebagai kekuasaan yang hegemonik. Pada *disciplinary power* selalu ada wacana yang berdiri dibelakang institusi disiplin yang mendukung beroperasinya kekuasaan dalam model ini. Institusi ini kemudian menjalankan kekuasaan yang mikro yang meresapi setiap relasi sosial. Yang mendasari semua itu sehingga bisa dijalankan adalah wacana kebudayaan.

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 91



disini santri harus mempercepat langkahnya untuk ke dapur, karena dalam waktu 30 menit kedepan santri harus sudah masuk kedalam kelas.

Interval waktu 30 menit dengan jumlah santri yang ratusan membuat santri harus berdesak-desakan untuk mengambil makanan, bahasa yang sering keluar pada mengantri makan ini ialah “*ba’da ki ana*” artinya sesudah kamu saya. Ini dikatakan dengan sesama teman asramannya, karena selesai mengambil makanan santri langsung ke asrama untuk memakannya. Selain itu, ada fenomena kakak kelas 6 yang berkuasa di dapur, ini diistilahkan bagi kaka-kakak yang ingin mengambil makanan di dapur mereka tidak mengantri, ia bisa langsung mengambil makanan tanpa harus mengantri, dan semua santri juga memahami itu sebagai kewajaran dengan mengandalkan nama “kakak kelas” sehingga jikapun santri sudah duluan mengantri tetapi tiba-tiba datang kakak kelas yang menyeludrup masuk untuk mengambil makanan, maka santri hanya bisa diam dan melihatnya saja.

Setiap hari rabu, santri MUQ mendapat kupon makanan untuk mengantri, ini dikarenakan setiap hari rabu santri mendapat menu makanan daging, kupon tersebut dibagikan oleh kakak osim selepas pulang sekolah sehingga untuk meminimalisir desakan yang terjadi maka dibagilah kupon pengantrian.

Melihat waktu yang sangat sedikit, maka disini santri harus memakai perhitungan waktu, berapa menit harus mengambil makanan, berapa menit harus jalan ke asrama, berapa menit untuk makan, berapa menit untuk jalan ke sekolah. Jika santri tidak memakai interval waktu tersebut maka santri akan terlambat masuk sekolah. Hal ini dikarenakan santri memang terkondisikan terlambat, santri tidak terlambat jika menggunakan waktu secara baik dan sangat efisien, selain itu juga santri harus mempercepat langkahnya. Sedangkan jika santri terlambat masuk ke sekolah santri akan mendapat hukuman, yaitu santri harus keliling sekolah.

## **2. Ketiduran dan Istirahat Sekolah**

Istirahat merupakan berhenti sebentar untuk melepaskan lelah. Hal ini sangat dibutuhkan oleh santri MUQ, karena santri MUQ Langsa kesehariannya ialah *full day*. Berikut jadwal *full day* dan aktivitas santri MUQ Langsa<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Sulaiman, *Dinamika...*, hlm. 119

### Kegiatan Sehari-Hari Santri Madrasah Ulumul Quran

NO	Waktu	Kegiatan
1	05.00 - 05.45	Salat Jama'ah Subuh dan baca al-Quran di Musalla
2	05.45 - 06.30	Morning Conversation / Tahfidz
3	06.30 - 07.30	Persiapan belajar di MUQ langsa dan sarapan pagi
4	07.30 - 13.00	Belajar di Madrasah
5	13.00 - 13.40	Salat jamaah zuhur/ baca al-Quran di Musall
6	13.40 - 14.20	Makan siang
7	14.20 - 16.00	Istirahat siang di Asrama
8	16.00 - 16.30	Salat Jamaah Ashar/ baca Al-quran di Musalla
9	16.30 - 17.50	Belajar sore
10	17.50 - 18.15	Makan malam
11	18.15 - 19.20	Salat jamaah Magrib/ baca Al-quran di Musalla
12	19.20 - 20.30	Belajar malam
13	20.30 - 21.00	Salat Jamaah Isya/ baca Al-Quran di Musalla
14	21.00 - 22.00	Kegiatan bebas
15	22.00 - 23.00	Menggulung pelajaran di Asrama
16	23.00 - 04.30	Istirahat malam (tidur) di Asrama

Dari kegiatan tersebut dapat dilihat kepadatan waktu yang dimiliki oleh santri, waktu-waktu tersebut telah dikondisikan oleh ustadz, jam berapa santri harus belajar, jam berapa santri harus ibadah, makan dan juga istirahat. Santri harus menjalankan aktivitas sesuai jadwal yang ditetapkan ustadz. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa santri waktu istirahat yang ada lebih sedikit, santri lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan mengembangkan bakat serta potensi yang ada dalam dirinya, baik itu potensi dari segi tilawah, hafidz, bahkan potensi lainnya. Waktu istirahat di MUQ Langsa ialah sebentar setelah pulang sekolah dan sesudah jamaah solat isya, bahkan sesudah pukul 23.00 santri sering tidak langsung istirahat karena ada banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan untuk sekolah.

Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa kegiatan santri sudah termenejemen dan didominasi oleh ustadz, santri harus mengikuti segala aturan yang ada, selanjutnya dalam menjalankan aturan santri terus menerus akan dikontrol

oleh ustadz, sehingga apabila dalam pelaksanaannya santri melanggar maka akan mendapat hukuman oleh pamong atau ustadz dan ustazah.

Santri MUQ langsa selalu dipacu dengan belajar, setiap waktu selalu dalam keadaan belajar, baik pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Di pesantren MUQ langsa santri ditempa untuk menjadi orang-orang hebat, menghafal Al-quran, pendakwah, ahli bahasa bahkan menjadi ulama. Hal ini sesuai dengan visi dan tujuan didirikannya MUQ Langsa. Dalam keadaan yang selalu penuh dalam aktivitas belajar, maka santri menjadi kurang mendapat istirahat.

Petikan wawancara Aina padatnya kegiatan MUQ dengan belajar:

“Kehidupan di MUQ Langsa keras ustazah, penuh perjuangan, aktivitas yang dilakukan gitu-gitu aja ustazah. pagi selesai solat subuh setoran tahfidz, setelah itu makan, lalu pergi ke sekolah. Pulang sekolah solat jamaah, selesai itu makan, duduk-duduk sebentar, jam 3 mandi, siap-siap untuk nunggu ashar, salat ashar berjamaah lalu DAYAH disini kami mengaji, belajar bahasa arab bagi santri tingkat MTS Sedangkan bagi santri tingkat MA belajar kitab kuning selain belajar bahasa Arab dan kitab kuning juga ada muhadarah dan pengajian lainnya seperti kitab awamel, akidatul islamiyah, dan juga kitab saraf, dayah ini berlangsung sampai sore, sore jam 6 makan, setelah itu menunggu waktu magrib untuk berjamaah. Selesai salat magrib ada aktivitas dayah lagi ustazah, sampai pukul sembilan, pukul sembilan seluruh santri solat isya berjamaah hingga pukul setengah sepuluh, selesai jamaah santri kembali ke asrama masing-masing, bagi yang ada tugas disekolah maka mengerjakan tugasnya baru tidur ustazah, full kali ustazah aktivitas kami, gak ada istirahat makanya kami sering mengantuk ustazah dikelas.”<sup>61</sup>

Dari petikan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan santri MUQ sangat penuh, bahkan untuk istirahat santripun kurang, sehingga banyak santri yang memanfaatkan waktu istirahat pada jam sekolah ketika tidak ada guru. Berikut wawancara dengan salah seorang santri Aliyah yang mengalami kurang istirahat:

kami sering tidur, dikelas tidur terus, kadang lagi duduk-duduk tidur, lagi baca yasin “pup jatuh” pernah lagi pas habis alat belum salam kaki saya sudah terlentang. Kalau dikelas kadang ada ustadz kami masih tidur, masukin kepala kedalam tas, tergantung ustadznnya juga, kalau ustadzn

---

<sup>61</sup> Wawancara dikelas Tsanawiyah dengan Aina (nama disamarkan) tanggal 07 September 2016.

ngajar ngak enak kami tidur terus, palingan hanya beberapa orang yang mendengar, biasanya pun ustadz tidak tegur lagi karena sudah tahu kami, kadang kak, memang ustazanya yang tidak mau belajar, dipancingnya kita ngobrol tentang osis sampai habis waktu.<sup>62</sup>

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana santri memanfaatkan waktunya untuk beristirahat, kendatipun itu didalam ruang belajar, dimusalla, sedang baca yasin dan santri juga melihat –lihat siapa yang menjadi guru dalam pelajaran tersebut, kalau ustadz atau ustazah yang mengajar dengan enak dan tidak membosankan biasanya jarang santri akan tidur, namun apabila yang mengajar tidak menyenangkan maka santri akan tidur, terkadang ustazahnya sendiri yang memancing suasana kelas untuk tidak belajar, kondisi inilah yang dimanfaatkan santri untuk istirahat.

#### **D. IBADAH IKHLAS DAN TERPAKSA**

Ibadah merupakan investasi akhirat yang selalu dilakukan oleh santri-santri di pesantren MUQ Langsa. Salah satu ibadah yang diwajibkan kepada santri MUQ Langsa ialah salat berjamaah. Salat berjamaah dilakukan pada salat lima waktu yaitu magrib, isya, subuh, zuhur, dan ashar. Setiap santri wajib melaksanakan salat berjamaah, apabila tidak melaksanakannya maka santri akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Berikut wawancara yang menggambarkan ikhlas dan terpaksa nya santri melaksanakan ibadah:

“kami sebenarnya ikhlas melaksanakan ibadah, hanya saja ketika kami dibentak, kami dimarahin, digedor-gedor pintu kami dengan cara yang kasar oleh pamong kami merasa berat untuk pergi ibadah, akhirnya ibadahpun jadi gak ikhlas. Kalau sudah begini jadinya kami berpegang pada haditslah, “sebaik-baik wanita yang salat dalam kamarnya”<sup>63</sup>

Petikan wawancara tersebut menggambarkan bagaimana keterpaksaan santri dalam menjalankan ibadah ketika mereka diperlakukan secara tidak lembut oleh pamongnya, timbulnya rasa kesal sehingga menjalankan ibadahpun bagi santi terasa seperti terpaksa melakukannya, dan melihat kondisi ini santri akhirnya melakukan perlawanan secara sembunyi dengan beralasan hadis

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Nina tanggal 17 Oktober 2016.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Mimi, tanggal 17 Oktober 2016.

yang mengatakan “wanita lebih abik salat dikamarnya”, ini merupakan salah satu bentuk perlawanan santri kepada aturan yang diberikan oleh ustadz.

Dari regulasi-regulasi ustadz tersebut, dapat dikatakan kehidupan santri yang demikian merupakan sebuah rekayasa, artinya kehidupan yang dialami oleh santri dipesantren MUQ sudah termenejemen oleh sistem yang ada, hal ini merupakan sebuah kekuasaan yang menjadi sasaran tubuh sehingga tubuh dilatih untuk menjadi pribadi yang disiplin hingga menjadi pribadi yang berguna dan patuh, jika dilihat kehidupan di MUQ Langsa berbeda dengan orang-orang yang tidak hidup dan tinggal dipesantren, mereka dalam kegiatan dan waktunya tidak diatur kecuali oleh diri mereka sendiri, sedangkan dipesantren tidak demikian, dalam segala aktivitas mereka sudah terkondisikan dengan ustadz. Hal tersebut sesuai dengan panopticon<sup>64</sup> dan kekuasaan.

Panopticon dapat diterapkan dalam pesantren, panopticon dalam konsepnya bangunan penjara berstruktur bulat melingkar. Disisi-sisi lingkaran bangunan terdapat kamar-kamar. Dibagian tengahnya terdapat sebuah menara pengawas. Dari menara bisa melihat ke segala arah, khususnya ke kamar-kamar tahanan yang terdapat di ujung lingkaran bangunan. Setiap kamar terdapat dua buah jendela berukuran besar, satu menghadap kemenara pengawas dan satu lagi menghadap ke luar yang berfungsi sebagai penerus cahaya. Sedangkan untuk penerangan malam hari, lampu ditata sedemikian rupa sehingga memiliki fungsi ganda, sebagai penerang bagi para tahanan dan sekaligus memudahkan para pengawas melihat bayangan para tahanan di dalamnya. Tekstur bangunan penjara seperti ini memberi banyak kemudahan kepada para pengawas mengamati dari jauh segala gerak-gerik dan keanehan dalam ruang tahanan namun sebaliknya para tahanan tidak tahu dan tidak bisa melihat siapa yang sedang mengawasi mereka.

Foucault mengilustrasikan fungsi disiplin panoptisme sebagai bentuk kekuasaan mendapat gagasan dari *panopticon* yang dikosepkan oleh Jeremy Betham,<sup>65</sup> dan menerapkan fungsi disiplin didalam penjara dan mekanisme kedisiplinan didalam lingkungan sehari-hari. Panoticon yang merupakan mekanisme pengawasan yang menghubungkan kepala pengawas dengan

---

<sup>64</sup> Sherly de Yong, Panoptisisme Pada Interior Kantor Biro Administrasi Keuangan. 4 Mei 2012.

<sup>65</sup> Jeremy Bethnam adalah seorang filsuf dari inggris, yang lahir pada tanggal 15 Februari 1748, dia juga seseorang yang mempunyai ide tentang panopticon.

setiap bagian, dimana pengawasan tersebut dilakukan bukan saja pada setiap individu, melainkan juga pada kelompok-kelompok kecil, individu terus-menerus diawasi oleh penjaga, hal ini untuk menghilangkan kekuasaan dan mencegah dari tindakan yang salah.

Sama halnya seperti konsep panopticon dalam penjara, pada ruang kerja ada suatu bentuk mekanisme pengawasan yang dapat dilakukan secara menyeluruh, pada setiap bagian dan menjangkau seluruh individu yang berada didalamnya. Melalui panopticon, pengguna tidak lagi mendapat perlakuan secara fisik, namun lebih kepada segi psikis, oleh karena itu panopticon ini disebut sebagai pendisiplinan baru.

Sistem panopticon menjadi bentuk pengawasan yang memungkinkan untuk mendapat kepatuhan dan keteraturan dengan meminimalkan tindakan yang sulit diramalkan. Prinsipnya, pengawasan bila dilakukan secara diskontinu, efek kesadaran diawasi kontinu. Keuntungan sistem panopticon itu ada tiga, pertama dari segi ekonomi, membuat pelaksanaan kekuasaan atau pendisiplinan lebih murah, kedua, dari segi politik, merupakan bentuk kontrol yang tidak kelihatan dan mencegah perlawanan, dampak kekuasaan sosial ini menjangkau secara intensif dan luas dengan resiko kegagalan rendah. ketiga, memaksimalkan manfaat sarana pedagogi dengan tekanan memaksimalkan peran unsur-unsur dalam sistem dalam pesantren MUQ Langsa.

Michael Foucault<sup>66</sup>, dalam *power and knowledge* mengatakan bahwa dimana ada relasi disana ada kekuasaan, sehingga kekuasaan lebih mengarah

---

<sup>66</sup> Michael Foucault lahir di Poitiers, perancis, tahun 1926. Ia bersalal dari kalangan medis. Ayahnya adalah seorang ahli bedah, juga saudara dan kakeknya. Berbeda dengan foucault yang lebih tertarik pada studi filsafat, sejarah, dan psikologi. Meski begitu kita bisa melihat pemikiran foucault berkaitan erat dengan bidang medis, khususnya psikopatologi. Setelah menyelesaikan pendidikan di Ecole Normale Supérieure pada 1946, ia memperdalam lagi bidang filsafat hingga meraih lisensi pada 1948. Dua tahun kemudian ia memperoleh lisensi dalam bidang psikologi, ia juga mendapat diploma dalam psikopatologi, ia sempat terjun ke dunia politik dan bergabung dengan partai komunis perancis hingga 1995.

Michael Foucault adalah satu tokoh poststrukturalis dan posmodernis terkemuka. Dia dikenal sebagai seorang intelektual yang cukup produktif dalam melakukan penelitian dan menerbitkannya sebagai buku. Bukunya yang pertama berjudul *Maladie Mentale et Personalite* (penyakit mental dan kepribadian), terbit pada 1954 dan habis terjual dipasaran. Setelah itu, ia mengerjakan penelitian untuk disertasi yang kemudian diberi judul *Folie Deraison. Historie de la folie a l'age classique* (Kegilaan dan Ketaksadaran. Sejarah Kegilaan dalam Periode Klasik) yang diterbitkan menjadi buku *Historie de la Folie* (Sejarah Kegilaan).

kepada sebuah hubungan, selain itu Foucault dalam kekuasaan mengulas masalah pendisiplinan masyarakat dengan model panopticon. Desain panopticon ini disebut dalam bukunya *Surveiller et punir: Naisance de la prison* yang terbit di Prancis, dan lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan judul *discipline and punish. The Birth of the prison (1997)* desain panopticon ini menjadi metafora bagi masyarakat “disiplin” modern dan kecenderungan yang menyebar, untuk mengawasi dan menormalisasi.

Santri dipesantren tanpa disadari atau tidak mereka masuk dalam dunia pengawasan dan pendisiplinan seperti halnya panopticon (penjara bundar), MUQ yang direkayasa kehidupannya seperti sebuah penjara bagi santrinya dimana dalam kehidupan tersebut hal yang paling diawasi ialah pendisiplinan,<sup>67</sup> hal ini tercermin dalam setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh santri sehari-hari, mulai dari mereka bangun tidur hingga tidur lagi, tersebut ialah pendisiplinan.

Sesuai dengan Foucault yang memaparkan dampak utama dari panopticon adalah sebegitu rupa sehingga menyebabkan adanya kesadaran dan visibilitas pada tahanan dalam hal ini (santri), yang memastikan berfungsinya keluasaan secara otomatis, jadi ia mengatur berbagai hal yang pada dampaknya pada tahanan pengawasan itu seolah-olah dirasakan bersifat permanen, sekalipun sebenarnya mungkin terjadi ketidaksinambungan pengawasan.

Individu yang selalu diawasi ialah santri, mereka diawasi oleh ustadz. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari santri dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan, hal ini bersifat sebuah pendisiplinan baru, dimana melalui panoptikon ini, santri tidak mendapat perlakuan secara fisik santri mendapat perlakuan yang sangat baik, makanan yang disajikan bergizi, olahraga juga dilakukan setiap sore dan juga ustadz tidak pernah melakukan kontak fisik terhadap santri yang biasanya akan berujung pada kekerasan jadi secara fisik santri mendapatkan sebuah kenyamanan, tetapi jika dikaji secara psikis, santri berada pada zona yang tertekan, yaitu merasa takut dengan pengawasan

---

Karier akademisnya diawali ketika ia menjadi staf pengajar pada Universitas Uppsala (Swedia) untuk bidang sastra dan kebudayaan Prancis, hingga akhirnya mendirikan Universitas Paris Vincennes, sebuah universitas eksperimental.

<sup>67</sup> disiplin merupakan bentuk normalisasi kekuasaan yang berlangsung dalam suatu institusi terhadap suatu tubuh individu, Abdil Mughis Mudhoffir. Sosiologi Masyarakat, Vol 18 No 1 Januari 2013, hlm.

yang dilakukan, karena jika santri yang diawasi ketahuan membuat pelanggaran maka mereka diberi sanksi, karena adanya sanksi santri merasa takut dan secara psikis mereka terganngu dan merasa tidak nyaman.

Sistem panoptikon menjadi bentuk pengawasan yang memungkinkan untuk mendapatkan kepatuhan dan keteraturan dengan meminimalkan tindakan yang sulit diramalkan. Prinsipnya, pengawasan bisa dilakukan secara diskontinu, efek kesadaran diawasi kontinu. Keuntungan sistem panoptikon itu ada tiga, pertama, dari segi ekonomi, membuat pelaksanaan kekuasaan atau pendisiplinan lebih mudah. Kedua, dari segi politik merupakan bentuk kontrol yang tidak kelihatan dan mencegah perlawanan, dampak kekuasaan sosial ini menjangkau secara intersif dan luas dengan resiko kegagalan rendah. Ketiga, memaksimalkan manfaat sarana pedagogi dengan tekanan memaksimalkan peran unsur-unsur dalam sistem.

Panoptisme memiliki prinsip "*one is totally seen without ever seeing and one sees everything without ever being seen*" yang artinya prinsip dimana disatu pihak ada orang yang selalu diawasi terus menerus tanpa pernah tahu siapa yang mengawasi dan dipihak lain ada orang yang selalu bisa mengawasi tanpa dilihat oleh orang yang diawasi. Agar bisa menerapkan prinsip ini, Foucault menjelaskan tentang beberapa syarat yaitu: pertama, adanya pusat orientasi. Adanya pusat orientasi dimaksud ialah adanya tujuan dalam pelaksanaan kekuasaan dan panoptikon, pusat tujuan tersebut ialah melahirkan santri-santri yang memiliki disiplin yang tinggi dan kepatuhan terhadap regulasi yang diberikan oleh ustadz, sehingga santri dimasa yang akan datang menjadi orang-orang yang sukses dengan dilatih tubuhnya kedalam sistem panopticon tersebut.

Kedua, adanya *peripheric ring* (bersekat dan dikelompokkan). Untuk mendapat tujuan dari pada sistem panopticon itu sendiri santri diperlukan pengawasan, dalam hal ini santri tidak tahu siapa saja yang mengawasinya, tetapi ia selalu merasa diawasi, dalam pengawasan tersebut santri dikelompokkan dalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan karakter masing-masing individu santri, kelompokkan ini terjadi pada kelompok asrama, di MUQ sendiri memiliki 17 asrama, yaitu asrama saifatuddin, burung merak, teuku umar, dll. Selain itu, kelas santri juga dikelompokkan, ini merupakan pemisahan dalam kelompok belajar, terlihat sangat jelas di MUQ Langsa pembagian kelompok terhadap santriwan dan santriwati, pada asrama dan ruang belajar santriwan dan santriwati dikelompokkan secara terpisah. Pada kelompok belajar putri ada namanya kelas TPI Kelas ini singkatan dari kelas (Tahfidz Putri) TPA (Tahfiz Putra)



ada juga kelas Abu Musa, dan masih banyak lagi pengelompokan kelas dalam belajar santri di MUQ Langsa.

Ketiga, adanya sistem yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh orang yang diawasi (baik sistem penataan interior, *surveillance* dan perilaku/ aktivitas pengguna). Santri dalam hal ini menjadi subjek yang diawasi, dalam penguasaan ustadz santri bukan saja diawasi dalam kegiatan belajarnya tetapi dalam setiap gerak-gerik dan tingkah lakunya, hal ini sesuai pada pusat tujuan dari panopticon yang melahirkan kepatuhan sehingga santri diawasi prilakunya seperti tidak boleh datang terlambat sekolah, terlambat berjamaah, bangun terlambat, berpacaran, merokok, sikap tersebut selalu diawasi oleh ustadz dan bila santri melakukan kesalahan dan pelanggaran maka akan diberikan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan perilaku yang dilanggar tersebut.

Dalam kehidupan santri MUQ yang direkayasa oleh penguasa aturan didalamnya, berbeda dengan kehidupan siswa-siswa pada umumnya yang tidak tinggal di lingkungan pesantren, mereka bebas melakukan sesuatu tanpa adanya pengawasan dan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan.

Berbicara peraturan bahwa, di MUQ peraturan tersebut dibuat oleh ustadz yang berkuasa sehingga yang dikatakan oleh Antonio Gramsci bahwa apparatus intelektual memiliki kekuatan untuk mendominasi suatu cara pandang tertentu yang secara sadar atau tidak sadar harus diterima masyarakat.<sup>68</sup> Menggunakan kerangka berpikir Gramsci tentang teori hegemoni, tindakan untuk menerima kehidupan di pesantren dengan penuh pengaturan pada dasarnya merupakan efek penafsiran hegemonik atas doktrin-doktrin Islam tentang relasi hubungan antara seorang ustadz dan santri.

Paralel dengan Gramsci Machael Foucault, mengajukan teori relasi kuasa. Foucault memandang kuasa tidak hanya milik apparatus Negara atau kelompok dominan semata. Yudi latif menulis bahwa Foucault tidak menempatkan kuasa sebagai suatu kepemilikan (melulu) ditangan Negara secara monolitik.<sup>69</sup> Foucault mengatakan: “saya tidak bermaksud mengatakan bahwa negara itu tidak penting; tetapi saya hendak mengatakan bahwa relasi-relasi kuasa.

<sup>68</sup> Antonio Gramsci, Selection From The Prison Notebooks, (India: Orien Longman, 1996), hlm. 12-13

<sup>69</sup> Muhammad Anshor, Berbagi Suami Atas Nama Tuhan, (Langsa: Data Printing), hlm. 9.

melampaui batas-batas kekuasaan Negara”<sup>70</sup> jadi Foucault tampaknya tidak mengecilkan pentingnya arti Negara; alih-alih dia hendak menegaskan bahwa ‘kuasa’ itu beroperasi diseputas dan melalui jejaring yang tumbuh disekitar institusi-institusi Negara; dalam artian tertentu, kuasa itu selalu tersebar secara lebih luas diseluruh masyarakat ketimbang yang kita sadari. Kuasa sebagai sebuah sosok yang selalu ada dalam interaksi sosial. Kuasa ada dimana-mana dan bisa dijalankan oleh siapapun.

Pada saat kuasa terkonsolidasikan menjadi dominasi, resistensi masih tetap mungkin dilakukan. Dominasi sendiri menunjuk pada relasi kuasa yang bersifat asimetris yang didalamnya orang-orang tersubordinasi memiliki sedikit ruang untuk bermanuver karena ruang kebebasan mereka untuk bertindak sangat terbata oleh karena efek kuasa. Kekuasaan yang hegemonik melahirkan resistensi atau perlawanan dari kelompok yang kontra hemoni, selanjutnya dalam pengoperasian kekuasaan dikatakan bahwa dimana ada afirmasi kekuasaan, di situ ada resistensi. Resistensi ini bukan berasal dari posisi diluar hubungan kekuasaan, perlawanan menjadi bagian dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan melahirkan anti-kekuasaan. Dimana ada afirmasi kekuasaan selalu ada perlawanan, bukan dalam arti kekuatan dari luar atau yang berlawanan, tetapi karena adanya kekuasaan itu sendiri. Orang sengaja mencoret-coretkan grafiti pada tembok yang justru ada tulisan “dilarang mencoret di tembok ini”. Larangan itu menjadi manifestasi dari kekuasaan, amak ada perlawanan. Ada prularitasbentu perlawanan. Seperti kekuasaan tidak berasal dari satu sumber, demikian juga perlawanan tidak berasal dari suatu tempat.<sup>71</sup>

## **E. BENTUK-BENTUK RESISTENSI SIMBOLIK DALAM KEHIDUPAN SANTRI MUQ**

Kekuasaan bukanlah persoalan kepemilikan, dalam konteks siapa yang menguasai siapa atau siapa yang *powerfull* , kekuasaan itu tersebar, berada diaman-mana (*omnipresent*) imanen terdapat dalam setiap relasi sosial. Hal

---

<sup>70</sup> Michael Foucault, *Truth and Power: Interview with Alessandro Fontana and Pasquale Pasquino* dalam Morris et.al., Michael Foucault: Power, Truth, Strategi, (Sydney: Feral Publications, 1979), hlm. 38

<sup>71</sup> Haryatmoko, hlm. 9

ini bukan karena kekuasaan itu memiliki kemampuan mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kondisi ketidaknampakannya, melainkan karena kekuasaan selalu diproduksi dalam setiap momen dan setiap relasi. Kekuasaan itu ada dimana-mana bukan karena ia merengkuh segala sesuatu melainkan karena ia datang dari manapun. Dalam bukunya *The History of Sexuality*, Foucault menunjukkan ada lima proposisi mengenai apa yang dimaksudkannya dengan kekuasaan, yakni:

- a. Kekuasaan bukan sesuatu yang didapat, diraih, digunakan atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dapat juga punah; tetapi kekuasaan dijalankan dari berbagai tempat dari relasi yang terus bergerak.
- b. Relasi kekuasaan bukanlah relasi struktural hirarkhis yang mengandaikan ada yang menguasai dan yang dikuasai.
- c. Kekuasaan itu datang dari bawah yang mengandaikan bahwa tidak ada lagi distingsi *binary opositions* karena kekuasaan itu mencakup dalam keduanya.
- d. Relasi kekuasaan itu bersifat intensional dan non-subjektif.
- e. Dimana ada kekuasaan, disitu ada anti kekuasaan (*resistance*). Dan resistensi tidak berada diluar relasi kekuasaan itu, setiap orang berada dalam kekuasaan, tidak satu jalanpun untuk keluar darinya. Pada point kelima terlihat jelas bahwa setiap ada kekuasaan maka akan lahirnya anti kekuasaan atau yang disebut dengan resistensi. Resistensi merupakan.

## 1. Mahalnya Kejujuran di Kalangan Santri

Kejujuran<sup>72</sup> menjadi sesuatu yang sangat bernilai dalam paradigma semua orang, kejujuran dipakai dimana saja dan kapan saja, jujur berarti mengatakan dan melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran, Rasulullah

---

<sup>72</sup> Kejujuran adalah sifat yang selalu dipakai dalam kehidupan sehari-hari, menurut Tabrani Rusyan, arti jujur dalam bahasa Arab merupakan terjemahan dari kata shidiq yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur merupakan induk dari sifat-sifat terpuji. Tabrani Rusyan, Pendidikan Budi Pekerti, (Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara, 2006) hlm 25. Sedangkan Kejujuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "jujur" yang mendapat imbuhan ke-an, yang artinya "lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus atau ikhlas". Muhammad Arifin bin Badri, sifat Perniagaan Nabi, (Bogor: Pustaka Daru Ilmi, 2008) hlm. 76 "kejujuran sendiri dapat dilihat dari apa yang disampaikan dan diperbuat sesuai dengan niat atau hati nurani.

sebagai suri tauladan ummat selalu menyuruh ummatnya untuk berlaku jujur dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, Nabi menyuruh ummatnya untuk berperilaku jujur nabi sendiri juga memiliki sifat jujur yang bersumber pada sifat *Shiddiq* artinya orang yang senantiasa jujur. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menyampaikan kebenaran walaupun pahit dan tidak memperdulikan celaan para pencela dalam kejujuran

Kejujuran ini yang menjadi mahal dikalangan bagi sebahagian santri MUQ. Kejujuran dianggap sebuah hal yang membahayakan, sehingga scoot mengatakan dalam teorinya bahwa salah satu bentuk perlawanan tersembunyi antara lain dilakukan dengan berpura-pura taat terhadap kelompok yang mendominasi meskipun di belakangnya melakukan hal yang berkebalikan. Berpura-pura merupakan gaya yang khas dan perlu bagi kelompok yang lemah dimana saja, dan hampir kapan saja. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan agar disatu pihak tidak kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat atau keuntungan tertentu dari kelompok yang mendominasi, tetapi dipihak lain dapat mengekspresikan resistensi terhadap dominasi tersebut. Pura-pura taat dalam lingkungan yang terkondisikan tetapi dibalik hal tersebut ada sebuah ketidajujuran dalam perbuatan dan perkataan yang tidak terungkap, disini peneliti mencoba menguraikan bentuk ketidakjujuran yang dilakukan santri terhadap hegemoni ustad di MUQ Langsa, tersebut diantaranya:

## **2. Santri Membawa Alat Komunikasi *Handphone*<sup>73</sup>**

Alat komunikasi HP dibawa oleh santri MUQ Langsa dengan alasan yang berbeda-beda, salah satu informan yang merupakan Alumni MUQ menceritakan kepada peneliti alasannya membawa HP semasa nyatri dulu ialah:

Kalau indah<sup>74</sup> bawa HP untuk nelpon orang tua, ya namanya kita jauh dari orang tua jadi rasanya perlu aja HP sebagai pegangan, HP yang indah bawa juga bukan HP canggih kayak sekarang: BB, Androe, Samsung. Dulu indah bawanya “HP tinut-tinut”. Sekarang aja udah enak di MUQ bawa laptop, HP koneksi internet, main HP pun gampang kali depan ustadz, paleng kalau ditegur saja sembunyiin Hpnya. Dulu indah sembunyiin

---

<sup>73</sup> Handphone merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh santri MUQ Langsa, dan selanjutnya disingkat dengan HP

<sup>74</sup> Indah bukan nama sebenarnya, wawancara dilakukan dengan alumni MUQ Langsa lulusan 2013, tanggal 27 September 2016.

HP di pohon, indah gulung-gulung pakai kertas sangkutin lah dipohon, besok pagi diambil, terus walaupun HP tinut-tinut lumayan juga bisa nelponan sama pacar, pacar Indah anak MUQ juga, jadi kami itu pernah nelponan sampek azan subuh, pas azan subuh indah matikan Hpnya, terus subuhnya lewat, pas datang pamong ke asrama indah pura-pura ke kamar mandi, begitu pamong keluar Indah balek lagi ke asrama, terus tidur sampek pagi, karena mengantuk berat, Indah libur sekolah.“

Dari petikan wawancara di atas, terlihat apa yang menjadi tujuan Indah membawa HP, hanya 20% saja kepentingan untuk komunikasi dengan orang tua, selebihnya HP digunakan untuk menelpon pacarnya.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa di MUQ Langsa hampir setiap santri membawa hp, hal ini disembunyikan oleh santri karena santri merasa takut hpnya akan diambil, jika hp ketahuan sekali masih dimaafkan, tetapi jika hp ketahuan untuk yang kedua kali bisa jadi hp tersebut menjadi aset MUQ Langsa dan tidak dikembalikan, dan ada juga yang harus mengambil hpnya sesudah selesai masa belajar di MUQ Langsa. Sehingga ketika diadakan razia oleh pamong dan ustadz santri tidak akan berlaku jujur meskipun mereka membawa hp, karena santri memiliki alat tersendiri untuk menyembunyikan hp tersebut, diantara tempat penyimpanannya ialah di dalam kamus, kamus yang tebal ada lubang yang pas dengan ukuran hp lubang itu khusus untuk penyimpanan hp, cara membuat tempat penyimpanan tersebut sangat mudah diantaranya ialah menggarisi ukuran hp pada lembar kamus/lalu membolonginya sesuai ukuran, dengan membuat tempat penyimpanan yang demikian maka hp akan aman, karena ustadz tidak akan curiga bahwa didalam kamus akan ada hp. Selain itu hp juga sering ditaruh di kamar mandi, dan di tong sampah, di belakang pintu dibolongkan lalu ditutup dengan roster, di balik sandal, hal merupakan sikap berpura-pura taat terhadap hegemoni ustadz tetapi di belakang santri melakukan perlawanan.

### **3. Santri Masih Ada yang Tidak Salat Berjamaah**

Salat yang dilakukan secara berjamaah merupakan sebuah anjuran dalam agama Islam, salat merupakan sebuah penghadapan seorang hamba kepada sang *khalik* dengan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan memohon bantuan kepada Allah.<sup>75</sup> Dengan salat berjamaah makmum akan terhubung

---

<sup>75</sup> Salat menurut bahasa berarti doa, sedangkan menurut istilah ialah beberapa

dengan shalat imam. Legalitas salat berjamaah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan al-hadis. Allah berfirman: *“Dan apabila engkau (Muhammad) berada ditengah-tengah mereka (shabatun) lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (salat) besertamu dan menyandang senjata mereka” (Q.s an-Nisa'/4:102)*

Di pesantren MUQ Langsa, sebagian santri yang melakukan resistensi dalam dominasi salat berjamaah, hal ini bukan saja dilakukan oleh santriwati tetapi juga dilakukan oleh santriwan. Salah satu pengakuan santriwati Siska (nama disamarkan) kepada penulis ialah:

“Adakan ustazah santri di sini, demi gak mau solat maunya dia pergi ke dapur mengambil saus dan kecap yang dicampurkan dan diletakkan pada CDnya agar pada pemeriksaan tersebut ia dikira berhalangan, padahal yang di dalam CDnya tersebut ialah campuran dari saus dan kecap, ntah kenapa mau sampai segitunya ustazah dari pada salat, pedaslah itunya setelah pemeriksaan”.<sup>76</sup>

Senada dengan mahalannya kejujuran di kalangan santri, santri MUQ memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Apabila teman seasramanya tidak hadir maka mereka mengatakan “dia ada orang tua” perkataan dia ada orang tua diniatkan dalam hati bahwa dia memang ada orang tua di rumahnya, sehingga teman yang tidak berjamaah aman dari ustazah.

Dari petikan wawancara tersebut terlihat jelas dimana santri masih mahal dengan kejujurannya, sehingga melakukan berbagai cara untuk melakukan bentuk ketidakjujuran terhadap diri sendiri, dan ustazah, selain itu santri yang tidak mau salat berjamaah juga lebih memilih masuk ke dalam lemari dari pada berjamaah, dari santriwati mereka akan melubangi asbes di kelas, membawa kasur serta kipas angin ke dalamnya daripada harus berjamaah.

Selain tidak berjamaah santri juga sering kedatangan pergi jamaah, Santri MUQ Langsa Yana (nama disamarkan) yang terlambat berjamaah akan diberikan

---

perkataan, perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kata jamaah berarti sejumlah orang yang dikumpulkan oleh satu tujuan, shalat berjamaah ialah salat yang dikerjakan bersama-sama, salah seorang diantaranya bertindak sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 1, terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973) hlm. 2015

<sup>76</sup> Wawancara dilakukan dengan santriwati di kelas Tsanawiyah tanggal 07 September 2016.

hukuman, berikut wawancaranya: “saya ustazah, pernah disuruh sujud selama 15 menit sama ustadz, karena saya terlambat mengikuti jamaah salat”.<sup>77</sup>

Petikan wawancara tersebut merupakan sebuah perlawanan yang sering dilakukan oleh santriwan, mereka sering telat berjamaah biasanya pada salat subuh. Santri yang terlambat bangun tidur akan terlambat jamaah, santri yang terlambat jamaah akan diberikan sanksi oleh ustadz berupa sujud lima menit kurang lebih, selain itu juga ada yang disuruh berdiri di sebelah tirai putri sehingga membuat santri yang terlambat malu.

#### **4. Terlambat Masuk Sekolah dan Bangun Tidur**

Terlambat masuk sekolah/madrasah bukan saja merupakan bentuk ketidakdisiplinan santri tetapi juga merupakan salah satu bentuk resistensi yang dilakukan, santri diawasi dalam pendisiplinan meskipun dalam pengawasan sehingga yang melakukan perlawanan diberikan sanksi dari ustadznya untuk membaca asmaul husna tiga kali, pompa, hukuman ini diberikan oleh kakak osis dengan persetujuan ustadz.

Terlambat bangun tidur akan menjadi terlambat jamaah, siapa yang terlambat bangun akan disiram air, alasan dari terlambat bangun tidur santri beragam, ada yang terlambat karena mengerjakan tugas semalaman, dan ada juga yang terlambat karena “ngejob” atau berpacaran melalui telpon dengan pacarnya, karena setelah salat isya merupakan jadwal santri nelpon dengan pacarnya, nelpon tersebut biasanya hingga pukul 00.00 baru setelah itu santri akan pergi tidur.

Peneliti mewawancarai seorang Alumni MUQ dengan kenangan yang tidak bisa dilupakannya saat terlambat bangun, kepada peneliti ia bercerita:

“Hari itu saya ingat sekali, saya telat tidur karena memang keadaannya demikian, di MUQ banyak sekali tugas, banyak hafalan, memang santri ditugaskan untuk menghafal seperti Nahu, Saraf, kitab-kitab Awamel itu, jadi saya tidak memiliki kesempatan istirahat, kehidupan di MUQ selalu dipacu, jadi karena telat tidur saya terbangun telat, tiba-tiba saya lihat pamong saya sudah menggedor pintu asrama, sayapun sudah tidak tahu sembunyi kemana lagi, akhirnya saya ketangkap, saya bersama teman-

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan salah seorang santriwan MUQ Langsa Rajif (nama disamarkan), tanggal 07 September 2016.

teman yang telat lainnya disuruh jongkok dan kami semua pada saat itu disirami dengan air parit, waaaah... itu merupakan kenangan saya yang tidak bisa saya lupakan di MUQ".<sup>78</sup>

## **5. Asrama Tidak Bersih**

*"Al-Nadzafah minal-Iman"* kebersihan adalah sebahagian dari iman. Dari hadis tersebut terlihat jelas bahwa Rasulullah sangat memperhatikan masalah kebersihan. Hadis tersebut diamalkan oleh pondok pesantren MUQ Langsa, dalam pesantren ini memiliki tujuh asrama.

Ketujuh asrama tersebut harus selalu tampak bersih, jika kedatangan ada asrama yang tidak bersih maka kakak osim di MUQ Langsa akan menghukum santri. Kebersihan asrama di MUQ Langsa selalu dikontrol, hal ini membuat santri harus menjaga kebersihan tersebut setiap hari, baik di asrama putra dan putri, bagi asrama yang kedatangan tidak bersih maka diberikan sanksi membersihkan parit, hal ini untk menerapkan salah satu dari keimanan, yaitu menjaga kebersihan.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Dedi Imansyah, tanggal 25 September 2016.



## BAB V

# FENOMENA PACARAN DI KALANGAN SANTRI MADRASAH ULUMUL QUR'AN LANGSA

### A. PACARAN MELALUI MEDIA HP

“*Kami membawa HP karena saat kami minta izin ingin menelpon orang tua ustazahnya sering tidak kasih, dengan alasan harus minta izin dengan pamong sendiri, ustazah tidak ada pulsa, sehingga kami susah untuk komunikasi dengan orang tua. Karena kondisi yang demikian akhirnya kami membawa HP ke MUQ. Tujuan awal membawa HP memang untuk menelpon orang tua, tapi setelah lama mondok di asrama mulailah kami mengenal lawan jenis jadi Hp pun kami gunakan untuk berkomunikasi dengan laki-laki (pacar)”*  
(wawancara Silvi, 14 Oktober 2016)

*Handphone* atau sering disebut dengan HP merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh setiap individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Santri MUQ Langsa menjadikan HP sebagai media atau alat komunikasi dengan orang tua, sesama santri, dan juga lawan jenis. Dengan adanya HP maka berpacaran dikalangan santri menjadi mudah untuk dilakukan karena terjalannya komunikasi yang baik. Apabila komunikasi baik maka hubungan antara satu individu dengan yang lain akan berjalan dengan baik pula.

Berpacaran sesama santri di MUQ Langsa yang dilakukan menggunakan HP membuat hubungan pacaran yang dijalankan menjadi lancar, kelancaran berpacaran melalui media HP menjadi sebuah fenomena yang biasa, meskipun di pesantren MUQ dilarang berpacaran dan jika dilakukan akan diberlakukan hukuman namun pacaran tersebut tetap terjadi dikalangan santri. Selain

itu, santri juga tidak memiliki hambatan untuk berpacaran, kecuali dari pribadi individu sendiri yang ingin beristiqamah untuk tidak berpacaran.

Fenomena berpacaran akan dibahas berikut ini, hal ini sesuai dengan ungkapan dari santriwan ketika peneliti menanyakannya:

“Siapa yang membawa hape ke pesantren?” Pertanyaan tersebut direspon dengan baik oleh santri, dan hampir seisi kelas menjawab semua membawa hape, lantas peneliti bertanya untuk apa hp dibawa ke pesantren? Santri menjawab “untuk pacaranlah”.<sup>1</sup>

Ada dua jenis pacaran di MUQ Langsa, yaitu pacaran sesama santri dan pacaran di luar santri. Pacaran sesama santri berarti santri melakukan hubungan pacaran dengan sesama santri di MUQ Langsa, baik itu sesama leting maupun dengan kakak dan abang leting, sedangkan pacaran diluar santri berarti suatu hubungan pacaran yang dilakukan dengan orang-orang diluar santri, baik itu di dalam satu kota maupun diluar kota. Santri yang berpacaran di MUQ Langsa baik sesama santri maupun di luar santri akan melalui komunikasi dengan media HP.

HP sebagai alat komunikasi di MUQ Langsa dibawa oleh santri dengan dua model, model pertama “HP tinut-tinut” dan model kedua “HP Andro”, HP tinut-tinut digunakan untuk berkomunikasi seperti sms dan telponan dengan orang tua, sedangkan HP Andro digunakan untuk menjelajah informasi didunia maya, nonton, bermain game dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan petikan wawancara Irma (nama disamarkan) yang peneliti lakukan, berikut wawancaranya:

“Kami di sini ada yang pacaran dengan sesama santri dan diluar santri, kami bawa dua HP kak, satu HP tinut tinut satu lagi HP Androe, kalau HP tinut-tinut kami telponan dan sms orang tua, kalau HP Andro kami bisa buka sosmed, nonton, main game jadi kami tidak bosan. Kalau tidak ada HP bosan kali, apalagi malam jumat, liat kawan telponan, chatangan kita gak tahu mau ngapain, dulu enak ada TV sekarang gak ada lagi, dulupun kalau nonton TV kita harus ikut tayangan yang ditonton sama kakak leting”.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan santri MUQ kelas Tsanawiyah tanggal 07 September 2016.

<sup>2</sup> Wawancara dengan santri MUQ Silvi (nama disamarkan) tanggal 17 Oktober 2016.

Dari dialog wawancara tersebut dapat dicermati bahwa santri MUQ merasa bosan dengan kepadatan aktivitasnya, sehingga mereka membutuhkan hiburan, dan santri melakukan pelarian dari kebosanan tersebut dengan membawa HP, dengan adanya HP santri akan dapat berkomunikasi dengan temannya, dapat bertukar pikiran, dapat curhat-curhatan sehingga dapat merilekskan pikiran. Selain telponan dan smsan santri juga bisa membuka dan menjelajah dunia sosial media untuk mencari informasi, menonton, main game yang kesemuanya itu dilakukan untuk mendapat hiburan, informan juga bercerita kalau tidak membawa HP rasanya bosan karena tidak ada TV lagi, pada tahun-tahun lalu MUQ Langsa mempunyai TV sehingga saat libur seperti jumat santri mendapat hiburan dengan menonton TV, sekarang tidak ada lagi TV sehingga santri beralih dengan HP.

Berawal dari HP tersebut santri melakukan interaksi dengan lingkungannya, lama kemudian akhirnya santri mulai mengenal lawan jenis. Menegal lawan jenis pada usia santri (usia puber) sangat lumrah terjadi, karena pada usia-usia ini santri masih labil dalam kategori usia remaja, santri dengan psikologi remaja mencari teman untuk dapat berbagi, apalagi dengan kondisi yang dikekang (kontrol). Dengan pengekangan peraturan atau disebut dengan hegemoni akhirnya santri melakukan bentuk-bentuk perlawanan, salah satu bentuk perlawanan tersebut ialah pacaran. Pacaran menjadi simbol bahwa santri melakukan resistensi terhadap hegemoni yang dilakukan ustadz. Pacaran ini dilakukan santri melalui media HP. Santri melakukan komunikasi dengan pacarnya pada tiga waktu yaitu ba'da zuhur, ba'da ashar dan ba'da isya<sup>3</sup>, tiga waktu tersebut sering digunakan santri yang berpacaran dengan sesama santri MUQ Langsa. Sedangkan santri yang berpacaran dengan orang diluar santri biasanya malam jumat, malam sabtu, malam minggu. Aktivitas yang dilakukan tergantung pada pribadi yang berpacaran, ada yang suka smsan, ada yang suka telponan. Jika telponan santri sering melakukannya di Asrama.

Berikut wawancara Fitria (Nama disamarkan) santri yang berpacaran dengan orang luar (LDR):

“Kami kadang kalau dijengguk ke MUQ kami pura-pura salam, terus kami makan di tempat Yahwan taman cinta, itu mau makan sama pacar dua orang bawa kawan rame-rame datang, anak MUQ pacaran gitu, datang rame-rame, kalau gak bisa lewat pos satpam kami manjat pagar, terus

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan santri MUQ Langsa 07 September 2016.

kalau pacaran dengan orang luar MUQ Langsa biasanya sering mendapat kiriman barang, kadang kami ditanya masih ada uang? Kami jawab masih ada. Padahal akmi udah gak ada lagi uang, terus dia ngasih uang 50.000 ke untuk jajan”.<sup>4</sup>

Santri yang berpacaran baik sesama santri maupun di luar santri akan berkomunikasi melalui media HP, berikut wawancaranya:

“Saya nelponan dengan pacaran habis zuhur, habis ashar, habis isya dan habis makan. biasanya saya nelpon dikamar, saya takut juga kalau ketahuan pacaran”.<sup>5</sup>

Aktivitas telponan ini bagi santri menyenangkan karena dapat menghilangkan kebosanan dari padatnya aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya, wati menceritakan pacarannya melalui HP kepada peneliti sebagai berikut:

“Saya kalau pacaran melalui HP itu mulai jam senyah 10 sampai jam 2, kadang-kadang juga pernah sampai jam 4 subuh.”<sup>6</sup>

Kebiasaan telponan yang dilakukan oleh santri MUQ Langsa ialah sampai jam 2 namun ada juga sebagian kecil yang telponan hingga pukul 4 bahkan sampai azan subuh, seorang alumni MUQ Langsa Dani (nama disamarkan) menceritakan kepada peneliti bagaimana aktivitas nelpon bersama pacarnya yang pernah ia lakukan, berikut wawancaranya:

“Saya dulu di MUQ juga pacaran, pakai HP tinut-tinut saya nelponan sama pacar saya, kami ngorol bebas, kalau sudah nelponan sudah tidak ingat jam, pernah saya nelponan sampai azan subuh, setelah azan subuh saya tutup telponnya dan saya pergi ke kamar mandi solat subuh dikamar, terus saya tidur, kalau sudah seperti ini keadaannya saya tidak masuk ke sekolah lagi, tidur terus saya sampai siang nanti saya suruh izinkan saya teman saya”.<sup>7</sup>

Dari petikan wawancara tersebut santri mengatakan kepada peneliti berapa lama ia mengobrol dengan pacarnya, dari pulang salat isya hingga

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Fitria (nama disamarkan) tanggal 17 Oktober 2016.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Fitria (nama disamarkan) MUQ Langsa tanggal 07 September 2016

<sup>6</sup> Wawancara dengan Wati tanggal 14 oktober 2016

<sup>7</sup> Wawancara dengan Dani salah seorang Alumni MUQ Langsa tahun 2013, tanggal 08 Oktober 2016.

azan subuh, biasanya kalau sudah nelponan sama pacar santri sudah tidak bisa mengontrol waktu, hingga keluaran pagi, ini juga disebabkan oleh faktor perasaan senang dan nyaman saat bertelponan sehingga banyak bercerita, curhat-curhatan membuat santri terlarut dalam menelpon.

Lain halnya seorang santri yang bercerita tentang lama berpacaran tentang teman satu asramanya, berikut wawancaranya:

“Teman satu asrama kami kak ada yang nelponan dari pagi sampai malam, bangun pagi nelponan, mau mandi telponan, ambil nasi telponan, ke sekolah telponan, telponannya pakai handset, HP dimasukan dalam jilbab jadi tidak ada yang tau”.<sup>8</sup>

Santri dalam petikan wawancara tersebut melakukan aktivitas pacarannya setiap waktu, kemanapun ia pergi ia akan membawa HP dan Handset, wanita dengan jilbabnya akan tertutup dan tidak kelihatan maka dengan mudah ia dapat berkomunikasi dengan pacarnya.

Selanjutnya salah seorang santri bercerita kepada peneliti Mirna (bukan nama sebenarnya) yang menjadikan tujuan membawa HP untuk menelpon orang tua dan berpindah kepada menelpon pacar, berikut wawancaranya:

“Saya suka di MUQ, banyak temannya, saya juga membawa HP ke sini, pertama niat saya untuk menelpon orang tua saya, ternyata ketika sudah lama mondok sayapun mulai mengenal lawan jenis laki-laki, jadi HP tersebut sudah saya alihkan fungsinya dari menelpon orang tua menjadi menelpon pacar saya”.

Dari petikan wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana tujuan awal santri membawa HP ialah untuk komunikasi dengan orang tua, dengan kondisi santri jauh dengan orang tua membuat santri membutuhkan alat untuk menghubungkan dengan cepat sampai informasi kepada orang tua, jika santri meminta kepada ustazah maka ustazah akan menyuruh santri ke pamong, belum lagi kalau pamong snatri tersebut tidak ada maka santri terhambat untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi kepada orang tuannya, hal inilah yang menjadi alasan utama santri untuk membawa HP. Namun lambat laun HP menjadi alih fungsi untuk menelpon pacar.

Satyo (bukan nama sebenarnya) menceritakan kepada peneliti bagaimana ia melakukan pacaran melalui HP, Berikut wawancaranya:

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Wati, tanggal 14 Oktober 2016.

“Saya malam itu lagi sms-an sama pacar, tiba-tiba HP saya diambil sama ustadz, sms saya habis dibaca smsnya, sama ustadz Hpnya diletakkan dikamarnya, saya ambillah diam-diam, ternyata berhasil, biasanya kalau HP sudah kedapatan maka tidak selamat lagi untuk menjadi milik kita”.

Petikan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa santri yang dikontrol oleh ustadz kedapatan menggunakan HP yang dilarang untuk komunikasi dengan pacarnya, ustadz mendapat HP langsung memeriksa sms yang dikirim kepada pacarnya, tidak sampai disitu santri yang tadinya mengontrol ustadz berkebalikan menjadi mengontrol ustadz, karena HP nya sedang bersama ustadz, ia mengincar hingga tahu letak Hpnya dikamar dan santri tersebut diam-diam mengambil Hpnya.

Selanjutnya Wati menceritakan kepada peneliti keadaan asrama saat HP-nya diambil oleh ustazah:

“Kemarin di asrama kami diambil Hpnya, karena kami ketiduran lupa cabut pas dicas, kami kan cas HP di lampu pakai piting, terus sambung dengan stop kontak, biasanya ada kawan kami yang nelponan dia lama tidur, rupanya pas malam itu dia ketiduran lupa simpan HP kami semua, pas subuhnya ustazah gedur pintu untuk bangunkan salat, dibuka pintu jatuh semua HP kami, yaudah Hpnya diambil sama ustazah, biasanya kalau sudah diambil HP tidak dikembalikan lagi”.<sup>9</sup>

Dari petikan wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana santri mempunyai resiko ketika ia membawa HP ke MUQ Langsa, resiko tersebut ialah HP yang kedapatan langsung diambil oleh ustazah dan tidak dikembalikan, cerita diatas menggambarkan bagaimana santri bersusah payah untuk men-caskan Hpnya sehingga ia harus mengoperasikan piting pada bola lampu, setelah itu ia akan menghubungkan dengan stop kontak sampai Hpnya dan HP teman seasrama bisa dicas, ternyata santri lupa untuk menyimpan kembali HP yang telah dicas, mereka tertidur dan akhirnya ustazah datang untuk membangunkan salat subuh, ketika ustazah membuka pintu jatuhlah HP yang di cas dan HP tersebut disita oleh ustazah sampai mereka tamat.

Setiap HP membutuhkan pengecasan batrai agar dapat digunakan, santri MUQ Langsa memiliki kreatifitas yang tinggi dalam bagian ini, santri memahami cara membuka lampu, lalu disambungkan dengan piting agar

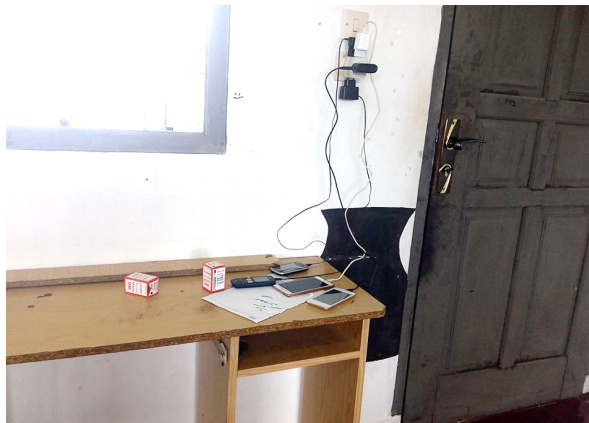
---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Wati tanggal 14 Oktober 2016.

timbulnya arus listrik, setelah itu dimasukkan kabel pengecasan, tidak hanya di lampu, santri juga bisa mengecash Hpnya di kipas angin, dengan perakitannya yang sama pada lampu, memasang piting menambah besi, karena bahan yang terbuat dari logam atau besi dapat menghantarkan energi listrik, selain itu santri juga membawa HP ke kelas untuk dapat dicas, mereka akan mengunci pintu agar mengantisipasi pada siapa yang akan masuk. Hal ini didapatkan oleh peneliti saat observasi lapangan, yang dilakukan oleh peneliti, berikut wawancaranya:

“Kami lebih kreatif dari anak STM, karena kami bisa membongkar lampu itu untuk cas HP, bisa juga cas HP dari kipas angin, dibuka saja arusnya lalu disambung dengan piting, banyak cara yang bisa kami buat”.<sup>10</sup>

Selain tempat cas biasa santri dikelas, santri juga bisa membuat tempat cas baru seperti di lampu, di kipas angin dll. Santri MUQ Langsa sangat kreatif dalam mengkonektifitaskan ilmu pengetahuan yang didapat dengan alam kehidupannya, sehingga mereka mampu membuat inovasi baru dalam mencaskan HP, dengan kemudahan tersebut membuat santri tidak punya alasan tidak membawa HP kecuali sudah bertekad dengan diri sendiri untuk taat pada peraturan tidak membawa HP.



Santri MUQ Langsa mempunyai semboyan yang mereka pegang, hasil wawancara yang dilakukan sebagai berikut:

<sup>10</sup> Wawancara dengan santriwan kelas Aliyah. Tanggal 18 Oktober 2016.

“Kami di sini punya peraturan, tapi kami melanggar. Makanya kami punya semboyan peraturan dibuat untuk dilanggar, coba kalau tidak ada aturan pasti tidak ada yang melanggar. Itu semboyan kami”.<sup>11</sup>

Dari wawancara santri ingin mengatakan bahwa apapun bentuk peraturan yang diberikan mereka akan punya jalan untuk keluar dari peraturan. Membawa HP ke MUQ Langsa bagi santri sangat menguntungkan, diantara keuntungannya ialah menghilangkan kejenuhan dan kebosanan pada aktivitas belajar, berpacaran, dapat menjelajah infomasi di dunia maya.

Selanjutnya santriwan dan santriwati mengambil moment pacaran melalui media HP ini sebagai asas manfaat. Asas manfaat yang dimaksud ialah santri berkesempatan untuk menyuruh atau meminta kepada pacarnya makanan kalau lapar, kesempatan santri yang tidak ada uang untuk membeli kitab bisa dibeli kitab dengan pacarnya, hal ini seperti perkataan salah seorang santriwan MUQ Bayu (nama disamarkan) kepada peneliti ketika diwawancarai:

“Kami sering kasih makanan untuk orang ni, barterlah ustazah, tukar-tukaran kami, seringnya kasih es cream, satu eskrim harganya lima ribu, kami beli magnum ada juga walls. Asrama cewek ustazah ada sari roti, ada cincau, harganya lima ribu, ada nasi goreng juga. Orang ni minta beli kitab juga sama kami ustazah, kami beliinlah ustazah kitab untuk orang ni”.<sup>12</sup>

Selanjutnya peneliti mewawancarai santriwati yang pernah mendapat manfaat dari pacaran:

“Kami pernah suruh beli ice cream pacar, dibeliin lima terus kami bagi-bagi dengan santri yang satu kamar sama kami, pernah juga suruh beli kitab sama cowok, karena kitab di sana harganya murah daripada di sini tempat cewek”.<sup>13</sup>

Dari petikan wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana santriwan dan santriwati menjadikan media HP dalam pacaran untuk asas manfaat bagi keduanya, santriwan merasa senang bisa membelikan *icecream* kepada pacarnya sedangkan santriwati juga merasa senang karena mendapat makanan

---

<sup>11</sup> Semboyan itu disampaikan oleh santriwan Aliyah kelas 6. Tanggal 17 Oktober 2016.

<sup>12</sup> Wawancara dengan salah seorang santriwan Bayu (nama disamarkan) tanggal 07 September 2016.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Siska Pada Tanggal 14 Oktober 2016.



dan kitab *free* dari pacarnya, ini menjadi simbiosis mutualisme artinya hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua santri.

Untuk mendapatkan ice cream maupun kitab dari santriwan maka santri akan melakukan perjanjian untuk bertemu, perjanjian untuk bertemu ini juga dilakukan melalui media HP. Bayu menceritakan kepada peneliti:

“Kami janjian dulu kalau mau jumpa, sms atau telpon, seringnya kami jumpa di panggung merah, pernah juga di dapur kami jumpa, sembunyi-sembunyi jangan sampai ketahuan sama pamong”.<sup>14</sup>

Dari petikan wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana santri melakukan perjanjian bertemu dengan pacarnya dengan menggunakan HP, santri sering bertemu di panggung merah, karena memang panggung ini sering bertemu orang tua atau dengan santri, kalau bertemu dengan pacar maka santri sembunyi-sembunyi hal ini agar tidak ketahuan dengan pamongnya. Dengan adanya media HP santri menjadi mudah dalam berpacaran. Selanjutnya salah seorang santri menceritakan bagaimana fenomena pacaran melalui HP yang dilakukan oleh kakak letingnya.

“Ustazah pernah ada kakak leting yang kasih HP ke abang leting, ngasih Hpnya itu melalui mukenah ustazah. Jadi kakak leting itu datang ke panggung merah, mereka jumpa di sana. dan mereka mau ngasih HP, kalau kasih HP Pakai mukenah dulu dan Hpnya disembunyikan ke dalam mukenahnya ustazah jadi ustadz gak tau. Pernah juga ada kejadian kakak leting sama abang leting nelponan dengan merekam suara, dan suara yang direkam tersebut ialah pembicaraan 18 tahun ke atas, kakak leting sama abang leting gak sadar ustazah, karena asyik menelpon akhirnya ketahuan sama ustadz, hp tersebut disita, lalu ustadz memeriksa isi dari hpnya, di dalamnya terdapat rekaman mesra tentang obrolannya ustazah, yaudah kalau udah kayak gitu, ustadz kasih kartu merah itu artinya orang tu dikeluarkan dari MUQ, tidak ada hubungan lagi dengan MUQ ustazah”.<sup>15</sup>

Dari petikan wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana santri yang tidak punya HP akan diberikan HP dengan pacarnya, santri lebih mudah memberi HP karena memakai mukenah, sehingga HP yang dibawa tidak terlihat oleh ustadz maupun pamong. Santri juga bercerita bagaimana kakak

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bayu 07 September 2016.

<sup>15</sup> Wawancara dilakukan dengan santri Tsanawiyah Riska (nama disamarkan) pada tanggal 07 September 2016.

leting yang ketahuan telponan dengan pacarnya dan merekam percakapan sehingga percakapan tersebut diputar kembali oleh ustadz, setelah melihat, menimbang dan memutuskan isi percakapan dari rekaman tersebut yang sudah tidak wajar bagi santri MUQ Langsa maka santri tersebut diberi kartu merah. Kartu merah mempunyai arti bahwa santri diberhentikan dari MUQ Langsa, dan tidak ada lagi hubungan antara santri dengan MUQ Langsa. Selanjutnya seorang santri bercerita tentang kejadian yang terjadi di MUQ Langsa tentang fenomena pacaran santri melalui media HP. Kepada peneliti Riska (nama disamarkan) menceritakan:

“Ada lagi ustazah kejadian kakak leting Tsanawiyah ustazah yang lagi nelpon pacarnya, tiba-tiba dari belakang ustadz datang dan mengambil hp cowoknya kakak tu, kakak tu merasa kesal dan melabrak ustadz melalui media social facebook ustazah, dengan bahasa yang tidak enak didengar kakak tu maki-maki ustadz, “kita lagi enak-enak nelpon, datang dia ambil HP memang kayak gak punya otak” gitu-gitulah ustazah dibilang sama kakak tu difacebook, terakhir kata-kata tersebut disimpan sama ustadz dan dilaporkan dengan kepala madrasah, oleh kepala madrasah santri tersebut dipanggil dan disidang dan akhirnya ia diberi kartu kuning karena santri tersebut sudah kelas tiga Tsanawiyah”.<sup>16</sup>

Santri dalam petikan wawancara tersebut tidak bisa mengontrol emosinya saat ustadz mengambil HP pacarnya, sehingga dengan sikap tidak menerima perlakuan yang diberikan ustadz santripun akhirnya “memaki” ustadz melalui media sosial facebook, dan kasus tersebut tidak sampai di media sosial saja, ustadz yang tidak terima dengan perlakuan santri terhadap dirinya akhirnya memuuskan untuk menghadap kepada kepala madrasah sekaligus membawa “*screenshot*” makian santri tersebut sehingga santri mendapatkan teguran dari kepala madrasah dan diberikan kartu kuning, kartu kuning artinya peringatan, santri tersebut sudah mendapatkan peringatan dan sekali lagi melakukan pelanggaran maka akan mendapat kartu merah. Santri tersebut juga mendapat kartu kuning berdasarkan pertimbangan sudah menduduki kelas 3.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan salah satu informan kelas santriwati Tsanawiyah Riska (nama disamarkan), tanggal 07 september 2016

## B. SAUDARA MENJADI ALASAN PERTEMUAN

Melalui media HP Santri menjadi mudah dalam melakukan pertemuan, sebelum bertemu dengan pacarnya maka dibuat terlebih dahulu kesepakatan dan perjanjian dimana akan bertemu, sehingga dengan adanya janji bertemu membuat mereka lebih mudah untuk mencari alasan, alasan yang biasa dilontarkan saat bertemu dengan pacaranya ialah “saudara”, mereka mengaku bertemu saudara padahal yang ditemui ialah pacaranya.

Pertemuan dengan pacar di MUQ Langsa dapat terjadi kapan santri mau, berikut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu informan:

“Saya kalau ketemuan bisa kapan saja saya mau, dulu ketika saya kelas 1, saya sering bertemu di musalla dengan pacar, sekarang lebih mudah saya tinggal memanggilnya dari microfont, misalnya “*i call to my sister adelia*” nanti pacar saya datang, jadi saya menjadikan saudara sebagai alasan saya agar bisa bertemu dengan pacarnya, kalau panggil melalui microfont harus panggil dengan bahasa kalau tidak saya dimarah dengan kakak osis, selain itu bisa bertemu juga dengan wawak cuci, melalui wawak cuci nanti saya dapat surat yang diselipkan didalam baju”.<sup>17</sup>

Dari petikan wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana santri MUQ Langsa menjadikan saudara sebagai alasan untuk bertemu dengan pacarnya, santri akan pergi ke pos satpam meminjam microfont lalu memanggil dengan bahasa Inggris selanjutnya mereka akan bertemu dengan bercakap-cakap sebentar dan pergi. Fenomena saudara menjadi alasan bertemu sudah sering terjadi, berikut wawancara yang dilakukan dengan salah seorang informan kepada peneliti ia bercerita:

“Saya biasa bertemu sekilas dengan pacar saya, saya pernah jumpa di dapur umum dengan pacar saya, begitu lagi ngobrol ustazah lewat naik kereta, saya pura-pura buang muka, pura-pura pergi setelah itu saya balik lagi, kalau ditanyain ustazah saya bilang adik ustazah”.<sup>18</sup>

Dari petikan wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana alasan saudara sering kalai dikatakan sebagai alasan agar dapat bertemu, baik bertemu di

<sup>17</sup> Wawancara dengan Randi (bukan nama sebenarnya) pada tanggal 07 Oktober 2016.

<sup>18</sup> Wawancara dengan salah seorang informan bernama Wali (bukan nama sebenarnya) tanggal 07 Oktober 2016.

pos satpam maupun bertemu di dapur, dengan mengatas namakan saudara maka ustazah atau ustadz tidak dapat melarang keduanya untuk bertemu. Lain halnya jika santri berpacaran dengan orang luar, jika orang tersebut berada di seputaran Kota Langsa maka dia akan menjenguknya, biasanya alasan pertemuannya juga sebagai abang, saudara sepupu, oom. Tempat yang kerap kali dijadikan untuk bertemu ialah taman maksiat “Yahwan”, biasanya di sini santri sering makan dengan pacarnya sehingga santri menjuluki warung Yahwan ini dengan taman maksiat. Di MUQ Langsa hari Jumat libur, sehingga Kamis sore santri-santri pulang, santri akan kembali pada malam Sabtu, malam Sabtu tersebut digunakan santri sebagai kesempatan untuk duduk bersama dengan pacar di taman maksiat Yahwan. Selain taman maksiat Yahwan, kerap kali tempat yang dijadikan santri untuk bertemu ialah panggung putih, panggung merah, panggung pelangi, dapur dan musalla.

Panggung putih ialah sebutan untuk panggung pertama yang dijumpai saat seseorang masuk ke dalam lokasi MUQ Langsa, panggung ini terletak di depan kantor, dan panggung ini jaraknya tidak terlalu jauh dari pos satpam. Pada panggung ini santri sering menjumpai pacarnya, biasanya santri tidak sendirian untuk berjumpa, ia akan mengajak teman terdekatnya atau teman sekelasnya.



Gambar tersebut merupakan panggung putih.

Selain panggung putih, ada panggung merah ada sebutan untuk “panggung merah”. Panggung merah ini terletak di belakang kantor dan akan terlihat jika seseorang ingin menuju ke MTs MUQ Langsa, panggung ini disebut panggung

merah karena lantai dari pada panggung tersebut berwarna merah, pada panggung ini santri kerap kali bertemu untuk mengantar cucian, sambil mengantar cucian sambil bertemu, pertemuan ini juga dilakukan setelah berjanji lewat HP.

Berikut gambar foto panggung merah



Panggung merah ini sangat banyak orang bertemu, tidak hanya orang tua, saudara santri tetapi juga pacar santri bertemu di panggung ini, informan menceritakan kepada peneliti bagaimana santri bertemu dengan pacarnya di panggung merah.

“Di panggung merah itu kak kalau santri pacaran dah kayak pasar, penuh terus, sekarang adik-adik tidak takut lagi sama kakak-kakaknya, kami liatin mereka jumpaan dipanggung merah, biasa saja mereka, seperti tidak merasa bersalah. Berbeda dengan kami dulu, kalau diliati sama kakak leting sudah takut sudah paham maksudnya kami ada salah, karena melihat dengan pandangan tajam itu kan bahasa isarat”.<sup>19</sup>

Senada dengan wawancara di atas, Mika menceritakan bahwa ;

“Saya sering juga jumpa dengan pacar saya di panggung merah, biasanya dia memberi saya makanan, seperti kemarin saya dibelikannya gelang dan dibawakannya buah alvokat saat dia kembali dari Takengon”.

---

<sup>19</sup> Wawancara Wati tanggal 14 Oktober 2016.

Selain kedua panggung tersebut putih dan merah, santri juga melakukan pertemuan di panggung pelangi, letak panggung pelangi berdekatan dengan musalla, tetapi santri tidak sering bertemu dipanggung ini disebabkan oleh jarak panggung dengan mesjid sehingga santri takut karena ada ustadz dan ustazah di musalla.

Berikut gambar panggung pelangi



Dapur juga menjadi salah satu tempat pertemuan santri yang berpacaran, dapur umum ini berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dari informan menceritakan:

“Pernah saya ngintip dari asrama di dapur umum pas malam-malam ada kakak leting dan abang leting bertemu di sana, mereka sembunyi-sembunyi alasan kakak tersebut untuk tukaran HP, Pas saya intip mereka lagi berjongkok sambil mengobrol-ngobrol”.<sup>20</sup>

Dari petikan wawancara tersebut tergambar bagaimana santri bertemu dengan pacarnya di dapur umum, sehingga fungsi dapur umum bagi santri selain tempat makan juga tempat berjumpa.

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan salah seorang santri Minah (bukan nama sebenarnya) tanggal 14 Oktober 2016.



### C. MUSALLA

Musalla sebagai tempat ibadah seringkali juga menjadi tempat pertemuan santri, sebelum bertemu juga santri melakukan hal yang sama, berjanji dulu melalui HP, baru setelah itu mereka akan bertemu di musalla, jika bertemu di musalla maka harus datang lebih awal, sebelum ramai orang, kalau datangnya sudah ramai orang maka pertemuan akan gagal. Biasanya santri bertemu di bawah musalla. Sekedar ngobrol saja sudah cukup bagi mereka. Selain itu santri juga ketika di dalam musalla sangat menanti adanya angin yang akan menyibrakkan kain batas (tabir) antara laki-laki dan perempuan, hal ini hanya untuk sekedar melihat wajah pacarnya saja, ini juga dirasakan santri begitu bahagia.





Pertemuan dengan mengandalkan saudara di MUQ Langsa sudah sering terjadi, biasanya santri akan memanggil nama pacarnya melalui microfon yang dikatakan sebagai saudara untuk alasan mereka berjumpa, memanggil nama saudara melalui microfon tersebut ialah alasan untuk berjumpa. Hal ini sering dilakukan santri karena banyak santri MUQ yang beradik-kakak-abang yang berpondok di sana. Salah satu santri menceritakan kepada peneliti fenomena yang terjadi di pos satpam berikut ini:

“Ada ustazah cewek pergi ke pos satpam, alasannya ambil makanan yang ditiip sama saudara, pas dikasih makanan disalamnya lagi ustazah cowok tu, selayaknya ayah dan anak ustazah”.<sup>21</sup>

Dari petikan wawancara tersebut, bisa dilihat bahwa santri sering bertemu dengan pacarnya yang mengatasnamakan saudara. Salah satunya tempat bertemu melalui pos satpam, biasanya tujuan pertemuan tersebut untuk mengantarkan makanan, mengantarkan baju dan sebagainya, ada saja alasan yang dijadikan untuk berjumpa, yang jelas semua yang datang mengatasnamakan saudara mereka santri menyalami setiap yang datang mengantarkan makanan tersebut, sehingga satpam yakin bahwa yang datang ialah saudara.

#### **D. TATAPAN MATA MENJADI BAHAGIA**

Santri yang sudah melihat pacarnya walau hanya bertatap mata sudah merasakan bahagia, hal ini diketahui oleh peneliti saat observasi pada santri tingkat MTs: “liat dia aja udah senang kali ustazah”.

Ungkapan tersebut mencerminkan betapa bahagia santri di masa remaja dengan gejala asmara yang mengelabuinya, sehingga hanya berjumpa sudah merasakan bahagia, santri di MUQ Langsa banyak yang berpacaran dengan teman sebaya.<sup>22</sup> Hal ini berdasarkan informasi yang peneliti koreksi langsung dari santri yang berpacaran.

Selain itu juga, peneliti mewawancarai alumni MUQ tentang bagaimana kisah tatapan mata yang menjadi bahagia saat berjumpa, kepada peneliti informan mengatakan:

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Satyo, (nama disamarkan) 14 September 2016.

<sup>22</sup> Hal ini berdasarkan informasi yang peneliti koreksi langsung dari santri yang berpacaran.



“Dulu ketika saya di MUQ, saya punya pacar namanya “Randi” (bukan nama sebenarnya), kami sering pacaran melalui HP, saat itu saya pakai HP “1802” HP “tinut-tinut” lah bahasa kami dulu, jadi sebelum bertemu saya dan Ucoc janji dulu, kami sering jumpa di panggung, musalla, dan pernah saya dan Ucoc cabut dari MUQ untuk bertemu di luar, jadi hari itu saya mengenakan mukenah dan mengendap-ngendap agar tidak ketahuan, saya pergi ke warung Yahwan, setelah tidak ada ustadz yang melihat saya lipat mukenah saya masukan ke dalam tas, setelah itu saya menyeberang ke sebelah jalan, memberhentikan “sudek” lalu saya menaikinya, dan saya hari itu berhasil kabur. Di sini sebenarnya akan berbahaya kalau dilihat oleh ustadz, karena ustadz kan mengejar saya, kebetulan hari itu tidak ada yang melihat saya dan saya berhasil kabur dari MUQ. Tempat yang tuju ialah rumah teman saya, saya tidak berani pulang ke rumah saya sendiri karena memang saya cabut dan tidak ada dijemput oleh orang tua saya, jadi hari itu hari Jumat saya setengah hari di rumah teman, selepas salat Jumat Ucoc menelpon saya dan kami janji keluar, tempat yang menjadi tujuan kami adalah warnet, saya karena sudah bosan dengan belajar ya saya ke warnet buka-buka youtube, liat yang video lucu-lucu, setelah beberapa jam di warnet saya diantar pulang ke MUQ sama si Randi. Dan saya merasa bahagia saya sudah berjumpa dengan dia”.<sup>23</sup>

Senada dengan wawancara tersebut, santri juga menceritakan perihal fenomena pertemuan yang terjadi di MUQ:

“Ada cewek dan cowok masuk kamar mandi umum depan LAB, entah ngapain orang tu didalam, akhirnya ketahuan pas keluar udah merah leher cowoknya. terus pernah lagi ustadz cerita, cowok nyamar jadi cewek, masuk asrama cewek pakai mukenah untuk bisa sama pacarnya, kawan ceweknya gak tau, tidur dia dikamar ceweknya dibawah tempat tidur pagi pulang dia, itu pacaran yang udah liar. Kalau pacaran yang gak liar smsan aja udah cukup dia, yang lebih enak kakak osis yang pacaran. Osis mudah jumpa, cuman bilang patner kerja aja jumpa terus, itulah kakak osis mencari kesempatan dalam kesempatan”.

Senada dengan wawancara tersebut, peneliti mendapat hasil wawancara dengan santri MUQ Langsa tentang perilaku pacaran santri tingkat Tsanawiyah yang baru terjadi di MUQ Langsa, berikut wawancaranya:

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan santi Alumni MUQ Dani (nama disamarkan) yang sekarang sedang menempuh Strata-1 di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Wawancara dilakukan tanggal 6 Oktober 2016.

“Kemarin ada yang bermasalah adik Tsanawiyah, mereka keluar dari jam 11 sampai jam 2 malam, yang santriwati pakai celana dan tidak pakai jilbab waktu ditemukannya, pakai baju tidur mereka, ngapain coba 4 jam itu dua pasangan. Orang ini masu kelas yang berbeda, mereka ketahuan karena memang sudah diincar, abang-abang sering ronda malam, karena di MUQ ada sesi keamanan tugasnya, mereka akan liat-liat siapa yang belum tidur, jadi yang ketahuan kemarin itu anak ibnu sina, mereka sudah dicari keliling asrama gak ada, dikamar mandi juga gak ada, terakhir abang-abang tu naiklah keatas Aliyah, ketahuan orang ni liat orang bergerak, didepan kelas juga ada sandal, ada satu pasangan sebenarnya sudah tau ada orang yang datang dengar suara tapak jalan, terus orang ni sembunyi tidur dibangku, abang-abang tu tanyak “ngapain kalian tidur-tidur?”

Habis itu, Ada juga kami dengar orang tu berdansa, pegang pinggang. Yang parahnya kak, anak yang buat kayak gitu anak yang berprestasi, sering dibawa keluar ke Banda Aceh, Takengon, porseni dibawa, kemana-mana dibawa tapi sungguh mengecewakan. Ustadz Jailani suruh keluarin, ustadz Alamsyah bilang janagn dikeluarin karena udah kelas 3, orang ni nanti berubah tapi ustadz jailani suruh keluar, akhirnya mereka dikeluarkan kak. Tapi udah ada kasus kayak gitu adek Tsanawiyah ni gak jera juga kak, selang dua hari kejadian itu kak, anak Tsanawiyah jumpaan di panggung merah kayak pasar malam udah kak panggung tu, udah kami liatin orang tu gak takut, gak ada lagi segannya sama kakak kelas orang tu, sama ustadz juga gak takut lagi orang tu karena ustadznya udah gak kejam lagi kayak dulu”.<sup>24</sup>

Wawancara tersebut dijelaskan oleh kakak Aliyah yang menceritakan bagaimana gejolak santri Tsanawiyah pada masa labil. Sehingga fenomena pacaran tersebut terjadi demikian, dengan sisi yang berbeda, santri Aliyah menceritakan bagaimana pertemuan mereka dengan pacarnya, berikut wawancaranya:

“Kami udah besar kak, jadi untuk bertemu kamipun udah malu sama adik-adik. Kalau mau bertemu kami di luar MUQ, kalau di MUQ kami bertemu sekedarnya saja, kalau udah ketemu, kasih makanan, pergi terus, itupun kami sudah senang. Kalau adik-adikkan tidak begitu”.

Dialog wawancara tersebut memperlihatkan bagaimana santri Aliyah lebih bisa mengontrol dirinya daripada santri Tsanawiyah, hal ini disebabkan

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan santri Aliyah kelas 5, tanggal 14 Oktober 2016.

karena pada santri Tsanawiyah mereka memasuki tahap pubertas, masa remaja awal, pada kondisi ini secara psikologi anak memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap sesuatu, dan pada usia ini anak mulai mengenal lawan jenis, dengan hegemoni yang dilakukan ustadz membuat santri mencari tempat pelarian dan akhirnya hal tersebut terjadi.

## BAB VI

# PACARAN DAN RESISTENSI TERHADAP HEGEMONI DI PESANTREN MUQ

Pacaran di kalangan santri merupakan suatu yang lumrah terjadi, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah santri masih berada pada masa remaja. Masa remaja adalah masa di mana suatu penahapan pertumbuhan yang berada pada titik gerak aktif kedua setelah masa pertumbuhan pada level anak. Bentuk-bentuk kreativitas juga ditunjukkan pada masa ini secara lebih dominan, termasuk rasa ingin bebas yang tidak mau berada pada pengendalian yang dirasa memaksa kehendak gerak yang diinginkan.<sup>1</sup> Selain itu, pada masa remaja seseorang juga memiliki gejala emosional yang tidak stabil. Hal ini dipengaruhi oleh hormon-hormon yang bekerja pada usia remaja tersebut.

Pada masa ini santri ingin melakukan sebuah kebebasan dari hegemoni yang dilakukan oleh ustadz. Santri tidak ingin dikendalikan atau bersifat memaksa. Hegemoni yang diberikan ustadz berdampak pada psikis santri, santri merasa tertekan dengan segala aturan, hingga pada akhirnya santri berada pada titik jenuh, kejenuhan ini bertitik temu dengan kebosanan. Dalam psikologi anak, apabila seorang anak yang merasa tertekan secara psikis akan melakukan pelarian sehingga lahirlah bentuk perlawanan yang dalam penelitian ini disebut dengan resistensi. Resistensi terbagi dalam dua kelompok: pertama, resistensi tertutup (*hidden transcript*), dan kedua resistensi terbuka (*public transcript*), Teori resistensi tertutup dan resistensi terbuka, sebagaimana dipaparkan oleh James C. Scott ketika menganalisa perilaku petani di sebuah pedesaan Malaysia dalam menghadapi dominasi para

---

<sup>1</sup> Syamsul Rizal, *Agama ...*, hlm. 14

petani kaya dan elite berkuasa.<sup>2</sup> Meskipun analisa *hidden transcript* dan *public transcript* digunakan Scoot untuk menganalisa sebuah komunitas, dalam hal ini komunitas petani di salah satu pedesaan Malaysia, sementara unit analisa dalam penelitian ini adalah komunitas santri di MUQ Langsa yang hidup dalam berbagai relasi dengan memakai teori *hidden transcript* saja. Artinya penelitian ini akan dianalisa menggunakan resistensi tertutup sedangkan resistensi terbuka tidak akan menjadi titik perhatian penelitian ini.<sup>3</sup>

Berikut hasil wawancara yang menjadi sebuah perlakuan santri terhadap resistensi.

“Kami membawa HP karena saat kami minta izin ingin menelpon orang tua ustazahnya sering tidak kasih, gak ada pulsa, disuruh bayarlah, harus minta izin dengan pamong sendiri, sehingga kami susah untuk komunikasi dengan orang tua. Karena kondisinya keg gitu akhirnya kami membawa HP ke MUQ. Tujuan awal membawa HP memang untuk menelpon orang tua, tapi setelah lama mondok di asrama mulailah kami mengenal lawan jenis laki-laki sehingga Hp pun kami gunakan untuk berkomunikasi dengan laki-laki (pacar)”.

Dari wawancara tersebut santri tidak dibenarkan membawa HP, tetapi juga dipersulit ketika meminjam HP, santri ingin menelpon orang tua tetapi ustazah dengan berbagai alasan sering kali tidak memberikannya dengan alasan tidak ada pulsa, disuruh bayar, dan sebagainya. Sehingga dengan perlakuan demikian santri melakukan sebuah perlawanan dari peraturan yaitu membawa hp sendiri. Berawal dari niat agar mudah berkomunikasi dengan orang tua hingga akhirnya berkomunikasi dengan lawan jenis.

Hal ini sesuai dengan *Teori Hidden Transcript* yang mengatakan bahwa orang-orang kalah atau kelompok-kelompok sub-ordinat selalu memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan perlawanannya terhadap dominasi kelompok-kelompok berkuasa.<sup>4</sup> Dari teori tersebut dapat dilihat bahwa kelompok-kelompok sub-ordinat yang dimaksud ialah santri dan kelompok yang berkuasa ialah ustadz, sehingga santri yang kalah dari hegemoni yang diberikan oleh ustadz akan memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan perlawanannya.

---

<sup>2</sup> Muhammad Anshor, dkk, Resistensi..., hlm. 77

<sup>3</sup> Resistensi merupakan sebuah bentuk perlawanan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari subordinat kepada kelompok dominasi. *ibid*, hlm. 85

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 85

Resistensi pacaran ini dilakukan santri melalui komunikasi hp, santri berkomunikasi dengan pacarnya pada tiga waktu yaitu ba'da zuhur, ba'da ashar dan ba'da isya<sup>5</sup> jika pasangan dari santri yang berpacaran tidak mempunyai hp maka pacarnya akan memberikan hape tersebut mealului mukenah, dengan memasukkan hp kedalam mukenah, tentu saja hal ini dilakukan agar ustadz tidak mencurigai santri yang membawa hp di dalam mukenah.

Senada dengan resistensi di atas, berikut juga wawancara yang mencerminkan resistensi yang dilakukan santri terhadap hegemoni ustadz:

“Pernah ada kakak leting yang seorang sedang nelponan dengan pacarnya, tiba-tiba dari belakang ustadz datang dan mengambil hp tersebut, santri yang ditelpon oleh pacarnya merasa kesal dan melabrak sang ustadz melalui media sosial dengan bahasa yang tidak enak didengar, oleh ustadz kata-kata tersebut disimpan dan dilaporkan oleh kepala madrasah, oleh kepala madrasah santri tersebut dipanggil dan disidangi dan akhirnya ia diberi kartu kuning yang artinya peringatan”.<sup>6</sup>

Informasi tersebut didapat dari santri yang masih duduk di tingkat Tsanawiyah, santri dengan penuh semangat menceritakan bagaimana kejadian pacaran tersebut terjadi pada kakak-kakak kelasnya, seperti yang terjadi pada kasus di atas, santri tersebut tidak menerima perlakuan ustadz yang mengganggu kesenangannya saat ia sedang “bertelponan” bersama pacarnya, akhirnya ia melakukan perlawanan dengan mengatakan kepada ustadz “dengan bahasa yang tidak baik atau berbentuk makian” perkataan tersebut dilontarkan melalui sosial media, perlakuan tersebut merupakan bentuk resistensi tersembunyi yang dilakukan oleh santri, ia mengatakan ustadznya di belakang, sehingga ustadz merasa tidak nyaman dengan “kata-kata” yang dikeluarkan santri oleh karena itu ustadz tersebut “menscreen” percakapan tersebut sebagai bukti yang dilaporkan kepada pimpinan madrasah. Oleh pimpinan madrasah kasus tersebut diproses, akhirnya santri tersebut tidak dikeluarkan karena mempertimbangkan kakak-kakak leting tersebut duduk di kelas IX, sehingga oleh pimpinan madrasah kakak leting tersebut hanya diberikan kartu kuning, kartu kuning memiliki arti peringatan.

Dari petikan wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana mudaratnya hp bagi santri, santri tersebut dengan menggunakan hp berpacaran, dan

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan santri MUQ Langsa 07 September 2016.

<sup>6</sup> Wawancara dilakukan dengan santri MUQ pada tanggal 07 September 2016.

saling berkomunikasi, akhirnya pacaran tersebutpun diketahui ustadz, ustadz datang tiba-tiba, bahkan menurut informan yang peneliti wawancarai mengatakan bahwa, utadz di MUQ Langsa ketika razia seperti malaikat maut, kecepatan langkahnya tak bisa diperhitungkan oleh mata dan didengar oleh telinga, tiba-tiba saja ia akan muncul dan mengambil hp santri, hal inilah sebenarnya yang paling ditakuti oleh santri MUQ Langsa.

Selanjutnya santri bercerita tentang kakak kelasnya yang karena pacaran mendapatkan kartu merah, kartu merah berarti santri tidak ada hubungan apa-apa lagi dan itu artinya santri dipecat. berikut wawancaranya:

Ada ustazahkan, dulu kakak leting kami itu cowok dan cewek nelponan dengan merekam suara, dan suara yang direkam tersebut ialah pembicaraan 18 tahun ke atas yaitu hal-hal yang berbau negatif, nah kakak yang sedang asyik telponan tanpa disadari ketahuan oleh ustadz, hp tersebut disita, lalu ustadz memeriksa isi dari hp tersebut, dan didaamnya terdapat rekaman mesra si santri dengan pacarnya, oleh ustadz santri diberi kartu merah.

Hal tersebut cukup menggambarkan bagaimana hukuman yang diberikan oleh ustadz sesuai kadar pacaran yang dilakukan, santri tersebut mendapat kartu merah karena kesalahan yang dilakukannya menurut undang-undang aturan di MUQ ialah fatal, sehingga hal-hal demikian harus segera dilenyapkan. Selanjutnya juga pengakuan santri kepada peneliti bahwa santri menjadikan dapur sebagai tempat mereka berjumpa, sebelum berjumpa mereka santri akan membuat janji terlebih dulu, jika perjumpaan didapur santri akan mempunyai banyak waktu untuk mengobrol, karena jarang di pantau oleh pamong.

Fenomena di atas sesuai dengan pandangan James C. Scoot bahwa bentuk-bentuk resistensi tersembunyi antara lain dilakukan dengan berpura-pura taat terhadap kelompok yang mendominasi meskipun di belakangnya melakukan hal yang berkebalikan. Scoot menulis bahwa berpura-pura merupakan gaya yang khas yang perlu bagi kelompok sub-ordinat di mana saja, dan hampir kapan saja.<sup>7</sup> Hal ini menurut Scoot dilakukan dengan pertimbangan agar di satu pihak tidak kehilangan kesempatan untuk mengambil manfaat atau keuntungan tertentu dari kelompok yang mendominasi, tetapi di pihak lain

---

<sup>7</sup> James C. Scoot, *Senjatanya Orang-Orang Kalah*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000) hlm. 376

dapat mengekspresikan resistensi terhadap dominasi tersebut. Hasil wawancara dengan salah seorang santriwan MUQ Langsa:

“Saya biasa bertemu sekilas dengan pacar saya, saya pernah jumpa di dapur umum dengan pacar saya, begitu lagi ngobrol ustazah lewat naik kereta, saya pura-pura buang muka, pura-pura pergi setelah itu saya balik lagi, kalau ditanyain ustazah saya bilang adik ustazah”.

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana santri berpura-pura taat ketika ada ustazah dan justru bersikap kebalikan ketika ustazah pergi. Santri berpacaran di dapur, ketika ustazah datang ia pura-pura tidak tahu dan menoleh muka, tetapi ketika ustazah sudah pergi ia kembali untuk mengobrol dengan pacaranya. Selain dari bentuk pacaran santri juga melakukan resistensi tertutup dengan menggossip atau membentuk pencitraan negatif terhadap Mudir.

Penelitian ini menemukan bahwa santri kurang setuju dengan kepemimpinan yang dipegang oleh mudir sekarang. Santri mengatakan MUQ sudah tidak seperti dulu lagi seperti program bahasa yang tidak jalan itu disebabkan oleh kepemimpinan mudir yang tidak tegas. Seharusnya mudir lebih tegas terhadap peraturan yang telah ditetapkan sehingga santri akan lebih aktif untuk menjalankannya. Menurut James C. Scott, perlawanan simbolis murni berupa gosip, perusakan nama baik, pemberi nama julukan, mengedarkan kabar angin yang bisa merusak citra, merupakan salah satu bentuk resistensi tertutup dari kelompok sub-ordinat terhadap kelompok yang mendominasi. Bukankah yang namanya gosip itu perdefinisi merupakan kisah yang diceritakan tentang pihak ketiga yang tidak hadir, begitu dilontarkan ia menjadi anonim tanpa asal usul tapi banyak penyalurnya. Sekalipun gosip itu bukan cerita yang menghormati orang, gosip menghormati tatanan normatif yang lebih luas tempat ia beroperasi. Dibalik setiap potong gosip yang tidak hanya sekedar berita, terdapat pernyataan tersirat tentang suatu peraturan atau norma yang telah dilanggar. Sesungguhnya pelanggaran terhadap tingkah laku yang menjadikan suatu peristiwa bernilai untuk digunjingkan.<sup>8</sup>

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap santri MUQ tentang ketidaksetujuan dengan kepemimpinan mudir:

---

<sup>8</sup> Muhammad Anshor, dkk. *Resistensi..*, hlm. 87



“MUQ bisa kembali seperti dulu apabila struktur paling atas dirombak hingga ke bawah, mudir sekarang tidak tegas, terlalu takut dengan HAM. Sekarang juga mudir tidak berpihak pada OSIS, apabila ada santri yang ada masalah dengan osisi mudir bukan membela osis, tapi malah tidak membela osis, bagaimana osis bisa disegani kalau begitu. Pernah ada adik kelas jam 11 malam disuruh mencari tanda tangan sama kakak osis, datang anak tu malah ngadu sama orang tuanya. Orangtuanya datang marahin ustadz “ngapain anak-anak udah malam disuruh carik tanda tangan?” orang tua gak ngerti dengan peraturan. jadi ustadznya bukan membela osis malah suruh anak osis untuk menandatangani yang disuruhnya. Terus sekarang kalau osis mau buat aturan mudirnya gak setuju, gak boleh kejam-kejam lagi katanya. Kami ak suka sama mudir, pernah mudir ngomong kop lama kak bilang “assalamualaikum wr wb” kami pas mudir bilang salam itu semua tepuk tangan. Mudir bilang “saya cukup senang kalau saya ngomong tepuk tangan” padahal dia gak tau maknanya apa. Maknanya kami gak suka makanya kami sorakin sambil tepuk tangan”.

Fenomena di atas menggambarkan bagaimana santri melakukan perlawanan secara simbolis terhadap kepemimpinan di MUQ Langsa, santri menginginkan MUQ bisa berjaya seperti dulu dengan salah satunya caranya ialah membongkar kembali struktur kepemimpinan yang paling atas, bentuk perlawanan ini dianalisis menggunakan teori Scoot bahwa perlawanan secara simbolis dapat dilakukan melalui gosip yang menceritakan tentang seseorang dengan ketidaktahuan orang yang diceritakan. Menurut Scoot, gosip tak pernah beredar tanpa pamrih, ia merupakan upaya gerilya untuk memajukan tuntutan dan juga kepentingan orang lain. Jadi gosip yang disebarkan santri keterkaitan ketidaksukaannya pada konsep kepemimpinan mudir bukan hanya dimaksudkan semata untuk kepentingan sendiri melainkan memberikan pembelajaran publik untuk lebih tegas dalam membangun konsep kepemimpinan. gosip ini merupakan cara yang digunakan pihak lemah yaitu santri dalam mengungkapkan perlawanan atas dominasi pihak yang lebih kuat. Namun demikian, pencitraan buruk yang disebarkan sebagian mungkin merupakan fakta yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya peneliti menganalisis salah satu wawancara yang merupakan bentuk perlawanan santri berikut ini:

“Kami di sini punya peraturan, tapi kami melanggar. Makanya kami punya semboyan peraturan dibuat untuk dilanggar, coba kalau tidak ada aturan pasti tidak ada yang melanggar. Itu semboyan kami”.

Dari petikan wawancara tersebut dapat dilihat bagaimana santri melakukan perlawanan terhadap kekuasaan ustadz dalam membentuk peraturan. Kekuasaan ustadz yang hegemonik melahirkan resistensi atau perlawanan dari kelompok yang kontra hegemoni. Sejalan dengan teori sosial James C. Scoot mengenai orang-orang kalah. James C. Scoot mendefenisikan perlawanan sebagai segala tindakan yang dilakukan oleh kaum atau kelompok subordinat yang ditunjukkan untuk mengurangi atau menolak klaim yang dibuat oleh pihak atau kelompok superodinat yaitu ustadz.

## BAB VII

### PENUTUP

Penelitian ini mengeksplorasi resistensi simbolik yang dilakukan oleh santri terhadap ustadz dalam kehidupan yang direkayasa di MUQ Langsa. Salah satu bentuk resistensi yang dilakukan santri ialah pacaran. Meski pacaran masuk kategori pelarangan ustadz namun banyak santri yang melakukannya secara diam-diam. Pacaran santri dalam hegemoni ustadz dapat dilakukan dengan berbagai cara:

*Pertama*, santri melakukan pacaran dengan menggunakan HP. Meski awalnya MUQ Langsa tidak membenarkan santri membawa HP namun kebutuhan santri terhadap komunikasi kepada orang tua mengharuskannya untuk membawa HP. Selanjutnya, Santri yang masih berusia remaja mulai mengenal dunia lawan jenis, sehingga santri menggunakan HP sebagai multifungsi, fungsi utama untuk komunikasi dengan orang tua dan fungsi lainnya untuk berkomunikasi dengan pacarannya. Pacaran santri dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi mulai dari memberikan HP kepada pacar secara sembunyi dibalik mukenah, hingga telponan memakai handset sembunyi-sembunyi di dalam jilbab, sering juga santri berkomunikasi dengan pacarnya di dalam asrama berjam-jam, kalau malam hari terkadang santri berkomunikasi sampai terdengar azan subuh, hal ini dilakukan secara sembunyi di belakang ustadz.

*Kedua*, pacaran santri dalam hegemoni ustadz dilakukan secara diam-diam dan berpura-pura taat. Santri secara diam-diam melakukan pertemuan dengan pacarnya di MUQ Langsa tanpa sepengetahuan ustadz, tempat yang kerap kali dijadikan untuk bertemu ialah panggung merah, panggung putih dan panggung pelangi. Panggung merah menjadi tempat yang paling sering terjadi pertemuan santri yang berpacaran, hal ini disebabkan oleh letak panggung yang strategi yaitu jauh dari musalla seperti panggung pelangi dan jauh dari kantor seperti panggung putih. Santri yang berpacaran di

panggung merah seperti pasar malam, hal ini seperti telah dijelaskan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya santri bertemu di dapur umum, musalla dan pos satpam. Sering kali di pos satpam santri menjual nama saudara untuk bertemu dengan pacarnya. Hal ini agar santri tidak ketahuan oleh ustadz melakukan pacaran. Khusus pacaran di kalangan santri umumnya bila bertemu membawa teman ramai-ramai, asal ramai tak mengapa yang terpenting adalah santri bisa bertemu pacar dan santri tidak dicurigai oleh ustadz. Selanjutnya santri yang berpacaran mempunyai taman cinta yaitu “taman yahwan” di sini sering tumbuh cinta-cinta di MUQ Langsa. Apalagi ketika santri kembali ke MUQ pada malam Sabtu, banyak yang bertemu di sana sekedar makan atau menghilangkan dahaga bersama pacar.

*Ketiga*, santri yang berpacaran dalam hegemoni ustadz merasa bahagia apabila sudah berjumpa. Meski hanya pandangan mata, atau pacarnya sekedar lewat di depan saja. Seringkali santri yang berpacaran ketika waktu salat menunggu tirai atau pembatas antara laki-laki dan perempuan terbuka oleh serpihan angin agar santri dapat melihat pacarnya dari ujung seberang musalla. Dengan hal demikian saja sudah cukup membuat santri merasa bahagia.

Selanjutnya tulisan ini memperlihatkan bagaimana santri menjadikan pacaran sebagai alat atau media untuk melakukan perlawanan kepada hegemoni yang dilakukan ustadz. Berawal dari hegemoni tidak boleh membawa HP sedangkan ketika santri meminjam HP kepada ustazah seringkali tidak diberi dengan alasan kehabisan pulsa, harus bayar, dengan kesulitan komunikasi tersebut santri melakukan perlawanan dengan membawa HP dan akhirnya santripun berpacaran dengan HP tersebut.

Santri mengaku bahwa hegemoni yang dilakukan ustadz di MUQ Langsa membuat santri berada pada titik kebosanan. Secara psikologi anak yang berada pada titik kebosanan dan kejenuhan akan mencari pelarian. Salah satu pelarian yang dilakukan snatri MUQ Langsa terhdap hegemoi ustadz tersebut adalah pacaran. Pacaran tersebut menjadi simbol bahwa santri tidak berdaya dengan peraturan yang diberikan sehingga mereka melakukan sebuah perlawanan. Perlawanan dalam berpacaran santri dilakukan menggunakan komunikasi dengan pacarnya, curhat-curhatan, dapat menghilangkan bosan dan jenuh santri. Santri mengaku bahwa jika tidak ada HP maka bosan sekali berada di MUQ, apalagi malam Jumat, semua teman telponan dengan pacarnya, kalau dulu ada TV di asrama bisa nonton TV sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi untuk menghilangkan bosan dengan pacaran. Kalau tidak punya pacar

sudah pasti bosan rasanya. Pacaran menjadi media resistensi santri dalam hegemoni ustadz juga dilakukan oleh siswa berprestasi secara diam-diam seperti yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan Dkk. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana: UGM, 2008
- Annisah, Relevansi Pendidikan Akhlak dengan Perilaku Keagamaan Siswa (Study Kasus Pada MA MUQ Langsa, skripsi. Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala, 2011
- Anshor, Muhammad. Dkk, *Berbagi Suami Atas Nama Tuhan*, Langsa: Data Printing, 2013
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII-XVIII*, Akar Pembaharuan Islam Indonesia Jakarta: Kencana, cet. 3, 2007
- Ali, Hery Noer, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999.
- A. Hasjmy, *Sepuluh Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Daerah Aceh* Hisaab (Fakultas Ilmu Pasti)H , Sinar Darussalam, Nomor 17 September 1969, Banda Aceh: Yayasan Pembina Darussalam, 1969.
- A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia* Jakarta: Al-Ma'arif, 1993.
- Ahmad, Zakaria, *Sekitar Kerajaan Aceh 1520-16-75* Medan: Monora, 1972.
- Asrohah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Akh. Minhaji, *Tradisi Akademik di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.

- A.J. Piekaar, *Aceh dan Peperangan dengan Jepang*, terj. Aboebakar, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi, 1977.
- Ahmad, *et.al.* Zakaria, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- A. Malik Fajar, *Visi Pembaharuan Pendidikan Islam*, Jakarta: Lembaga Pengembangan pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), 1998.
- A. Hasjmy, *Sepuluh Tahun Darussalam dan Hari Pendidikan Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Pembina Darussalam, 1969.
- A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan berkembangnya Agama Islam di Nusantara*, Jakarta: Al-Ma'arif, 1993.
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Abdul Rachman Saleh, *Madrasah dan pendidikan Anak Bangsa, Visi, Misi dan Aksi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- A. Rahman Hanapiah, "Madrasah Aliyah", dalam *Refeksi Setengah Abad Pendidikan Aceh, Menjenguk Masa lampau, Menjangkau Masa Depan*, Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Aceh, 2010.
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam: Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan manusia*, Cet. Ke-3 Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Al-Rasyidin, *Falsafah Pendidikan Islam: Membangun Kerangka Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Praktik Pendidikan*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2008.
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia* Jakarta: Gramedia, 1983.
- A. K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat*, Jakarta: Pustaka Rakyat, 1950.
- Andi Faisal Bakti, *Islam And Nation Formation In Indonesia: From Communitarian To Organizational Communications*, Jakarta: Logos, 2000.
- A. Mukti, *Alam pemikiran Islam Modern Di Indonesia Dan Modern Islamic Thoungt In Indonesia*, Yogyakarta: Nida, 1969.
- Amir Hamzah Ws, *Pembaharuan Pendidikan Dan Pengadjaran Islam Jang Diselenggarakan oleh Pergerakan Muhammadiyah*, Yogjakarta: Muhammadiyah, 1962.

- Abd. Mukti, *Konstruksi Pendidikan Islam, Belajar dari Kejayaan Madrasah Nizhamiyah Disati Saljuq*, Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Aslam Nur (ed), *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX, Jilid II* Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh Bekerja sama Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004.
- Aslam Nur (ed), *Biografi Ulama-Ulama Aceh Abad XX, Jilid I, Cet. 2* Banda Aceh: Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh Bekerjasama Dengan Dinas Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007.
- A. Manaf Meuraxa, *Pelajaran Kemuhammadiyah*, Blang Pidie: MPD Tingkat II Aceh Selatan, 1976.
- A. Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di Indonesia dan Modern Islamic Thuoght In Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1969.
- A. Hasjmy, *Perang Gerilya dan Pergerakan politik di Aceh Untuk Merebut Kemerdekaan Kembali* Banda Aceh: MUI Prop. NAD, 1980.
- A. Hasjmy, *Semangat Merdeka A. Hasjmy 70 Tahun Menempuh jalan pergolakan dan Perjuangan Kemerdekaan* Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Ajidar Matsyah, *Jatuh Bangun Kerajaan Islam di Aceh* Yogyakarta: Kaukabar, 2013.
- Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor Voor Inlandsche zaken*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan, Cet. 2* Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Al-Chaidar, dkk., *Aceh Bersimbah Darah, Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh 1989-1998*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Azumardi Azra, *Islam Nusantara, Jaringan Global dan Lokal* Bandung: Mizan, 2002.
- Badri, Muhammad Arifin. *Sifat Perniagaan Nabi*, Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2008.
- Bagus, Denny. *jurnal Manejemen SDM*, 2010 <http://jurnal-sdm.definisi visimisdanstrategi>, diakses tanggal 06 September 2016



- Bungin, M Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Baharuddin, *Pendidikan Humanistik* Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007.
- Badruzzaman Ismail, *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan Banda Aceh*: Boebon Jaya, 2013.
- Burger dan Prayudi, *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia*, Jakarta: Pradiya Pramita, 1962.
- Cakra Arbas, *Aceh dan Mou Helsinki, Di Negara Kesatuan Republik Indonesia* Jakarta: Sofmedia, 2015.
- Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam; Sejarah dan Peranannya dalam Kemajuan Ilmu Pengetahuan* Jakarta: Logos Publishing House, 1994.
- Djojonegoro, Wardiman, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1996.
- Denys Lombard (Terj.) Winarsih Arifin, *Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda (1607-1636)*, Jakarta: Pustaka Populer Gramedia, 2006.
- Dhuhri, Saifuddin, *Dayah Menapaki Jejak Pendidikan Warisan Endatu di Aceh* Banda Aceh: Lhee Sagoe Press, 2014.
- Darwis A. Sulaiman, (ed), *Aceh Bumi Iskandar Muda*, Cet. I Banda Aceh: Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Departemen Agama R.I., *Pengembangan Pendidikan Agama* Jakarta: Dep. Agama, 2004.
- Daulay, Haidar Putra, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara* Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES. 1982
- Djuhardi, Edukasi Penelitian Tindakan Agama dan Keagamaan. *Pengembangan Ekonomi Pesantren*. Vol VII, No 1 Januari-Maret. 2009
- Douglas J. Goodman, Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Fackri Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1986.
- Firdaus, A.N., *Dosa-Dosa Politik, (Orde Lama Yang Tidak Berulang Di Era Reformasi)*, Jawa Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

- Gramsci, Antonio *Selection From The Prison Notebooks*, India: Orien Longman, 1996
- Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Hasbi Amiruddin, *et.al.*, *Aceh Serambi Mekkah*, Yogyakarta: Multi Solusindo Press, 2008
- Haidar Putra Daulay, *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintas Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Hardjosoesto, Terisa Yulia dan siswanto, *Pengaruh Belajar Dengan Cara Menghafal Terhadap Mengingat Kosakata dalam Bahasa Inggris*, Psikomensia Vol. 13, No 1, January 2014
- Haryatmoko, *Kekuasaan-Pengetahuan Sebagai Rezim Wacana*, juni 2010
- Ibrahim Alfian, *Perang Di Jalan Allah*, Cet. Pertama, Jakarta: New Aqua Press, 1987.
- Ira Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, Bahagian Ketiga*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Idris, Safwan, "Pendidikan Di Aceh", dalam, *Perkembangan Pendidikan Di Nanggroe Aceh Darussalam*, Cet. 2 Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Cet. Ke-2, 2002.
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Erlangga
- Ismail, Sulaiman. *Dinamika Sistem Pendidikan Islam*, Langsa: Data Printing, 2013
- Jogyanto, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2008
- Jorge Santos Alves, *Aceh Dari Kacamata Portugis pandangan sebagai Kota pelabuhan Asia Tenggara, dalam Meletakkan Masa lalu Aceh*, Jakarta: Pustaka Larasan, 2011.
- Jhon M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1980.
- Jamaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, t.t.

- Julius Jacob, *Het Falilie An Kampong Leven Op Groop Aceh* Leiden: Ej.Brill, 1984.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Balai Pustaka. 2007
- Khalid, Muhammad. *Pembelajaran di pesantren Salafi dan Pesantren Modern*, Skripsi Langsa: IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2012
- Kriyantono, Rahmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, 2007
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999
- Kurdi (ed), Muliadi, *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Humam Resource*, Cet. 1 Banda Aceh: Yayasan Aceh mandiri, 2010.
- Karel A. Steenbrink, *Pesantren Madrasah Sekolah; Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Jakarta: LP3ES, 1986
- Komaruddin Hidayat & Hendro Prasetyo (ed), *Problem & Prospek IAIN Ontologi Pendidikan Tinggi Islam*, Jakarta: Ditjen Bimbangais Depag RI, 2000.
- Kartini Kartono, *Pengantar Ilmu Pendidikan Teoritis*, Bandung: Mandar Maju , 1992.
- L. M. Sitorus, *Sedjarah Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Djakarta: Pustaka Rakyat, 1947.
- Moetono, Soemarsaid, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi Tentang Masa Mataram II, Abad XVI Sampai XIX*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Mansur, *Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Wacana ilmu, 1999.
- Ma'luf, Louis, *al-Mujid fi al-lughoh wa al-*Alam**, Beirut: Darul Masyriq, 1975.
- Muslih Usa, *Pendidikan Islam di Indonesia : antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

- M.Hasbi Amiruddin, dkk., *Pengembangan Dayah dalam perspektif Ulama Dayah* Banda Aceh: Ar-Raniry Prees, 2007.
- Muliadi Kurdi , et. al., *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource di Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Cet. ke-2, Surabaya: Pustaka Pelajar, 2004.
- M. Athiyah Al-Abrasyi, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Muhammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Cet. 1 Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Muhammad Al-Taumy Al-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Muliadi Kurdi (ed), *Ulama Aceh Dalam Melahirkan Human Resource di Aceh* Banda Aceh: Yayasan Aceh Mandiri, 2010.
- Mohd. Yamin, *Gajah Mada*, Jakarta: Balai Pustaka, 1956.
- Mohammad Said, *Atjeh Sepanjang Abad* Medan: Diterbitkan Pengarang Sendiri, 1961.
- Martin Van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarikat: Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1995.
- M. Isa Sulaiman, *Sejarah Aceh, Sebuah Gugatan terhadap Tradisi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Muhaimin, *Sejarah Pendidikan Islam*, Padang: IAIN Press, 1999.
- Muhidin M. Dahlan, (ed), *Sosialisme Religius Suatu Jalan keempat*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2000
- Misri A. Muchsin, *Potret Aceh Dalam Bingkai Sejarah*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- M. Junus Djamil, *Gerakan kebangkitan Aceh Kumpulan Karya Sejarah* Bandung: Bina Biladi Press, 2009.

- M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh Dalam Pergolakan Aceh* Jakarta: Media Dakwah, t.t.
- M. Nur El Ibrahimy, *Peranan Tgk. Daud Beureueh Dalam Pergolakan Aceh* Jakarta: Media Dakwah, 2001.
- Muhammad Umar (EMTAS), *Darah dan Jiwa Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Busafat, 2002.
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, cet. I Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- M. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah kenegaraan, Studi tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Muslim Thahir, dkk., *Wacana Pemikiran Santri Dayah Aceh* Banda Aceh: Wacana Press, 2007.
- Mudhoffir, Abdil Mughis. *Teori Kekuasaan Michel Foucaut: Tantangan bagi Sosiologi Politik*, Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol. 18, No. 1, Januari 2013
- Nata, Abuddin, *Sejarah pendidikan Islam pada periode Klasik dan Pertengahan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Perkembangan Pendidikan di Nanggroe Aceh Darussalam*, Cet. 2 Banda Aceh: Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
- Pazzan, *Prospek Dayah di Aceh*, Banda Aceh: Pancasarjana IAIN Ar-Raniry, 2010
- P.J. Veth, *Atehin an Zijne Betrekkingen tot Nederland Tot Nadeland* Leiden: Geralth, Koff, 1887.
- Raharjo, M. Dawam, *Pergulatan Dunia Pesantren dari Bawah* Jakarta: Perhimpunan Perkembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1985.
- Rahim, Abd. jurnal studi islamika vol 9, No 1 Juni 2012
- Rizal, Syamsul. *Agama dan kearifan lokal dalam tantangan global, Perilaku Pacaran Anak Muda Kota Langsa-Aceh Dalam Bayang-Bayang Syariat*, Yogyakarta: UGM, 2008
- Rusyan, Tabrani. *Pendidikan Budi Pekerti*, Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 1*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973

- Scott, James C. *Senjatanya Orang-orang Kalah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000
- Siti Juriah, Pengaruh Kompetensi Guru PAI terhadap Pengembangan Akhlak Siswa Madrasah Ulumul Quran. Langsa: Zawiyah
- Sunarto. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Saridjo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam* Jakarta: Armisco, 1996.
- Suny, (ed.), Ismail, *Bunga Rampai Tentang Aceh* Jakarta: Bhrarata Aksara, 1980.
- Said, Muhammad, *Aceh Sepanjang Abad*, jld. I, Medan: Waspada, 1981.
- Soebahar, Abd. Halim, *Kebijakan Pendidikan Islam dari Ordonansi Guru sampai UU Sisdiknas*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Shalabi, Ahmad, *Sejarah Pendidikan Islam*, terj., Muchtar Yahya dan Sanusi Lateif, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Shaleh, Abd. Rachman, *Penyelenggaraan Madrasah*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1980.
- Saleh, Hasan, *Mengapa Aceh Bergolak; Bertarung Untuk Kepentingan Bangsa dan Bersabung Untuk Kepentingan Daerah*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992.
- Sulaiman, M. Isa, *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap tradisi*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Saleh, Hasan, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992.
- Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional: Dari Budi Utomo sampai Proklamasi, 1908-1945* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Taufiq Abdullah, (Ed), *Sejarah Umat Islam Indonesia*, Jakarta: MUI, 1991.
- T. Ibrahim Alfian, dkk., *Sejarah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Banda Aceh: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978.
- T. Alamsyah, dkk., *Pedoman Umum Adat Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA), Prov. Daerah Istimewa Aceh, 1990.

- T. Ibrahim Alfian, *Wajah Rakyat Aceh Dalam Lintasan Sejarah, Jilid XVI*  
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1972.
- Tgk. A. K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal*, Jakarta: Seulawah RI-001, 1992.
- Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
Universitas Airlangga, *Hubungan Karakteristik Demografi Dan Social Ekonomi  
Dengan Perilaku Pacaran Santri*. Vol 7 No 2 Desember 2005
- Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, *Education Management, Analisis Teori  
dan Praktik*, cet. 2 Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai  
Pustaka, 1991.
- Yong, Sherly de. Panoptisisme Pada Interior Kantor Biro Administrasi  
Keuangan. 4 mei 2012
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Mutiara,  
1979.
- Zainuddin, *Tarich Atjeh dan Nusantara*, Medan: Pustaka Iskandar Muda 1961.
- Zuhairimi, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

#### **DAFTAR INFORMAN**

1. Aina (14 tahun), santri Tsanawiyah MUQ Langsa, 07 September 2016
2. Bayu (14 tahun), santri MUQ Langsa, 07 September 2016
3. Dani (21 tahun), mahasiswa IAIN Langsa, 08 Oktober 2016
4. Dedi Imansyah (30 tahun), Guru MIN Payabujok Langsa, 25 September 2016
5. Dina Kusumawardani (21 tahun), Mahasiswi IAIN Langsa, 25 september 2016
6. Fathurrahman (39 tahun), Guru MUQ Langsa, 15 Oktober 2016
7. Fitria (16 tahun), santri MUQ Langsa, 17 Oktober 2016
8. Indah (21 tahun), Mahasiswi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 27 September 2016
9. Mimi (16 tahun), santri MUQ langsa, 17 Oktober 2016
10. Nani (17 tahun), santri MUQ Langsa, 14 Oktober 2016

11. Nina (16 tahun), santri MUQ Langsa, 17 Oktober 2016
12. Rajif (15 tahun), santri MUQ Langsa, 07 September 2016
13. Randi (14 tahun), santri Tsanawiyah MUQ Langsa, 07 Oktober 2016
14. Riska (14 tahun), santri Tsanawiyah MUQ Langsa, 07 September 2016
15. Sabrina (17 Tahun), Santri MUQ Langsa, 27 September 2016
16. Saputra (21 tahun), mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 25 September 2016
17. Satyo (17 tahun), santriwan MUQ Langsa, 14 September 2016
18. Siska (14 tahun), Santri MUQ Langsa, 07 September 2016
19. Wali (14 tahun), santri Tsanawiyah MUQ Langsa, 07 Oktober 2016
20. Wati (16 tahun), santri MUQ Langsa, 14 Oktober 2016
21. Wawan (28 tahun), masyarakat kota Langsa, 08 Oktober 2016



## BIODATA PENULIS



**Basri Ibrahim**, lahir 14 Februari 1967 di Kec. Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Pendidikan SD, SMP dan SMA ia selesaikan di tanah kelahiran. Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Mengambil S2 dan S3 Konsentrasi Pendidikan Islam pada Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Memulai Karir sebagai PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur lalu pindah sebagai Dosen pada STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2008 dan kini ia menjabat sebagai Rektor IAIN Langsa dengan jabatan akademik Lektor Kepala (IV.c).

Publikasi Ilmiah yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir, diantaranya: “Konsep Islam Tentang Pembinaan Lingkungan Sosial” (2014), “Politik dan Konservatisme Islam Indonesia dan Tunisia” (2018), “Pola Pembinaan Tradisi Akademik Pada PTKIN Aceh dan Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama Islam Masyarakat” (2019), “Madrasah Transformation Into Modern Educational Institutions During The New Order” (2019), “Penyelenggaraan Dayah Dalam Kebijakan Pemerintah Di Aceh Tahun 1966–1998” (2019), “Urgensi Transformasi Terhadap Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam” (2019), “Pendidikan Islam di Aceh (1966-1998) dengan Menganalisa Aspek Perubahan (Transformasi)” (2020).



**Mohd. Nasir**, lahir 18 Desember 1977 di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Sempat nyantri 2 tahun di Dayah Darul Huda Langsa dan melanjutkan nyantri di ponpes MUQ Langsa selama 6 tahun. Lalu ia melanjutkan ke Jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Medan (2000); program magister di IAIN Medan (2003); dan program doktoral PEDI di IAIN Medan (2014). Memulai karir sebagai guru PNS di MIN Sukarejo kota Langsa tahun 2006

lalu mutasi sebagai dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2008 dan kini diamanahkan sebagai Wakil Rektor II IAIN Langsa dengan jabatan akademik Lektor Kepala (IV.a).

Beberapa dari publikasi Ilmiahnya yang dipublikasikan dalam tiga tahun terakhir, diantaranya: Narasi Pendidikan Islam di Aceh: Biografi Intelektual M. Arifin Amin (Jurnal Miqot, Vol. 42 No. 2, Juli - Desember 2018); Symbolic Resistance Of Acehnese Students Against National Narcotics Agency Hegemony On Drug Eradication (Jurnal Tarbiyah, Vol. 26 No. 2, 29 September 2019); Negotiation Of The Ma'rifah Community Identity In Forming Sufistic Sholihan In Seuruway Community Of Aceh Tamiang (Jurnal Ushuluddin, Vol. 28 No. 1, Januari - June 2020); Doda Idi Poem and Transmission of Ethno-Nationalism Spirit In The Aceh Community (Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies, Vol. 4 No. 1, 2020).





**Basri Ibrahim**, lahir 14 Februari 1967 di Kec. Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Pendidikan SD, SMP dan SMA ia selesaikan di tanah kelahiran. Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Mengambil S2 dan S3 Konsentrasi Pendidikan Islam pada Program Pasca Sarjana UIN Sumatera Utara. Memulai Karir sebagai PNS pada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur lalu pindah sebagai Dosen pada STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2008 dan kini ia menjabat sebagai Rektor IAIN Langsa dengan jabatan akademik Lektor Kepala (IVc).



**Mohd. Nasir**, lahir 18 Desember 1977 di Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Sempat nyantri 2 tahun di Dayah Darul Huda Langsa dan melanjutkan nyantri di ponpes MUQ Langsa selama 6 tahun. Lalu ia melanjutkan ke Jurusan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Medan (2000); program magister di IAIN Medan (2003); dan program doktoral PEDI di IAIN Medan (2014). Memulai karir sebagai guru PNS di MIN Sukarejo kota Langsa tahun 2006 lalu mutasi sebagai dosen STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa tahun 2008 dan kini diamanahkan sebagai Wakil Rektor II IAIN Langsa dengan jabatan akademik Lektor Kepala (IVa).



PENERBIT BUKU UMUM & PERGURUAN TINGGI  
Jl. Sosro No.16A Medan 20224, Tel 061-77151020  
Fax 061-7347756 Email. [perdanapublishing@gmail.com](mailto:perdanapublishing@gmail.com)

ISBN 978-623-7842-55-2



9 786237 842552